Ekonomi Syariah
Kebaikan Untuk Semua

Danantara Indonesia

ASKRINDO Syariah

Laporan Tahunan
Annual Report 2025

Memberi Arti
Menebar Manfaat
Menumbuhkan Keberkahan

Giving Meaning, Spreading Benefits, Cultivating Blessings



www.askrindosyariah.co.id

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, strategi, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

This Annual Report contains financial conditions, operation results, policies, projections, plans, strategies, as well as the Company's objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such prospective statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

Pernyataan-pernyataan prospekif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Prospective statements in this Annual Report is prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

Laporan Tahunan 2025 menyajikan kinerja Perseroan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan makna atau interpretasi antara kedua versi tersebut, maka versi dalam bahasa Indonesia akan menjadi acuan utama dan menggunakan mata uang Rupiah dalam penyajian laporan keuangan.

The 2025 Annual Report presents the Company's performance for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 in two languages, namely Indonesian and English. In the event of any differences in meaning or interpretation between the two versions, the Indonesian version shall prevail and the financial statements are presented in Indonesian Rupiah.

Pada penyusunan buku Laporan Tahunan ini memuat kata "Askrindo Syariah" yang didefinisikan sebagai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang menjalankan bisnis di bidang Penjaminan Pembiayaan Syariah. Adakalanya kata "Perseroan" dan "Kami" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah secara umum.

In the preparation of this Annual Report, the term "Askrindo Syariah" refers to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, which operates in the field of Sharia Financing Guarantee. The terms "the Company" and "We" are also used interchangeably for ease of reference to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah in general.

Penjelasan Tema

Theme Explanation



Memberi Arti Menebar Manfaat Menumbuhkan Keberkahan

Giving Meaning, Spreading Benefits, Cultivating Blessings

Tema "Memberi Arti, Menebar Manfaat, Menumbuhkan Keberkahan" bagi Askrindo Syariah tahun 2025 mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan peran sebagai lembaga penjaminan berbasis prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian. Di tengah dinamika industri penjaminan yang semakin kompetitif, meningkatnya risiko pembiayaan, serta tuntutan tata kelola yang semakin ketat, Askrindo Syariah dituntut untuk memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan risiko yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Tema ini juga menegaskan bahwa setiap aktivitas bisnis perusahaan diarahkan untuk menghadirkan nilai tambah bagi UMKM, mitra lembaga keuangan, serta ekosistem pembiayaan syariah secara keseluruhan.

The theme "Giving Meaning, Spreading Benefits, Cultivating Blessings" for Askrindo Syariah in 2025 reflects the company's commitment to carrying out its role as a sharia-based guarantee institution that is not only profit-oriented, but also focused on delivering broader value and benefits to society and the economy. Amid an increasingly competitive guarantee industry, rising financing risks, and stricter governance requirements, Askrindo Syariah is challenged to strengthen its role in providing fair, transparent, and sharia-compliant risk protection. This theme also emphasizes that every business activity is directed toward creating added value for MSMEs, financial institution partners, and the overall sharia financing ecosystem.

Dalam industri keuangan tahun 2025, yang ditandai dengan transformasi digital, peningkatan ekspektasi layanan, serta dorongan inklusi keuangan syariah, Askrindo Syariah berperan sebagai Penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. "Menebar Manfaat" diwujudkan melalui perluasan akses penjaminan bagi sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sementara "Menumbuhkan Keberkahan" tercermin dari penerapan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan bisnis, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap proses operasional. Dengan demikian, tema ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi arah strategis perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam setiap aktivitas usaha.

In the 2025 financial industry landscape marked by digital transformation, rising service expectations, and efforts to enhance sharia financial inclusion Askrindo Syariah plays a role as a driver of sustainable economic growth. "Driving Value" is realized through expanding guarantee access for productive sectors, particularly MSMEs as the backbone of the national economy, while "Enriching Blessings" is reflected in the implementation of prudential principles, business sustainability, and adherence to sharia values in every operational process. Thus, this theme is not merely a slogan, but a strategic direction for the company in maintaining a balance between business performance, social responsibility, and blessings in every business activity.

Strategi Perseroan Tahun 2025

Corporate Strategy in 2025

Memasuki tahun 2025, Askrindo Syariah mengarahkan strategi Perseroan pada penguatan peran sebagai penjamin pembiayaan syariah yang adaptif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas portofolio, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasi digitalisasi untuk efisiensi dan layanan yang lebih baik, sekaligus memperluas sinergi dengan ekosistem keuangan syariah dan UMKM, didukung oleh penguatan tata kelola dan kapasitas SDM guna menjaga kinerja yang sehat.

Entering 2025, Askrindo Syariah directs its corporate strategy toward strengthening its role as an adaptive and sustainable sharia financing guarantee institution through improving portfolio quality, enhancing risk management, and optimizing digitalization for greater efficiency and better service. This is also accompanied by expanding synergies with the sharia financial ecosystem and MSMEs, supported by strengthened governance and human resource capacity to maintain sound performance.

Perseroan telah menetapkan sasaran utama dalam mendorong pertumbuhan penjaminan yang berkualitas, meningkatkan profitabilitas, serta memperkuat daya saing secara berkelanjutan.

The Company has set key objectives to drive quality growth in guarantee business, improve profitability, and strengthen competitiveness on a sustainable basis.

Sasaran Utama *Main Goal*
Pengembangan Bisnis dengan dukungan penguatan organisasi, Sumber Daya Insani (SDI) unggul, GCG, manajemen risiko, kapabilitas Teknologi Informasi (TI) dan *service excellent* *Business Development supported by strengthened organizational capabilities, superior Human Resources (HR), Good Corporate Governance (GCG), risk management, enhanced Information Technology (IT) capabilities, and service excellence.*

Sasaran Strategis *Strategic Goal*	
Penguatan kapabilitas organisasi	*Strengthening Organizational Capabilities*
Peningkatan efektivitas & efisiensi proses bisnis	*Enhancing Business Process Effectiveness and Efficiency*
Diversifikasi portofolio & jumlah mitra bisnis	*Diversifying the Business Portfolio and Expanding the Number of Business Partners*
Peningkatan kapasitas penjaminan	*Increasing Guarantee Capacity*
Penguatan pengawasan internal	*Strengthening Internal Oversight*



Keberlanjutan Tema

Continuity of Theme

2024

Kolaborasi Dan Inovasi Untuk Keberkahan Bersama
Collaboration and Innovation Towards Shared Blessings



Setiap tahun, Askrindo Syariah secara konsisten berupaya meningkatkan kinerja melalui inovasi yang selaras dengan pengembangan produk, layanan, dan pemanfaatan teknologi. Pada tahun 2024, inovasi dan transformasi tersebut menjadi landasan utama dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah Perusahaan. Sejalan dengan itu, Askrindo Syariah memperkuat kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Each year, Askrindo Syariah consistently strives to enhance its performance through innovation aligned with the development of products, services, and the adoption of technology. In 2024, these innovation and transformation initiatives served as key drivers in strengthening the Company's quality and value creation. In parallel, Askrindo Syariah reinforced harmonious collaboration with all stakeholders to support sustainable growth.

2023

Memperkuat Sinergi, Tumbuh Dalam Harmoni
Strengthening Synergy, Growing in Harmony



Tema "Memperkuat Sinergi, Tumbuh dalam Harmoni" mencerminkan komitmen PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam membangun kolaborasi yang kuat dan keseimbangan yang harmonis di seluruh aspek kinerja sepanjang tahun 2023. Sinergi ini mencakup kerja sama internal, kemitraan dengan mitra bisnis, serta kontribusi sosial dan lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

The theme "Strengthening Synergy, Growing in Harmony" reflects PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's commitment to fostering strong collaboration and harmonious balance across all aspects of performance throughout 2023. This synergy encompasses internal collaboration, partnerships with business partners, as well as social and environmental contributions through Corporate Social Responsibility (CSR) programs, in support of sustainable growth.

2025

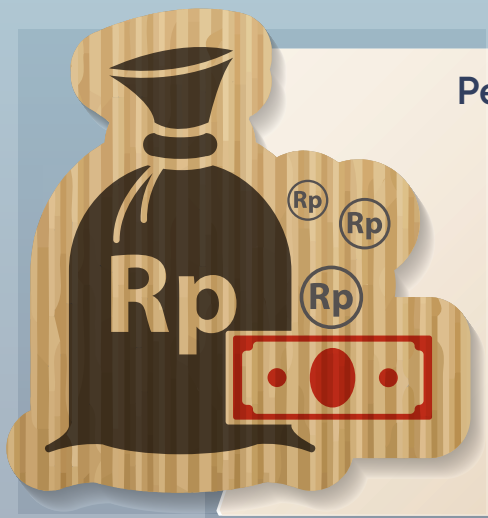
Memberi Arti
Menebar Manfaat
Menumbuhkan Keberkahan

Giving Meaning, Spreading Benefits, Cultivating Blessings



Pencapaian Tahun 2025

Achievements In 2025



Pendapatan Kafalah Bersih
Net Kafalah Income

2025

Rp206,58

Miliar | *Billion*

2024

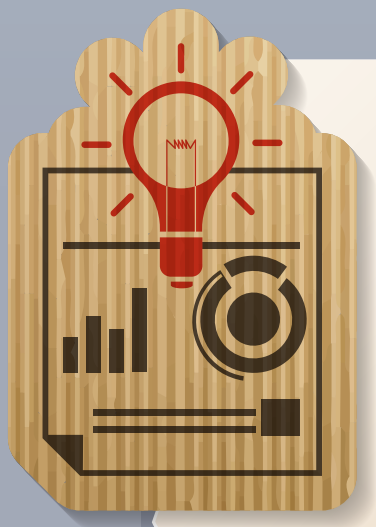
Rp196,67

Miliar | *Billion*

5,04%

Pendapatan Kafalah Bersih meningkat menjadi Rp206,58 miliar dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp196,67 miliar

Net Kafalah Revenue increased to Rp206.58 billion from the realization in 2024 of Rp196.67 billion.



Laba Bersih Tahun Berjalan
Net Profit for the Year

2025

Rp163,18

Miliar | *Billion*

2024

Rp136,80

Miliar | *Billion*

19,29%

Laba Bersih Tahun Berjalan meningkat menjadi Rp163,18 miliar dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp136,80 miliar.

Net Profit for the Year decreased to Rp163,18 billion from the realization in 2024 of Rp136.80 billion.



Ekuitas | *Equity*

2025

Rp1.168,52

Miliar | *Billion*

2024

Rp996,56

Miliar | *Billion*

17,26%

Nilai ekuitas meningkat 17,26% dari tahun sebelumnya senilai Rp996,56 miliar.

Total equity increased 17,26% from the previous year's position of Rp996,56 billion.



Aset | *Assets*

2025

Rp3.279

Miliar | *Billion*

2024

Rp2.986,40

Miliar | *Billion*

9,80%

Posisi aset meningkat 9,80% dari tahun sebelumnya senilai Rp2.986,40 Miliar.

Assets position increased by 9,80% from the previous year's position of Rp2.986,40 Billion.



Skor GCG | *GCG Score*

2025

93,60

2024

93,52

Pada Periode tahun 2025, penilaian GCG memperoleh Skor 93,60 atau meningkat dari penilaian GCG tahun sebelumnya sebesar 93,52 dengan kategori "Sangat Baik."

In the 2025 period, the GCG assessment yielded a score of 93,60, an improvement from the previous year's score of 93,52, thereby maintaining the "Very Good"

Daftar Isi

Table of Contents

2 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

3 Penjelasan Tema
Theme Explanation

4 Strategi Perseroan Tahun 2025
Corporate Strategy in 2025

6 Keberlanjutan Tema
Continuity of Theme

8 Pencapaian Tahun 2025
Achievements In 2025

10 Daftar Isi
Table of Contents

13 **KILAS KINERJA 2025**
PERFORMANCE HIGHLIGHT 2025

14 Kilas Kinerja 2025
2025 Performance Highlights

15 Ikhtisar Laba Rugi
Highlights of Profit and Loss

15 Ikhtisar Arus Kas
Highlights of Cash Flows

16 Rasio-Rasio Keuangan
Financial Ratios

16 Ikhtisar Kinerja Operasional
Highlights of Operational Performance

16 Ikhtisar Saham dan Efek lainnya
Shares and other Securities Highlights

17 Peristiwa Penting 2025
2025 Event Highlights

26 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

28 Kerja Sama Strategis Tahun 2025
Strategic Cooperation in 2025

33 **LAPORAN MANAJEMEN**
MANAGEMENT REPORT

34 Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioner's Report

44 Laporan Direksi
The Board of Director's Report

53 **PROFIL PERUSAHAAN**
COMPANY PROFILE

54 Informasi Umum Perusahaan
General Information of the Company

55 Informasi Perubahan Nama Perusahaan
Information on Company Name Changes

56 Wilayah Operasional
Operational Areas

58 Wilayah Kerja PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Operating Area of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

60 Jejak Langkah
Milestones

62 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama
Vision, Mission and Core Values

64 Makna Logo Perusahaan
Definition of The Company Logo

65 Bidang Usaha
Business Activities

66 Struktur Organisasi
Organizational Structure

68 Komposisi Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

69 Profil Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners

72 Komposisi Direksi
Composition of the Board Of Directors

73 Profil Direksi
Profile of the Board of Directors

76 Komposisi Dewan Pengawas Syariah
Composition of the Sharia Supervisory Board

77 Pengawas Syariah
Profile of the Sharia Supervisory Board

79 Profil Pejabat Eksekutif
Profile of The Senior Executive

80 Komposisi Kepala Divisi
Composition Head of Division

89 Informasi Pemegang Saham
Shareholders Information

90 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

91 Daftar Entitas Anak
List of Subsidiaries

91 Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

91 Informasi dalam Situs Perusahaan
Information in the Company's Website

92 Lembaga dan Profesi Penunjang
Supporting Institutions and Professions

93 Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

95 **TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS**
BUSINESS SUPPORTING REVIEW

96 Sumber Daya Manusia
Human Resources

98 Rekrutmen dan Pengembangan Karir
Recruitment and Career Development

99 Demografi Karyawan
Employee Demographic

109 Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Budget

111 Teknologi Informasi
Information Technology

112 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

117 **ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN**
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

118 Tinjauan Perekonomian Global dan Nasional
Global and National Economic Review

120 Tinjauan Industri Keuangan Syariah
Sharia Financial Industry Review

121 Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen Bisnis
Operational Performance Review Per Busines Segment

123 Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

124 Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

126 Liabilitas
Liabilities

127 Ekuitas
Equity

128 Laporan Laba Rugi
Statement of Profit or Loss

131 Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

132 Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debt

132 Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy

133 Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Goods Investment

134 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

134 Peristiwa Penting Setelah Periode Pelaporan Akuntan
Significant Event After The Accountant Reporting Date

135 Prospek Usaha Tahun 2026
Business Prospect In 2026

136 Target dan Realisasi Tahun 2025, Serta Proyeksi 2026
Target and Realization In 2025, as Well as Projectioni In 2026

137 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

140 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

141 Program Kepemilikan Saham Karyawan/Manajemen (ESOP/MSOP)
Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

141 Informasi Material yang Berkaitan dengan Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang
Material Information Related To Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and/or Debt Restructuring

141 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transaction With Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties

142 Perubahan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan
Changes in Law with Significant Effects

142 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in the Accounting Policy

145 **TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

146 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

146 Landasan Hukum
Legal Basis

149 Prinsip-Prinsip GCG
GCG Principles

151 Evaluasi Penerapan GCG
Evaluation of GCG Implementation

152 Perbaikan Signifikan Pada Implementasi GCG Tahun 2025
Significant Improvement on GCG Implementation in 2025

154 Mekanisme dan Struktur GCG
GCG Structure and Mechanism

155 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

156 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

161 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meeting of The Board of Commissioners and Board of Directors

166 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

169 Direksi
Board of Directors

174 Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
Performance Evaluation of The Board of Directors and Board of Commissioners

175 Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

177 Pengungkapan Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Disclosure of Affiliation With Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, and Major and/or Controlling Shareholders

178 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of The Board of Commissioners

187 Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

197 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

204 Satuan Pengawasan Internal (SPI)
Internal Audit Unit (SPI)

215 Kepatuhan dan Tata Kelola
Compliance And Govenance Unit

216 Auditor Eksternal
External Auditor

216 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

218 Manajemen Risiko
Risk Management

231 Akses Informasi Perseroan
Access To Company Information

231 Situs Web
Website

232 Benturan Kepentingan Terkait Hubungan Berelasi
Conflicts of Interests with Related Parties

233 Perkara Penting
Important Cases

233 Sanksi Administratif
Administrative Sanction

233 Kode Etik
Code of Conduct

237 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

243 Pernyataan Anti-Gratifikasi, Korupsi, dan Penyuapan
Statements of Anti-Gratification, Corruption, and Bribery

243 Pernyataan Penolakan Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
Declaration of Prohibition to Fund Political Activities

246 **IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN**
SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

246 Ikhtisar Kinerja Ekonomi
Economic Performance Highlights

246 Ikhtisar Kinerja Lingkungan
Environmental Performance Highlights

247 Ikhtisar Kinerja Sosial
Social Performance Highlights

247 LAPORAN KEBERLANJUTAN
Sustainability Report

249 **LAPORAN KEUANGAN**
FINANCIAL REPORT

01



Kilas Kinerja 2025

Performance Highlight 2025

Kilas Kinerja 2025

2025 Performance Highlights

(dalam juta Rupiah | *in million Rupiah*)

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021	*Description*
Kas dan Setara Kas	23.870	23.869	41.147	58.110	22.305	*Cash and Cash Equivalents*
Investasi	2.375.793	2.039.313	1.663.485	1.409.318	1.012.593	*Investments*
Deposito berjangka untuk Tujuan Tertentu	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000	*Time deposits for Certain Purposes*
Piutang Imbal Jasa Kafalah - Bersih	1.915	5.429	14.645	38.929	104.972	*Kafalah Fee Receivables - Net*
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih	60.720	43.219	57.800	51.238	65.098	*Re-Guarantee Receivables - Net*
Piutang Hasil Investasi	27.280	24.773	19.261	16.985	10.283	*Investment Income*
Biaya Dibayar di Muka	827	1.325	491	1.416	1.125	*Prepaid Expenses*
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	36.129	34.781	38.177	44.810	40.493	*Deferred Acquisition Costs*
Aset Penjaminan Ulang	647.000	682.327	609.933	525.061	337.678	*Re-Guarantee Assets*
Aset Tetap – Bersih	28.516	33.000	26.156	18.123	23.510	*Fixed Assets – Net*
Aset Tidak Berwujud – Bersih	2.255	2.909	3.554	401	560	*Intangible Assets – Net*
Aset Pajak Tangguhan	22.839	13.873	12.717	7.501	3.854	*Deferred Tax Assets*
Aset Lain-Lain	1.860	1.584	3.492	10.973	9.940	*Other Assets*
Jumlah Aset	3.279.004	2.986.402	2.550.858	2.258.938	1.708.484	*Total Assets*
Utang Ta'widh	214	125	1.552	280	8.834	*Ta'widh Payables*
Utang Penjaminan Ulang	33.327	35.820	35.008	72.344	39.577	*Re-Guarantee Payables*
Utang Pajak	10.055	2.158	2.760	35.031	25.961	*Taxes Payables*
Cadangan Ta'widh	437.877	367.625	199.556	164.879	204.777	*Ta'widh Reserves*
Cadangan IJK yang Belum Merupakan Pendapatan	1.402.018	1.356.458	1.207.760	1.050.049	733.511	*Unearned Kafalah Fee*
Pendapatan Komisi yang Ditangguhkan	130.883	137.381	137.799	124.558	71.827	*Deferred Commission Income*
Liabilitas Imbalan Kerja	246	134	89	-	-	*Employee Benefit Liabilities*
Akrual dan Utang Lain-Lain	95.867	90.141	99.406	118.167	119.123	*Accruals and Other Payables*
Jumlah Liabilitas	2.110.487	1.989.842	1.683.930	1.565.308	1.203.610	*Total Liabilities*
Modal Saham	400,000	400.000	400.000	400.000	400.000	*Share Capital*
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Setelah Pajak	(8.398)	(8.203)	(8.219)	(8.002)	(3.539)	*Remeasurement of Employee Benefit Liabilities, Net of Tax*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	23.234	(7.785)	(1.763)	(20.910)	1.382	*Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	590.498	476.910	322.542	75.540	75.540	*Appropriated Retained Earnings*
Saldo Laba belum Ditentukan Penggunaannya	163.183	135.638	154.368	247.002	31.491	*Unappropriated Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas	1.168.517	996.560	866.928	693.630	504.874	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.279.004	2.986.402	2.550.858	2.258.938	1.708.484	*Total Liabilities and Equity*

Ikhtisar Laba Rugi

Highlights of Profit and Loss

(dalam juta Rupiah / *in million Rupiah*)

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021	*Description*
Imbal Jasa Kafalah Bruto	834.065	820.650	756.658	964.553	729.532	*Gross Kafalah Fees*
Pendapatan Kafalah	538.926	436.599	358.947	445.729	459.355	*Kafalah Income*
Beban Kafalah	(332.346)	(239.927)	(134.640)	(99.710)	(151.100)	*Kafalah Expense*
Pendapatan Kafalah Bersih	206.580	196.672	224.307	346.019	308.255	*Net Kafalah Income*
Pendapatan Investasi	153.658	123.131	96.547	72.410	44.282	*Investment Income*
Beban Usaha	(147.950)	(139.710)	(126.300)	(137.979)	(109.330)	*Operating Expenses*
(Beban) / Pendapatan Lain-lain - Bersih	(21.556)	(15.407)	(8.611)	(6.919)	(20.903)	*Other (Expenses) / Income - Net*
Laba Sebelum Zakat dan Pajak	190.732	164.686	185.943	273.531	222.304	*Profit Before Zakah and Income Tax*
Zakat	(4.768)	(4.117)	(4.649)	(6.838)	(5.558)	*Zakah*
Laba Sebelum Pajak	185.964	160.569	181.294	266.693	216.746	*Profit Before Income Tax*
Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan	(22.781)	(23.774)	(26.926)	(51.182)	(47.446)	*Income Tax Expenses / (Benefit)*
Laba Bersih Tahun Berjalan	163.183	*136.795*	154.368	215.511	169.300	*Net (Loss) / Income for the Year*
Jumlah (Kerugian)/ Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	194.007	130.789	173.298	188.756	167.663	*Total Comprehensive (Loss) / Income for The Year*

Ikhtisar Arus Kas

Highlights of Cash Flows

(dalam juta Rupiah / *in million Rupiah*)

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021	*Description*
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	297.618	396.915	235.786	465.924	424.078	*Net Cash Flows Pro vided from Operating Activities*
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(298.786)	(389.411)	(248.490)	(430.119)	(388.084)	*Net Cash Flows Used in Investing Activities*
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	(28.831)	(4.782)	(4.259)	-	-	*Net Cash Flows Provided from Financing Activities*

Rasio-Rasio Keuangan

Financial Ratios

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021	*Description*
Return on Asset (ROA)	5,21%	4,9%	7,7%	13,8%	14,6%	*Return on Asset (ROA)*
Return on Equity (ROE)	14,7%	14,2%	19,01%	36,0%	40,2%	*Return on Equity (ROE)*
Solvabilitas	150,1%	155,4%	151,5%	144,3%	141,9%	*Solvency*
Likuiditas	345,9%	319,6%	580,1%	344,3%	549,7%	*Liquidity*
**Yield on Investment* (YOI)	6,7%	6,4%	6,0%	5,7%	5,1%	*Yield on Investment (YOI)*
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	61,7%	32%	35,2%	31,0%	23,8%	*Operating Expenses to Operating Income*
Net Profit Margin (NPM)	19,6%	16,7%	20,4%	22,3%	23,2%	*Net Profit Margin (NPM)*
Gearing Ratio	29,07 kali / *times*	26,37 Kali/ *times*	28,8 kali / *times*	26,0 kali /*times*	28,6 kali / *times*	*Gearing Ratio*
Rasio Efektivitas Subrogasi	21,8%	19,5%	28,8%	12,4%	18,8%	*Subrogation Efficiency Ratio*

Ikhtisar Kinerja Operasional

Highlights of Operational Performance

(dalam juta Rupiah / *in million Rupiah*)

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021	*Description*
Kafalah Produktif	780.873	783.605	724.192	870.325	614.669	*Productive Kafalah*
Kafalah Konsumtif	46.027	33.730	20.309	81.085	105.156	*Concumptiev Kafalah*
Imbal Jasa Kafalah Bank Garansi	6.784	1.510	8.749	10.436	7.372	*Guarantee Bank Kafalah Fee*
Imbal Jasa Kafalah *Surety*	381	1.805	3.408	2.707	2.335	*Surety Kafalah Fee*
Jumlah	834.065	820.650	756.658	964.553	729.532	*Total*

Ikhtisar Saham dan Efek lainnya

Shares and other Securities Highlights

Sampai dengan akhir 2025, Perseroan belum pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Perseroan juga belum pernah menerbitkan dan/atau mencatatkan obligasi, sukuk, maupun efek lainnya baik di BEI atau Bursa manapun.

Dalam Laporan Tahunan 2025 ini, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai Kinerja Saham, Obligasi, Sukuk, maupun efek lainnya.

Until the end of 2025, the Company has never conducted an Initial Public Offering of Shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX). In addition, the Company has never issued and/or listed bonds, sukuk, or other securities either on the IDX or any Stock Exchange.

Thus, in this 2025 Annual Report, the Company does not disclose any information regarding the performance of Shares, Bonds, Sukuk, or other securities.

Peristiwa Penting 2025
2025 Event Highlights

10 Januari 2025 | ***January 10, 2025***



Edukasi Keuangan Inklusif bagi Lembaga Pendidikan Provinsi Banten
Inclusive Financial Education for Educational Institutions in Banten Province

30 Januari 2025 | ***January 30, 2025***



Opening Ceremony BRI UMKM Export 2025 "Broadening MSME'S Global Outreach" and BRI Microfinance Outlook 2025 "Empowering the People's Economy: a Pillar for Achieving Inclusive and Sustainable Growth"

31 Januari 2025 | ***January 31, 2025***



PKS dengan Bank Jatim
Cooperation Agreement (PKS) with Bank Jatim

2 – 4 Februari 2025 | ***February 2-4, 2025***



Rapat Kerja Nasional Semester I Tahun 2025
National Working Meeting (First Semester 2025)

11 Februari 2025 | ***February 11, 2025***



Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 "Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Keuangan"
Annual Financial Services Industry Meeting 2025: "Strengthening a Stable and Inclusive Financial Services Sector to Support Priority Financial Programs"

21 Februari 2025 | ***February 21, 2025***



Workshop Sinergi Kolaborasi *Business Matching* Pembiayaan/ Pendanaan Syariah K/L "Sinergi Peningkatan Pembiayaan Syariah untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional"
Synergy Collaboration Workshop on Sharia Financing/Funding Business Matching for Ministries/Agencies: "Synergy in Enhancing Sharia Financing to Strengthen Stability and National Economic Transformation"

22 Februari 2025 | *February 22, 2025*



Beyond Brotherhood "Syariah Riders for Charity and Syrnergy in Harmony"

22 – 23 Februari 2025 | *February 22-23, 2025*



Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Tangerang

28 Februari 2025 | February 28, 2025



Penandatanganan Nota Kesepahaman Penggunaan Produk Penjaminan Syariah
Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on the Utilization of Sharia Guarantee Products

18 Maret 2025 | *March 18, 2025*



Seminar Literasi Penjaminan Syariah ASIPPINDO
ASIPPINDO Sharia Guarantee Literacy Seminar

20 Maret 2025 | *March 20, 2025*



Penerimaan Penghargaan Anugerah BUMN 2025 Tahun ke-14 Kategori *Corporate and CEO*
Recipient of the 14th BUMN Award 2025 in the Corporate and CEO Category

21 Maret 2025 | *March 21, 2025*



Buka Puasa Bersama dan Tasyakuran Kantor Pusat Askrindo Syariah
Iftar Gathering and Celebration at Askrindo Syariah Headquarters

22 Maret 2025 | ***March 22, 2025***



Banten Halal *Fair* 2025

28 Maret 2025 | ***March 28, 2025***



Mudik Bareng Tahun 2025 Askrindo Syariah
Askrindo Syariah 2025 Joint Homecoming Program

15 – 16 April 2025 | ***April 15-16, 2025***



Upgrading Skill Produk Pembiayaan dan *Business Matching* antara Bank Jatim Syariah dengan Askrindo Syariah
Skill Enhancement on Financing Products and Business Matching between Bank Jatim Syariah and Askrindo Syariah

23 April 2025 | ***April 23, 2025***



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Askrindo Syariah dengan PT INKA "Penjaminan KBG, *Surety Bond* dan Penjaminan Lainnya"
Signing of a Memorandum of Understanding between Askrindo Syariah and PT INKA: "Guarantee of KBG, Surety Bonds, and Other Guarantees"

26 April 2025 | ***April 26, 2025***



Penyerahan Bantuan CSR kepada Perpustakaan Parmawijaya Dendasasmita
CSR Assistance Handover to Parmawijaya Dendasasmita Library

30 April 2025 | ***April 30, 2025***



Vendor Gathering Askrindo Syariah dengan PT Pegadaian
Askrindo Syariah Vendor Gathering with PT Pegadaian

2 Mei 2025 | *May 2, 2025*



Media *Gathering* dan Silaturahmi "Membangun Sinergi dan Kolaborasi"
Media Gathering and Networking Event: "Building Synergy and Collaboration"

6 Mei 2025 | *May 6, 2025*



Indonesia *International Financial Inclusion Summit* (IFIS) 2025

9 Mei 2025 | *May 9, 2025*



Penandatanganan PKS Askrindo Syariah dengan
PT Proteksi Jaya Mandiri "Penjaminan Pembiayaan Mitraguna BSI"
Signing of Cooperation Agreement (PKS) between Askrindo Syariah and PT Proteksi Jaya Mandiri: "Guarantee of BSI Mitraguna Financing"

16 – 18 Mei 2025 | *May 16-18, 2025*



Syariah Financial Fair 2025 *goes* to Palembang

5 Juni 2025 | *June 5, 2025*



Penyerahan Hewan Qurban dalam Rangka Idul Adha 1446 H melalui BSI Maslahat dan PNM
Distribution of Qurbani Livestock for Eid al-Adha 1446 H through BSI Maslahat and PNM

19 Juni 2025 | *June 19, 2025*



Workshop Keuangan Syariah bagi Usaha Halal
Sharia Financial Workshop for Halal Businesses

8 Juli 2025 | *July 8, 2025*



Global Launching of The State of the Global Islamic Economy (SGIE) *Report* 2025 dan Perayaan 1 Dekade Indonesia Halal *Lifestyle Center* (IHLC)
Global Launch of The State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025 and 1st Decade Celebration of the Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC)

11 Juli 2025 | *July 11, 2025*



Tasyakuran Milad ke-13 (versi Tahun Hijriah)
13th Anniversary Celebration (Hijri Calendar)

2 – 3 Agustus 2025 | *August 2-3, 2025*



Syariah Financial Fair (SYAFIF) 2025 goes to Bandung

13 Agustus 2025 | *August 13, 2025*



Rapat Koordinasi dengan DPD RI "Pembangunan Infrastruktur di Kawasan DIY dan Jasela untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan."
Coordination Meeting with the Regional Representative Council (DPD RI): "Infrastructure Development in the Special Region of Yogyakarta (DIY) and South Sumatra (Jasela) to Enhance Economic Growth and Food Security."

15 Agustus 2025 | *August 15, 2025*



Pawai dan Lomba Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80
Parade and Competitions Commemorating the 80th Anniversary of Indonesia's Independence Day

18 Agustus 2025 | *August 18, 2025*



Grand Prix Synergy: One Track One Vision

21 Agustus 2025 | ***August 21, 2025***



Penandatanganan PKS Askrindo Syariah dengan KB Bank Syariah
Signing of Cooperation Agreement (PKS) between Askrindo Syariah and KB Bank Syariah

28 Agustus 2025 | ***August 28, 2025***



LokaModal (Lokomotif Akses Permodalan)
LokaModal (Locomotive of Capital Access)

11 – 13 September 2025 | ***September 11-13, 2025***



Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah
Monitoring and Evaluation of Sharia People's Business Credit (KUR) Disbursement

22 – 23 September 2025 | ***September 22-23, 2025***



Rapat Kerja Nasional Semester II Tahun 2025
2025 Second Semester National Working Meeting

30 September 2025 | ***September 30, 2025***



Talkshow Zakat Perusahaan dan Penerimaan Sertifikat Label Taat Zakat
Corporate Zakat Talk Show and Receipt of the Zakat Compliance Label Certificate

2 Oktober 2025 | ***October 2, 2025***



Indonesia *Economic Summit* 2025 & Penerimaan Apresiasi 14th INFOBANK *Sharia Financial Institution Award* 2025
Indonesia Economic Summit 2025 & Receipt of Appreciation at the 14th INFOBANK Sharia Financial Institution Award 2025

3 – 4 Oktober 2025 | ***October 3-4, 2025***



Syariah Financial Fair 2025 goes to Mataram

10 Oktober 2025 | ***October 10, 2025***



Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk Komitmen Bersama dalam Pelaksanaan Skema ESI
Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for a Joint Commitment in Implementing the ESI Scheme

21 Oktober 2025 | ***October 21, 2025***



Pembukaan *Booth* dan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) dalam acara KUR *The Next: Adaptive and Integrative*
Booth Opening and Mass Contract Signing for People's Business Credit (KUR) with 800,000 Borrowers, Job Creation Initiative, and Launch of the Housing Program Credit (KPP) at "KUR The Next: Adaptive and Integrative" Event

22 Oktober 2025 | ***October 22, 2025***



Program Pemberian Laptop di Sekolah Cendekia Baznas pada Peringatan Hari Santri Nasional 2025
Laptop Distribution Program at Baznas Cendekia School to Mark National Santri Day 2025

3 – 4 November 2025 | ***November 3-4, 2025***



Indonesia *Islamic Finance Summit* 2025 dan Sarasehan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah 2025
Indonesia Islamic Finance Summit 2025 and Sharia Insurance, Guarantee, and Pension Funds (PPDP) Symposium 2025

5 November 2025 | ***November 5, 2025***



Penghargaan Anugerah Kemandirian 2025
"Mitra Pendukung Program Pendidikan"
2025 Independence Award
"Supporting Partner of Education Programs"

8 November 2025 | ***November 8, 2025***



Launching Piloting Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR)
Launch of the PINTAR Pilot Program (Improving Financial Inclusion for Equitable People's Economic Development)

6 – 9 November 2025 | ***November 6-9, 2025***



Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) tahun 2025
Financial Expo and Sharia Seminar (EKSiS) 2025

19 November 2025 | ***November 19, 2025***



Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemasaran Bersama antara Askrindo Syariah dengan Jasindo Syariah
Signing of a Joint Marketing Memorandum of Understanding between Askrindo Syariah and Jasindo Syariah

Desember 2025 | ***December 2025***



Penyerahan Bantuan Bencana di Sumatera (Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara)
Disaster Relief Assistance Handover in Sumatra (West Sumatra, Aceh, and North Sumatra)

1 Desember 2025 | ***December 1, 2025***



Tasyakuran Milad ke-13 Askrindo Syariah
Thanksgiving Ceremony for the 13th Anniversary of Askrindo Syariah

4 Desember 2025 | ***December 4, 2025***



Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisioner dan Industri Jasa Keuangan Tahun 2025
Year-End Dialogue between Members of the Board of Commissioners and the Financial Services Industry 2025

16 – 18 Desember 2025 | **December *16–18, 2025***



Workshop Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Tahun 2025
2025 Workshop on the Development of Sharia Financial Literacy and Inclusion

16 – 19 Desember 2025 | ***December 16-19, 2025***



Bazar Mitra Bisnis dan UMKM Binaan dalam Rangka Milad ke-13 Askrindo Syariah
Business Partner and Fostered MSME Bazaar in Commemoration of the 13th Anniversary of Askrindo Syariah

20 Desember 2025 | ***December 20, 2025***



Mini Soccer Tournament 2025 dalam Rangka Milad ke-13 Askrindo Syariah
2025 Mini Soccer Tournament in Commemoration of the 13th Anniversary of Askrindo Syariah

01



14th Anugerah BUMN 2025

Terbaik III Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik Anak Perusahaan BUMN
3rd Best in Organizational Transformation – Best Subsidiary of a State-Owned Enterprise

BUMN Track

02



14th Anugerah BUMN 2025

Best CEO in Business Resilience Award

BUMN Track

03



Certificate of Appreciation

The Execelent Performance Sharia Guarantor Company 2025

Info Bank Media Group

04



Anugerah Kemandirian 2025

Sebagai Mitra Pendukung Program Pendidikan
As a Supporting Partner for Educational Programs

LAZNAZ Yatim Mandiri

05



TOP 100 CEO *AWARD* 2025

Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025

Info Bank Media Group

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan
Awards

Sertifikasi
Certifications

01



Certificate of Registration "*Quality Management System*-ISO 9001:2015"
Terbit/*Issued* : 18 Juli 2024 | *July 18, 2024*
Berlaku Sampai/*Valid Until* : 17 Juli 2027 | *July 17, 2027*

02



Peers Quality Assurance Ltd Certificate of Registration "*Information Security Management System*-ISO 27001:2013"
Terbit Kembali/*Re-issued* : 25 November 2024 | *November 25, 2024*
Berlaku Sampai/*Valid Until* : 25 November 2025 | *November 25, 2025*

03



Sistem Manajemen Anti Penyuapan: SNI ISO 37001 : 2016 dari Komite Akreditasi
Nasional Anti-Bribery Management System: SNI ISO 37001 : 2016 from National Accreditation Committee
Terbit/*Issued* : 28 Oktober 2024 | *October 28, 2024*
Berlaku Sampai/*Valid Until* : 27 Oktober 2027 | *October 27, 2027*

04



Label Taat Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Zakat
Compliance Label from the National Board of Zakat
Terbit/*Issued* : 17 Maret 2025 | *March 17, 2025*
Berlaku Sampai/*Valid Until* : 17 Maret 2026 | *March 17, 2026*

Kerja Sama Strategis Tahun 2025

Strategic Cooperation in 2025

No.	Nama Mitra *Partner Name*	Perjanjian Kerja sama (PKS) *Cooperation Agreement (PKS)*	Tanggal Awal *Starting Date*	Tanggal Jatuh Tempo *Maturity Date*
1	BPD Jateng Syariah	PKS KPP Permintaan Rumah *Cooperation Agreement (PKS) for Housing Demand Program Credit (KPP)*	30 Desember 2025 *December 30, 2025*	30 Desember 2028 *December 30, 2028*
2	BPD Jawa Timur	PKS Pembiayaan Multiguna *Cooperation Agreement (PKS) for Multipurpose Financing*	31 Januari 2025 *January 31, 2025*	31 Januari 2028 *January 31, 2028*
		PKS Pembiayaan Pegawai *Cooperation Agreement (PKS) for Employee Financing*	31 Januari 2025 *January 31, 2025*	31 Januari 2028 *January 31, 2028*
3	Bank Riau Kepri Syariah	*Restatement* PKS Induk *Restatement of the Master Cooperation Agreement*	25 Februari 2025 *February 25, 2025*	25 Februari 2025 *February 25, 2025*
4	Pegadaian	PKS Penjaminan atas Pembiayaan Amanah *Cooperation Agreement (PKS) for Guarantee of Amanah Financing*	7 November 2025 *November 7, 2025*	7 November 2026 *November 7, 2026*
		MOU Penggunaan Produk Penjaminan Syariah *Memorandum of Understanding (MoU) on the Utilization of Sharia Guarantee Products*	28 Februari 2025 *February 28, 2025*	28 Februari 2027 *February 28, 2027*
5	BSI	Pembaruan PKS KUR *Renewal of the Cooperation Agreement (PKS) for People's Business Credit (KUR)*	14 April 2025 *April 14, 2025*	26 Januari 2027 *Januari 26, 2027*
		PKS KPP Permintaan Rumah *Cooperation Agreement (PKS) for Housing Demand Program Credit (KPP)*	5 November 2025 *November 5, 2025*	26 Januari 2027 *January 26, 2027*
		PKS Pembiayaan Solusi Emas Hijrah *Cooperation Agreement (PKS) for Hijrah Gold Solution Financing*	17 Maret 2025 *March 17, 2025*	17 Maret 2028 *March 17, 2028*
		Nota Kesepakatan Pembiayaan Solusi Emas Hijrah *Memorandum of Agreement on Hijrah Gold Solution Financing*	17 Maret 2025 *March 17, 2025*	17 Maret 2028 *March 17, 2028*
		PKS KBG *Cooperation Agreement (PKS) for KBG*	5 Desember 2025 *December 5, 2025*	5 Desember 2028 *December 5, 2028*
6	Mitra Proteksi Madani	Nota Kesepahaman *Crash Program* Percepatan Penyelesaian Pengajuan Klaim Penjaminan ULaMM *Memorandum of Understanding on Crash Program for Accelerating the Settlement of ULaMM Guarantee Claim Submissions*	26 September 2025 *September 26, 2025*	31 Desember 2025 *December 31, 2025*
		PKS KBG	5 Agustus 2025 *August 5, 2025*	5 Agustus 2025 *August 5, 2025*



02



Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioner's Report



Siti Ma'rifah
Komisaris Utama
President Commissioner

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) dapat melalui tahun buku ini dengan baik di tengah dinamika kondisi ekonomi dan industri jasa keuangan yang penuh tantangan.

Tinjauan Perekonomian Global dan Industri Syariah di Tahun 2025

Perekonomian global pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang moderat di tengah ketidakpastian yang masih berlanjut. Berdasarkan *World Economic Outlook* IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berada pada 3%–3,2%, mencerminkan proses normalisasi pascapandemi, pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju, serta meningkatnya fragmentasi perdagangan global.

World Bank juga menyoroti bahwa tekanan inflasi di banyak negara mulai mereda, meskipun masih terdapat risiko yang bersumber dari fluktuasi harga energi, pangan, serta ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global.

Industri keuangan syariah global pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan semakin signifikan dalam sistem keuangan dunia. Berdasarkan laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) 2025, total aset industri keuangan syariah global mencapai sekitar USD 3,88 triliun pada tahun 2024, tumbuh sebesar 14,9% secara tahunan (*year-on-year*). Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap instrumen keuangan berbasis prinsip syariah, penguatan sektor perbankan syariah, serta perkembangan pasar sukuk dan industri keuangan sosial syariah di berbagai negara, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap instrumen keuangan berbasis prinsip syariah serta penguatan sektor perbankan syariah.

Ke depan, prospek industri keuangan syariah tetap positif dengan potensi pertumbuhan jangka menengah yang kuat. Laporan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) 2025 memproyeksikan bahwa total aset keuangan syariah global dapat mencapai sekitar USD 9,7 triliun pada tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 10%.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We give thanks to Allah SWT for His mercy and blessings, which have enabled PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) to successfully navigate this fiscal year amid the dynamic and challenging conditions of the economy and the financial services industry.

Overview on The Global Economic Conditions and Sharia Industry in 2025

The global economy in 2025 shows moderate growth amid ongoing uncertainty. Based on the World Economic Outlook of the International Monetary Fund, global economic growth is projected to be in the range of 3%–3.2%, reflecting post-pandemic normalization, tighter monetary policies in several advanced economies, and increasing global trade fragmentation.

The World Bank also highlights that inflationary pressures in many countries have begun to ease, although risks remain stemming from fluctuations in energy and food prices, as well as geopolitical tensions that may affect global economic stability.

The global Islamic finance industry in 2025 is showing strong and increasingly significant growth within the global financial system. According to the Islamic Financial Services Board (IFSB) 2025 report, the total assets of the global Islamic finance industry reached approximately USD 3.88 trillion in 2024, growing by 14.9% year-on-year. This growth was driven by rising demand for Sharia-compliant financial instruments, the strengthening of the Islamic banking sector, and the development of the sukuk market and the Islamic social finance industry in various countries, fueled by rising demand for Sharia-compliant financial instruments and the strengthening of the Islamic banking sector.

Looking ahead, the prospects of the Islamic finance industry remain positive, with strong medium-term growth potential. The Islamic Finance Development Indicator 2025 projects that total global Islamic financial assets could reach approximately USD 9.7 trillion by 2029, with an average annual growth rate of around 10%.

Pertumbuhan ini akan didorong oleh digitalisasi layanan keuangan, penguatan regulasi, serta meningkatnya peran keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan inklusi keuangan global.

This growth will be driven by the digitalization of financial services, stronger regulatory frameworks, and the increasing role of Islamic finance in supporting sustainable finance and global financial inclusion.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Assessment of The Board of Directors' Performance

Dewan Komisaris memberikan apresiasi tinggi kepada Direksi atas pencapaian laba tahun berjalan yang berhasil melampaui target RKAP secara signifikan di tengah dinamika ekonomi yang menantang. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 (*audited*), Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp163,183 miliar, atau mencapai 132,25% dari target RKAP 2025 yang ditetapkan sebesar Rp123,391 miliar. Keberhasilan ini didorong oleh pertumbuhan Imbal Jasa Kafalah (IJK) Bruto yang mencapai Rp834,065 miliar serta perolehan Hasil Investasi yang melampaui target, yakni sebesar Rp153,658 miliar.

The Board of Commissioners extends high appreciation to the Board of Directors for achieving a current year profit that significantly exceeded the RKAP target amid challenging economic conditions. Based on the audited financial statements as of 31 December 2025, the Company recorded a profit for the year of Rp163.183 billion, reaching 132.25% of the 2025 RKAP target of Rp123.391 billion. This achievement was driven by the growth of Gross Kafalah Fee (Imbal Jasa Kafalah/IJK), which reached Rp834.065 billion, as well as investment income that exceeded the target, amounting to Rp153.658 billion.

Dewan Komisaris juga mencatat efektivitas manajemen dalam mengelola biaya usaha, di mana realisasi beban usaha sebesar Rp147,950 miliar tetap berada di bawah pagu anggaran (94,55% dari RKAP). Kinerja penagihan subrogasi menunjukkan hasil luar biasa dengan realisasi Rp83,357 miliar, mencapai 165,47% dari targetnya.

The Board of Commissioners also noted the effectiveness of management in controlling operating expenses, where realized operating expenses of Rp147.950 billion remained below the budget ceiling (94.55% of the RKAP). Subrogation collection performance showed outstanding results, with realization reaching Rp83.357 billion, equivalent to 165.47% of the target.

Total aset Perseroan per akhir 2025 tercatat sebesar Rp3,279 triliun, tumbuh 9,8% secara tahunan (YoY), yang mencerminkan penguatan skala bisnis Perseroan sebagai pemimpin pasar di industri penjaminan syariah.

The Company's total assets as of the end of 2025 were recorded at Rp3.279 trillion, growing 9.8% year-on-year (YoY), reflecting the strengthening scale of the Company's business as a market leader in the Islamic guarantee industry.

Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian Direksi. Meskipun laba tumbuh, terdapat peningkatan Beban Kafalah akibat tingginya beban klaim (*ta'widh*) bruto yang mencapai Rp561,289 miliar atau 134,50% dari RKAP. Rasio klaim (*Ta'widh Ratio*) tahun 2025 meningkat tajam menjadi 67% dibandingkan 46% pada tahun sebelumnya. Dewan Komisaris menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi bisnis inti dan penguatan kualitas akseptasi untuk mengendalikan rasio ta'widh yang terus merangkak naik.

However, the Board of Commissioners also raised several critical observations for the attention of the Board of Directors. Despite profit growth, there was an increase in Kafalah Expenses due to higher gross claim expenses (ta'widh), which reached Rp561.289 billion or 134.50% of the RKAP. The claim ratio (Ta'widh Ratio) in 2025 rose sharply to 67%, compared to 46% in the previous year. The Board of Commissioners emphasized the need for a thorough evaluation of core business strategies and strengthened underwriting quality to control the increasing ta'widh ratio.

Dari sisi manajemen risiko, Perseroan berhasil menjaga profil kesehatan keuangan sesuai regulasi. *Gearing ratio agregat* per Desember 2025 tercatat sebesar 29,1 kali, ambang batas yang ditetapkan oleh regulator sebesar 40 kali. Tingkat likuiditas Perseroan mencapai ambang batas yang ditetapkan oleh regulator 174,89%, jauh di atas ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2025 sebesar 120%. Capaian ini memvalidasi bahwa meskipun ekspansi bisnis dilakukan secara agresif, Direksi tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian.

From a risk management perspective, the Company successfully maintained a sound financial health profile in accordance with regulatory requirements. The aggregate gearing ratio as of December 2025 stood at 29.1 times, still below the regulatory threshold of 40 times. The Company's liquidity level reached 174.89%, well above the minimum requirement under OJK Regulation No. 11 of 2025, which is 120%. These achievements validate that despite carrying out aggressive business expansion, the Board of Directors continues to uphold the principle of prudence.

Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis, mencakup pengawasan terhadap penetapan strategi hingga pemantauan implementasinya. Prosedur ini didesain untuk memastikan bahwa Direksi bekerja dalam koridor kebijakan yang telah disetujui dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta mematuhi prinsip kehati-hatian. Mekanisme utama pengawasan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam forum ini, Dewan Komisaris membedah laporan performa bulanan, membandingkan realisasi dengan target, dan memberikan arahan langsung atas masalah-masalah yang bersifat mendesak. Diskusi tidak terbatas pada angka finansial, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian bisnis, pengembangan teknologi informasi, kondisi kualitas tingkat kesehatan perusahaan, pengembangan SDI serta penerapan manajemen risiko. Di luar forum formal, Dewan Komisaris juga melakukan diskusi informal secara berkala untuk menjaga kelancaran komunikasi dan memberikan masukan yang lebih fleksibel terhadap dinamika pasar.

Dewan Komisaris juga terlibat aktif dalam pengawasan proses penyusunan strategi jangka panjang dan tahunan. Masukan diberikan sejak tahap awal penyusunan RKAP, dengan fokus pada kesesuaian target dengan rencana jangka panjang perusahaan, pengelolaan permodalan, dan pemenuhan struktur organisasi yang ideal. Dewan Komisaris menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur TI yang handal dan akuntabel sebagai prasyarat bagi efisiensi operasional. Oleh karena itu, Dewan Komisaris secara konsisten memantau pengembangan sistem TI agar dapat mendukung akselerasi proses bisnis secara menyeluruh.

Dalam pengawasan manajemen risiko, Dewan Komisaris menggunakan pendekatan *three lines* model. Dewan Komisaris memastikan bahwa Lini Pertama (unit bisnis) mengidentifikasi risiko secara akurat, Lini Kedua (manajemen risiko dan kepatuhan) memberikan panduan yang efektif, dan Lini Ketiga (Satuan Pengawas *Internal*/SPI) bertindak sebagai penilai independen yang memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pengendalian internal kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan juga mencakup pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit, baik internal maupun eksternal, guna memastikan setiap kelemahan sistemik segera diperbaiki.

Supervisory Role of The Board of Commissioners in the Formulation and Implementation of Corporate Strategy

The Board of Commissioners performs its supervisory function through structured and systematic procedures, covering oversight of strategy formulation through to monitoring its implementation. These procedures are designed to ensure that the Board of Directors operates within the policy framework approved in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and complies with the principle of prudence. `The main supervisory mechanism is carried out through Monthly Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In this forum, the Board of Commissioners reviews monthly performance reports, compares actual results against targets, and provides direct guidance on urgent issues. The discussions are not limited to financial figures, but also include monitoring of business performance achievements, information technology development, the Company's health indicators, human resource development, and the implementation of risk management.
In addition to formal meetings, the Board of Commissioners also conducts periodic informal discussions to maintain smooth communication and provide more flexible input in response to market dynamics.

The Board of Commissioners is also actively involved in supervising the formulation of long-term and annual strategies. Inputs are provided from the early stages of the RKAP preparation, with a focus on aligning targets with the Company's long-term plan, capital management, and the fulfillment of an optimal organizational structure. The Board of Commissioners emphasizes the importance of developing a reliable and accountable IT infrastructure as a prerequisite for operational efficiency. Therefore, the Board of Commissioners consistently monitors the development of the Company's IT systems to ensure they can support the acceleration of overall business processes.

In risk management oversight, the Board of Commissioners applies the three lines model approach. The Board ensures that the First Line (business units) accurately identifies risks, the Second Line (risk management and compliance functions) provides effective guidance, and the Third Line (Internal Audit Unit/SPI) acts as an independent assessor that delivers an objective view on the effectiveness of internal controls to both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The oversight also includes monitoring the completion of follow-up actions from audit findings, both internal and external, to ensure that any systemic weaknesses are promptly addressed and corrected.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2025

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan, Dewan Komisaris secara aktif memberikan rekomendasi yang tajam dan berorientasi pada keberlanjutan bisnis jangka panjang. Untuk tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan tujuh klaster rekomendasi utama kepada Direksi guna merespons dinamika industri dan tantangan internal yang muncul.

Pertama, terkait optimalisasi pendapatan IJK Bruto, Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat profitabilitas setiap makful lahu. Selain itu, Direksi diminta untuk menerapkan metodologi *The 4 Disciplines of Execution* (4DX) guna memastikan program-program akselerasi pencapaian target IJK tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi tereksekusi dengan disiplin di tingkat operasional.

Kedua, dalam pengendalian beban klaim (*ta'widh*), Dewan Komisaris menekankan perlunya penerapan prinsip *four eyes principal* sejak tahap awal akseptasi untuk memastikan objektivitas penilaian risiko, terutama untuk penjaminan yang memiliki profil risiko tinggi. Direksi juga diinstruksikan untuk menyempurnakan sistem informasi digital yang memungkinkan pemantauan operasional secara *real-time*.

Ketiga, pada aspek manajemen investasi, Dewan Komisaris meminta Direksi bersama Komite Investasi untuk melakukan penempatan dana yang diprioritaskan pada instrumen *admitted asset* yang likuid dan aman guna menjaga rasio solvabilitas Perseroan.

Keempat, Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk untuk menurunkan piutang IJK yang telah berumur lama, antara lain dengan merekomendasikan pembangunan sistem terintegrasi yang mensyaratkan pelunasan IJK sebelum sertifikat kafalah diterbitkan. Langkah ini krusial untuk memperbaiki profil arus kas operasional Perseroan.

Kelima, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kapasitas SDI yang difokuskan pada penguatan kompetensi di bidang bisnis non-program, guna mengurangi ketergantungan pada program pemerintah yang tingkat persaingan dan tekanannya terhadap margin semakin tinggi.

Pandangan Atas Prospek Usaha

Seiring dengan pertumbuhan industri jasa keuangan nasional dan meningkatnya kebutuhan akan penjaminan berbasis prinsip syariah. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta dukungan Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif menjadi katalis utama bagi peningkatan permintaan produk penjaminan. Selain itu, tren pertumbuhan industri keuangan syariah yang stabil turut membuka peluang bagi Perseroan untuk memperluas pangsa pasar

Implementation of The Commissioners' Duties in 2025

In carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners actively provides focused recommendations oriented toward long-term business sustainability. For 2025, the Board of Commissioners issued seven main clusters of recommendations to the Board of Directors in response to evolving industry dynamics and emerging internal challenges.

First, regarding the optimization of Gross Kafalah Fee (IJK) revenue, the Board of Commissioners directed the Board of Directors to conduct periodic evaluations of the profitability level of each makful lahu. In addition, the Board of Directors was instructed to implement the 4 Disciplines of Execution (4DX) methodology to ensure that IJK target acceleration programs do not remain at the planning stage, but are executed with discipline at the operational level.

Second, in controlling claim expenses (ta'widh), the Board of Commissioners emphasizes the need to implement the four eyes principle from the early stage of acceptance to ensure objectivity in risk assessment, particularly for guarantees with high-risk profiles. The Board of Directors is also instructed to enhance the digital information system to enable real-time operational monitoring.

Third, in terms of investment management, the Board of Commissioners requests the Board of Directors, together with the Investment Committee, to allocate funds primarily into admitted assets that are liquid and secure in order to maintain the Company's solvency ratio.

Fourth, the Board of Commissioners also instructs the Board of Directors to reduce long-outstanding IJK receivables, among others by recommending the development of an integrated system that requires IJK settlement prior to the issuance of kafalah certificates. This measure is crucial to improve the Company's operating cash flow profile.

Fifth, the Board of Commissioners is paying special attention to enhancing SDI's capacity, with a focus on strengthening its competencies in non-program business areas, in order to reduce its dependence on government programs, where competition and pressure on margins are increasingly intense.

Outlook on Business Prospects

In line with the growth of the national financial services industry and the increasing demand for Sharia-based guarantee services, the strengthening of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as government support for inclusive financing, serve as key catalysts for rising demand for guarantee products. In addition, the stable growth trend of the Islamic finance industry also opens opportunities for the Company to expand its market

dan meningkatkan kontribusi terhadap ekosistem ekonomi syariah nasional.

Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP tahun 2026 yang disusun Direksi memberikan gambaran yang wajar, realistis, dan mencerminkan optimisme yang terukur dalam menghadapi dinamika industri penjaminan. Tema RKAP 2026, yaitu "Perluasan Pasar dan Digitalisasi dalam Menjaga *Sustainability Growth*", dipandang sebagai arah kebijakan yang tepat untuk memperkuat kapabilitas organisasi melalui dukungan teknologi informasi yang handal. Dewan Komisaris mendukung penuh sasaran utama Direksi untuk mengembangkan bisnis melalui layanan unggul dan penguatan infrastruktur internal.

Dalam perspektif finansial, Dewan Komisaris mendukung target Imbal Jasa Kafalah (IJK) Bruto tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp903.70 miliar (meningkat 12,96% dari prognosa tahun 2025) serta target Laba Setelah Pajak sebesar Rp151.60 miliar (meningkat 7,44% dari prognosa tahun 2025). Dewan Komisaris juga memberikan catatan agar Perseroan tetap patuh (*comply*) terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2025. Proyeksi *gearing ratio* agregat akhir tahun 2026 pada level 27,31 kali dinilai aman dan memberikan ruang yang cukup bagi Perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa melampaui ambang batas 40 kali yang ditetapkan regulator.

Asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan prospek 2026, seperti pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,1%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.550/USD, dinilai cukup moderat. Namun, Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi tetap mempertimbangkan sumber data lain (seperti *World Bank* atau IMF) guna melakukan mitigasi risiko atas ketidakpastian global. Sektor investasi juga diharapkan memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan aset pada akhir tahun 2026.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi utama untuk mewujudkan keberlanjutan bisnis dan menjaga reputasi Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, seluruh organ GCG Perseroan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan dedikasi yang tinggi, yang tercermin dari konsistensi peningkatan kualitas tata kelola di setiap lini.

share and increase its contribution to the national Islamic economic ecosystem.

The Board of Commissioners assesses that the 2026 RKAP prepared by the Board of Directors provides a reasonable and realistic outlook, while reflecting measured optimism in facing the dynamics of the guarantee industry. The 2026 RKAP theme, "Market Expansion and Digitalization in Sustaining Growth," is considered an appropriate strategic direction to strengthen organizational capabilities through reliable information technology support.
The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' key objectives to develop the business through excellent service delivery and the strengthening of internal infrastructure.

From a financial perspective, the Board of Commissioners supports the 2026 Gross Kafalah Fee (IJK) target of Rp903,70 billion, representing an increase of 12.96% from the 2025 forecast, as well as the Net Profit After Tax target of Rp151,60 billion, reflecting a 7.44% increase from the 2025 forecast. The Board of Commissioners also emphasizes that the Company must remain fully compliant with the provisions stipulated in OJK Regulation No. 11 of 2025. The projected aggregate gearing ratio at the end of 2026 is expected to be at a level of 27.31 times, which is considered safe and provides sufficient room for the Company to expand its business without exceeding the regulatory threshold of 40 times.

The macroeconomic assumptions used as the basis for preparing the 2026 outlook—such as national economic growth of 5.1%, inflation of 2.5%, and an exchange rate of Rp16,550/USD—are considered moderately conservative. However, the Board of Commissioners advises the Board of Directors to continue considering alternative data sources (such as the World Bank or the International Monetary Fund) to mitigate risks arising from global uncertainty. The investment sector is also expected to contribute optimally to asset growth by the end of 2026.

Board of Commissioners' View on Corporate Governance Implementation

The Board of Commissioners is of the view that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is a fundamental foundation for achieving business sustainability and maintaining the Company's reputation.

Throughout 2025, all GCG (Good Corporate Governance) organs of the Company have carried out their duties and responsibilities with high dedication, reflected in the consistent improvement of governance quality across all levels.

Berdasarkan Laporan Realisasi Kegiatan tahun 2025, Dewan Komisaris mencatat bahwa Perseroan telah memenuhi 100% kewajiban pelaporan tata kelola tepat waktu. Hal ini mencakup penyelesaian pelaporan *Self-Assessment* GCG versi OJK periode tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada April 2025, serta penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai POJK Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 58.

Based on the 2025 Activity Realization Report, the Board of Commissioners noted that the Company had fulfilled 100% of its governance reporting obligations on time. This includes the completion of the OJK GCG Self-Assessment report for the 2024 period, which was conducted in April 2025, as well as the preparation of the Corporate Governance Implementation Report in accordance with OJK Regulation No. 3 of 2017 Article 58.

Hasil terakhir penilaian mandiri (*self-assessment*) GCG Perseroan mencapai skor 93,52 dan menempatkan Perseroan dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini membuktikan komitmen kuat Direksi dalam memperbaiki proses bisnis agar selaras dengan standar tata kelola nasional yang ditetapkan OJK.

The latest GCG self-assessment results recorded a score of 93.52, placing the Company in the "Very Good" category. This reflects the strong commitment of the Board of Directors to improving business processes in alignment with national governance standards set by the Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Komisaris menilai bahwa peningkatan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan hasil dari internalisasi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan transparansi di seluruh jenjang organisasi.

The Board of Commissioners considers that this improvement is not merely an administrative achievement, but rather the result of internalizing the values of professionalism, integrity, and transparency across all levels of the organization.

Dewan Komisaris juga terlibat langsung dalam pemantauan efektivitas *Whistleblowing System* (WBS) untuk memastikan lingkungan kerja yang bertanggung jawab dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris secara berkala menelaah laporan yang masuk melalui WBS dan memastikan bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti secara objektif dan rahasia.Transparansi informasi juga terus ditingkatkan, di mana laporan keuangan dan operasional dipublikasikan secara tepat waktu dan akurat untuk memenuhi hak informasi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Board of Commissioners is also directly involved in monitoring the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) to ensure a responsible work environment free from fraudulent practices. Through the Audit Committee, the Board of Commissioners periodically reviews reports received via the WBS and ensures that each complaint is followed up objectively and confidentially.
Information transparency is also continuously enhanced, where financial and operational reports are published in a timely and accurate manner to fulfill the information rights of shareholders and other stakeholders.

Dalam rangka penguatan tata kelola risiko, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi yang telah menyempurnakan seluruh *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan memperhatikan aspek manajemen risiko dan kepatuhan syariah. Penyusunan kembali *Risk Appetite Statement* (RAS) yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan strategis telah didasarkan pada perhitungan risiko yang matang.

In strengthening risk governance, the Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in refining all Standard Operating Procedures (SOPs) by taking into account risk management aspects and Sharia compliance. The revision of the Risk Appetite Statement (RAS), adjusted to current market conditions, is a crucial step to ensure that every strategic decision is based on sound risk assessment.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mengawal penerapan prinsip GCG ini guna melindungi kepentingan seluruh *stakeholder* Perseroan.

The Board of Commissioners remains committed to continuously overseeing the implementation of these GCG principles in order to safeguard the interests of all the Company's stakeholders.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Assessment of The Performance of Committees Under The Board of Commissioners

Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan teknis dan strategis. Sepanjang tahun 2025, komite-komite ini telah menjalankan tugasnya dengan sangat efektif, memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is supported by specialized committees that function as technical and strategic oversight instruments. Throughout 2025, these committees have carried out their duties effectively, making tangible contributions to the Board of Commissioners' decision-making process.

Komite Audit

Komite Audit telah berperan vital dalam memastikan integritas pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal. Sepanjang tahun 2025, komite ini telah melakukan reviu mendalam terhadap kualitas laporan keuangan interim, memantau efektivitas audit eksternal, serta mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) SPI. Komite Audit juga aktif memberikan masukan terkait pencegahan benturan kepentingan dan memastikan tindak lanjut atas temuan audit dilakukan secara tuntas oleh Direksi. Partisipasi anggota komite dalam berbagai seminar GRC dan audit menunjukkan komitmen untuk selalu memperbarui standar pengawasan sesuai praktik terbaik industri.

Komite Pemantau Risiko (KPR)

KPR telah menjalankan fungsinya dalam mengawasi penerapan kerangka manajemen risiko yang komprehensif. Fokus utama KPR di tahun 2025 adalah pemantauan profil risiko inheren yang cenderung meningkat akibat dinamika ekonomi makro. KPR telah memberikan rekomendasi strategis terkait penentuan *Top Risk* korporasi, penyusunan *Business Continuity Management* (BCM), serta evaluasi kebijakan umum manajemen risiko. KPR juga mendorong Direksi untuk melakukan pengukuran profil risiko yang lebih presisi pada setiap indikator sasaran guna memastikan Perseroan tetap berada dalam ambang batas toleransi risiko yang aman.

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)

KNR telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penelahaan terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi bagi pengurus Perseroan. Di tahun 2025, KNR memberikan masukan strategis terkait rencana reorganisasi struktur perusahaan untuk mendukung ekspansi ke bisnis *non-program*. Komite ini juga memastikan bahwa sistem remunerasi yang diterapkan telah dikaitkan dengan pencapaian KPI dan kinerja perusahaan secara keseluruhan, guna menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil. KNR juga memantau proses analisis 7 kebutuhan organisasi dan prosedur rekrutmen untuk memastikan Perseroan memiliki SDI yang kompeten dan berintegritas.

Dewan Komisaris memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota komite atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang telah menjadi elemen kunci dalam pencapaian kinerja Perseroan yang solid di tahun 2025.

Audit Committee

The Audit Committee has played a vital role in ensuring the integrity of financial reporting and the effectiveness of internal controls. Throughout 2025, the committee conducted in-depth reviews of the quality of interim financial statements, monitored the effectiveness of external audits, and evaluated the Internal Audit Unit's (SPI) Annual Audit Work Plan (RKAT). The Audit Committee also actively provided input on conflict of interest prevention and ensured that follow-up actions on audit findings were fully completed by the Board of Directors. The participation of committee members in various GRC and audit seminars also reflects their commitment to continuously updating supervisory standards in line with industry best practices.

Risk Monitoring Committee (KPR)

The Risk Monitoring Committee (KPR) has carried out its function in overseeing the implementation of a comprehensive risk management framework. The main focus of the KPR in 2025 was the monitoring of inherent risk profiles, which tended to increase due to macroeconomic dynamics. The KPR provided strategic recommendations related to the determination of corporate Top Risks, the formulation of Business Continuity Management (BCM), and the evaluation of the general risk management policy. The committee also encouraged the Board of Directors to conduct more precise risk profiling for each performance indicator to ensure that the Company remains within a safe risk tolerance threshold.

Nomination and Remuneration Committee (KNR)

The Nomination and Remuneration Committee (KNR) has supported the Board of Commissioners in reviewing the Company's nomination and remuneration policies. In 2025, the KNR provided strategic input regarding the planned organizational restructuring to support expansion into non-program business activities. The Committee also ensured that the remuneration system implemented is linked to KPI achievement and overall Company performance, in order to foster a results-oriented work culture. In addition, the KNR monitored the analysis of organizational needs and recruitment procedures to ensure that the Company has competent and high-integrity human resources.

The Board of Commissioners extends its highest appreciation to all committee members for their dedication and professionalism in carrying out their oversight functions, which have been a key element in achieving the Company's solid performance in 2025.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama periode tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Siti Ma'rifah
- Komisaris : Kun Wahyu Wardana
- Komisaris Independen : Kristina Lestariningsih

Apresiasi

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh insan Askrindo Syariah atas dedikasi, integritas, dan kerja keras dalam menjaga kinerja serta keberlangsungan usaha Perseroan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun buku. Upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta implementasi prinsip syariah menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra usaha, *regulator*, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan kepada Perseroan. Sinergi yang terjalin dengan baik menjadi faktor kunci dalam memperkuat posisi Askrindo Syariah di industri jasa keuangan syariah.

Akhirnya kata dengan memohon ridha Allah SWT, Dewan Komisaris berharap agar Askrindo Syariah senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah usahanya, serta mampu terus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Changes in The Composition of The Board f Commissioners

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners. Thus, the composition of the Board as of the date of this Annual Report is as follows:

- *President Commissioner : Siti Ma'rifah*
- *Commissioner : Kun Wahyu Wardana*
- *Independet Commissioner : Kristina Lestariningsih*

Appreciation

In closing, the Board of Commissioners extends its highest appreciation to the Board of Directors and all Askrindo Syariah personnel for their dedication, integrity, and hard work in maintaining the Company's performance and business continuity amid various challenges throughout the financial year. The efforts undertaken to strengthen governance, risk management, and the implementation of Sharia principles serve as an important foundation for the Company's sustainable growth.

The Board of Commissioners also expresses gratitude to the shareholders, business partners, regulators, and all stakeholders for their continued trust and support to the Company. The strong synergy that has been established is a key factor in strengthening Askrindo Syariah's position in the Islamic financial services industry.

In conclusion, with prayers for the blessings of Allah SWT, the Board of Commissioners hopes that Askrindo Syariah will always be granted blessings in every step of its business journey and will continue to make meaningful contributions to the national economy and public welfare.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atas Nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,



Siti Ma'rifah
Komisaris Utama
President Commissioner



Kun Wahyu Wardana
Komisaris
Commissioner

Siti Ma'rifah
Komisaris Utama
President Commissioner

Kristina Lestariningsih
Komisaris Independen
Independet Commissioner

Laporan Direksi
The Board of Director's Report



Kokok Alun Akbar
Direktur Utama
President Director

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Askrindo Syariah dapat melalui tahun buku dengan kinerja yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang penuh tantangan.

Sepanjang tahun berjalan, Direksi terus berupaya menjalankan strategi bisnis secara adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbagai inisiatif strategis telah dilakukan, mulai dari penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas portofolio penjaminan, hingga pengembangan layanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

Kondisi Perekonomian

Tahun 2025 ditandai oleh berbagai tantangan perekonomian global yang berasal dari meningkatnya kebijakan perdagangan proteksionis, ketidakpastian tarif perdagangan internasional, penurunan bantuan pembangunan, serta lambatnya reformasi struktural di sejumlah negara. Kondisi tersebut sempat menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan inflasi global secara umum masih relatif terkendali.

Di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20% (*year-on-year*) dan inflasi yang tetap terkendali pada level 2,92% (*year-on-year*). Kinerja sektor eksternal juga tetap solid, didukung oleh surplus perdagangan dan pertumbuhan ekspor sebesar 6,2% (*year-on-year*), serta posisi cadangan devisa yang memadai. Aktivitas manufaktur kembali berada pada fase ekspansif dengan PMI sebesar 51,2, sementara pasar keuangan menunjukkan kinerja positif yang tercermin dari penguatan IHSG hingga mencapai 8.710 pada awal Desember 2025 dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 6,01%.

Meskipun fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak, gas, batubara, dan nikel, masih memberikan tekanan terhadap penerimaan negara, stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menjadi fondasi yang mendukung keberlangsungan pertumbuhan usaha dan memperkuat keyakinan Direksi terhadap prospek bisnis Perseroan. Dengan didukung stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional, Askrindo Syariah terus berupaya mengoptimalkan peluang

Esteemed Shareholders and Stakeholders

Praise and gratitude we extend to Allah SWT for His abundant blessings and grace, which have enabled Askrindo Syariah to navigate the financial year with performance that remains well maintained amid the challenging dynamics of the global and national economy.

Throughout the year, the Board of Directors has consistently endeavored to implement business strategies in an adaptive manner, while upholding the principles of prudence, Good Corporate Governance (GCG), and compliance with Sharia principles. Various strategic initiatives have been undertaken, ranging from strengthening risk management, improving the quality of the guarantee portfolio, to developing digital-based services to enhance operational efficiency and service quality.

Economic Conditions

The year 2025 was marked by various global economic challenges stemming from the rise of protectionist trade policies, uncertainty surrounding international trade tariffs, declining development assistance, and slow structural reforms in several countries. These conditions temporarily weighed on global economic growth prospects, although their impact on overall economic activity and global inflation remained relatively manageable.

Amid these dynamics, the Indonesian economy demonstrated strong resilience, recording economic growth of 5.20% year-on-year, while inflation remained under control at 2.92% year-on-year. External sector performance also remained solid, supported by a trade surplus and export growth of 6.2%, as well as adequate foreign exchange reserves. Manufacturing activity returned to an expansionary phase, with the Purchasing Managers' Index (PMI) reaching 51.2, while the financial market delivered positive performance, reflected in the Jakarta Composite Index (JCI) strengthening to 8,710 in early December 2025 and the 10-year Government Bond yield standing at 6.01%.

Although fluctuations in global commodity prices, particularly oil, gas, coal, and nickel, continued to exert pressure on state revenues, overall national economic stability remained well maintained. These conditions provided a solid foundation for sustaining business growth and reinforced the Board of Directors' confidence in the Company's business prospects. Supported by a stable economic environment and a sound national financial system, Askrindo Syariah continued to optimize growth

pertumbuhan, memperkuat peran dalam mendukung pembiayaan syariah, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

opportunities, strengthen its role in supporting Sharia financing, and deliver sustainable value to all stakeholders.

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2025

Dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2025, Direksi menetapkan tema Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yaitu "Penguatan Fondasi dalam Pengembangan Bisnis". Tema tersebut selaras dengan arah strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025–2029 dan menjadi landasan bagi Perseroan dalam merumuskan berbagai program kerja serta inisiatif strategis. Melalui tema ini, Perseroan berupaya memperkuat aspek fundamental perusahaan guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strategy and Strategic Policies for 2025

In carrying out its business activities throughout 2025, the Board of Directors established the theme of the Company Work Plan and Budget (RKAP) as "Strengthening the Foundation for Business Development." This theme is aligned with the strategic direction outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2025–2029 and serves as the basis for formulating various work programs and strategic initiatives. Through this theme, the Company seeks to strengthen its fundamental capabilities in order to foster healthy and sustainable business growth while creating added value for all stakeholders.

Dalam implementasinya, Perseroan terus berupaya menghadirkan kinerja terbaik melalui berbagai langkah strategis yang berfokus pada penguatan fondasi bisnis. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, memperluas peluang pengembangan usaha, serta memperkuat kemampuan Perseroan dalam menghadapi dinamika industri dan perubahan lingkungan bisnis. Direksi meyakini bahwa fondasi yang kuat merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan serta kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang optimal kepada nasabah dan mitra usaha.

In its implementation, the Company continuously strives to deliver its best performance through a range of strategic measures focused on strengthening its business foundation. These efforts are aimed at enhancing the Company's competitiveness, expanding business development opportunities, and reinforcing its ability to respond to industry dynamics and changes in the business environment. The Board of Directors believes that a strong foundation is a key prerequisite for achieving sustainable growth and enabling the Company to provide optimal services to customers and business partners.

Sejalan dengan tema yang ditetapkan, sasaran utama RKAP 2025 adalah mendorong pengembangan bisnis yang didukung oleh penguatan organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI), penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), penguatan manajemen risiko, peningkatan kapabilitas teknologi informasi, serta pengembangan budaya *service excellence*. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memperkuat kapasitas internal sekaligus meningkatkan efektivitas operasional, sehingga mampu mendukung pencapaian target bisnis dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

In line with the established theme, the primary objective of the 2025 RKAP is to drive business development supported by organizational strengthening, the enhancement of Human Capital quality, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the strengthening of risk management, the improvement of information technology capabilities, and the development of a service excellence culture. Through these initiatives, the Company is committed to strengthening its internal capacity while improving operational effectiveness, thereby supporting the achievement of business targets and creating sustainable growth in the future.

Peran Direksi dalam Perumusan dan Proses Implementasi Kebijakan Strategis Perseroan

The Role of The Board of Directors in Formulating and Implementing The Company's Strategic Policies

Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan serta memastikan implementasi kebijakan strategis Perseroan berjalan secara efektif, terarah, dan selaras dengan kepentingan pemegang saham. Dalam proses penyusunan kebijakan strategis, Direksi senantiasa mengakomodasi arahan dan aspirasi pemegang saham, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain

The Board of Directors plays a central role in formulating and ensuring that the implementation of the Company's strategic policies is carried out effectively, in a directed manner, and aligned with the interests of shareholders. In the process of developing strategic policies, the Board of Directors consistently accommodates the directives and aspirations of shareholders, while remaining guided by the provisions of the Company's Articles of Association and

itu, kebijakan strategis yang ditetapkan juga diselaraskan dengan arah kebijakan strategis induk usaha dan *holding*, guna menciptakan sinergi yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.

Dalam merumuskan strategi, Direksi mempertimbangkan secara komprehensif kondisi makroekonomi, perkembangan industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank, serta industri penjaminan syariah. Pendekatan analitis dilakukan melalui penggunaan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi posisi dan potensi Perseroan, serta pemanfaatan *Business Model Canvas* sebagai alat manajemen dalam memetakan model bisnis secara menyeluruh dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan serta peluang yang ada.

Dalam tahap implementasi, Direksi memastikan bahwa setiap kebijakan strategis dijalankan secara konsisten melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi secara berkala. Hasil dari proses *monitoring* tersebut menjadi dasar dalam melakukan tindakan korektif secara tepat waktu, guna menjaga efektivitas pelaksanaan strategi serta memastikan pencapaian target kinerja Perseroan. Dengan pendekatan yang disiplin, terukur, dan berkelanjutan, Direksi berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan usaha serta meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

applicable laws and regulations. In addition, the adopted strategic policies are aligned with the strategic direction of the parent company and holding group to create optimal synergy in supporting the achievement of shared objectives.

In formulating strategies, the Board of Directors comprehensively considers macroeconomic conditions, developments in the Islamic banking industry, non-bank financial institutions, and the Islamic guarantee industry. The analytical approach is conducted using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) method to identify the Company's position and potential, as well as the Business Model Canvas as a management tool to map the business model in a structured and comprehensive manner. This is intended to ensure that the policies adopted are adaptive, relevant, and capable of addressing existing challenges and opportunities.

In the implementation phase, the Board of Directors ensures that each strategic policy is executed consistently through regular monitoring and evaluation mechanisms. The results of these monitoring activities serve as the basis for timely corrective actions, in order to maintain the effectiveness of strategy execution and ensure the achievement of the Company's performance targets. With a disciplined, measurable, and sustainable approach, the Board of Directors is committed to maintaining business continuity and enhancing value for all stakeholders.

Pencapaian Kinerja dan Target Tahun 2025

Selama tahun 2025, Perseroan berhasil mencatat laba bersih periode sebesar Rp163,18 miliar atau mencapai 132,25% terhadap RKAP YTD Desember 2025 sebesar Rp123,39 miliar, serta meningkat sebesar 19,29% dibandingkan realisasi laba bersih YTD Desember 2024 sebesar Rp136,80 miliar. Capaian ini mencerminkan kinerja operasional yang solid dan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan Perseroan sepanjang tahun berjalan.

Pencapaian tersebut terutama ditopang oleh kinerja produksi yang didominasi oleh segmen produktif sebesar Rp780,87 miliar, diikuti oleh segmen konsumtif sebesar Rp46,03 miliar, serta segmen *suretyship* sebesar Rp7,16 miliar. Komposisi portofolio ini menunjukkan fokus Perseroan pada penguatan bisnis di segmen produktif yang memberikan kontribusi utama terhadap pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Secara keseluruhan, kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui optimalisasi portofolio, pengelolaan risiko yang *prudent*, serta peningkatan kualitas layanan. Direksi meyakini bahwa capaian ini menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan kinerja Perseroan di periode mendatang.

Performance Achievements and 2025 Targets

During 2025, the Company recorded a net profit of Rp163.18 billion, achieving 132.25% of the Year-to-Date (YTD) December 2025 RKAP target of Rp123.39 billion, and increasing by 19.29% compared to the YTD December 2024 net profit realization of Rp136.80 billion. This achievement reflects solid operational performance and the effectiveness of the business strategies implemented by the Company throughout the year.

This performance was primarily supported by production activities dominated by the productive segment, which contributed Rp780.87 billion, followed by the consumer segment at Rp46.03 billion, and the suretyship segment at Rp7.16 billion. This portfolio composition demonstrates the Company's focus on strengthening its productive business segment, which serves as the main contributor to revenue growth and overall profitability.

Overall, these results reflect the Company's success in maintaining sustainable business growth through portfolio optimization, prudent risk management, and continuous improvement in service quality. The Board of Directors believes that this achievement provides a strong foundation to support the Company's future performance growth.

Tantangan yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari perkembangan regulasi dan dinamika persaingan industri penjaminan. Perubahan lingkungan usaha yang semakin kompleks menuntut Perseroan untuk terus beradaptasi agar tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis, kualitas layanan, serta keberlanjutan kinerja perusahaan di tengah berbagai perubahan yang terjadi.

Salah satu tantangan utama berasal dari implementasi POJK Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur berbagai aspek kegiatan usaha penjaminan. Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan *cash collateral* sebesar 25% untuk produk penjaminan *non-cash financing*, seperti *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi, berpotensi memengaruhi daya saing industri penjaminan karena ketentuan serupa tidak diterapkan pada industri asuransi. Selain itu, pembatasan jangka waktu penjaminan maksimal lima tahun juga menjadi tantangan bagi produk-produk dengan tenor yang lebih panjang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain melalui penerbitan sertifikat penjaminan secara bertahap dan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan tingkat risiko debitur atau terjamin.

Selain tantangan regulasi, Perseroan juga menghadapi persaingan tarif yang semakin ketat di industri penjaminan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur batasan tarif berpotensi mendorong praktik persaingan yang kurang sehat dan dapat memengaruhi kecukupan imbal jasa penjaminan dalam mengantisipasi risiko klaim. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan menerapkan *risk-based pricing*, sehingga setiap penetapan tarif dilakukan berdasarkan profil risiko yang terukur. Strategi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara daya saing perusahaan, kualitas portofolio, serta keberlanjutan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

Prospek Usaha

Dalam jangka pendek, Perseroan menargetkan pertumbuhan finansial yang solid melalui peningkatan aset dan ekuitas secara organik dengan pola *double digit*. Aset ditargetkan tumbuh sebesar 13% menjadi Rp3,79 triliun, sementara ekuitas ditargetkan meningkat sebesar 14,44% menjadi Rp1,296 triliun. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Perseroan menargetkan pertumbuhan produksi Imbal Jasa Kafalah (IJK) bruto sebesar 12,96% menjadi Rp903,7 miliar, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan laba sebesar 7,44% atau mencapai sekitar Rp151,6 miliar.

Challenges Faced

Throughout 2025, the Company faced a number of challenges arising from regulatory developments and the evolving competitive landscape of the guarantee industry. The increasingly complex business environment required the Company to continuously adapt in order to maintain business growth, service quality, and sustainable corporate performance amid ongoing changes.

One of the key challenges stemmed from the implementation of OJK Regulation (POJK) No. 11 of 2025, which governs various aspects of guarantee business activities. The requirement to provide cash collateral amounting to 25% for non-cash financing guarantee products, such as Surety Bonds and Counter Bank Guarantees, has the potential to affect the competitiveness of the guarantee industry, as similar requirements are not imposed on the insurance industry. In addition, the limitation on guarantee periods to a maximum of five years presents challenges for products with longer tenors. To address these issues, the Company implemented various mitigation measures, including the phased issuance of guarantee certificates and tariff adjustments based on developments in the risk profile of debtors or guaranteed parties.

In addition to regulatory challenges, the Company also faced increasingly intense price competition within the guarantee industry. The absence of specific regulations governing tariff limits may encourage unhealthy competitive practices and affect the adequacy of guarantee service fees in anticipating claim risks. In responding to these conditions, the Company remained committed to the prudential principle by implementing a risk-based pricing approach, ensuring that all tariff determinations are based on measurable risk profiles. This strategy is expected to maintain a balance between the Company's competitiveness, portfolio quality, and the sustainability of its long-term performance.

Business Prospect

In the short term, the Company targets solid financial growth through an organic increase in assets and equity at a double-digit rate. Assets are projected to grow by 13% to Rp3.79 trillion, while equity is targeted to increase by 14.44% to Rp1.296 trillion. To support the achievement of these targets, the Company aims to grow Gross Guarantee Fee (Imbal Jasa Kafalah/IJK) production by 12.96% to Rp903.7 billion, which is expected to drive profit growth of 7.44%, reaching approximately Rp151.6 billion.

Pencapaian target finansial jangka pendek tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis yang lebih luas. Dengan struktur keuangan yang semakin sehat, JPAS diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekspansi pasar secara berkelanjutan serta memperkuat daya saing melalui optimalisasi transformasi digital sebagai *enabler* utama dalam mendukung efisiensi dan pertumbuhan bisnis.

Dalam jangka panjang, Perseroan menargetkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dengan proyeksi CAGR aset sebesar 10,4% hingga mencapai Rp5,5 triliun, serta CAGR ekuitas sebesar 11,8% menjadi Rp1,79 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan IJK bruto dengan CAGR sebesar 11,5% menjadi Rp1,38 triliun, yang diharapkan menghasilkan pertumbuhan laba sekitar 9% atau mencapai Rp216,7 miliar. Dengan profil keuangan tersebut, JPAS diharapkan tumbuh menjadi perusahaan jasa keuangan syariah yang kokoh, bertumpu pada penguatan fondasi bisnis, serta menjadikan transformasi digital dan kapabilitas teknologi informasi sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian visi sebagai perusahaan penjaminan syariah terbesar dan terbaik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Direksi telah menetapkan sasaran utama dalam RKAP 2025 yaitu "Pengembangan Bisnis dengan dukungan penguatan organisasi, Sumber Daya Insani (SDI) unggul, GCG, manajemen risiko, kapabilitas Teknologi Informasi (TI), dan *service excellence*". Sasaran tersebut menjadi arah strategis Perseroan dalam memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus memperkuat fundamental perusahaan di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Perseroan merealisasikan berbagai program kerja yang berfokus pada penguatan pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, serta mampu meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pemutakhiran sistem dan prosedur yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, serta evaluasi yang terintegrasi. Penguatan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperbaiki kualitas *monitoring* kinerja, serta mendukung terciptanya operasional yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

The achievement of these short-term financial targets is expected to strengthen the Company's foundation for broader business development. With an increasingly sound financial structure, JPAS is expected to enhance its capacity for sustainable market expansion and strengthen its competitiveness through the optimization of digital transformation as a key enabler supporting efficiency and business growth.

In the long term, the Company targets more sustainable growth with a projected asset CAGR of 10.4%, reaching Rp5.5 trillion, and an equity CAGR of 11.8%, reaching Rp1.79 trillion. This growth is supported by an increase in Gross IJK with a CAGR of 11.5% to Rp1.38 trillion, which is expected to generate profit growth of around 9%, reaching Rp216.7 billion. With this financial profile, JPAS is expected to evolve into a strong Islamic financial services company, built upon a solid business foundation, with digital transformation and information technology capabilities serving as the primary driving forces in achieving sustainable business growth and supporting its vision of becoming the largest and best Islamic guarantee company.

Implementation of Good Corporate Governanc

The Board of Directors has established the main objective of the 2025 RKAP, namely "Business Development supported by strengthened organization, high-quality Human Capital (HC), Good Corporate Governance (GCG), risk management, Information Technology (IT) capability, and service excellence." This objective serves as the Company's strategic direction in ensuring sustainable business growth while strengthening its fundamental capabilities amid an increasingly competitive industry landscape.

To support the achievement of this objective, the Company implemented various work programs focused on strengthening internal control and enhancing compliance with applicable rules and regulations. These measures are undertaken to ensure that all operational activities are conducted in accordance with good governance principles and are capable of minimizing risks that may affect the Company's performance.

In addition, the Company has also carried out system and procedure enhancements covering integrated planning, control, and evaluation processes. These improvements are expected to increase the effectiveness of decision-making, enhance the quality of performance monitoring, and support more efficient, transparent, and accountable operations.

Perubahan Komposisi Direksi

Sepanjang tahun pelaporan ini, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Dengan demikian, komposisi Direksi Askrindo Syariah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Kokok Alun Akbar
- Direktur Keuangan : Aviantono Yudihariadi
- Direktur Pemasaran : Achmad Rizali

Pada bulan Maret tahun 2026 Bapak Kokok Alun Akbar telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Utama Askrindo Syariah.

Apresiasi

Sebagai penutup, Direksi menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kinerja Perseroan melalui implementasi strategi yang adaptif, pengelolaan risiko yang *prudent*, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan konsisten dengan prinsip syariah. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Perseroan optimistis mampu menjaga pertumbuhan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan di tengah dinamika industri jasa keuangan.

Direksi juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan yang konstruktif, serta kepada seluruh insan Perseroan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan. Tidak lupa, terima kasih disampaikan kepada pemegang saham, Dewan Pengawas, mitra usaha, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan. Dengan memohon ridha Allah SWT, Perseroan berharap dapat terus tumbuh dan berkontribusi bagi perekonomian nasional serta pengembangan industri keuangan syariah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Changes in The Board of Directors Composition

Throughout the reporting year, there were no changes in the composition of the Board of Directors. Accordingly, the composition of Askrindo Syariah's Board of Directors as of 31 December 2025 was as follows:

- *President Director : Kokok Alun Akbar*
- *Director of Finance : Aviantono Yudihariadi*
- *Director of Marketing : Achmad Rizali*

However, in March 2026, Mr. Kokok Alun Akbar resigned from his position as President Director of Askrindo Syariah.

Appreciation

In closing, the Board of Directors reaffirms its commitment to continuously strengthen the Company's performance through the implementation of adaptive strategies, prudent risk management, and consistent application of Good Corporate Governance in alignment with Sharia principles. With the support of all stakeholders, the Company remains optimistic in maintaining healthy business growth, enhancing competitiveness, and delivering sustainable value amidst the dynamics of the financial services industry.

The Board of Directors also extends its appreciation to the Board of Commissioners for their constructive guidance and supervision, as well as to all employees for their dedication and contributions. Gratitude is also conveyed to the shareholders, Supervisory Board, business partners, regulators, and all stakeholders for their continued trust and support. With prayers for the blessings of Allah SWT, the Company hopes to continue growing and contributing to the national economy and the development of the Islamic financial industry.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atas Nama Direksi,
On Behalf of the Board of Directors,



Kokok Alun Akbar
Direktur Utama
President Director



Aviantono Yudihariadi
Direktur Keuangan
Director of Finance

Kokok Alun Akbar
Direktur Utama
President Director

Achmad Rizali
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

03



Profil Perusahaan

Company Profile



Informasi Umum Perusahaan

General Information of the Company

Nama Perusahaan *Company Name*	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Jenis/Badan Hukum Perusahaan *Type/Company Legal Entity*	Perusahaan Tertutup *Limited Liability Company*
Bidang Usaha *Line of Business*	Penjaminan Pembiayaan Berbasis Syariah *Sharia-based Financing Guarantee*
Domisili *Domicile*	Jakarta
Tanggal Pendirian *Date of Establishment*	29 November 2012 *November 29, 2012*
Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	Akta Nomor 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-61610.AH.01.01 tanggal 3 Desember 2012 *Deed Number 45 on November 29, 2012 of Hadijah, S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter Number AHU-61610.AH.01.01 on December 3, 2012*
Modal Dasar *Authorized Capital*	400.000 lembar saham atau Rp400.000.000.000 *400,000 shares or Rp400,000,000,000*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *Issued and Paid-up Capital*	400.000 lembar saham atau Rp400.000.000.000 *400,000 shares or Rp400,000,000,000*
Kepemilikan Saham *Share Ownership*	PT Asuransi Kredit Indonesia: 99,99% Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA): 0,01%
Alamat Kantor Pusat *Head Office Address*	Menara BPJamsostek (Menara Utara) Lantai 19 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12710 Tel.: +62 21 508 85222 Situs Web/website: www.askrindosyariah.co.id e-mail: sekper@askrindosyariah.co.id
Hubungan Investor *Investor Relations*	Nirwan Tri Nugroho (081326014441)
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*	Catur Heru Putranto (081111837905)

Riwayat Singkat Perusahaan
Company at a Glance

Didirikan pada akhir tahun 29 November 2012 atau 15 Muharram 1434 Hijriah, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Askrindo Syariah" atau "Perseroan") merupakan perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia dengan pemegang saham mayoritas Perseroan yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia ("PT Askrindo"). Pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN, PT Askrindo bergabung dengan *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, *Indonesia Financial Group* (IFG).

Established by the end of November 29, 2012 or 15 Muharram 1434 Hijri, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Askrindo Syariah" or "the Company") is the first sharia guarantee company in Indonesia with PT Asuransi Kredit Indonesia ("PT Askrindo") as the majority shareholder of the Company. On March 31, 2020, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, PT Askrindo joined the State-Owned Insurance and Guarantee Holding Company, Indonesia Financial Group (IFG).

Sejalan dengan pertumbuhan industri pembiayaan, PT Askrindo melihat peluang untuk membentuk lembaga penjaminan secara khusus yang menjamin pembiayaan berbasis syariah. Hal tersebutlah yang menjadi awal pembentukan Askrindo Syariah.

In line with the financing business growth, PT Askrindo saw an opportunity to establish a sharia-based financing guarantee institution. This was the starting point of the establishment of Askrindo Syariah.

Lebih lanjut, melalui Askrindo Syariah, PT Askrindo dapat merealisasikan rencana jangka panjangnya untuk mengoptimalkan penggunaan modal dan meningkatkan kontribusinya di sektor industri penjaminan pembiayaan nasional, terlebih dengan pesatnya pertumbuhan industri pembiayaan syariah baik yang berbentuk Lembaga Keuangan Bank Syariah (LKBS) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah (LKBBS).

Then, through Askrindo Syariah, PT Askrindo was able to realize it long-term plan to optimize the use of capital and increase its contribution in the national financing guarantee industry sector, given the rapid growth of the Islamic finance industry in the form of Sharia Bank Financial Institution (LKBS) or Sharia on-Bank Financial Institution (LKBBS).

Pengembangan usaha Askrindo Syariah senantiasa berorientasi kepada pengembangan jejaring usaha PT Askrindo secara keseluruhan, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional. Askrindo Syariah telah berkembang menjadi salah satu lembaga penjaminan syariah terbesar di Indonesia dengan jaringan mencapai 41 *outlet* hingga akhir tahun 2025 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Business development of Askrindo Syariah is oriented to the development of PT Askrindo whole business network, both operational and non-operational. Askrindo Syariah has been growing to become one of the biggest sharia financing guarantee institution with 41 outlets until the end of 2025 that are spread across Indonesia.

Informasi Perubahan Nama Perusahaan
Information on Company Name Changes

Pada 14 Desember 2012, Perseroan yang semula didirikan dengan nama PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah melakukan perubahan nama menjadi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Perubahan nama tersebut sudah tertuang dalam Akta Nomor 27 tanggal 17 Desember 2012.

On December 14, 2012, the Company, which was established under the name of PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah, changed its name into PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. The name change was stated in Deed Number 27 dated December 17, 2012.

Wilayah Operasional

Operational Areas







Kantor Cabang
Branch office

1	Aceh	10	Bandung
2	Medan	11	Semarang
3	Padang	12	Yogyakarta
4	Pekanbaru	13	Surabaya
5	Palembang	14	Mataram
6	Tangerang	15	Balikpapan
7	Jakarta 1	16	Makassar
8	Jakarta 2		
9	Bekasi		

Kantor Perwakilan Pemasaran (KPPM)
Marketing Representative Office

1	Meulaboh	10	Jakarta Selatan 2	19	Malang
2	Lhokseumawe	11	Bogor	20	Jember
3	Padang Sidempuan	12	Tasikmalaya	21	Denpasar
4	Batam	13	Cirebon	22	Pontianak
5	Bengkulu	14	Purwokerto	23	Banjarmasin
6	Jambi	15	Tegal	24	Palu
7	Bandar Lampung	16	Surakarta	25	Manado
8	Serang	17	Pati		
9	Jakarta Selatan 1	18	Kediri		

Wilayah Kerja PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Operating Area of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kantor Cabang
Branch Office

No.	Kantor Cabang *Branch Office*	Alamat *Address*
1	KC JAKARTA 1	Menara BP Jamsostek (Menara Utara), Lt.19 Jl.Jend. Gatot Subroto No.38 Kav.71-73, Jakarta Selatan
2	KC JAKARTA 2	Jl. Tebet Raya No. 9D, Kel. Tebet Barat, Jakarta Selatan 12870
3	KC BANDUNG	Jl. Karapitan No. 87 Kel. Burangrang, Bandung, Jawa Barat 40261
4	KC SURABAYA	Komplek Ruko Mega Galaxy Blok 16C - 2, Jl. Raya Ir. Soekarno Hatta (MERR), Jawa Timur 60116
5	KC MEDAN	Jl. Sei Belutu No.93, Padang Bulan Selayang I, Sumatera Utara, 20154
6	KC SEMARANG	Komplek Rukan Pemuda Mas (DP) Blok A Kav. B1, Jl. Pemuda No. 150, Jawa Tengah, 50132
7	KC PALEMBANG	Jl. Basuki Rahmat No. 1607B, Palembang, Sumatera Selatan, 30136
8	KC MAKASSAR	Jl. Onta Lama No 105 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90135
9	KC ACEH	Kompleks Perkantoran Aceh Square, Jl. Teuku Imeum, Banda Aceh 23248
10	KC TANGERANG	Ruko BSD Sektor 7, Blok RK No. 10, Jl. Pahlawan Seribu, Serpong Tangerang, Banten 15310
11	KC MATARAM	Jl. Sriwijaya No. 318 D, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83126
12	KC BEKASI	Ruko Bekasi Mas Blok C 14, Jl. Ahmad Yani, Jawa Barat 17141
13	KC PADANG	Gedung Rangkiang Komplek Perkantoran Ventura Kav. 4, Jl. Khatib Sulaiman No. 9 Lolong Belanti, Sumatera Barat 25173
14	KC PEKANBARU	Ruko Mutiara Asri Garden, Jl. Arifin Ahmad No. 12 Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru Riau
15	KC YOGYAKARTA	Ruko B, Jl. Kebon Raya 1 RT 017 RW 006, Kota Gede, Yogyakarta 55171
16	KC BALIKPAPAN	Jl. Little China (Komplek Ruko Sentra Eropa Balikpapan Baru) Blok AB3 Nomor 11 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Kantor Perwakilan Pemasaran
Marketing Representative Office

No.	Kantor Perwakilan Pemasaran (KPPM) *Marketing Representative Office (KPPM)*	Alamat *Address*
1	Kantor Perwakilan Pemasaran Meulaboh *Meulaboh Marketing Representative Office*	Jl. Manek Roo, Tugu Mesjid Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat Meulaboh
2	Kantor Perwakilan Pemasaran Lhokseumawe *Lhokseumawe Marketing Representative Office*	Dusun Kuta Gelumpang Lr II, Gampong Mon Geudong Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
3	Kantor Perwakilan Pemasaran Padang Sidempuan *Padang Sidempuan Marketing Representative Office*	Jl. Serma Lion Kosong No. 6, Kel. Wek II, Kec. Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara 22711
4	Kantor Perwakilan Pemasaran Batam *Batam Marketing Representative Office*	Komp. Graha Kadin Blok F, No. 1, Jl.Engku Putri Batam Centre, Batam - 29453
5	Kantor Perwakilan Pemasaran Bengkulu *Bengkulu Marketing Representative Office*	Jl. Fatmawati Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu 38222
6	Kantor Perwakilan Pemasaran Jambi *Jambi Marketing Representative Office*	Jl. Arief Rahman Hakim No. 5-6, Simpang IV Sipin Telanaipura, Jambi 3631

No.	Kantor Perwakilan Pemasaran (KPPM) *Marketing Representative Office (KPPM)*	Alamat *Address*
7	Kantor Perwakilan Pemasaran Bandar Lampung *Bandar Lampung Marketing Representative Office*	Jl. M . Yamin No. 32 GH, Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung 35127
8	Kantor Perwakilan Pemasaran Serang *Serang Marketing Representative Office*	Jl. Jendral Ahmad Yani No.50, Cipare, Kec. Serang Kota Serang, Banten 42118
9	Kantor Perwakilan Pemasaran Jakarta Selatan 1 *South Jakarta 1 Marketing Representative Office*	Komplek Grand Wijaya, Jl. Wijaya II RT 6 RW 1 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
10	Kantor Perwakilan Pemasaran Jakarta Selatan 2 *South Jakarta 2 Marketing Representative Office*	Komplek Grand Wijaya, Jl. Wijaya II RT 6 RW 1 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
11	Kantor Perwakilan Pemasaran Bogor *Bogor Marketing Representative Office*	Ruko Warung Jambu Jl. Pajajaran No. 28 I RT 01 RW 05 Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor Jawa Barat 16153
12	Kantor Perwakilan Pemasaran Tasikmalaya *Tasikmalaya Marketing Representative Office*	Jl. Yudanegara No.28, Yudanagara, Kec. Cihideung Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46121
13	Kantor Perwakilan Pemasaran Cirebon *Cirebon Marketing Representative Office*	Jl. Siliwangi No. 34 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon 45121
14	Kantor Perwakilan Pemasaran Purwokerto *Purwokerto Marketing Representative Office*	Jl. Dr. Angka No.12, Karangjengkol, Sokanegara Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53115
15	Kantor Perwakilan Pemasaran Tegal *Tegal Marketing Representative Office*	Jl. Gajah Mada No.107 Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52125
16	Kantor Perwakilan Pemasaran Surakarta *Surakarta Marketing Representative Office*	Jl. Bhayangkara No. 22 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta 57141
17	Kantor Perwakilan Pemasaran Pati *Pati Marketing Representative Office*	Jl.Jendral Sudirman No.121 Pati Kidul Kec.Pati, Kab.Pati, Jawa Tengah 59114
18	Kantor Perwakilan Pemasaran Kediri *Kediri Marketing Representative Office*	Jl. Brawijaya No. 25B, Pakelan, Kota Kediri, Jawa Timur 64123
19	Kantor Perwakilan Pemasaran Malang *Malang Marketing Representative Office*	Jl. Majapahit No. 3A, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111
20	Kantor Perwakilan Pemasaran Jember *Jember Marketing Representative Office*	Jl. Ahmad Yani No.18, Kampungtengah Kepatihan Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
21	Kantor Perwakilan Pemasaran Denpasar *Denpasar Marketing Representative Office*	Jl. Raya Puputan No. 9 Panjer, Denpasar Selatan, Bali 80234
22	Kantor Perwakilan Pemasaran Pontianak *Pontianak Marketing Representative Office*	Jl. M. Sohor No. 29 E-F, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121
23	Kantor Perwakilan Pemasaran Banjarmasin *Banjarmasin Marketing Representative Office*	Jl. Achmad Yani km 7 No. 3 RT 05 RW 02 Kec. Kertak Hanyar 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70654
24	Kantor Perwakilan Pemasaran Palu *Palu Marketing Representative Office*	Kompleks Rukan Paluta *Building*, Jl. Professor Mohammad Yamin No. 144, Tatura Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah 94236
25	Kantor Perwakilan Pemasaran Manado *Manado Marketing Representative Office*	Kantor Cabang Askrindo *Insurance* Manado, Jl. 17 Agustus No. 45 Bumi Beringin, Teling Atas, Kec.Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara 95113

Jejak Langkah
Milestones

2012

- Pertama kali didirikan dengan nama PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah pada 29 November 2012
- Perseroan melakukan perubahan nama dari semula PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah menjadi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah pada 14 Desember 2012
- *First established under the name of PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah on November 29, 2012*
- *The Company changed its name from PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah on December 14, 2012*

2013

Perseroan meresmikan pembukaan Kantor Pemasaran di 6 (enam) kota yaitu Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, dan Banjarmasin

The Company launched new Marketing Offices in 6 (six) cities including Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang and Banjarmasin.

2014

Pembukaan Kantor Pemasaran baru di 8 (delapan) kota yaitu Pontianak, Makassar, Denpasar, Malang, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, dan Palembang, sebagai upaya memperluas jaringan usaha Perseroan

The opening ceremony of new Marketing Offices in 8 (eight) cities including Pontianak, Makassar, Denpasar, Malang, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, and Palembang, as an effort to expand the Company's business network

2015

- Pemegang saham melakukan penambahan Modal Disetor
- Pembukaan Kantor Pemasaran di Padang, Sumatera Barat
- *Shareholders chipped additional Paid-in Capital*
- *The Company launched Marketing Office in Padang, West Sumatra*

2016

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menunjuk Perseroan sebagai salah satu perusahaan penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia appointed the Company as one of financing guarantee company for Sharia Micro Loans (KUR)

2017

Selalu berperan di tengah tantangan bisnis

Consistently taking a role in the midst of business challenges

2018

Peresmian alih fungsi Kantor Pemasaran menjadi Kantor Cabang yang berlokasi di 5 (lima) kota, antara lain Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan Makassar

Inaugurated the change of function from Marketing Office to Branch Offices located in 5 (five) cities, those are Medan, Palembang, Semarang, Surabaya and Makassar

2019

- Peresmian Teras Mitra di Kantor Cabang Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Semarang, dan Palembang
- Pefindo (*Credit Rating Industry*) memberikan sertifikat pemeringkatan kepada Perseroan dengan peringkat idA+ (*Single A plus; Stable Outlook*)
- Perseroan memperoleh tambahan Modal Disetor sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) sehingga total Modal Disetor Perseroan menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah)
- *The Company launched Teras Mitra at Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Semarang, and Palembang Branch Offices*
- *Pefindo (Credit Rating Industry) provided rating certificate to the Company with idA + rating (Single A plus; Stable Outlook)*
- *The Company received additional Paid-in Capital of Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion rupiah) resulted the Company's total Paid-up Capital amounted Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah)*

2020

- Perseroan turut berkontribusi pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- Perseroan melakukan transformasi digital dengan penggunaan *Digital Signature* pada penerbitan sertifikat e-polis
- Perseroan menetapkan AKHLAK sebagai nilai-nilai utama (*Core Values*)
- *The Company contributed to the National Economic Recovery Program (PEN)*
- *The Company carried out a digital transformation by using Digital Signature on the issuance of e-policy certificate*
- *The Company determined AKHLAK as its core values (Core Values)*

2021

- Peningkatan laba Perseroan di tahun 2021 mencapai 5x lipat atau tumbuh 520,01% dibandingkan tahun sebelumnya
- Perseroan mendapatkan penghargaan sebagai Penjamin KUR 2021 Terbaik III dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- Perseroan memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
- Perseroan menyelenggarakan kegiatan Literasi Penjaminan Syariah di Kota Mataram, Pekanbaru dan Aceh
- Perseroan menjalin kerja sama strategis dengan beberapa Mitra Bisnis
- *The increase in the Company's profit in 2021 that reached 5 times or grew by 520.01% compared to the previous year*
- *The Company received an award as the Best III KUR Guarantor 2021 from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia*
- *The Company obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certifications*
- *The Company organized Sharia Assurance Literacy activities in the cities of Mataram, Pekanbaru and Aceh*
- *The Company established strategic cooperation with several Business Partners*

2022

- *Launching Mobile Application* Askrindo Syariah (MAASYA)
- *Launching* Buku Penjaminan Pembiayaan Syariah "Penguatan UMKM Melalui Penjaminan Syariah"
- Pefindo (*Credit Rating Industry*) memberikan sertifikat pemeringkatan kepada Perseroan dengan peringkat idA+ (*Single A plus; Stable Outlook*)
- Perseroan menyelenggarakan kegiatan Literasi Penjaminan Syariah di Kota Medan
- Perseroan menjalin kerja sama strategis dengan beberapa Mitra Bisnis
- *Launching of Askrindo Syariah Mobile Application (MAASYA)*
- *Launching of the Sharia Financing Guarantee Book "Strengthening MSMEs through Sharia Guarantee"*
- *Pefindo (Credit Rating Industry) gave a rating certificate to the Company with a rating of idA+ (Single A plus; Stable Outlook)*
- *The Company organizes Sharia Guarantee Literacy activities in Medan City*
- *The Company establishes strategic partnerships with several Business Partners*

2023

- Perseroan menyelenggarakan kegiatan Literasi Dana Bergulir dan Penjaminan Syariah pada acara Jatim Halal Fest
- Peresmian Rumah Sementara Layak Huni (RUSLI) Askrindo Syariah bersama LAZ Al Azhar
- Perseroan mendapatkan Label Taat Zakat dari BAZNAS
- Perseroan menjalin kerja sama strategis dengan beberapa Mitra Bisnis
- *The Company held Literacy of Revolving Funds and Sharia Guarantee activities at Jatim Halal Fest event*
- *Inauguration of Rumah Sementara Layak Huni (RUSLI) Askrindo Syariah with LAZ Al Azhar*
- *The Company received the Taat Zakat Label from BAZNAS*
- *The Company established strategic cooperation with several Business Partners*

2024

- Perseroan dianugerahi penghargaan *The Best Sharia Guarantor Company* 2024 dari Majalah Infobank.
- Perseroan menjalin kerja sama strategis dengan beberapa Mitra Bisnis.
- Perseroan memperoleh penghargaan *Most Active in Capital Market Service* Kategori *Insurance Company* dari Bank Syariah Indonesia.
- Perseroan menyelenggarakan 18 kegiatan Literasi dan 9 kegiatan Inklusi Keuangan Syariah di beberapa Kota di Indonesia.
- Perseroan melakukan perpindahan alamat Kantor Pusat.
- *The Company received The Best Sharia Guarantor Company Award from Infobank.*
- *The Company established strategic collaboration with numerous Business Partners.*
- *The Company received Most Active in Capital Market Service in the Category of Insurance Company Award from Bank Syariah Indonesia.*
- *The Company conducted 18 Literacy activities and 9 Sharia Financial Inclusion in several Cities in Indonesia.*
- *The Company moved its Head Office.*

2025

- Perusahaan dianugerahi penghargaan Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik Anak Perusahaan BUMN dari BUMN *Track.*
- Perusahaan dianugerahi penghargaan *The Excellence Performance Sharia Guarantor Company 2025* dari Majalah Infobank.
- Askrindo Syariah menyelenggarakan 17 kegiatan Literasi dan 12 kegiatan Inklusi Keuangan Syariah di beberapa Kota di Indonesia.
- Perusahaan menyalurkan bantuan sarana pendidikan berupa laptop bagi Sekolah Cendekia BAZNAS Bogor.
- Perusahaan dianugerahi Label Taat Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
- *The company was awarded the Best Organizational Transformation Award for State-Owned Enterprise Subsidiaries by BUMN Track.*
- *The company was awarded the 2025 Excellence in Performance Award for Sharia Guarantor Companies by Infobank Magazine.*
- *Askrindo Syariah organized 17 financial literacy activities and 12 Sharia financial inclusion activities in several cities across Indonesia.*
- *The company distributed educational aid in the form of laptops to the BAZNAS Cendekia School in Bogor.*
- *The company was awarded the Zakat Compliance Label by the National Zakat Agency (Baznas).*

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Utama

Vision, Mission and Core Values

Visi
Vision

Menjadi perusahaan penjamin pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global

Becoming a prominent sharia based financing guarantee company to support national economic development and play a role in the global market

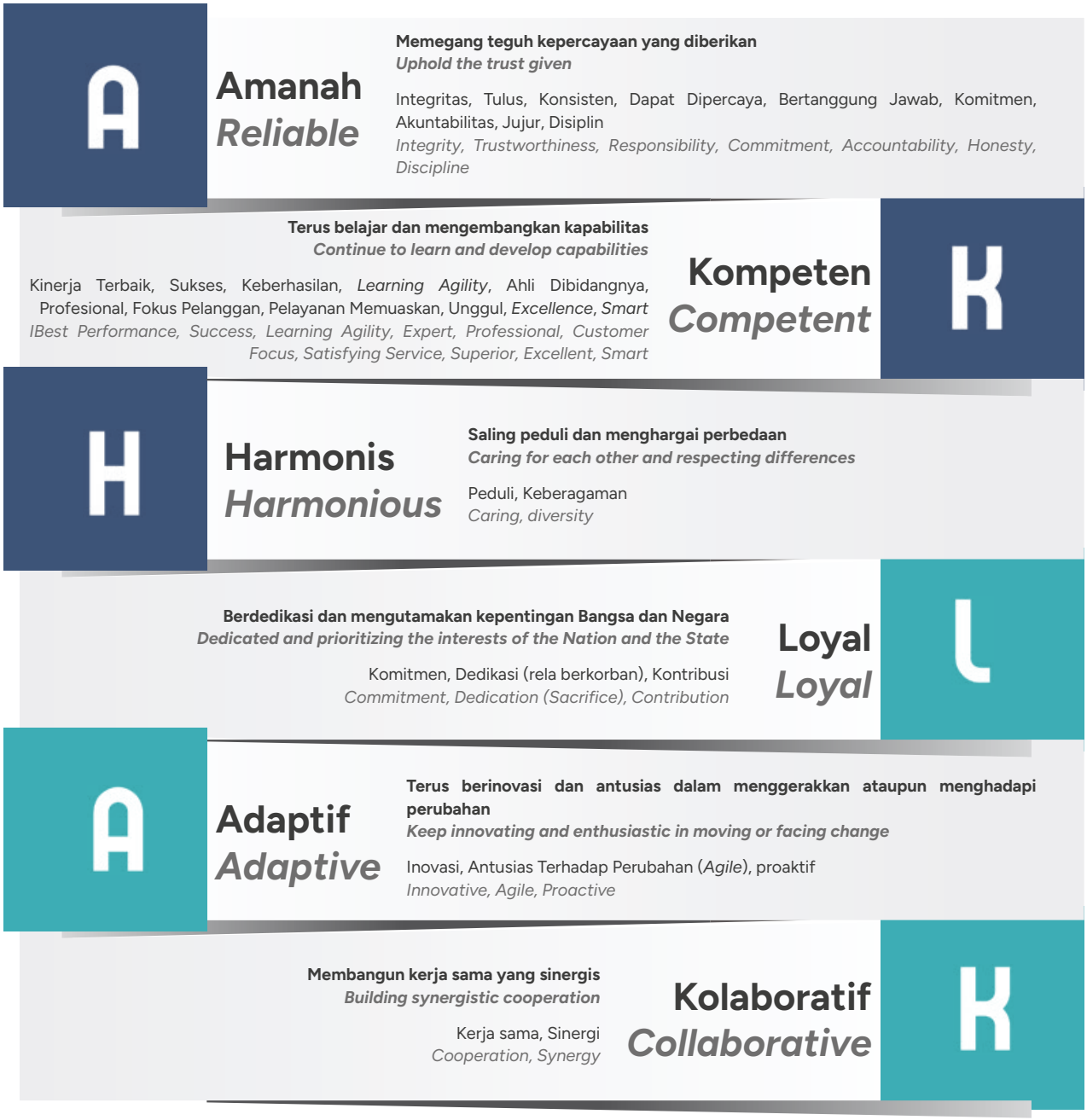
Misi
Mision

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah
2. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah
3. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait
4. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan
5. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas

1. *Contribute to the development of national economy, especially those based on sharia*
2. *Provide easy access to all stakeholders of sharia-based financing business*
3. *Provide financing guarantee services by prioritizing prudential principle as to provide financial protection to all related parties*
4. *Improve services and product innovation continuously to enhance the company values*
5. *Implement good corporate governance that upholds professionalism and integrity principles*



Nilai-Nilai Utama
Core



Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 256/KEP-DIR/XII/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, yang disingkat menjadi AKHLAK.

Visi, Misi dan Nilai-Nilai Utama Perusahaan telah dibahas, dikaji, dan ditinjau kembali oleh Direksi Perseroan yang sedang menjabat dan disetujui bersama oleh Dewan Komisaris.

In accordance with the Board of Directors' Decree of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee Number 256/KEP-DIR/XII/2020 concerning Determination of Core Values of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, namely Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative, which shortened to AKHLAK.

Vision, Mission & Corporate Cultures has been discussed, analyzed, reviewed, and approved by both the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Makna Logo Perusahaan

Definition of The Company Logo

ASKRINDO Syariah

Warna Biru Tua, menggambarkan Askrindo Syariah sebagai Perusahaan Penjaminan yang dapat diandalkan.
Dark Blue Color, Symbolizing Askrindo Syariah as a reliable Guarantee Company.

Warna Hijau Daun, menggambarkan kemakmuran, kemajuan, harapan, dan keberuntungan.
Leaf Green Color, Symbolizing prosperity, progress, hope, and good fortune.

Lambang Alpha-Kappa dengan warna biru dan hijau merupakan identitas Perseroan sebagai anak perusahaan PT Askrindo.
The symbol of Alpha-Kappa with the blue and green colors is an identity of the Company as a subsidiary of PT Askrindo.

"Askrindo Syariah diharapkan menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan nomor satu, kokoh, modern, dan inovatif dalam memberikan layanan kepada Mitra Bisnis di seluruh Indonesia.
Askrindo Syariah is expected to be the number one, sturdy, modern and innovative financing guarantee company in providing services to business partners throughout Indonesia."

Bidang Usaha
Business Activities

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar

Perseroan memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, yaitu turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha di bidang penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan penjaminan yang usaha pokoknya melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan
2. Melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Berjalan Tahun 2025

Semua kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar berjalan di tahun 2025. Selain itu Perseroan ditunjuk sebagai lembaga penjaminan pembiayaan syariah dalam program pemerintah yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai sebuah lembaga penjaminan berbasis syariah, Perseroan memiliki beberapa produk penjaminan, di antaranya:

1. Kafalah Pembiayaan (Produktif dan Konsumtif)
   Salah satu produk jasa penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan selaku Kafil (Penjamin) bagi Makful Anhu (Penerima Pembiayaan) dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari Makful Lahu (Lembaga Keuangan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah), khususnya para Penerima Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis di Lembaga Keuangan Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah tersebut.

2. Kafalah *Suretyship* (*Surety Bond* dan Bank Garansi)
   Produk jasa pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk memberikan jaminan kepada kontraktor atau Bank Penerbit/Bank Garansi/Penerima Jaminan (Makful Lahu) atas *Ta'widh* (Klaim) Bank Garansi yang diajukan oleh *Obligee* melalui Makful Lahu, dikarenakan *Principal* wanprestasi.

Business Activities Based on The Articles of Association

The Company has purposes and objectives as stated in the latest amendments to the Company's Articles of Association, which are participating in implementing and supporting government policies and programs in the field of economy and national development in general, especially conducting business in the field of guarantee under sharia principles and optimizing the use of Company resources to produce high quality and highly competitive services to increase the Company's value by implementing good corporate governance principles.

In order to achieve the above purposes and objectives, the Company runs its main business activities as follows:

1. *As a financing guarantee company with main business of providing financing guarantee with sharia principles; and*
2. *Carrying out other businesses activities that are still relevant with kafalah business (guarantee) based on the applicable requirements.*

Business Activities In 2025

All business activities in accordance with the Articles of Association have run well in 2025. In addition, the Company was appointed as a sharia financing guarantee institution in government programs, namely the Sharia People's Business Credit (KUR) program.

In managing business activities as a sharia-based guarantee institution, the Company has several guarantee products, including:

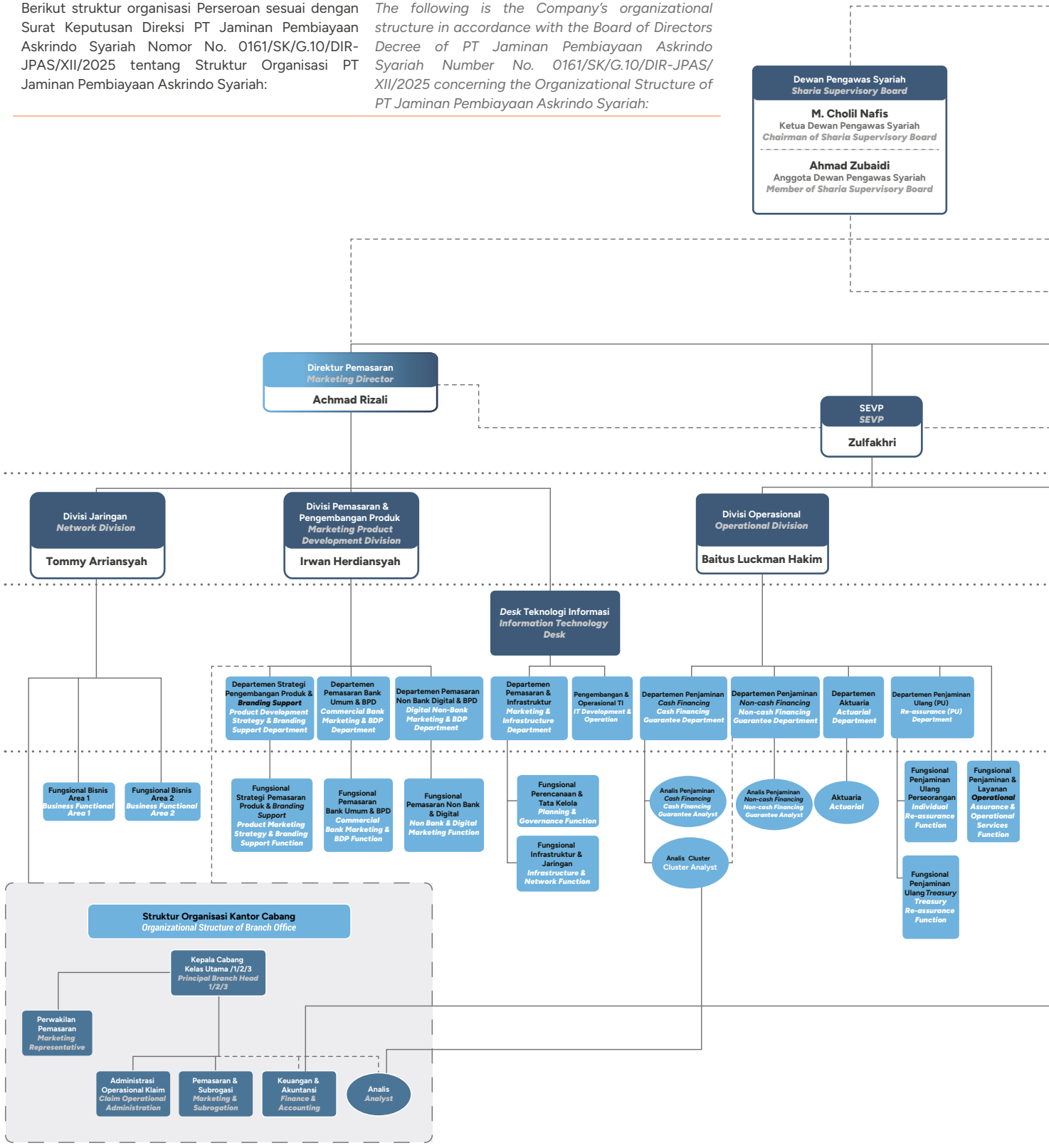
1. *Kafalah Financing (Productive and Consumptive)*
   One of the financing guarantee service products provided by the Company as a Kafil (Guarantor) for Makful Anhu (Recipient of Financing) in an effort to obtain productive and consumptive financing from Makful Lahu (Sharia Banking or Non-Sharia Bank Financial Institutions), especially Financing Recipients who do not meet technical requirements in Sharia Banking or Non-Sharia Bank Financial Institutions.

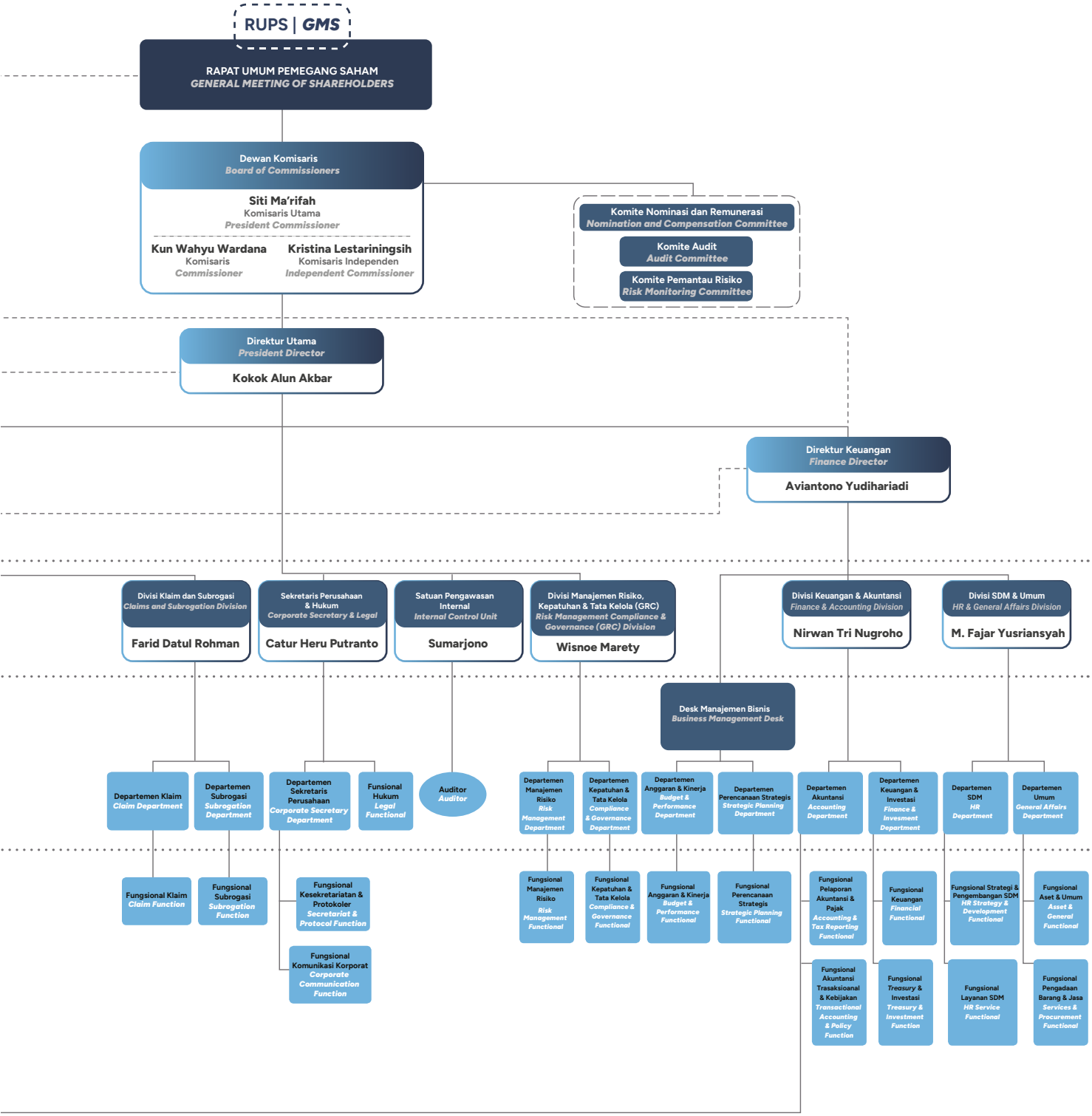
2. *Kafalah Suretyship (Surety Bond and Guarantee Bank)*
   Sharia-based financing service products designed to provide guarantees to the contractor or Issuing Bank/ Bank Guarantee/Guarantee Recipient (Makful Lahu) for the Ta'widh (Claim) Bank Guarantee submitted by the Obligee through Makful Lahu, due to default.

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Berikut struktur organisasi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor No. 0161/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2025 tentang Struktur Organisasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah:

The following is the Company's organizational structure in accordance with the Board of Directors Decree of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Number No. 0161/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2025 concerning the Organizational Structure of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah:




RUPS | GMS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Siti Ma'rifah
Komisaris Utama
President Commissioner
Kun Wahyu Wardana
Komisaris
Commissioner
Kristina Lestariningsih
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Compensation Committee
Komite Audit
Audit Committee
Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
Direktur Utama
President Director
Kokok Alun Akbar
Direktur Keuangan
Finance Director
Aviantono Yudihariadi
Divisi Klaim dan Subrogasi
Claims and Subrogation Division
Farid Datul Rohman
Sekretaris Perusahaan & Hukum
Corporate Secretary & Legal
Catur Heru Putranto
Satuan Pengawasan Internal
Internal Control Unit
Sumarjono
Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan & Tata Kelola (GRC)
Risk Management Compliance & Governance (GRC) Division
Wisnoe Marety
Divisi Keuangan & Akuntansi
Finance & Accounting Division
Nirwan Tri Nugroho
Divisi SDM & Umum
HR & General Affairs Division
M. Fajar Yusriansyah
Desk Manajemen Bisnis
Business Management Desk
Departemen Klaim
Claim Department
Departemen Subrogasi
Subrogation Department
Departemen Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Department
Funsional Hukum
Legal Functional
Auditor
Auditor
Departemen Manajemen Risiko
Risk Management Department
Departemen Kepatuhan & Tata Kelola
Compliance & Governance Department
Departemen Anggaran & Kinerja
Budget & Performance Department
Departemen Perencanaan Strategis
Strategic Planning Department
Departemen Akuntansi
Accounting Department
Departemen Keuangan & Investasi
Finance & Invesment Department
Departemen SDM
HR Department
Departemen Umum
General Affairs Department
Fungsional Klaim
Claim Function
Fungsional Subrogasi
Subrogation Function
Fungsional Kesekretariatan & Protokoler
Secretariat & Protocol Function
Fungsional Komunikasi Korporat
Corporate Communication Function
Fungsional Manajemen Risiko
Risk Management Functional
Fungsional Kepatuhan & Tata Kelola
Compliance & Governance Functional
Fungsional Anggaran & Kinerja
Budget & Performance Functional
Fungsional Perencanaan Strategis
Strategic Planning Functional
Fungsional Pelaporan Akuntansi & Pajak
Accounting & Tax Reporting Functional
Fungsional Keuangan
Financial Functional
Fungsional Strategi & Pengembangan SDM
HR Strategy & Development Functional
Fungsional Aset & Umum
Asset & General Functional
Fungsional Akuntansi Trasaksional & Kebijakan
Transactional Accounting & Policy Function
Fungsional Treasury & Investasi
Treasury & Investment Function
Fungsional Layanan SDM
HR Service Functional
Fungsional Pengadaan Barang & Jasa
Services & Procurement Functional

Komposisi Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners



Kristina Lestariningsih
Komisaris Independen
Independet Commissioner

Siti Ma'rifah
Komisaris Utama
President Commissioner

Kun Wahyu Wardana
Komisaris
Commissioner

Di sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan demikian susunan Dewan Komisaris hingga tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Siti Ma'rifah
Komisaris	: Kun Wahyu Wardana
Komisaris Independen	: Kristina Lestariningsih

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners, therefore the composition of the Board of Commissioners as of the reporting date of this Annual Report & Sustainability Report is as follows:

President Commissioner	*: Siti Ma'rifah*
Commissioner	*: Kun Wahyu Wardana*
Independet Commossioner	*: Kristina Lestariningsih*

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Siti Ma'rifah

Komisaris Utama

President Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPSLB tanggal 16 Juni 2021 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 15 September 2021.

Pendidikan

- Doktoral Hukum dari UNKRIS (2020)
- Pasca Sarjana Hukum dari UNKRIS (2010)
- Pasca Sarjana Ekonomi/Manajemen Pemasaran dari Unitama Jagakarsa (2002)
- Sarjana Hukum dari Universitas Krisna Dwipayana (1999)
- Tarbiyah dari STAISA (1999)

Pengalaman Kerja

- Angota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance (2010-2019)
- Ketua STAISA Jakarta (2005-2015)
- Sekretaris FKB DPRD Provinsi DKI Jakarta (1999-2004)

Rangkap Jabatan

- Komite Syariah PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (sejak 2021)
- Ketua Senat STAISA (sejak 2014)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Financial Services (sejak 2012)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia (sejak 2006)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jiwa Central Asia Raya (sejak 2006)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Panin Dai-chi Life (sejak 2005)
- Dosen STAISA Jakarta (sejak 1993)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi Dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen, 58 years old, lives in South Tangerang.

Legal Basis of Appointment

Appointed for the first time as President Commissioner through the EGMS on June 16, 2021 and obtained an effective decision from the OJK on September 15, 2021.

Education

- *Doctoral of Law from UNKRIS (2020)*
- *Postgraduate Law from UNKRIS (2010)*
- *Postgraduate Degree in Economics/ Marketing Management from Unitama Jagakarsa (2002)*
- *Bachelor of Law from Krisna Dwipayana University (1999)*
- *Tarbiyah from STAISA (1999)*

Work Experience

- *Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020)*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance (2010-2019)*
- *Head of STAISA Jakarta (2005-2015)*
- *Secretary of FKB DPRD DKI Jakarta Province (1999-2004)*

Concurrent Position

- *Sharia Committee of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) (since 2021)*
- *Chairwoman of the STAISA Senate (since 2014)*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of PT Toyota Astra Financial Services (since 2012)*
- *Member of PT Reasuransi Nasional Indonesia Sharia Supervisory Board (since 2006)*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of PT Jiwa Central Asia Raya (since 2006)*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of PT Panin Dai-chi Life (since 2005)*
- *Lecturer at STAISA Jakarta (since 1993)*

Affiliation

She has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.

Kun Wahyu Wardana

Komisaris
Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Depok, Jawa Barat.

Dasar Hukum Pengangkatan
Pertama kali diangkat sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 16 Juni 2021 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 15 September 2021.

Pendidikan
- Pasca Sarjana Hukum dari Monash University (2011)
- Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1997)

Pengalaman Kerja
- Direktur Kepatuhan, SDM dan MR PT Askrindo (2020-2024)

Beliau dipercaya memegang sejumlah posisi strategis di PT Jasa Raharja (2001-2020), di antaranya:
- Urusan Pelaksana Hukum Administrasi Sekretariat Perusahaan
- Ajun *Underwriter* Divisi Asuransi, Kepala Seksi Administrasi Hukum Sekretariat Perusahaan
- Arsiparis Muda Tingkat I Sekretariat Perusahaan
- Arisparis Madya Tingkat II Sekretariat Perusahaan
- Kepala Urusan Administrasi Santunan Divisi Pelayanan
- Kepala Cabang Sulawesi Tenggara
- Kepala Cabang Sulawesi Utara
- Kepala Cabang Riau
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & Penelitian Pengembangan
- Kepala Divisi Manajemen Risiko & Transformasi Perusahaan
- ADP *Law Firm* Jakarta (November 1998-Januari 2001)
- Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta (Desember 1996-Juli 1998)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen, 53 years old, lives in Depok, West Java.

Legal Basis of Appointment
Appointed for the first time as Commissioner through the EGMS on June 16, 2021 and obtained an effective decision from the OJK on September 15, 2021.

Education
- *Postgraduate Degree in Law from Monash University (2011)*
- *Bachelor of Law from Yogyakarta Indonesia Islamic University (1997)*

Work Experience
Compliance, HR and MR Director PT Askrindo (2020-2024)

He is entrusted with holding a number of strategic positions at PT Jasa Raharja (2001-2020), including:
- *Administrative Legal Affairs for the Corporate Secretariat*
- *Adjunct Underwriter for the Insurance Division, Head of Legal Administration Section for the Corporate Secretariat*
- *Junior Archives for Level I Corporate Secretariat*
- *Middle Arsiparis for Level II Corporate Secretaria*
- *Head of Administrative Affairs for Compensation Services Division*
- *Head of Southeast Sulawesi Branch*
- *Head of North Sulawesi Branch*
- *Head of Riau Branch*
- *Head of Risk Management & Development Research Division*
- *Head of Risk Management & Company Transformation Division*
- *ADP Law Firm Jakarta (November 1998-January 2001)*
- *Yogyakarta Law Defenders Institute (December 1996-July 1998)*

Concurrent Position
None.

Affiliation
He has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.

Kristina Lestariningsih

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Komisaris Independen melalui RUPS tanggal 3 Januari 2023 setelah mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 15 Desember 2022.

Pendidikan
- Doktoral Manajemen Stratejik dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2017)
- Pasca Sarjana Finance MBA dari Georgia State University, USA (1998)
- Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1988)

Pengalaman Kerja
- Beliau dipercaya memegang sejumlah posisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2021), di antaranya:
  - *Group Head* Analisis Risiko Kredit
  - *Group Head* Divisi Bisnis Korporasi
  - Wakil Kepala Divisi Bisnis Korporasi
  - Wakil Pimpinan Wilayah Bisnis Kantor Wilayah
  - Kepala Divisi *Transactional Banking*
  - Kepala Divisi *Corporate Development Strategy*
  - Kepala Divisi *Enterprise, Portfolio & Market Risk*
- Direktur Keuangan, SDM dan Logistik PT Bringin Gigantara (2018)

Rangkap Jabatan
Assesor dan pengajar Kredit, Manajemen Risiko dan *Sustainability Finance* di PT Bringin Indah Gemilang dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (sejak 2021)

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan pemegang saham.

Indonesian citizen, 61 years old, lives in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Appointed as Independent Commissioner through the EGMS on January 3, 2023 and obtained an effective decision from the OJK on December 15, 2022.

Education
- *Doctoral in Strategic Management from Padjadjaran University, Bandung (2017)*
- *Master of Finance MBA from Georgia State University, USA (1998)*
- *Bachelor of Agricultural Socioeconomics from the Bogor Agricultural Institute (1988)*

Work Experience
- *He is entrusted with holding a number of positions at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2001-2021), including:*
  - *Group Head of Credit Risk Analysis*
  - *Group Head of Corporate Business Division*
  - *Deputy Head of Corporate Business Division*
  - *Deputy Head of Regional Office Business Area*
  - *Head of Transactional Banking Division*
  - *Head of Corporate Development Strategy Division*
  - *Head of Enterprise, Portfolio & Market Risk Division*
- *Director of Finance, HR and Logistics of PT Bringin Gigantara (2018)*

Concurrent Position
Active Lecturer & Credit Assessor & Risk Mitigation PT Brillian Indah Gemilang and Indonesian Banking Development Institute (since 2021)

Affiliation
She has no affiliated relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.

Komposisi Direksi

Composition of the Board Of Directors



Achmad Rizali
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Kokok Alun Akbar
Direktur Utama
President Director

Aviantono Yudihariadi
Direktur Keuangan
Director of Finance

Di sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi, dengan demikian susunan Direksi hingga tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2025

Direktur Utama	: Kokok Alun Akbar
Direktur Keuangan	: Aviantono Yudihariadi
Direktur Pemasaran	: Achmad Rizali

Pada tanggal 31 Maret 2026 Direktur Utama Askrindo Syariah atas nama Bapak Kokok Alun Akbar mengundurkan diri. Hingga dalam proses penyusunan buku laporan tahunan ini diselesaikan, belum terdapat pengganti beliau.

Throughout 2025, there were changes in the composition of the Board of Directors, therefore the composition of the Board of Directors as of the reporting date of this Annual Report & Sustainability Report is as follows:

As of December 31, 2025

President Director	*: Kokok Alun Akbar*
Finance Director	*: Aviantono Yudihariadi*
Marketing Director	*: Achmad Rizali*

On March 31, 2026, the President Director of Askrindo Syariah, Mr. Kokok Alun Akbar, submitted his resignation. As of the completion of this Annual Report, his successor has not yet been appointed.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Kokok Alun Akbar

Direktur Utama

President Director



Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan

Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPSLB tanggal 3 April 2023 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 10 Oktober 2023.

Pendidikan

Sarjana dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya (1989)

Pengalaman Kerja

Beliau pernah menjabat sebagai:

- Komisaris Utama PT Bahana Artha Ventura (2022-2023)
- Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022)
  - Executive Vice President HCBP Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (2022)
- Beliau dipercaya memegang sejumlah posisi PT Bank BRI Syariah (2018-2021), diantaranya:
  - Plt. Direktur Kepatuhan
  - Plt. Direktur Operasional
  - Plt. Direktur Bisnis Ritel
  - Plt. Direktur Utama
  - Direktur Bisnis Komersial
- Selain itu, beliau dipercaya memegang sejumlah posisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1992-2018), diantaranya:
  - Kepala Divisi Bisnis BUMN 2
  - Kepala Divisi Bisnis Korporasi 2
  - Wakil Kepala Divisi Bisnis BUMN 2
  - Group Head Agribisnis 1, Divisi Agribisnis
  - Pemimpin Cabang

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Indonesian citizen, 59 years old, lives in Jakarta.

Legal Basis of Appointment

Appointed for the first time as President Director through the EGMS on April 3, 2023 and obtained an effective decision from the OJK on October 10, 2023.

Education

Bachelor Degree from Veteran National Development University, Surabaya (1989)

Work Experience

He served as:

- *President Commissioner, PT Bahana Artha Ventura (2022–2023)*
- *Retail Banking Director, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021–2022)*
  - *Executive Vice President, Human Capital Business Partner (HCBP), Head Office, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022)*
- *He also served in various positions at PT Bank BRI Syariah (2018–2021), including:*
  - *Acting Compliance Director*
  - *Acting Operations Director*
  - *Acting Retail Business Director*
  - *Acting President Director*
  - *Commercial Business Director*
- *In addition, he held various positions at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1992–2018), including:*
  - *Head of SOE Business Division 2*
  - *Head of Corporate Business Division 2*
  - *Deputy Head of SOE Business Division 2*
  - *Group Head of Agribusiness 1, Agribusiness Division*
  - *Branch Manager*

Concurrent Position

None

Affiliation

He has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.

Aviantono Yudihariadi

Direktur Keuangan
Finance Director



Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Penunjukan
Pertama kali diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui RUPSLB tanggal 13 Januari 2022 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 11 Mei 2022 dan telah dialihtugaskan menjadi Direktur Keuangan pada tanggal 9 November 2023 berdasarkan Akta Notaris Nomor 55.

Pendidikan
Sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia (1991)

Pengalaman Kerja
- Direktur Pemasaran Perseroan (2022-2023)
- Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Transformasi Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (2017-2021)
- Kepala Divisi Teknologi Informasi, Kepala Divisi Klaim, Kepala Divisi SDM dan Umum PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) (2005-2017)

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Indonesian citizen, 59 years old, lives in Tangerang.

Legal Basis of Appointment
Appointed for the first time as Director of Marketing through the EGMS on January 13, 2022 and obtained an effective decision from the OJK on May 11, 2022 and has been reassigned to Finance Director on November 9, 2023 based on Notary Deed Number 55.

Education
Bachelor of Computer Science from the University of Indonesia (1991)

Work Experience
- *Marketing Director of the Company (2022-2023)*
- *Head of Information Technology Division, Head of Corporate Transformation Division of PT Asuransi Kredit Indonesia (2017-2021)*
- *Head of Information Technology Operations Division, Head of HR and General Affairs Division of PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) (2005-2017)*

Concurrent Position
None

Affiliation
He has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.

Achmad Rizali

Direktur Pemasaran

Marketing Director



Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Penunjukan

Pertama kali diangkat sebagai Direktur Pemasaran melalui RUPSLB tanggal 9 November 2023 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 5 April 2024.

Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Borobudur, Jakarta (1995)
- D3 Perikanan-Teknik Penangkapan Ikan dari Akademi Usaha Perikanan, Jakarta (1989)

Pengalaman Kerja

Beliau dipercaya memegang sejumlah posisi PT Asuransi Kredit Indonesia (2009-2023), di antaranya:

- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah I Jakarta
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah IV Surabaya
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Cikini
- Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah III Semarang
- Pemimpin Cabang dan Koordinator Wilayah Semarang
- Wakil Kepala Cabang (Vice AMD) Semarang
- Kepala Bagian Pertanggunan Cabang Semarang
- Kepala Seksi Cabang Semarang
- Kepala KUP Purwokerto

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Indonesian citizen, 59 years old, lives in Jakarta.

Legal Basis of Appointment

Appointed for the first time as Marketing Director through the EGMS on November 9, 2023 and obtained an effective decision from the OJK on April 5, 2024.

Education

- *Bachelor of Economics Management from Borobudur University, Jakarta (1995)*
- *D3 Fisheries-Fishing Techniques from Fisheries Business Academy, Jakarta (1989)*

Work Experience

He was trusted to hold a number of positions at PT Asuransi Kredit Indonesia (2009-2023), including:

- *Regional Head of Regional Office I Jakarta*
- *Regional Head of Regional Office IV Surabaya*
- *Regional Head of Cikini Regional Office*
- *Regional Head of Regional Office III Semarang*
- *Branch Manager and Regional Coordinator Semarang*
- *Deputy Branch Manager (Vice AMD) Semarang*
- *Semarang Branch Insurance Section Head*
- *Semarang Branch Section Head*
- *Head of KUP Purwokerto*

Concurrent Position

None

Affiliation

He has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and shareholders.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Composition of the Sharia Supervisory Board



M. Cholil Nafis
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Ahmad Zubaidi
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Di sepanjang tahun 2025 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah, dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah hingga tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2025

Ketua Dewan Pengawas Syariah : M. Cholil Nafis
Anggota Dewan Pengawas Syariah : Ahmad Zubaidi

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Sharia Supervisory Board, therefore the composition of the Sharia Supervisory Board as of the reporting date of this Annual Report is as follows:

As of December 31, 2025

Chairman of Sharia Supervisory Board : M. Cholil Nafis
Member of Sharia Supervisory Board : Ahmad Zubaidi

Pengawas Syariah

Profile of the Sharia Supervisory Board

M. Cholil Nafis

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of Sharia Supervisory Board



Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, 51 years old, lives in Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 22 Februari 2023 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 10 Oktober 2023.

Legal Basis of Appointment

Appointed as Chairman of Sharia Supervisory Board a Circular Resolution of the Shareholders dated February 27, 2023 based on the recommendation of the MUI National Sharia Board on February 22, 2023 and obtained an effective decision from the OJK on October 10, 2023.

Pendidikan

- *Doctor of Philosophy in Islamic Finance* dari University of Malaya, Malaysia (2010)
- *Magister* Agama dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2003)
- *Licence (LC)* Syariah dari Al-Imam Muhammad Ibnu Sa'ud Islamic University, Jakarta (2000)
- Sarjana Agama dari Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah, Jakarta (2000)

Education

- *Doctor of Philosophy in Islamic Finance from University of Malaya, Malaysia (2010)*
- *Master of Religion from UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2003)*
- *Licence (LC) Sharia from Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, Jakarta (2000)*
- *Bachelor of Religion from Az-Ziyadah Islamic College, Jakarta (2000)*

Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan

- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian Syariah Pusat (2011-sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (2015-sekarang)
- Dewan Pengawas Syariah PT Chubb Life Insurance Indonesia (2014-sekarang)
- Dosen Pengajar UIN Syarif Hidayatullah (2005-sekarang)
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhwah (2000-sekarang)

Work Experience and Concurrent Position

- *Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Pegadaian Syariah Center (2011-present)*
- *Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (2015-present)*
- *Sharia Supervisory Board of PT Chubb Life Insurance Indonesia (2014-present)*
- *Lecturer at UIN Syarif Hidayatullah (2005-present)*
- *Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) Center for Da'wah and Ukhwah (2000-present)*

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Affiliation

He has no affil iated relationships with other members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and shareholders.

Ahmad Zubaidi

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board



Warga Negara Indonesia, berusia 61 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan
Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 20 Mei 2024 dan mendapatkan keputusan efektif OJK tanggal 05 Februari 2025.

Pendidikan
- Doktor dalam bidang Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Jakarta (2023)
- Pascasarjana dalam bidang Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta (2004)
- Sarjana dalam bidang Syariah atau Peradilan Agama, IAIN Jakarta (1997)

Pengalaman Kerja
- Pengawas Syariah Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) (2018-2020)
- Ketua Badan Takmir Masjid Nurul Ikhwan (2016-2020)
- Pengawas Syariah PT Bhinneka Life Indonesia UUS (2018-2019)
- Ketua Penelitian dan Publikasi Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Assyafiiyah (2012-2016)
- Pembina Lembaga Pendidikan Islam Nurul Ikhwan (2009-2016)
- Kepala Bagian Penerbitan dan Seleksi Naskah Penerbit Pustaka Am-Mawardi Jakarta (2000-2004)
- Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Dharma Niayata Abipraya (1996-1999)

Rangkap Jabatan
- Ketua Dewan Pengawas Syariah *Fintech* Syariah Kapital Boost Indonesia (sejak 2020)
- Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Assyafiiyah Jakarta (sejak 2016)
- Dosen ESQ *Business School* Menara 165 Jakarta (sejak 2014)
- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jakarta (sejak 2007)

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham.

Indonesian citizen, 61 years old, lives in Jakarta.

Legal Basis of Appointment
Appointment as Member of the Sharia Supervisory Board a Circular Resolution of the Shareholders dated June 6, 2024 based on the recommendation of the MUI National Sharia Board on May 20, 2024, and has obtained an effective decision from the OJK since February 05, 2025.

Education
- *Doctorate in Islamic Economics, Jakarta State Islamic University (2023)*
- *Postgraduate degree in Sharia, Jakarta State Islamic University (2004)*
- *Bachelor's degree in Sharia or Religious Justice, IAIN Jakarta (1997)*

Work Experience
- *Sharia Supervisor of Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) (2018-2020)*
- *Chairman of the Takmir Board of Nurul Ikhwan Mosque (2016-2020)*
- *Sharia Supervisor of PT Bhinneka Life Syariah (2018-2019)*
- *Head of Scientific Research and Publication of the Faculty of Islamic Studies, Assyafiiyah University (2012-2016)*
- *Trustee of Nurul Ikhwan Islamic Education Institute (2009-2016)*
- *Head of Publishing and Manuscript Selection Section of Pustaka Am Mawardi Jakarta Publisher (2000-2004)*
- *Head of Education of Dharma Niayata Abipraya Foundation (1996-1999)*

Concurrent Position
- *Chairman of Sharia Supervisory Board Fintech Syariah Kapital Boost Indonesia (since 2020)*
- *Lecturer-Faculty of Islamic Law, Assyafiiyah Jakarta University (since 2016)*
- *ESQ Lecturer of Business School Menara 165 Jakarta (since 2014)*
- *Lecturer-Faculty of Islamic Law, The State Institute for Islamic Studies, Bandung (since 2007)*

Affiliation
He has no affiliated relationships with other members of the Sharia Supervisory Board, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and shareholders.

Profil Pejabat Eksekutif

Profile of The Senior Executive

Zulfakhri

Senior Executive Vice President



Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun, berdomisili di Bekasi.

Pendidikan

- *Master of Business Administration*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2009)
- Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung (2000)

Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan

Saat ini beliau menjabat sebagai *Senior Executive Vice President* Perseroan. Sebelumnya beliau pernah berkarier di PT Askrindo dengan posisi sebagai berikut:

- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (November 2021-Februari 2024)
- Wakil Kepala Divisi *Underwriting & Product Development* (Februari 2019-Oktober 2021)
- Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan (September 2018 - Februari 2019)
- Kepala Departemen Klaim Asuransi Umum (Januari 2017-September 2018)
- Kepala Departemen Legal Non-Litigasi (Juni 2015-Januari 2017)
- Supervisor Legal & Kepatuhan (Januari 2015-Juni 2015)
- Supervisor Pemasaran (Mei 2014-Januari 2015)

Beliau juga pernah meniti karier di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta, sebagai Manajer & Sekretaris Asosiasi pada Oktober 2012 hingga Mei 2014, dan di PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (BUMIDA BUMIPUTERA) pada April 2001 hingga September 2012.

Indonesian citizen, 48 years old, lives in Bekasi.

Education

- *Master of Business Administration, Faculty of Economics and Business, Gajah Mada University, Yogyakarta (2009)*
- *Bachelor of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung (2000)*

Work Experience and Concurrent Position

Currently, he serves as Senior Executive Vice President of the Company. Previously he had a career at PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) with the following positions:

- *Head of Human Resources Division (November 2021-February 2024)*
- *Deputy Head of Underwriting & Product Development Division (February 2019-October 2021)*
- *Head of Corporate Secretary Department (September 2018-February 2019)*
- *Head of General Insurance Claims Department (January 2017-September 2018)*
- *Head of Non-Litigation Legal Department (June 2015-January 2017)*
- *Legal & Compliance Supervisor (January 2015-June 2015)*
- *Marketing Supervisor (May 2014-January 2015*

He has also worked at the Indonesian General Insurance Association (AAUI), Jakarta, as Manager & Secretary of the Association from October 2012 to May 2014, and at PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (BUMIDA BUMIPUTERA) from April 2001 to September 2012.

Komposisi Kepala Divisi
Composition Head of Division



Baitus Luckman Hakim
Kepala Divisi Operasional
Head of Operations Division



Wisnoe Marety
Pjs. Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola
Act. Head of GRC Division



Sumarjono
Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Audit Unit



Tommy Arriansyah
Plt. Kepala Divisi Jaringan
Act. Branch Managemet Division



Catur Heru Putranto
Kepala Sekretaris Perusahaan dan Hukum
Head of Corporate Secretary and Legal Division



M. Fajar Yusriansyah
Kepala Divisi SDM dan Umum
Head of HR and GA Division



Irwan Herdiansyah
Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk
Head of Marketing and Product Development Division



Nirwan Tri Nugroho
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Financial and Accounting Division



Farid Datul Rohman
Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi
Act. Head of Claims and Subrogation Division

Baitus Luckman Hakim

Kepala Divisi Operasional

Head of Operations Division



Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun, berdomisili di Tangerang.

Pendidikan

- *Bachelor of Science in Physics* jurusan Material & Computing *Science* dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (2004)
- *Magister Sains Management* jurusan *Marketing & Finance* dari Universitas Airlangga Surabaya (2016)

Pengalaman Kerja

Sejak 2019 sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Perseroan. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Jakarta 1 (2016-2019) dan Kepala Cabang Surabaya (2013-2016). Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau juga pernah berkarier di PT Bank Syariah Mandiri dengan posisi sebagai berikut:

- *Sub Branch Manager* KCP Buleleng (2012-2013)
- *Micro Banking District Manager* Surabaya (Jan 2012-Mar 2012)
- *Account Officer and Microbanking Head* Denpasar (2010- 2012)
- Beliau juga pernah meniti karier di beberapa perusahaan perbankan dan keuangan ternama, antara lain:
- *Manager of Consumer Corporate Segmen and Branch Channeling Acquisition* PT Bank BII Maybank Tbk. (2008-2009)
- *Assistant Manager* CEPS Jakarta HSBC (2007-2008)
- *District Sales Team Manager Region* 1 (Ciledug, Serpong, Ciputat Tangerang Selatan) Citibank (Citifinancial) (Januari 2007-September 2007)

Indonesian citizen, 44 years old, lives in Tangerang.

Education

- *Bachelor of Science in Physics jurusan Material & Computing Science dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (2004)*
- *Magister Sains Management jurusan Marketing & Finance dari Universitas Airlangga Surabaya (2016)*

Work Experience

Since 2019 until now, he has served as Head of the Company's Operational Division. Previously he served as Head of Jakarta 1 Branch (2016-2019) and Head of Surabaya Branch (2013-2016). Prior to joining the Company, he also had a career at PT Bank Syariah Mandiri with the following positions:

- *Sub Branch Manager of KCP Buleleng (2012-2013)*
- *Micro Banking District Manager Surabaya (Jan 2012-Mar 2012)*
- *Account Officer and Microbanking Head Denpasar (2010- 2012)*
- *He has also pursued a career in several well-known banking and financial companies, including:*
- *Manager of Consumer Corporate Segment and Branch Channeling Acquisition at PT Bank BII Maybank Tbk. (2008-2009)*
- *Assistant Manager CEPS Jakarta at HSBC (2007-2008)*
- *District Sales Team Manager Region 1 (Ciledug, Serpong, Ciputat, South Tangerang) at Citibank (Citifinancial) (January 2007-September 2007)*

Sumarjono

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Head of Internal Audit Unit



Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Jakarta.

Pendidikan

- Magister Jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2015)
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta (1998)

Sertifikasi

- QIA (*Qualified Internal Auditor*) Tahun 2022
- QCRO (*Qualified Chief Risk Officer*) Tahun 2021

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Desember 2019-sekarang)
- Auditor Ahli Madya pada Deputi Akuntan Negara BPKP Pusat, Jakarta (2019)
- Auditor Ahli Muda pada Deputi Akuntan Negara BPKP Pusat, Jakarta (2015-2019)
- Auditor Ahli Muda pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Semarang (2010-2015)
- Auditor Ahli Pertama pada BPKP Perwakilan Jambi, Jambi (2008-2010)
- Auditor Pelaksana Lanjutan di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Jambi (2004-2008)
- Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Jambi (1999-2004)

Indonesian citizen, 49 years old, lives in Jakarta.

Education

- *Master's Degree in Accounting from Diponegoro University (2015)*
- *State College of Accountancy (STAN), Jakarta (1998)*

Certifications

- *QIA (Qualified Internal Auditor) in 2022*
- *QCRO (Qualified Chief Risk Officer) in 2021*

Work Experience

- *Head of Internal Audit Unit PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (December 2019-present)*
- *Senior Expert Auditor at the Central BPKP Deputy Accountant, Jakarta (2019)*
- *Junior Expert Auditor at the Central BPKP Deputy Accountant, Jakarta (2015-2019)*
- *Junior Expert Auditor at Central Java BPKP Representative, Semarang (2010 - 2015)*
- *First Expert Auditor at Jambi BPKP Representative, Jambi (2008 - 2010)*
- *Advanced Executive Auditor at Jambi BPKP Representative, Jambi (2004-2008)*
- *Executing Auditor at BPKP Representative Jambi, Jambi (1999 - 2004)*

Wisnoe Marety

Pjs. Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola
Act. Head of GRC Division



Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun, berdomisili di Jakarta.

Pendidikan
Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian/ Manajemen Agribisnis IPB *University* 2005

Pengalaman Kerja
- Pjs. Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola Askrindo Syariah (2025-Saat ini)
- Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan Askrindo Syariah (2025)
- Kepala Departemen Sekretaris Perusahaan dan Legal Askrindo Syariah (2020-2025)
- Kepala Departemen *Marketing Support* Askrindo Syariah (2019-2020)
- Kepala Departemen Analis CBC Askrindo Syariah (2015-2019)
- Senior Staf Analis Askrindo Syariah (2015)
- *Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri (2012-2015)
- *Account Officer* Bank Agroniaga (2008-2012)

Indonesian citizen, 42 years old, residing in Jakarta.

Education
Bachelor of Agricultural Socio-Economics/ Agribusiness Management, IPB University 2005

Work Experience
- *Act. Head of Risk Management, Compliance, and Corporate Governance Division, Askrindo Syariah (2025–Present)*
- *Head of Corporate Secretary Department, Askrindo Syariah (2025)*
- *Head of Corporate Secretary and Legal Department, Askrindo Syariah (2020–2025)*
- *Head of Marketing Support Department, Askrindo Syariah (2019–2020)*
- *Head of CBC Analyst Department, Askrindo Syariah (2015–2019)*
- *Senior Analyst Staff, Askrindo Syariah (2015)*
- *Relationship Manager, Bank Syariah Mandiri (2012–2015)*
- *Account Officer, Bank Agroniaga (2008–2012)*

Catur Heru Putranto

Kepala Sekretaris Perusahaan dan Hukum
Head of Corporate Secretary and Legal Division



Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, berdomisili di Bekasi.

Pendidikan
Sarjana Manajemen Keuangan Perbankan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Widya, Jakarta (2002)

Pengalaman Kerja
- Kepala Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2019 - Sekarang)
- Menempati beberapa posisi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2013 - 2019))
- *Micro Banking Manager* PT Bank Syariah Mandiri (2011-2013)
- Manager Divisi Kredit BPR Perdana (2008-2011)
- *Cluster Manager* Divisi *Consumer Mass Market* PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2005-2009)
- Supervisor Divisi Nestle PT Arina Multi Karya (2002-2005)

Indonesian citizen, 52 years old, lives in Bekasi.

Education
Bachelor's Degree in Banking Financial Management from Dharma Widya School of Economics, Jakarta (2002)

Work Experience
- *Head of Corporate Secretary and Legal Affairs at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2019–present)*
- *Held various positions at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2013–2019)*
- *Micro Banking Manager of PT Bank Syariah Mandiri (2011-2013)*
- *Credit Division Manager of BPR Perdana (2008-2011)*
- *Cluster Manager of the Consumer Mass Market Division of PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2005-2009)*
- *Nestle Division Supervisor of PT Arina Multi Karya (2002-2005)*

Farid Datul Rohman

Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi

Act. Head of Claims and Subrogation Division



Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun, berdomisili di Kab. Bogor

Indonesian citizen, 47 years old, Domicile in Bogor Regency.

Pendidikan

Sarjana Teknik Pertambangan, Metalurgi Institut Teknologi Bandung (2001)

Education

Bachelor of Engineering in Mining and Metallurgical Engineering, Institut Teknologi Bandung (2001)

Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan

- Plt. Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- Menempati beberapa posisi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- Asisten Manager Klaim dan Kepala Cabang PT Asuransi Takaful Umum (2007-2013)

Work Experience and Concurrent Position

- *Acting Head of Claims and Subrogation Division, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*
- *Held various positions at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*
- *Assistant Claims Manager and Branch Manager, PT Asuransi Takaful Umum (2007–2013)*

Irwan Herdiansyah

Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk
Head of Marketing and Product Development Division



Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun, berdomisili di Jakarta.

Pendidikan
Sarjana Sosial Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (2005)

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2021-sekarang)
- *Branch Manager* PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2017-2021)
- Kepala Departemen Marketing PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2014-2017)
- *Business Alliance Officer* PT Bank Syariah Mandiri (2010-2014)
- *Senior Account Officer* PT Federal Internal Finance Tbk (2007-2010)

Indonesian citizen, 42 years old, lives in Jakarta.

Education
Bachelor of Social Economy from Bogor Agriculture Institute (2005)

Work Experience
- *Head of Marketing and Product Development Division of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2021-present)*
- *Branch Manager of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2017-2021)*
- *Head of Marketing Department of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2014-2017)*
- *Business Alliance Officer of PT Bank Syariah Mandiri (2010-2014)*
- *Senior Account Officer of PT Federal Internal Finance Tbk (2007-2010)*

Nirwan Tri Nugroho

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Financial and Accounting Division



Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun, berdomisili di Jakarta.

Pendidikan
Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro (2008)

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2022-sekarang)
- Kepala Departemen Manajemen Bisnis PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2019-Mei 2022)
- Kepala Unit Anggaran dan Investasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2014-2019)
- Manajer *Budget Representative* PT Bank Negara Indonesia (2009-2014)

Indonesian citizen, 40 years old, lives in Jakarta.

Education
Bachelor of Accounting from Diponegoro University (2008)

Work Experience
- *Head of Finance and Accounting Division of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2022-present)*
- *Head of Business Management Department of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2019-May 2022)*
- *Head of Budget and Investment Unit of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2014-2019)*
- *Manager of Budget Representative of PT Bank Negara Indonesia (2009-2014)*

Tommy Arriansyah

Plt. Kepala Divisi Jaringan

Act. Branch Management Division



Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Bandung.

Pendidikan

Magister Sains Ekonomi Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2012)

Pengalaman Kerja dan Rangkap Jabatan

Saat ini beliau menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Jaringan. Sebelumnya beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

- *Kepala Divisi Jaringan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2025 - sekarang)*
- *Kepala Desk Area PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2024-2025)*
- *Koordinator Wilayah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2023-2024)*
- *Kepala Cabang KCU.Jakarta 01 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2021-2023)*
- *Kepala Cabang KC.Bandung PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2013-2021)*
- *Kepala Cabang Jakarta Jasindo Takaful PT Asuransi Jasa Indonesia (2010-2013)*
- *Menempati beberapa posisi manajerial pada PT Asuransi Jasa Indonesia (2002-2010)*
- *Site Engineer PT Sumarecon (2001 - 2002)*

Indonesian citizen, 50 years old, Domicile in Bandung.

Education

Master of Science in Islamic Financial Economics, Universitas Indonesia (2012)

Work Experience and Concurrent Position

He currently serves as Act. Head of the Network Division. Previously, he held the following positions:

- *Head of Network Division, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2025–Present)*
- *Head of Area Desk, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2024–2025)*
- *Regional Coordinator, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2023–2024)*
- *Branch Manager, Jakarta 01 Main Branch Office, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2021–2023)*
- *Branch Manager, Bandung Branch Office, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2013–2021)*
- *Branch Manager, Jakarta Branch, Jasindo Takaful, PT Asuransi Jasa Indonesia (2010–2013)*
- *Held various managerial positions, PT Asuransi Jasa Indonesia (2002–2010)*
- *Site Engineer, PT Summarecon (2001–2002)*

M. Fajar Yusriansyah

Kepala Divisi SDM dan Umum

Head of HR and GA Division



Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, 50 years old, lives in Jakarta.

Pendidikan

Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Universitas Pasundan, Bandung (1999)

Education

Bachelor of Industrial Engineering and Management, University of Pasundan, Bandung (1999)

Sertifikasi

Certified Risk Management Professional (CRMP)

Certification

Certified Risk Management Professional (CRMP)

Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi SDM dan Umum PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2023-saat ini)
- Kepala Cabang Bandung PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2022-2023)
- Kepala Cabang Jakarta 2 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2019-2022)
- Kepala Cabang Semarang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2016-2019)
- Kepala KPS Banjarmasin PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2016)
- *Unit Head Marketing Support* PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2013-2016)
- *Sales Head* PT Toyota Astra Financial Services (2006-2013)
- *Sales Officer* PT Danamon Indonesia (2004-2022)

Work Experience

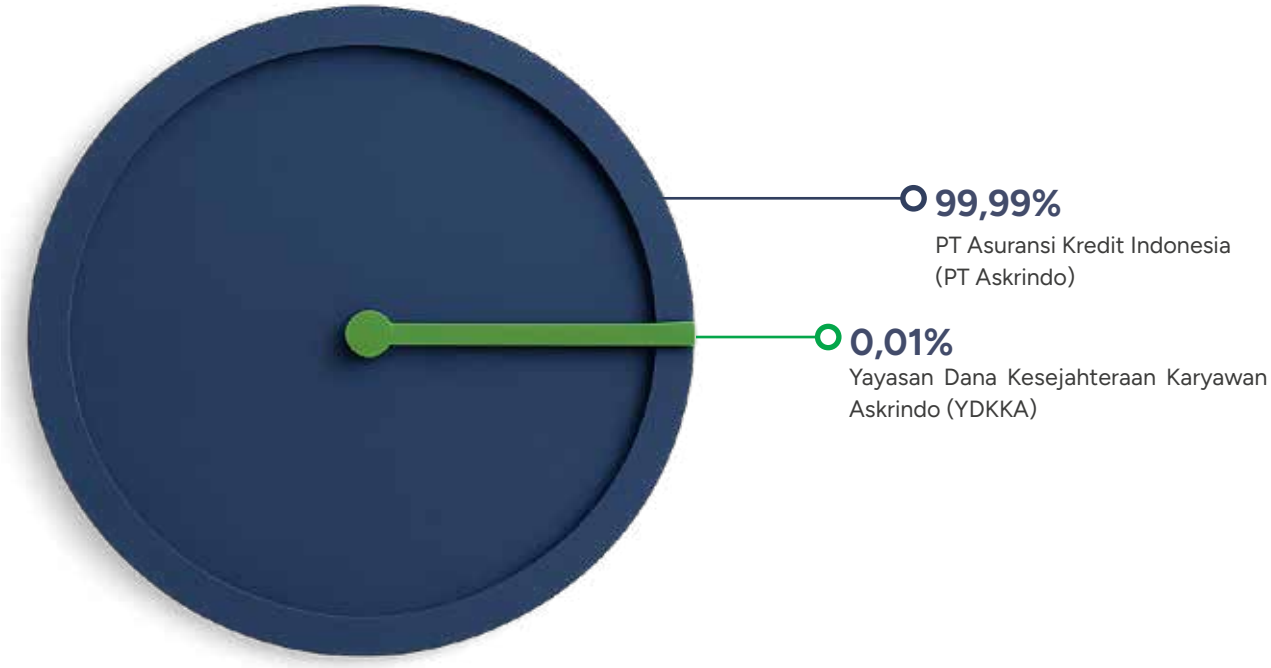
- *Head of HR and General Affairs Division of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2023-present)*
- *Head of Class I Bandung Branch of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2022-2023)*
- *Head of Class I Jakarta 2 Branch of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2019-2022)*
- *Head of Semarang Branch of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2016-2019)*
- *Head of KPS Banjarmasin PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2016)*
- *Unit Head Marketing Support PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2013-2016)*
- *Sales Head of PT Toyota Astra Financial Services (2006-2013)*
- *Sales Officer of PT Danamon Indonesia (2004-2022)*

Informasi Pemegang Saham

Shareholders Information

PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 99,99% dan 0,01% saham dimiliki oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) per 31 Desember 2025.

PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) acts as the Company's major and controlling shareholder with total share ownership of 99.99% and 0.01% of shares is owned by Askrindo Employee Welfare Fund Foundation (Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo-YDKKA) as of December 31, 2025.



Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Modal dasar Perseroan adalah sebanyak Rp400.000.000.000 terbagi atas 400.000 saham, masing masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 100.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000. Hal tersebut telah ditetapkan dihadapan Notaris Hadijah, SH. di Jakarta, yang tertuang dalam Akta Nomor 45 tanggal 29 November 2012. Berikut ini adalah komposisi pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam akta tersebut di atas sesuai pasal 4 ayat 2 adalah seperti yang terinci dalam tabel berikut ini:

The Company's authorized capital is Rp400,000,000,000 which divided into 400,000 shares, with a nominal value of Rp1,000,000 per share. 25% of the authorized capital or a total of 100,000 shares was issued and paid with a total nominal value of Rp100,000,000,000. This has been determined before the Notary Hadijah, S.H., in Jakarta, as stated in Deed Number 45 dated November 29, 2012. The composition of the Company's shareholders as stated in deed above in accordance with Article 4 paragraph 2 is detailed in the following table:

Uraian *Description*	**Jumlah Saham** *Total Shares*	**Persentase** *Percentage*	**Nominal Saham (Dalam Jutaan Rupiah)** *Shares Value (In Million Rupiah)*
PT Asuransi Kredit Indonesia	99.999	99,99%	99.999
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	0,01%	1
Jumlah *Total*	100.00	100%	100.000

Selanjutnya, mengacu pada akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Nomor 34 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, disebutkan bahwa telah terjadi penambahan Modal Disetor sebesar Rp150.000.000.000 pada tahun 2019. Sehingga jumlah Modal Saham yang dimiliki oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp400.000.000.000. Pada tanggal 12 Februari 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0028810. AH.01.11 telah mengesahkan perubahan tersebut. Sehingga struktur modal Perseroan setelah perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:

Furthermore, pursuant to the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) No. 34 dated January 20, 2020, drawn up before Hadijah, S.H., a Notary Public in Jakarta, it is stated that there was an increase in paid-in capital of Rp150,000,000,000 in 2019. Consequently, the total share capital held by PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2019, amounted to Rp400,000,000,000. On February 12, 2020, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, through Decree Number AHU-0028810.AH.01.11, ratified the amendment. Consequently, the Company's capital structure following the amendment is as follows:

Uraian *Description*	**Jumlah Saham** *Total Shares*	**Persentase** *Percentage*	**Nominal Saham (Dalam Jutaan Rupiah)** *Shares Value (In Million Rupiah)*
PT Asuransi Kredit Indonesia	399.999	99,99%	399.999
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	0,01%	1
Jumlah *Total*	400.00	100%	400.000

Daftar Entitas Anak

List of Subsidiaries

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, dan perusahaan ventura bersama.

As of December 31, 2025, the Company did not have subsidiaries, associated companies and joint venture companies.

Kronologis Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Pada Laporan Tahunan 2025 ini, Perseroan tidak mencantumkan informasi mengenai penerbitan saham dan tindakan korporasi atas saham yang dimiliki. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir 2025, Perseroan belum menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik termasuk *private placement* dan/atau pencatatan saham.

In this 2025 Annual Report, the Company does not disclose information regarding shares listing and corporate actions. Due to until the end of 2025, Askrindo Syariah has not issued and traded its shares to the public including private placement and/or listing of shares.

Informasi dalam Situs Perusahaan

Information in the Company's Website

Situs resmi Perseroan yaitu www.askrindosyariah.co.id dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akses *stakeholders* atas informasi serta kinerja Perseroan yang aktual dan terkini.

The Company's official website, namely www. askrindosyariah.co.id, is developed according to prevailing laws and regulations in order to improve transparency and stakeholder access to get actual and updated information as well as the Company's performance.



Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions

Informasi Jasa Berkala Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan Tahun 2025.

Information on Regular Service Provided by Supporting Institutions and Professions in 2025.

Nama dan Alamat Lembaga *Name and Address of Institutions*		**Jasa yang Diberikan** *Services Provided*
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan RSM Indonesia Plaza ASIA, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta, 12190 Telp: (021) 51401340 Fax: (021) 51401350	Jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain jasa audit. *Audit service of the Company's financial statements for 2025 fiscal year. The Public Accounting Firm did not provide other services than the audit service.* Biaya | *Fee* Rp1.150.000.000
Pemeringkat Efek Credit Rating Agency	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Equity Tower Lt. 30 Sudirman Central Business District, Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 50968469 Fax: (021) 50968468	Jasa pemeringkatan Perseroan untuk periode penugasan tahun 2025. *Rating agency for period of 2025.* Biaya | *Fee* Rp125.000.000
Aktuaria Actuary	Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan Sentral Senayan II Lt.16 Unit E.15 Jl. Asia Afrika No.8, Gelora Jakarta Pusat 10270 Telp.: (021) 7210684 Email: kkagd@kkagd.com	Jasa perhitungan PSAK 62 untuk periode penugasan tahun 2025. *SFAS 62 calculation for period of 2024.* Biaya | *Fee* Rp250.000.000
	Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan Disctrict 8, Treasury Tower 6th Floor, Unit N Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, SCBD Jakarta 12190 Tlp.: (021) 50606888 Email: info@padmaaktuaria.com	Jasa perhitungan PSAK 24 untuk periode penugasan tahun 2025. *SFAS 24 calculation for period of 2025.* Biaya | *Fee* Rp27.000.000
Konsultan Hukum Legal Consultant	Rasul & Co Perkantoran Buncit Mas Lt.3 Jl. Kemang Utara IX No.35 Jakarta Selatan 12730	Konsultan hukum untuk periode penugasan Juni Desember 2025 *Legal consultant for period of June-December 2025.* Biaya | *Fee* Rp462.000.000

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

Perseroan tergabung dalam beberapa organisasi dan menjalin kemitraan dari berbagai pihak eksternal guna mewujudkan inisiatif keberlanjutan. Berikut merupakan daftar asosiasi/organisasi eksternal yang Perseroan ikuti:

The Company joined several organizations and build partnerships with external parties in order to realize its sustainable initiatives. Hereby is the list of external associations/organizations that the Company is a part of:

No.	Nama Organisasi Eksternal *External Organization Name*	Sifat Keikutsertaan *Types of Membership*	Lingkup *Scope*
1.	Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (ASIPPINDO)	Anggota *Member*	Nasional *National*



04



Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Supporting Review

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan sebagai aset utama dan mitra strategis dalam mencapai target dan tujuan bisnis Askrindo Syariah. Menyadari pentingnya peranan SDM bagi roda bisnis sehari-hari, Perseroan berkomitmen akan terus mengembangkan dan menyesuaikan sistem pengelolaan SDM yang dimiliki agar senantiasa berjalan selaras dengan dinamika bisnis yang terjadi dan juga disesuaikan dengan fokus pengembangan bisnis Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Perseroan telah menerapkan beberapa inisiatif kebijakan pengelolaan karyawan yang mencakup beberapa aspek, di antaranya pemberian remunerasi yang kompetitif, proteksi asuransi kesehatan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan karyawan, pelaksanaan program dan/atau kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, promosi jabatan, dan lainnya. Perseroan senantiasa memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan karyawan karena meyakini ketersediaan SDM yang andal dan berkompetensi tinggi akan mampu memberikan kontribusi penting terhadap upaya pencapaian visi dan misi Perseroan sebagai lembaga penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

Human Resources (HR) plays a role as the main asset and strategic partner in achieving Askrindo Syariah's business targets and objectives. Realizing the importance of the role of human resources in the daily business, the Company is committed continuing to develop and adjust its HR management system so that it is always in line with the dynamics of the business that occurred and adjusted to the Company's business development focus.

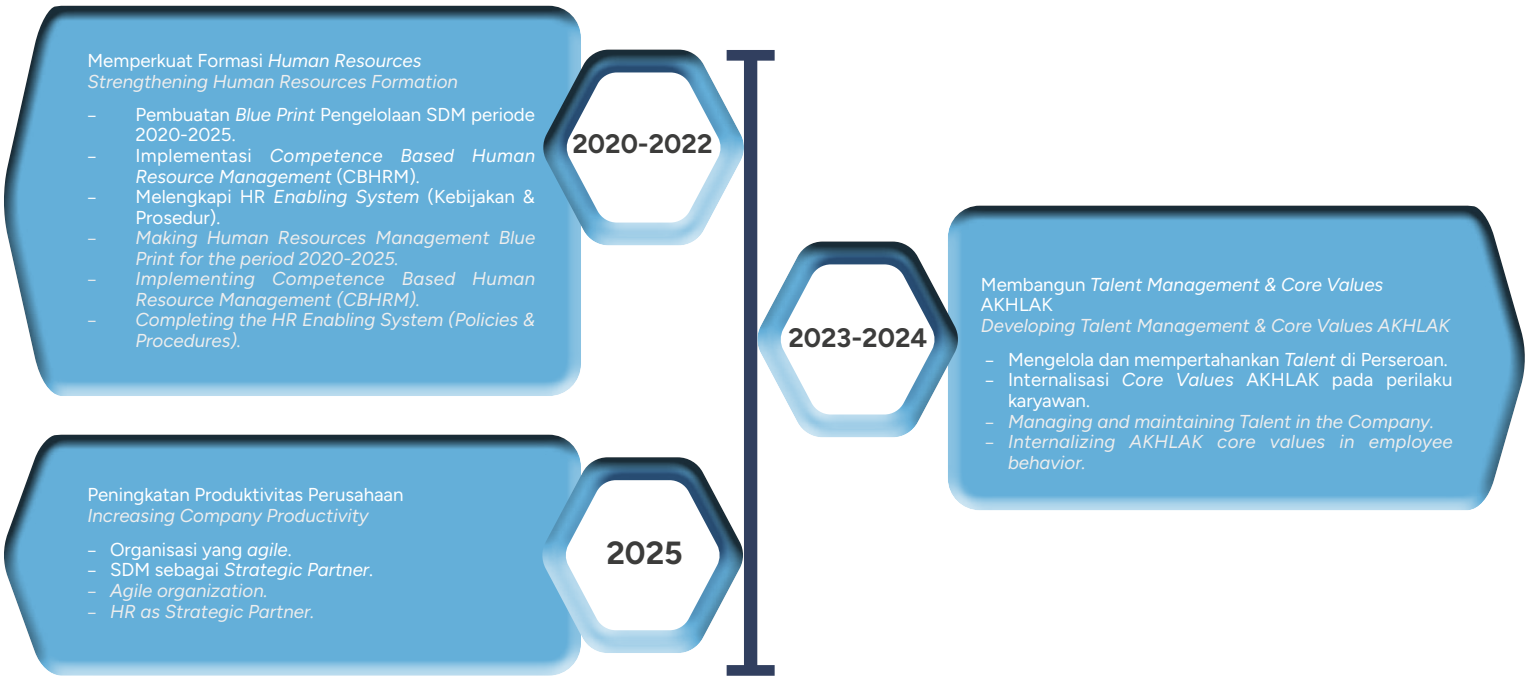
Currently, the Company has implemented several employee management policy initiatives in several aspects, including competitive remuneration, health insurance as employee welfare protection, implementation of training programs and/or activities and employee competency development, promotions, and others. The Company always pays great attention to HR management because it believes that the availability of reliable and highly competent human resources will be able to make an important contribution in achieving the Company's vision and mission as a sharia-based financing guarantee institution.

Roadmap Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Secara umum, rencana pengembangan SDM kedepan adalah menyiapkan *performance oriented* personel sebagai *key driver* pertumbuhan bisnis sesuai dengan visi misi Askrindo Syariah agar pengembangan SDM lebih terarah dan mampu menunjang kebutuhan Askrindo Syariah dalam menghadapi dinamika yang ada. Perseroan telah menyusun *roadmap* pengelolaan SDM sebagai berikut:

Human Resources Management Roadmap

In general, the future plan of HR development is to prepare performance-oriented personnel as key drivers of business growth in accordance with the Askrindo Syariah's vision and mission so that HR development is more focused and able to support Askrindo Syariah's needs in facing the recent business dynamics. The Company has formulated HR management roadmap as follows:

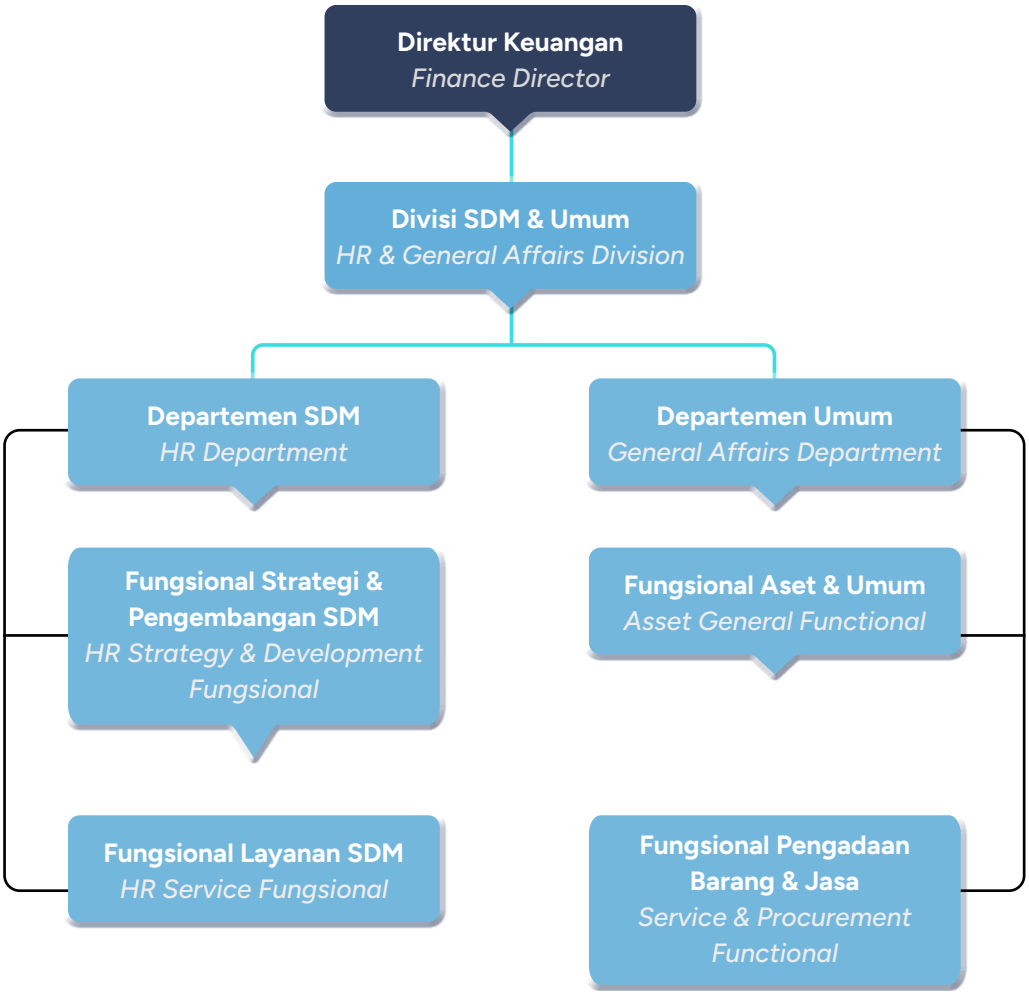


Struktur Pengelola SDM

Departemen SDM adalah Unit Kerja di Askrindo Syariah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan SDM Askrindo Syariah. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Departemen SDM melalui Kepala Divisi SDM dan Umum mempertanggungjawabkan laporan kegiatannya secara langsung kepada Direktur Keuangan, di bawah pengawasan Komite Personalia. Pada bagan berikut ini dapat dilihat struktur organisasi pengelola SDM Perseroan yang masih berlaku per 31 Desember 2025:

HR Management Structure

The HR Department is a Work Unit in Askrindo Syariah that is fully responsible for Askrindo Syariah's HR management. In carrying out its duties and responsibilities, HR Department through Head of Human Resources and General Affairs Division is directly responsible for its activity reports to the Director of Finance, under the supervision of the Personnel Committee. In the following chart, can be seen the organizational structure of the Company's HR management which is still in effect as of December 31, 2025:



Rekrutmen dan Pengembangan Karir

Recruitment and Career Development

Strategi pemenuhan karyawan yang dijalankan oleh Askrindo Syariah menganut prinsip keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan. Pada pelaksanaannya, Perseroan senantiasa mengoptimalkan berbagai sarana atau media yang tersedia untuk mempublikasikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang di buka di Perseroan, misalnya melalui iklan, situs Perseroan, *job fair*, referensi dan media rekrutmen lainnya.

The employee recruitment strategy implemented by Askrindo Syariah adheres to the principles of openness, fairness and equality. In its implementation, the Company always optimizes any available facilities or media to publish information about job recruitments at the Company, for example through advertisements, the Company's website, job fairs, references and other recruitment media.

Tahapan seleksi karyawan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Perseroan merekrut lulusan baru secara selektif dari perguruan tinggi terkemuka yang memiliki indeks prestasi dan potensi yang baik. Setelah rangkaian tahapan seleksi karyawan selesai, maka Perseroan memberikan pelatihan intensif kepada para talenta-talenta terbaik yang sudah didapatkan agar proses adaptasi terhadap tanggung jawab, tugas, dan lingkungan kerja yang baru di Perseroan dapat berjalan lebih cepat.

The employee selection stage is carried out by considering the organizational needs and competencies of each candidate. The Company selectively recruits new graduates from leading universities with good achievement index and potential. After a series of employee selection stages are completed, the Company provides intensive training to the best talents recruited for a faster adaptation process to the new responsibilities, duties and work environment in the Company.

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan kemampuannya.

Every employee has the same opportunity to reach the highest level of position based on their ability.

Sepanjang tahun 2025, Askrindo Syariah telah merekrut sebanyak 3 orang karyawan organik dan 13 orang karyawan non organik dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan formasi SDM yang mampu menjawab tantangan operasional dan mendukung ekspansi bisnis Perseroan ke depan.

Throughout 2025, Askrindo Syariah recruited 3 organic employees and 13 non-organic employees from diverse educational backgrounds and experiences. This step is part of the strategy to strengthen the human resources formation capable of addressing operational challenges and supporting the Company's future business expansion.

Kebijakan pengelolaan SDM Perseroan senantiasa berjalan secara dinamis sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Program pengembangan kompetensi khususnya di sertifikasi keahlian industri penjaminan baik tenaga ahli dan analis berjalan di tahun 2025 dilaksanakan baik secara daring maupun tatap muka, baik yang diselenggarakan secara *in-house* maupun publik. Pelatihan diberikan dengan tujuan membentuk mental dan keahlian serta sebagai pembekalan kepada para karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas.

The Company's HR management policy always runs dynamically so that it can adjust to the dynamics and needs of the organization. Competency development programs, especially in the certification of guarantee industry expertise, both experts and analysts, will run in 2025, both online and face-to-face, both held in house or public. The training is provided to build mental and skills as well as provision for employees to improve their productivity.

Demografi Karyawan

Employee Demographic

Pada tahun 2025, Askrindo Syariah memiliki jumlah SDM sebanyak 171 orang karyawan, turun sebesar 2,28% dibandingkan pada tahun 2024 sebanyak 175 karyawan. Penurunan jumlah pegawai terjadi karena adanya pegawai yang mengundurkan diri serta pensiun.

In 2025, Askrindo Syariah had a total workforce of 171 employees, representing a decrease of 2.28% compared to 175 employees in 2024. The reduction in the number of employees was due to resignations and retirements.

Meski demikian, jumlah SDM pada tahun 2025 telah sejalan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dari sisi kuantitas, dengan mempertimbangkan peningkatan produktivitas setiap pegawai.

Nevertheless, the total workforce in 2025 remains aligned with the Company's operational needs in terms of quantity, taking into account improvements in employee productivity.

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Table of Total Employee by Position

Uraian | *Description*	**2025**	**2024**
Manager	46	43
Supervisor	39	44
Staff	86	88
Jumlah | ***Total***	**171**	**175**

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table of Total Employee by Education Level

Uraian | *Description*	**2025**	**2024**
S2 | *Postgraduate*	29	26
S1 | *Bachelor Degree*	141	148
Diploma	1	1
Jumlah | ***Total***	**171**	**175**

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Table of Total Employee by Age

Uraian | *Description*	**2025**	**2024**
<20-35 tahun *years old*	77	87
36-45 tahun *years old*	64	61
46-56 tahun *years old*	30	27
Jumlah | ***Total***	**171**	**175**

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Table of Total Employee by Employment Status

Uraian | *Description*	**2025**	**2024**
Tetap | *Permanent*	157	156
Kontrak | *Contract*	14	19
Jumlah | ***Total***	**171**	**175**

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender

Table of Total Employee by Gender

Uraian | Description	2025	2024
Laki-laki | *Male*	116	119
Perempuan | *Female*	55	56
Jumlah | *Total*	**171**	**175**

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Lokasi

Table of Total Employee by Location

Lokasi | *Location*	2025	2024
Kantor Cabang | *Branch*		
Kantor Pusat | *Head Office*	94	98
Kantor Cabang Banda Aceh | *Branch of Banda Aceh*	3	3
Kantor Cabang Medan | *Branch of Medan*	3	3
Kantor Cabang Padang | *Branch of Padang*	2	2
Kantor Cabang Pekanbaru | *Branch of Pekanbaru*	3	3
Kantor Cabang Palembang | *Branch of Palembang*	2	2
Kantor Cabang Tangerang | *Branch of Tangerang*	2	3
Kantor Cabang Jakarta 1 | *Branch of Jakarta 1*	5	5
Kantor Cabang Jakarta 2 | *Branch of Jakarta 2*	3	3
Kantor Cabang Bekasi | *Branch of Bekasi*	3	3
Kantor Cabang Bandung | *Branch of Bandung*	4	5
Kantor Cabang Semarang | *Branch of Semarang*	5	4
Kantor Cabang Yogyakarta |*Branch of Yogyakarta*	4	4
Kantor Cabang Surabaya | *Branch of Surabaya*	5	5
Kantor Cabang Mataram | *Branch of Mataram*	3	4
Kantor Cabang Balikpapan | *Branch of Balipapan*	3	3
Kantor Cabang Makassar | *Branch of Makassar*	3	4
Jumlah Pegawai Kantor Cabang | *Total Branch Office Employees*	**53**	**56**

Kantor Perwakilan Pemasaran

Marketing Representative Office

Lokasi | Location	2025	2024
Kantor Pemasaran Meulaboh | *Meulaboh Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Lhokseumawe | *Lhokseumawe Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Padang Sidempuan | *Padang Sidempuan Marketing Office*	0	0
Kantor Pemasaran Batam | *Batam Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Bengkulu | *Bengkulu Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Jambi | *Jambi Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Bandar Lampung | *Bandar Lampung Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Serang | *Serang Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Jakarta Selatan 1 | *South Jakarta 1 Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Jakarta Selatan 2 | *South Jakarta 2 Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Bogor | *Bogor Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Tasikmalaya | *Tasikmalaya Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Cirebon | *Cirebon Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Purwokerto | *Purwokerto Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Tegal | *Tegal Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Solo | *Solo Marketing Office*	1	1

Lokasi | Location	2025	2024
Kantor Pemasaran Pati | *Pati Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Kediri | *Kediri Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Malang | *Malang Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Jember | *Jember Marketing Office*	1	0
Kantor Pemasaran Denpasar | *Denpasar Marketing Office*	1	0
Kantor Pemasaran Pontianak | *Pontianak Marketing Office*	1	0
Kantor Pemasaran Banjarmasin | *Banjarmasin Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Palu | *Palu Marketing Office*	1	1
Kantor Pemasaran Manado | *Manado Marketing Office*	0	1
Jumlah Pegawai Kantor Pemasaran *Total Marketing Office Employees*	**24**	**21**
Jumlah Pegawai Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran *Total Branch Office and Marketing Office Employees*	**171**	**175**

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pemetaan program pengembangan SDM Askrindo Syariah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional bisnis Perseroan dalam beberapa tahun ke depan. Perseroan juga memperkuat program pelatihan dan pengembangan dengan menyusun kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan. Pada prinsipnya, setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang setara untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi individu serta mempertimbangkan relevansinya dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari.

Dengan menyelenggarakan program pelatihan yang digelar secara berkala, Perseroan berharap dapat mempersiapkan insan Perseroan yang tangguh dalam mengatasi berbagai tantangan bisnis, produktif dan memiliki integritas tinggi, serta adaptif terhadap disrupsi yang terjadi sehingga senantiasa mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan aktual di lapangan.

Selama tahun 2025, Askrindo Syariah telah menyelenggarakan beragam program pelatihan, baik yang bersifat pembentukan karakter, penguatan keterampilan teknis, hingga pelatihan spesialisasi untuk mendukung penguasaan bidang tertentu. Pelatihan-pelatihan tersebut diberikan melalui berbagai metode, baik secara daring maupun tatap muka, dan diselenggarakan secara internal maupun bekerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal yang kredibel.

Informasi secara terinci mengenai pelatihan SDM tersaji dalam tabel berikut:

HR Training and Development

The mapping of Askrindo Syariah's HR development program is carried out comprehensively by taking into account the operational needs of the Company's business in the next few years. The Company also strengthens training and development programs by formulating a curriculum to meet HR needs. In principle, each employee has an equal opportunity to improve their competence in accordance with the individual potential development needs as well as consideration of the relevance to daily work duties and responsibilities.

By organizing training programs that are held regularly, the Company expects to prepare the potential candidates in overcoming various business challenges who are productive and have high integrity, and are adaptive to the disruptions occurred so that they are always able to respond to business actual needs and demand.

Throughout 2025, Askrindo Syariah has conducted a diverse range of training programs, including character building, technical skills enhancement, and specialized training to support mastery in specific fields. These trainings were delivered through various methods, both online and faceto-face, and organized internally as well as in collaboration with credible external trainingbinstitutions.

Detailed information regarding HR training is presented in the following table:

Pelatihan Operasional (Aktuaria, Akseptasi, Klaim & Reasuransi)

Operational Training (Actuarial, Acceptance, Claims & Reinsurance)

No.	Pelatihan	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	*Trainings*
1	*29th Indonesia Rendezvous 2025 - Empowering Trust: Connecting the World of Insurance and Reisurance*	15-17 Oktober 2025 *October 15-17, 2025*	Bali / *Offline*	AAUI	1	*29th Indonesia Rendezvous 2025 - Empowering Trust: Connecting the World of Insurance and Reisurance*
2	Analisa *Fraud* di Industri Perbankan dan Penjaminan Pembiayaan	10 Maret 2025 *March 10, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Internal	20	*Analysis of Fraud in the Banking and Financing Guarantee Industry*
3	Analisa Kredit diperbankan	11-12 Agustus 2025 *August 11-12, 2025*	*Online*	IFG Corporate University	1	*Credit Analysis in Banking*
4	*Boothcamp* Aktuaris 2025 Industri Asuransi Umum	13-20 Juni 2025 *June 13-20, 2025*	*Online*	AAUI	1	*Actuarial Bootcamp 2025 for the General Insurance Industry*
5	Dasar-Dasar Reasuransi	17 Juli 2025 *July 17, 2025*	Jakarta/ *Hybrid*	Ahli Asuransi	15	*Fundamentals of Reinsurance*
6	*Learning Development Program LDP-1 batch 2*	13 Juni - 4 Juli 2025 *June 13 - July 4, 2025*	Jakarta/ *Offline*	LPPI	7	*Learning Development Program LDP-1 batch 2*
7	Pelatihan dasar akutaria Asuransi Umum *Batch* 1 tahun 2025	14 Juni - 20 Agustus 2025 *June 14- August 20, 2025*	*Online*	PAI	1	*Basic Actuarial Training General Insurance Batch 1, 2025*
8	Pelatihan Profesi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Syariah	16 - 23 Agustus 2025 *August 16-23, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Bintang Cahaya Gempita	4	*Professional Training Expert Personnel Scheme Sharia Guarantee*
9	Pelatihan Skema Analis Penjaminan	8 -9 Desember 2025 *December 8-9, 2025*	Jakarta/ *Hybrid*	Bintang Cahaya Gempita	3	*Analyst Scheme Training Surety (Guarantee)*
10	Pelatihan Skema Staf Klaim Dan Subrogasi	2-3 Juli 2025 *July 2-3, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Bintang Cahaya Gempita	3	*Staff Scheme Training Claims and Subrogation*
11	Persiapan Implementasi PSAK 413	25-26 September 2025 *September 25-26, 2025*	Jakarta/ *Offline*	PWC Indonesia	6	*Preparation for the Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 413*
12	Sertifikasi Skema Staf Klaim & Subrogasi	14 Agustus 2025 *August 14, 2025*	Jakarta/ *Offline*	LSP Penjaminan	2	*Staff Certification Scheme Claims & Subrogation*
13	*Sharing Session IFG "Merger & Acquisition and the Post-Merger Integration Cycle"*	6 November 2025 *November 6, 2025*	Jakarta/ *Offline*	IFG Corporate University	4	*Sharing Session IFG "Merger & Acquisition and the Post-Merger Integration Cycle"*
14	Sosialisasi *Cyber Security Awareness*	5 Desember 2025 *December 5, 2025*	Jakarta/ *Hybrid*	PT MSBU (SiberMate)	14	*Cyber Security Awareness Socialization*
15	Sosialisasi POJK No.10 & No.11 Tahun 2025 & Pengenalan RAKB	8 Juli 2025 *July 8, 2025*	Jakarta/ *Offline*	OJK & Internall	8	*Socialization of OJK Regulations No. 10 and No. 11 of 2025 and Introduction to the RAKB*
16	Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Penjaminan Syariah	17 September & 17 November 2025 *September 17, 2025 & November 17, 2025*	Jakarta/ *Offline*	LSP Penjaminan	4	*Certification Examination for Sharia Guarantee Expert Personnel*

No.	Pelatihan	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	*Trainings*
17	*Webinar* LAPS SJK - Penerapan kebijakan *Standstill* pada layanan *peer-to-peer lending*	15 Juli 2025 *July15, 2025*	*Online*	LAPS SJK	2	*LAPS SJK Webinar – Implementation of the Standstill Policy in Peer-to-Peer Lending Services*
18	*Refreshment Business Process*	18-20 November 2025 *November 18-20, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Internal	19	*Refresment Business Process*

Pelatihan Keuangan dan Akuntansi

Financial and Accounting Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	*Certified Data Analyst CertDA 42*	10 - 26 Oktober 2025 *October 10-26, 2025*	*Online*	IKAI	1	2,750,000
2	Desain dan Implementasi Internal *Control Over Financial*	27 - 28 mei 2025 *May 27-28, 2025*	Jakarta *Offline*	PSHBI	1	-
3	*In-House Training* Pajak PPh 21	11 februari 2025 *January 11, 2025*	Jakarta *Offline*	Abraham Consulting	6	13,109,100
4	Menyusun SOP Keuangan dan Akuntansi Berdasarkan Format ISO *Preparation of Financial and Accounting SOPs Based on ISO Forma*	30 Agustus 2025 *August 30, 2025*	*Offline*	IAMI	1	1,800,000
5	Pelatihan Aset *Liability Management* *Asset Liability Management Training*	24 -25 Oktober 2025 Otcober 24-25, 2025	*Online*	Mahaka Institut	3	18,000,000
6	Pelatihan CA *Review* (Pro) *CA Review Training (Pro)*	15 November 2025 *November 15, 2025*	*Online*	FEB UI	3	1,243,000
7	Pelatihan Pejabat Eksekutif Keuangan & Investasi *Executive Officer Training Finance & Investment*	7 Oktober 2025 October 7, 2025	Jakarta *Offline*	Bintang Cahaya Gempita	1	6,000,000
8	Persiapan Implementasi PSAK 413 *Preparation for the Implementation of PSAK 413*	25 - 26 September 2025 *September 25-26, 2025*	Jakarta *Offline*	PWC Indonesia	7	1,816,533
9	Sosialisasi POJK No.10 & No.11 Tahun 2025 & Pengenalan RAKB *Socialization of OJK Regulations No. 10 and No. 11 of 2025 and Introduction to RAKB*	7 Agustus 2025 *August 7, 2025*	Jakarta *Offline*	OJK & Internal	2	300,000

Pelatihan Manajemen Risiko

Risk Management Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	Konferensi Nasional Profesional MR XI - *Towards Golden Indonesia 2045 : Risk Management as Competitive Edge in A Complex World "Preparedness, Agility, and Adaptation"* *National Professional Conference of Risk Management XI – Towards Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World "Preparedness, Agility, and Adaptation*	27 - 28 November 2025 *November 27-28, 2025*	*Offline*	LSPMR	1	2,600,000
2	Uji Sertifikasi - *Certified Risk Management Officer* - CRMO *Certification Examination – Certified Risk Management Officer (CRMO)*	5 Mei 2025 *May 5, 2025*	Jakarta/ *Offline*	LSPMR	1	1,400,000
3	*Masterclass Program* LSPMR: Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital *LSPMR Masterclass Program: Risk Mitigation in Digital Transformation*	3-4 Juli 2025 *July 3-4, 2025*	*Online*	LSPMR	2	4,800,000
4	Pelatihan & Pembekalan Sertifikasi CRMO Anamrot (Level II) *Training & Preparation for CRMO Certification (Anamrot Level II)*	28-30 April 2025 *April 28-30, 2025*	*Online*	LSPMR	1	5,000,000
5	Perpanjang Sertifikasi CRMO *CRMO Certification Renewal*	3 Oktober 2025 *October 3, 2025*	*Online*	LSPMR	4	4,200,000
6	Perpanjang Sertifikasi CRMP *CRMP Certification Renewal*	3 Oktober 2025 *October 3, 2025*	*Online*	LSPMR	2	3,100,000
7	*Workshop "Ethical Risk Culture & Risk Leadership"*	30 September 2025 *September 30, 2025*	*Online*	GRC Manajemen	2	2,600,000
8	*Workshop Integrating Strategy And Risk Management*	21-22 April 2025 *April 21-22, 2025*	*Online*	GRC Manajemen	1	3,250,000
9	Webinar Manajemen Risiko sebagai Integrator Implementasi POJK 12 2024 *Webinar: Risk Management as an Integrator for the Implementation of OJK Regulation No. 12 of 2024*	31 Januari 2025 *January 31, 2025*	*Online*	GIRMA	1	-
10	*Virtual Round Table Discussion : CSR and Fraud Navigating the Ethical and Legal Challenges*	25 Januari 2025 *January 25, 2025*	*Online*	ACFE	1	-
11	*Webinar Determining the Risk Strategy in the Challenges of Environmental Social and Macro Economic Changes* : Penetapan Strategi Risiko Perusahaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Sosial dan Makro Ekonomi *Webinar: Determining Risk Strategy in the Challenges of Environmental, Social, and Macroeconomic Changes – Setting Corporate Risk Strategy in Facing Social and Macroeconomic Environmental Changes*	7 Januari 2025 *January 7, 2025*	*Online*	LSPMR	3	-

Pelatihan HR & GA

HR & GA Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	Merancang Program *Management Trainee* *Designing a Management Trainee Program*	17-18 Maret 2025 *March 17-18, 2025*	*Online*	Kelas HR	3	578,017
2	Pelatihan Ahli K3 Umum sertifikasi BNSP *General Occupational Health and Safety (OHS) Expert Training – BNSP Certification*	15 - 17 Desember 2025 *December 15-17, 2025*	*Online*	Garuda Systrain Indonesia	1	2,775,000
3	Re-Sertifikasi HR Staf *HR Staff Recertification*	6-7 Oktober 2025 *October 6-7, 2025*	*Online*	Phinastika	2	11,000,000
4	*Training for Fire Fighting Class D Certification by KEMNAKER RI*	3-5 November 2025 *November 3-5, 2025*	*Online*	Garuda Systrain Indonesia	1	4,578,750
5	*Training* Pengelolaan Arsip Dinamis *Dynamic Records Management Training*	27 - 28 Februari 2025 *February 27-28, 2025*	*Online*	Media Edutama Indonesia	1	3,330,000
6	*Seminar World Class HR Director School* *World Class HR Director School Seminar*	22-23 Januari 2025 *January 22-23, 2025*	*Online*	Intipesan Pariwara	1	-

Pelatihan Pemasaran

Marketing Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	Produk *Letter of Credit* (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Bullion Bank *Products: Letter of Credit (L/C), Domestic Documentary Credit (SKBDN), and Bullion Banking*	7 Agustus 2025 *August 7, 2025*	Jakarta / *Offline*	BRI & Pegadaian	12	5,119,600
2	Pelatihan Ahli Penjaminan spesialis *Specialist Guarantee Expert Training*	16 November 2025 *November 16, 2025*	*Online*	RGC Fia UI	25	21.506.250
3	Praktik *Underwritting* / Bisnis untuk *Frontliner Intermediate Level* *Underwriting Practice / Business for Frontliners – Intermediate Level*	25-26 Juni/ 24-25 Juli/ 21-22 Agustus 2025 *June 25–26 / July 24–25/ August 21–22, 2025*	Palembang/ Jogja/ Makasar	IFG Corporate University	8	7,856,042
4	Uji Sertifikasi Pejabat *Executive* Pemasaran *Certification Examination for Executive Marketing Office*	7 Oktober/ 23 Desember 2025 *October 7/ December 23, 2025*	Jakarta/ *Offline*	LSP Penjaminan	2	3,000,000

Pelatihan Manajemen Bisnis

Business Management Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	PPL *Business and Valuation Essentials*: Strategi dan Perancangan Strategi Bisnis dengan menggunakan Laporan Keuangan *CPD (Continuing Professional Development): Business and Valuation Essentials – Strategy and Business Strategy Design Using Financial Statement*	18 Juni 2025 *June 18, 2025*	*Online*	Ikatan Akuntan Indoneisa : IAI	1	800,000
2	PPL *Financial Modelling* (Pendekatan Kasus) *CPD: Financial Modelling (Case-Based Approach)*	23-25 Juni 2025 *June 23-26, 2025*	*Onllie*	Ikatan Akuntan Indoneisa : IAI	1	1,700,000

Pelatihan Sekretaris Perusahaan dan Hukum

Corporate Secretary and Legal Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	*Certified Professional Legal Auditor*	28-30 September 2025 *Septembr 25-30, 2025*	Jakarta/*Offline*	PT Media SDM Indonesia	2	800,000
2	*Compliance Management Fundamentals With Certfication*	19-21 Agustus 2025 *August 19-24, 2025*	*Online*	CRMS	1	8,047,500
3	Audit Legal Perjanjian Kerja Sama *Legal Audit of a Cooperation Agreement*	6-7 Maret 2025 *March 6-7, 2025*	*Onlne*	Media Edutama Indonesia	2	5,550,000

Pelatihan Teknologi Informasi

Information Technology Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	*Awareness ISO* 27001:2022	14-15 November 2025 *November 14-15, 2025*	Jakarta/ *Offline*	PT ACS Indonesia	15	19,177,770
2	Pelatihan & Sertifikasi *Big Data Scientist* *Big Data Scientist Training & Certification*	28-30 Oktober 2025 *October 28-30, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Media Edutama Indonesia	1	9,990,000
3	Pelatihan & Sertifikasi ITSM *Manager* *ITSM Manager Training & Certification*	19-21 Mei/ 14-16 Juli/ 8-10 Desember *May 19-21, 2025/July 14-16/December 8-10, 2025*	*Online*	PT Inixindo	3	9,990,000

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
4	Persiapan Uji Kompetensi *Database Administrator* & Sertifikasi *Preparation for Competency Test – Database Administrator & Certification*	28-30 Juli 2025 *July 28-30, 2025*	Jakarta / *Offline*	PT Inixindo	1	3,552,000
5	Sosialisasi *Cyber Security Awareness* *Cyber Security Awareness Socialization*	5 Desember 2025 *December 5, 2025*	*Hybrid*	PT MSBU (SiberMate)	106	-
6	*Training Cobit 2019*	10-11 Juli/ 15-17 Oktober 2025 *July 10-11/ October 15-17/2025*	Jakarta / *Offline*	PT Inixindo	2	18,123,508

Pelatihan SEVP

SEVP Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	Konferensi Nasional Profesional MR XI - *Towards Golden Indonesia 2045 : Risk Management as Competitive Edge in A Complex World "Preparedness, Agility, and Adaptation"* *National Professional Conference of Risk Management (MR) XI – Towards Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World "Preparedness, Agility, and Adaptation"*	27-28 November 2025 *November 27-28, 2025*	Batam	LSPMR	1	16,250,116
2	Pelatihan Profesi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Syariah *Professional Training – Sharia Guarantee Expert Personnel Scheme*	16 & 23 Agustus/ 17 September 2025 *August 16 & 23/ September 17, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Bintang Cahaya Gempita & LSP Penjaminan	1	9,190,650
3	Produk *Letter of Credit* (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *Bullion Bank* *Products: Letter of Credit (L/C), Domestic Documentary Credit (SKBDN), and Bullion Banking*	7 Agustus 2025 *August 7, 2025*	Jakarta/ *Offline*	BRI & Pegadaian	1	543,300
4	*Sharing Session* IFG *"Merger & Acquisition and the Post-Merger Integration Cycle*	6 November 2025 *November 6, 2025*	Jakarta/ *Offline*	IFG Corporate University	1	-
5	Sosialisasi POJK No.10 & No.11 Tahun 2025 & Pengenalan RAKB *Socialization of OJK Regulations No. 10 and No. 11 of 2025 and Introduction to RAKB*	8 Juli 2025 *July 8, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Internal & OJK	1	150,000

Pelatihan *Soft Skill*

Soft Skill Training

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*	Biaya *Budget* (Rp)
1	*Boothcamp Public Speaking*	15-31 Juli 2025 *July 15-31, 2025*	*Online*	Transformasi Digital Indonesia : TDI	2	330,870
2	*Master class on Communication & Public Speaking "Speak Swell, Sell Well"*	8 Mei 2025 *May 8, 2025*	*Online*	PT Esensi Bisnis Solusi	4	4,000,000
4	*Leadership Development Program (Pra-LDP) Batch 1*	14 Maret – 14 April 2025 *March 14- April 14, 2025*	*Online*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	26	100,334,999
5	*Leadership Development Program (Pra-LDP) Batch 2*	13 Juni – 4 Juli 2025 *June 13-July 14, 2025*	*Offline*	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	14	78,417,953
6	*Certified Strategic Leadership Mastery Batch ke-17 (CSLM)*	11-24 November 2025 *November 11-24, 2025*	*Online*	*Multi Tasking Training*	1	512,842

Biaya Pengembangan Kompetensi

Competency Development Budget

Biaya Pengembangan Kompetensi di Askrindo Syariah tercatat sebesar Rp 1.467.963.408,- meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.021.706.794,- sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendukung peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

The competency development expenses at Askrindo Syariah were recorded at Rp 1.467.9963.408,- an increase compared to the previous year which amounted to Rp1,021,706,794, reflecting the Company's commitment to strengthening human resource quality and supporting sustainable performance improvement.

Evaluasi Pengembangan Kompetensi

Competency Development Evaluation

Evaluasi pengembangan kompetensi di Askrindo Syariah sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan transformasi perusahaan.

The Company always evaluates the training activities that have been carried out throughout the financial year. This is implemented by the Company to measure effectiveness of HR training and development system implementation concerning employee productivity.

Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup penguatan kompetensi kepemimpinan, digitalisasi, serta pemahaman prinsip syariah. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi karyawan dalam berbagai program pelatihan serta perbaikan kinerja individu yang berkontribusi terhadap pencapaian target perusahaan.

The results of the evaluation will later be used as consideration for management, although not as a determinant factor or final result of HR development process/activity, both in the appointment of employees (promotions) and the employee mutation process, as a consideration to upgrade advance HR training requirements in the future.

Dalam peningkatan kompetensi pegawai, *support* dalam bidang TI diperlukan untuk menunjang aktivitas pembelajaran pegawai. Dalam hal ini, perusahaan mengoptimalkan *Learning Management System (LMS)* yang dikembangkan oleh internal perusahaan melalui unit kerja *Desk* Teknologi Informasi.

In improving employee competency, IT support is required to facilitate employee learning activities. In this regard, the company optimizes a Learning Management System (LMS) developed internally by the company through the Information Technology Desk unit.

Di sisi lain, evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah area yang masih perlu ditingkatkan, seperti pemerataan akses pelatihan antar unit kerja serta pengukuran dampak pelatihan yang lebih terstruktur dan terukur. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk terus menyempurnakan strategi pengembangan kompetensi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, serta penyesuaian kurikulum dengan dinamika industri, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perusahaan juga bekerja sama dengan berbagai Lembaga pelatihan dan sertifikasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang menunjang peningkatan kompetensi dan keahlian pegawai, di antaranya LSP Penjaminan dan LSP Manajemen Risiko.

On the other hand, the evaluation also identified several areas that still require improvement, such as ensuring equal access to training across work units and establishing a more structured and measurable assessment of training impact. Therefore, the Company is committed to continuously refining its competency development strategy through a more integrated approach, leveraging digital learning technologies, and aligning the curriculum with industry dynamics to ensure the sustainable enhancement of human resource quality.

The company also collaborates with various training and certification institutions in organizing training and certification programs that support the enhancement of employee competencies and expertise, including the Guarantee Professional Certification Agency (LSP Penjaminan) and the Risk Management Professional Certification Agency (LSP Manajemen Risiko).

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Perseroan telah menjalankan *Human Capital Management System* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM, khususnya dalam proses remunerasi, *talent management*, *training and development* serta penilaian kinerja. Adapun proses *Human Capital* yang dapat dieksekusi melalui sistem ini adalah sentralisasi *payroll*, master data karyawan, kamus kompetensi serta *Key Performance Indicator* (KPI) bagi seluruh karyawan.

Human Capital Management System

The Company has implemented a Human Capital Management System which aims to improve HR performance, particularly in the remuneration process, talent management, training and development and performance appraisals. The Human Capital processes that can be executed through this system are payroll centralization, employee master data, competency dictionaries and Key Performance Indicators (KPI) for all employees.

Program SDM Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan beberapa program strategis dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang dimiliki. Kegiatan strategis tersebut adalah:

1. Penyesuaian Struktur Organisasi dan *Segregation of Duty* dalam mendukung operasional bisnis dan *service excellence*
2. Penyelarasan SOP dan kebijakan SDM dengan Struktur Organisasi
3. Memastikan implementasi Kebijakan Manajemen Pengelolaan Karir di internal perusahaan berjalan dengan optimal
4. Evaluasi penyesuaian Remunerasi/ Struktur Gaji benefit dan kesejahteraan pegawai.
5. Penyusunan kebijakan pensiun dini pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai sebagai langkah efisiensi sesuai anggaran Perusahaan.
6. Pengkinian Komite Personalia dan Komite Disiplin sebagai wadah atau forum dalam membahas isu atau masalah kepegawaian
7. Pengkinian Kebijakan Rotasi, Mutasi dan Promosi pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta selaras kebijakan Askrindo atau IFG
8. Pengkinian Level dan jenjang kepangkatan pegawai mencakup Fungsional, Struktural dan Spesialis

HR Program In 2025

In 2025, the Company has implemented several strategic programs in an effort to improve the quality of its human resources. These strategic activities are:

1. *Adjustment of the organizational structure and segregation of duties to support business operations and service excellence.*
2. *Alignment of SOPs and HR policies with the organizational structure.*
3. *Ensuring optimal implementation of the Career Management Policy within the company.*
4. *Evaluation of remuneration adjustments, including salary structure, benefits, and employee welfare.*
5. *Formulation of an early retirement policy to improve employee performance and productivity as part of efficiency measures in accordance with the company's budget.*
6. *Updating the Personnel Committee and Disciplinary Committee as a forum for discussing employment-related issues.*
7. *Updating employee rotation, transfer, and promotion policies in accordance with company needs and aligned with Askrindo or IFG policies.*
8. *Updating employee levels and rank structures, including functional, structural, and specialist positions.*

Teknologi Informasi
Information Technology

Perseroan telah menyusun *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) sebagai panduan dalam membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan serta meningkatkan keandalan Teknologi Informasi (TI) dalam kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Implementasi TI di Perseroan meliputi sistem fungsional, sistem produksi penjaminan pembiayaan dan penjaminan *suretyship*, sistem transaksi perdagangan, sistem keuangan dan akuntansi serta sistem Sumber Daya Manusia (SDM).

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus mendorong perbaikan aspek TI. Dalam mendukung kelancaran operasional, Askrindo Syariah terus mendorong penguatan dan pengembangan aspek teknologi informasi guna menciptakan proses kerja yang lebih cepat, efektif, dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan manusia. Upaya ini menjadi semakin krusial mengingat hampir seluruh kegiatan operasional perusahaan telah dilakukan secara digital dan sangat bergantung pada keandalan sistem teknologi informasi yang digunakan.

Master Plan Teknologi Informasi yaitu peningkatan keandalan IT dalam mendukung peningkatan bisnis, operasional, dan layanan unggul. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui beberapa strategi:

1. *Penguatan Tata Kelola TI dan SDM TI melalui penyempurnaan tata kelola, penguatan struktur organisasi, serta peningkatan kompetensi SDM melalui kebijakan, pelatihan, dan sertifikasi profesional.*
2. *Pengembangan Sistem Terintegrasi dan Digitalisasi Proses Bisnis melalui integrasi sistem, modernisasi aplikasi, implementasi Open API, dan digitalisasi proses bisnis secara end-to-end.*
3. *Pengembangan Platform API dan Layanan Digital Mitra melalui pembangunan ekosistem Open API untuk mendukung integrasi yang aman serta kolaborasi digital dengan mitra bisnis dan pihak ketiga.*
4. *Data Analytics dan Business Intelligence melalui optimalisasi pemanfaatan Data Warehouse, platform analitik, kecerdasan buatan (AI), dan penguatan tata kelola data guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.*
5. *Modernisasi Infrastruktur dan Penguatan Keamanan TI melalui penerapan hybrid cloud, Zero Trust Architecture, SIEM/SOAR, perlindungan endpoint, serta penguatan kolaborasi keamanan siber dengan IFG.*

The Company has developed an Information Technology Master Plan (IT Master Plan/MPTI) as a guideline for building, implementing, operating, and enhancing the reliability of Information Technology (IT) in its business activities and operations. The implementation of IT within the Company covers functional systems, financing guarantee production systems and suretyship guarantee systems, trading transaction systems, financial and accounting systems, as well as Human Resources (HR) systems.

Throughout 2025, the Company continued to drive improvements in its information technology (IT) aspects. To support operational efficiency, Askrindo Syariah consistently strengthened and developed its information technology capabilities to create faster, more effective, and more efficient work processes, while minimizing the potential for human error. This effort has become increasingly critical as nearly all of the Company's operational activities are conducted digitally and highly depend on the reliability of the information technology systems in use.

The Information Technology Master Plan is focused on enhancing the reliability of IT to support business growth, operational excellence, and superior service delivery. This strategic objective is pursued through the following initiatives:

1. *Strengthening IT Governance and Human Capital by enhancing IT governance practices, strengthening the organizational structure, and improving workforce competencies through policies, training programs, and professional certifications.*
2. *Developing Integrated Systems and Digitalizing Business Processes through system integration, application modernization, Open API implementation, and end-to-end digitalization of business processes.*
3. *Developing the API Platform and Digital Partner Services by establishing an Open API ecosystem to enable secure integration and foster digital collaboration with business partners and third parties.*
4. *Advancing Data Analytics and Business Intelligence by optimizing the use of the Data Warehouse, analytics platforms, artificial intelligence (AI), and strengthening data governance to support data-driven decision-making.*
5. *Modernizing IT Infrastructure and Strengthening Cybersecurity through the adoption of a hybrid cloud environment, Zero Trust Architecture, Security Information and Event Management/ Security Orchestration, Automation and Response (SIEM/SOAR), endpoint protection, and enhanced cybersecurity collaboration with IFG.*

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

2025 : Strengthening IT Foundation & Expanding Innovation
- Pengembangan distribution channel (OpenAPI, OSA, Maasya Mobile).
- Pengembangan aplikasi inti (FGOS, Portal Keuangan, CRM, e-Procurement, Core System, Klaim & Subrogasi, HRIS).
- Peningkatan infrastruktur TI (Firewall, ZTNA, HCI, memory & storage).
- Penguatan tata kelola TI (kebijakan, SOP, arsitektur TI, dan IT Maturity).
- Pengembangan dashboard operasional dan Data Warehouse.

2026 : Leveraging Technology for Market Expansion & Business Innovation
- Pembangunan Sistem Informasi Marketing.
- Pengembangan dashboard profitabilitas dan produksi.
- Pengembangan Big Data dan data governance.
- Implementasi endpoint security dan peningkatan kapasitas data center.
- Pengembangan distribution channel dan aplikasi bisnis.
- Penguatan tata kelola TI.

2027 : Accelerating Digital Transformation for Business Growth
- Integrasi data dan AI-based Management Information System (MIS).
- Penguatan cloud dan Disaster Recovery Center (DRC).
- Implementasi keamanan siber (DLP, PAM, WAF, SSO).
- Pengembangan Portal Umum dan DevSecOps.
- Penguatan tata kelola TI.

2028 – Secure & Intelligent Digital Platform
- Implementasi OpenAPI, OSA, dan Maasya Mobile.
- Penguatan DevSecOps dan arsitektur keamanan informasi.
- Pengujian Disaster Recovery Plan (DRP).
- Implementasi ERP, shared services, dan Security Operations Center (SOC).
- Penguatan tata kelola TI.

2029 : Building a Resilient & Sustainable IT Ecosystem for the Future
- Penguatan integrasi data, infrastruktur, dan keamanan.
- Integrasi end-to-end sistem bisnis.
- Tata kelola TI berkelanjutan melalui audit dan monitoring proaktif.
- Penguatan arsitektur TI dan peningkatan IT Maturity.

Information Technology Development Roadmap

2025 : Strengthening IT Foundation & Expanding Innovation
- *Development of distribution channels (OpenAPI, OSA, and Maasya Mobile).*
- *Development of core applications (FGOS, Financial Portal, CRM, e-Procurement, Core System, Claims & Subrogation, and HRIS).*
- *Enhancement of IT infrastructure (Firewall, ZTNA, HCI, memory, and storage).*
- *Strengthening IT governance (policies, Standard Operating Procedures (SOPs), IT architecture, and IT maturity).*
- *Development of operational dashboards and a Data Warehouse.*

2026 : Leveraging Technology for Market Expansion & Business Innovation
- *Development of a Marketing Information System.*
- *Development of profitability and production dashboards.*
- *Development of Big Data capabilities and data governance.*
- *Implementation of endpoint security and enhancement of data center capacity.*
- *Enhancement of distribution channels and business applications.*
- *Strengthening IT governance.*

2027 : Accelerating Digital Transformation for Business Growth
- *Integration of data and an AI-based Management Information System (MIS).*
- *Strengthening cloud infrastructure and the Disaster Recovery Center (DRC).*
- *Implementation of cybersecurity solutions (DLP, PAM, WAF, and SSO).*
- *Development of a General Portal and implementation of DevSecOps.*
- *Strengthening IT governance.*

2028 : Secure & Intelligent Digital Platform
- *Implementation of OpenAPI, OSA, and Maasya Mobile.*
- *Strengthening DevSecOps and information security architecture.*
- *Testing of the Disaster Recovery Plan (DRP).*
- *Implementation of ERP, shared services, and a Security Operations Center (SOC).*
- *Strengthening IT governance.*

2029 : Building a Resilient & Sustainable IT Ecosystem for the Future
- *Strengthening data integration, infrastructure, and security.*
- *End-to-end integration of business systems.*
- *Sustaining IT governance through continuous audits and proactive monitoring.*
- *Strengthening IT architecture and advancing IT maturity.*

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Tata Kelola Teknologi Informasi diimplementasikan dengan mengacu pada standar COBIT 2019 yang dikembangkan oleh *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA), serta berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai dasar dalam memastikan pengelolaan TI yang efektif, terarah, dan sesuai dengan praktik terbaik.

Kerangka Kerja COBIT 2019 terdiri dari 5 (lima) domain utama, yaitu:
- *Evaluate, Direct, Monitor (EDM)*
- *Align, Plan, and Organize (APO)*
- *Build, Acquire, and Implement (BAI)*
- *Deliver, Service, and Support (DSS)*
- *Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)*

Selain itu, untuk mendukung penerapan Tata Kelola TI yang baik di dalam Manajemen Keamanan Sistem Informasi di dalam Perseroan sudah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SKMI) ISO 27001:2022.

IT Governance is implemented in accordance with the COBIT 2019 framework developed by the Information Systems Audit and Control Association (ISACA), and guided by the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management in State-Owned Enterprises (SOEs), serving as the foundation to ensure effective, well-directed IT management aligned with best practices.

The COBIT 2019 Framework consists of five (5) main domains:
- *Evaluate, Direct, Monitor (EDM)*
- *Align, Plan, and Organize (APO)*
- *Build, Acquire, and Implement (BAI)*
- *Deliver, Service, and Support (DSS)*
- *Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)*

In addition, to support the implementation of effective IT governance, the Company has implemented an Information Security Management System (ISMS) in accordance with ISO/IEC 27001:2022 as part of its information security management framework.

Strategi Pengembangan SDM Pada Departemen Teknologi Informasi

Mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi pegawai Departemen TI dalam rangka peningkatan strategis bisnis perusahaan dalam hal penggunaan teknologi untuk mempercepat digitalisasi Perseroan yang berkesinambungan.

Memfasilitasi kegiatan pelatihan pegawai pada Departemen TI khususnya dalam hal peningkatan kompetensi yang menunjang kemampuan di bidang pengembangan *Mobile Application* dan *Core System*.

HR Development Strategy In Information Technology Department

Prepare and improve the capacity and competence of IT Department employees in order to improve the company's business strategy in terms of using technology to accelerate the sustainable digitalization of the Company.

Facilitate employee training activities in IT Department, especially in terms of competency improvement that supports capabilities in the field of Mobile Application and Core System development.

Pelatihan Teknologi Informasi

Pada tahun 2025, Perseroan mengikut sertakan personil TI dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Information Technology Training

In 2025, the Company participated IT personnel in training and competency development, as follows:

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*
1	*Awareness* ISO 27001:2022	14-15 November 2025 *November 14-15, 2025*	Jakarta/ *Offline*	PT ACS Indonesia	15
2	Pelatihan & Sertifikasi *Big Data Scientist* *Big Data Scientist Training & Certification*	28-30 Oktober 2025 *October 28-30, 2025*	Jakarta/ *Offline*	Media Edutama Indonesia	1

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*	Jumlah Peserta *Number of Participant*
3	Pelatihan & Sertifikasi ITSM Manager *ITSM Manager Training & Certification*	19-21 Mei/ 14-16 Juli/ 8-10 Desember *May 19-21/ July 14-16/ December 6-10, 2025*	*Online*	PT Inixindo	3
4	Persiapan Uji Kompetensi Database Administrator & Sertifikasi *Preparation for Database Administrator Competency Examination & Certification*	28-30 Juli 2025 *July 28-30, 2025*	Jakarta/ *Offline*	PT Inixindo	1
5	Sosialisasi *Cyber Security Awareness* *Cyber Security Awareness Awareness Program*	5 Desember 2025 *December 5, 2025*	*Hybrid*	PT MSBU (SiberMate)	106
6	*Training Cobit* 2019	10-11 Juli/ 15-17 Oktober 2025 *July 10-11, 2025/October 15-17, 2025*	Jakarta/ *Offline*	PT Inixindo	2

Program Teknologi Informasi Tahun 2025

Pada tahun 2025, Askrindo Syariah telah melaksanakan rangkaian program kerja bidang Teknologi Informasi sebagai bagian dari transformasi Teknologi Informasi di Perseroan. Penjelasan mengenai realisasi transformasi Teknologi Informasi pada tahun 2025, sebagai berikut:

Information Technology Program In 2025

In 2025, Askrindo Syariah has implemented series of Information Technology work program as part of Information Technology transformation in the Company. Explanation about Information Technology transformation realization in 2025 is as follows:

No.	Sasaran *Target*	Strategi Utama *Main Strategies*	Kebijakan Utama *Main policies*	Program Kerja *Work Programs*
1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. *Improving Business Process Effectiveness and Efficiency.*	Peningkatan penggunaan system financing guarantee originating system (FGOS). *Increase the adoption of the Financing Guarantee Originating System (FGOS).*	Kebijakan tata kelola dan Prosedur Pengembangan TI. *IT Governance Policy and IT Development Procedures.*	Pengembangan Financing Guarantee Origination System (FGOS) dilaksanakan dengan Desk TI sebagai Project Management Office (PMO) yang berkolaborasi dengan divisi operasional sebagai Product Owner. *The Financing Guarantee Origination System (FGOS) was developed with the IT Division serving as the Project Management Office (PMO), collaborating with the operational divisions as Product Owners.*
2	Penggunaan TI sebagai enabler dan driver bisnis. *Leveraging IT as a Business Enabler and Driver.*	Peningkatan tingkat keamanan sistem digital. *Enhance the security of digital systems.*	Kebijakan tata kelola dan Prosedur Pengembangan TI. *IT Governance Policy and IT Development Procedures.*	Pelaksanaan Penetration Test bagi aplikasi layanan digital dan pelaksanaan sosialisasi rutin. *Conduct Penetration Testing for digital service applications and conduct regular Information Security Awareness programs.*

No.	Sasaran *Target*	Strategi Utama *Main Strategies*	Kebijakan Utama *Main policies*	Program Kerja *Work Programs*
3	Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan komunikasi, data center, dan data recovery center. *Development and Enhancement of Network Communications, Data Center, and Disaster Recovery Center Infrastructure.*	Inovasi penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas infrastruktur TI *Technology Innovation and IT Infrastructure Capacity Enhancement.*	Mengacu pada standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi, IT master plan, Permen BUMN PER-02/MBU/02/2018 dan POJK No.2/POJK.05/2017. *Aligned with the Information Security Management System (ISMS), the IT Master Plan, the Indonesian Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/02/2018, and OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017.*	*Pengembangan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan komunikasi serta pusat data teknologi informasi guna meningkatkan keandalan, ketersediaan, dan kinerja layanan TI.* *Development and enhancement of communication network infrastructure and data center capacity to improve the reliability, availability, and performance of IT services.*
4	Pembangunan dan pengembangan aplikasi untuk Mitra Bisnis. *Development of Applications for Business Partners.*	Pembangunan dan Pengembangan Delivery Channel yang menghubungkan Mitra dengan sistem Askrindo Syariah. *Development and Enhancement of Delivery Channels Integrating Business Partners with Askrindo Syariah's Systems.*	Sesuai dengan standar tata kelola IT serta kebutuhan bisnis perusahaan. *Aligned with IT governance standards and the Company's business requirements.*	Pengembangan layanan aplikasi-aplikasi untuk mitra bisnis. *Development of Application Services for Business Partners.*
5	Penguatan aplikasi Core System dan surrounding sytem. *Strengthening Core Systems and Surrounding Applications.*	Melakukan penguatan integrasi antar sistem. *Strengthen system integration to improve operational efficiency and service reliability.*	Sesuai dengan standar tata kelola IT serta kebutuhan bisnis perusahaan. *Aligned with IT governance standards and the Company's business requirements.*	Enhancement modul-modul core system dan pengembangan aplikasi surrounding untuk meningkatkan integrasi sistem, kinerja aplikasi, dan digitalisasi proses bisnis Perusahaan. *Enhance core system modules and develop surrounding applications to improve system integration, application performance, and the digitalization of the Company's business processes.*
6	Pengembangan dengan Data Warehouse dan Data Analityc System. *Development of Data Warehouse and Data Analytics Systems.*	Perbaikan kualitas data perusahaan, serta optimalisasi penggunaan data perusahaan. *Improve the quality of the Company's data and optimize data utilization.*	Mengacu pada tata kelola IT serta permen BUMN PER-03/MBU/02/2018. *Aligned with IT governance principles and the Indonesian Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/02/2018.*	Penguatan integrasi data dan pengembangan dashboard analitik untuk mendukung kebutuhan pelaporan dan pengambilan keputusan manajemen. *Strengthen data integration and develop analytical dashboards to support reporting requirements and management decision-making.*

No.	Sasaran *Target*	Strategi Utama *Main Strategies*	Kebijakan Utama *Main policies*	Program Kerja *Work Programs*
7	Kebijakan UU PDP dalam Implementasi Perusahaan *Implementation of the Personal Data Protection (PDP) Law Across the Company*	Pembuatan kebijakan UU PDP dan Tools Pendukung *Development of Personal Data Protection (PDP) Policies and Supporting Tools.*	Mengacu pada UU PDP no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi *Aligned with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP).*	Penyusunan kebijakan Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai landasan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap pengelolaan data pribadi di lingkungan Perusahaan. *Develop a Personal Data Protection (PDP) Policy as the foundation for implementing personal data governance and ensuring compliance with personal data protection regulations across the Company.*

Realisasi Master Plan Teknologi Informasi Tahun 2025

Realization Of Information Technology Master Plan In 2025

Inisiatif dan program kerja Teknologi Informasi sesuai MPTI yang berhasil direalisasikan pada tahun 2025, sebagai berikut:

Information Technology initiatives and work program based on MPTI that are successfully implemented in 2025, as follows:

No.	Program Kerja *Work Program*	Program Kerja Turunan *Sub-Programs*	Target Penyelesaian *Implementation Target*	Kemajuan *Progress*
1	Penguatan Tata Kelola TI. *Strengthening IT Governance.*	a. Pemutakhiran Rencana Strategi TI 2025-2029. b. Re-Surveillence SMKI 27001:2013 Periode 2024. c. Peninjauan, Perubahan, Penambahan Kebijakan dan SOP TI. d. Peningkatan Maturity Level TI. *a. Update of the 2025–2029 IT Strategic Plan.* *b. ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) Re-Surveillance Audit for the 2024 Certification Cycle.* *c. Review, Revision, and Development of IT Policies and Standard Operating Procedures (SOPs).* *d. Improvement of IT Maturity Level.*	a. Januari-Februari b. Februari c. Januari-Juni d. Juli-September *a. January-February* *b. February* *c. January–Juni* *d. July–September*	Perusahaan telah memperkuat tata kelola TI melalui penyelesaian Rencana Strategis TI (RSTI) 2025–2029, keberhasilan mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO/IEC 27001:2013 sekaligus mempersiapkan transisi menuju ISO/IEC 27001:2022, pembaruan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) TI, serta pelaksanaan IT Maturity Level Self-Assessment sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola TI secara berkelanjutan. *The Company has strengthened its IT governance through the completion of the 2025–2029 Information Technology Strategic Plan (ITSP), the successful maintenance of its ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) certification while preparing for the transition to ISO/IEC 27001:2022, the revision of IT policies and Standard Operating Procedures (SOPs), and the implementation of an IT Maturity Level Self-Assessment as part of its continuous IT governance improvement initiatives.*

No.	Program Kerja *Work Program*	Program Kerja Turunan *Sub-Programs*	Target Penyelesaian *Implementation Target*	Kemajuan *Progress*
2	Penguatan keamanan sistem informasi perusahaan. *Strengthening Corporate Information Security.*	a. Pelaksanaan pengujian keamanan sistem dengan penetration testing. b. Mengadakan Event Security Awareness. *a. Conduct Information System Security Assessments through Penetration Testing.* *b. Organize Security Awareness Events.*	a. Juli-September b. Juli-September *a. July–September* *b. July–September*	Perusahaan telah memperkuat keamanan sistem informasi melalui pelaksanaan penetration testing pada core system, kegiatan lainnya adalah penyelenggaraan Cybersecurity Awareness untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Perusahaan. *The Company has strengthened its information system security by conducting penetration testing on its core systems. In addition, the Company organized Cybersecurity Awareness programs to enhance information security awareness and promote a strong security culture across the organization.*
3	Enhancement modul-modul core system dan pengembangan aplikasi surrounding. Core System Module Enhancement and Surrounding Application Development.	a. Enhancement fitur-fitur aplikasi. b. Tuning dan maintenance database. c. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi bisnis. *a. Enhancement of Application Features.* *b. Database Tuning and Maintenance.* *c. Development of Business Applications and Digitalization Initiatives.*	a. Januari - September b. Sepanjang Tahun c. Sepanjang Tahun *a. January – September* *b. Throughout the Year* *c. Throughout the Year*	Perusahaan telah melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan core system serta aplikasi pendukung melalui enhancement fitur, pemeliharaan database, dan pengembangan berbagai aplikasi sebagai penunjang kegiatan operasional dan bisnis perusahaan. *The Company has carried out the development and enhancement of its core systems and supporting applications through feature enhancements, database maintenance, and the development of various applications to support the Company's operational activities and business processes.*
4	Pengembangan layanan aplikasi-aplikasi untuk mitra bisnis. *Development of Digital Services for Business Partners.*	Pengembangan kerja sama Host-to-Host (H2H) dengan Mitra Bisnis. *Development of Host-to-Host (H2H) Integration with Business Partners.*	Sepanjang tahun *Throughout the Year*	Perusahaan telah mengembangkan layanan aplikasi untuk mitra bisnis melalui implementasi dan pengembangan integrasi Host-to-Host (H2H) dengan berbagai mitra strategis. Integrasi ini bertujuan untuk mengotomatisasi pertukaran data dan transaksi secara real-time, meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan, mengurangi proses manual, serta memperkuat konektivitas dan kolaborasi digital dengan mitra bisnis. *The Company has developed application services for business partners through the implementation and enhancement of Host-to-Host (H2H) integrations with various strategic partners. These integrations are designed to automate real-time data exchange and transaction processing, improve service speed and accuracy, reduce manual processes, and strengthen digital connectivity and collaboration with business partners.*

No.	Program Kerja *Work Program*	Program Kerja Turunan *Sub-Programs*	Target Penyelesaian *Implementation Target*	Kemajuan *Progress*
5	Optimalisasi dan pemanfaatan fungsi Data Warehouse. *Optimization and Utilization of the Data Warehouse.*	Pengembangan aplikasi dashboard beban usaha berbasis Mobile. *Development of a Mobile-Based Operational Workload Dashboard Application.*	Juli – September *July–September*	Perusahaan telah mengoptimalkan pemanfaatan Data Warehouse melalui pengembangan dashboard beban usaha berbasis mobile yang bertujuan untuk menyajikan informasi beban usaha secara terintegrasi, real-time, dan mudah diakses oleh manajemen, sehingga mendukung proses monitoring kinerja, pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional Perusahaan. *The Company has optimized the utilization of its Data Warehouse through the development of a mobile-based operating expense dashboard, designed to provide integrated, real-time, and easily accessible operating expense information for management. This initiative supports performance monitoring, enables faster data-driven decision-making, and enhances the effectiveness of the Company's operational management.*
6	Pengembangan dan Upgrade kapasitas infrastruktur jaringan komunikasi dan data center TI. *Development and Capacity Upgrade of Network Communication and Data Center Infrastructure.*	a. Penambahan Firewall DRC. b. Pengadaan ZTNA di KC. c. Penambahan Perangkat Storage Server. *a. Deployment of an Additional Firewall at the Disaster Recovery Center (DRC).* *b. Implementation of Zero Trust Network Access (ZTNA) for Branch Offices.* *c. Procurement of Additional Synology Storage Devices.*	a. Maret-Mei b. Juni-Agustus c. September - November *a. March–May* *b. June–August* *c. September – November*	Perusahaan telah meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan komunikasi dan data center melalui implementasi Firewall di Disaster Recovery Center (DRC) dan penambahan storage server di Data Center, yang telah berhasil diselesaikan. Selain itu, Perusahaan juga menginisiasi implementasi Zero Trust Network Access (ZTNA) melalui kajian, pembaruan pengetahuan, dan proses pengadaan sebagai bagian dari penguatan keamanan infrastruktur TI. *The Company enhanced its network communication and data center infrastructure by implementing a Firewall at the Disaster Recovery Center (DRC) and deploying additional server storage in the Data Center, both of which were successfully completed. The Company also initiated the implementation of Zero Trust Network Access (ZTNA) through feasibility assessments, knowledge enhancement, and procurement activities to strengthen its IT infrastructure security.*

05



Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian Global dan Nasional

Global and National Economic Review

Tinjauan Makro Ekonomi Global

Pada tahun 2025, perekonomian global menunjukkan pertumbuhan yang relatif moderat di tengah dinamika ketidakpastian yang masih berlanjut. Berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund,* ekonomi global diperkirakan tumbuh sekitar 3,1% pada tahun 2026, sedikit meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 3,0%. Sementara itu, *World Bank* memperkirakan pertumbuhan global berada di kisaran 2,6%–2,7%, mencerminkan pemulihan yang berlangsung secara bertahap namun belum merata di seluruh kawasan.

Dari sisi kawasan, negara maju mencatatkan pertumbuhan yang cenderung terbatas, dengan rata-rata sekitar 1,5%–1,7%, dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang masih ketat serta perlambatan aktivitas industri. Sebaliknya, negara berkembang dan *emerging markets* menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan pada kisaran 4,0%–4,2%, didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Namun demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global masih menjadi faktor yang membayangi prospek pertumbuhan tersebut.

Tekanan inflasi global pada tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. *International Monetary Fund* mencatat bahwa inflasi global diperkirakan turun menjadi sekitar 4,5% dari posisi tahun 2024 yang berada di atas 5%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh stabilisasi harga energi dan pangan, meskipun inflasi inti di beberapa negara masih relatif tinggi. Kondisi ini mendorong bank sentral di berbagai negara untuk mempertahankan suku bunga pada level yang relatif tinggi guna memastikan inflasi kembali ke target jangka menengah.

Sementara itu, perdagangan internasional menunjukkan pemulihan terbatas dengan pertumbuhan volume perdagangan global sekitar 3,0% pada tahun 2025, menurut *World Trade Organization*. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 2,5%, namun masih mencerminkan lemahnya permintaan global dan adanya hambatan struktural dalam rantai pasok. Selain itu, tren proteksionisme dan fragmentasi perdagangan turut memengaruhi kinerja ekspor dan impor di berbagai negara.

Tinjauan Makro Ekonomi Indonesia

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,11% (*year-on-year*), meningkat dibandingkan tahun

Global Macro economic Overview

In 2025, the global economy is expected to show relatively moderate growth amid ongoing uncertainty. According to International Monetary Fund projections, the global economy is projected to grow by approximately 3.1% in 2026, a slight increase from the previous year's growth rate of around 3.0%. Meanwhile, the World Bank estimates global growth to be in the range of 2.6%–2.7%, reflecting a recovery that is proceeding gradually but remains uneven across regions.

Regionally, advanced economies are recording relatively limited growth, averaging around 1.5%–1.7%, influenced by still-tight monetary policies and a slowdown in industrial activity. Conversely, developing and emerging markets are performing better, with growth in the range of 4.0%–4.2%, driven by increased domestic consumption and investment. However, external risks such as geopolitical tensions and global financial market volatility remain factors casting a shadow over these growth prospects.

Global inflationary pressures in 2025 show a downward trend compared to the previous year. The International Monetary Fund notes that global inflation is projected to fall to around 4.5% from the 2024 level, which was above 5%. This decline is primarily driven by the stabilization of energy and food prices, although core inflation in some countries remains relatively high. These conditions are prompting central banks in various countries to maintain interest rates at relatively high levels to ensure inflation returns to medium-term targets.

Meanwhile, international trade shows limited recovery with global trade volume growth of around 3.0% in 2025, according to the World Trade Organization. This figure is higher than the previous year's rate, which was below 2.5%, but still reflects weak global demand and structural barriers in supply chains. Additionally, trends toward protectionism and trade fragmentation are also affecting export and import performance across various countries.

Indonesian Macroeconomic Overview

In 2025, Indonesia's economy continued to perform solidly amid global dynamics that remained fraught with uncertainty. According to an official release from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth stood at 5.11% (year-on-year), an increase from the

2024 yang sebesar 5,03%. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, mencerminkan keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional yang didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga serta peningkatan investasi. Komponen ekspor barang dan jasa juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%, sejalan dengan masih terjaganya permintaan dari mitra dagang utama. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sekitar 6,12%, mencerminkan peningkatan aktivitas investasi yang menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi stabilitas harga, tingkat inflasi nasional menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Inflasi tahunan (*year-on-year*) pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92%, dengan inflasi inti sebesar 2,38%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi dalam kisaran sasaran, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, kinerja sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Meskipun data rinci Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2025 secara tahunan menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh volatilitas global, secara umum NPI tetap berada dalam kondisi terjaga dengan dukungan transaksi berjalan yang relatif stabil serta aliran masuk modal asing. Dalam berbagai publikasi otoritas moneter, NPI Indonesia pada tahun 2025 tercatat masih mencatatkan surplus terbatas (kisaran beberapa miliar dolar AS), yang turut menopang stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Secara keseluruhan, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2025 mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat dan resilien. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5%, inflasi yang terkendali di bawah 3%, serta stabilitas sektor eksternal melalui Neraca Pembayaran Indonesia menjadi indikator utama yang menunjukkan bahwa perekonomian nasional mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan global. Ke depan, capaian ini menjadi landasan penting bagi Perseroan dalam merumuskan strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

5.03% recorded in 2024. In nominal terms, Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached Rp23,821.1 trillion, reflecting the continued expansion of the national economy supported by strong domestic demand.

On the expenditure side, Indonesia's economic growth in 2025 was primarily driven by sustained household consumption and increased investment. Exports of goods and services also recorded the highest growth at 7.03%, in line with sustained demand from major trading partners. Meanwhile, Gross Fixed Capital Formation (GFCF) grew by approximately 6.12%, reflecting increased investment activity, which serves as a key driver of economic growth.

In terms of price stability, the national inflation rate indicates a relatively controlled situation. Annual inflation (year-on-year) in December 2025 stood at 2.92%, with core inflation at 2.38%. This achievement demonstrates the success of keeping inflation within the target range, thereby preserving purchasing power and supporting the sustainability of domestic consumption as the primary engine of economic growth.

Furthermore, the performance of Indonesia's external sector also demonstrates considerable resilience. Although detailed data on Indonesia's Balance of Payments (BOP) for 2025 on an annual basis reflects dynamics influenced by global volatility, overall the BOP remains in a stable condition, supported by a relatively stable current account and inflows of foreign capital. In various publications by monetary authorities, Indonesia's BOP in 2025 is recorded as still posting a limited surplus (in the range of several billion U.S. dollars), which helps underpin the stability of the Rupiah exchange rate and strengthens the resilience of the external sector.

Overall, Indonesia's macroeconomic conditions in 2025 reflect strong and resilient economic fundamentals. Sustained economic growth above 5%, controlled inflation below 3%, and external sector stability as reflected in Indonesia's Balance of Payments serve as key indicators demonstrating that the national economy is capable of withstanding and growing amidst global pressures. Moving forward, these achievements form a crucial foundation for the Company in formulating adaptive and sustainable business strategies.

Tinjauan Industri Keuangan Syariah

Sharia Financial Industry Review

Pada tahun 2025, industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin solid dan resilien di tengah dinamika perekonomian global. Berdasarkan publikasi Bank Indonesia melalui laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, sektor ekonomi dan keuangan syariah (EKSyar) terus diperkuat sebagai pilar strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030.

By 2025, Indonesia's Islamic finance industry will demonstrate increasingly solid and resilient performance amid the dynamics of the global economy. According to a publication by Bank Indonesia through the 2025 Indonesian Sharia Economics and Finance Review (KEKSI) report, the sharia economics and finance sector (EKSyar) continues to be strengthened as a strategic pillar in driving an inclusive and sustainable national economic transformation, in line with the direction of the 2030 Sharia Economics and Finance Blueprint.

Kinerja ekonomi syariah nasional pada tahun 2025 tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor *Halal Value Chain* (HVC) tumbuh sebesar 6,2% (*year-on-year*), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat menjadi sekitar 27%. Pertumbuhan ini didorong oleh penguatan sektor unggulan, seperti industri makanan dan minuman halal, *modest fashion*, serta pariwisata ramah muslim.

National Islamic economic performance in 2025 is recorded to have grown at a higher rate than national economic growth. The Halal Value Chain (HVC) sector grew by 6.2% (year-on-year), surpassing the national economic growth rate of 5.11%, with its contribution to Gross Domestic Product (GDP) increasing to approximately 27%. This growth was driven by the strengthening of key sectors, such as the halal food and beverage industry, modest fashion, and Muslim-friendly tourism.

Dari sisi industri jasa keuangan syariah, kinerja menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Total aset industri keuangan syariah mencapai sekitar Rp3.131 triliun atau tumbuh 8,61% (yoy) Kontribusi terbesar berasal dari pasar modal syariah sebesar Rp1.800 triliun, diikuti perbankan syariah sebesar Rp1.067 triliun. Fungsi intermediasi juga semakin efektif, tercermin dari pertumbuhan pembiayaan sekitar 9,6% serta Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,14%.

In the Islamic financial services industry, performance continues to show a positive trend. Total assets in the Islamic financial industry reached approximately Rp3,131 trillion, representing an 8.61% year-over-year increase. The largest contribution came from the Islamic capital market at Rp1,800 trillion, followed by Islamic banking at Rp1,067 trillion. Intermediation functions have also become increasingly effective, as reflected in financing growth of approximately 9.6% and a 10.14% increase in third-party funds (DPK).

Kinerja positif tersebut didukung oleh kebijakan regulator, termasuk implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah oleh Bank Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, realisasi insentif KLM Syariah mencapai Rp35 triliun atau sekitar 4,49% dari batas maksimum, yang memberikan ruang likuiditas bagi perbankan syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan serta mendukung pertumbuhan sektor riil.

This positive performance was supported by regulatory policies, including the implementation of the Sharia Macroprudential Liquidity Incentive Policy (KLM) by Bank Indonesia. By the end of 2025, the realization of the Sharia KLM incentive reached Rp35 trillion, or approximately 4.49% of the maximum limit, providing liquidity space for Islamic banking to increase financing disbursement and support real sector growth.

Selain itu, penguatan industri juga didorong oleh integrasi keuangan komersial dan sosial syariah. Penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Badan Amil Zakat Nasional mencapai sekitar Rp52,5 triliun, sementara instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) tumbuh 22% (YoY). Di sisi lain, pasar keuangan syariah turut berkembang, ditandai dengan kenaikan indeks saham syariah sebesar 22,8% (*year-to-date*) serta pertumbuhan reksa dana syariah sebesar 31,6% menjadi Rp66,5 triliun. *(Sumber: Bank Indonesia – Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2025/2026, BAZNAS – Outlook Zakat Indonesia)*

Additionally, the industry's growth was driven by the integration of commercial and social Sharia finance. The disbursement of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds through the National Zakat Agency reached approximately Rp52.5 trillion, while Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) instruments grew by 22% (year-over-year). On the other hand, the Islamic financial market has also expanded, marked by a 22.8% increase in the Islamic stock index (year-to-date) and a 31.6% growth in Islamic mutual funds to Rp66.5 trillion. (Source: Bank Indonesia – Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2025/2026, BAZNAS – Indonesia Zakat Outlook)

Askrindo Syariah memiliki posisi strategis dalam ekosistem keuangan syariah nasional sebagai perusahaan penjaminan. Pertumbuhan pembiayaan syariah yang meningkat mendorong kebutuhan mitigasi risiko yang lebih optimal, sehingga peran penjaminan menjadi krusial dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendukung penguatan *Halal Value Chain*.

Secara keseluruhan, sinergi antara kebijakan regulator, pertumbuhan industri, serta peran lembaga penjaminan seperti Askrindo Syariah menjadi faktor utama dalam memperkuat fondasi ekosistem keuangan syariah nasional. Dengan prospek pertumbuhan yang tetap positif, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta akselerasi digitalisasi dan inovasi, industri keuangan syariah Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.

Askrindo Syariah holds a strategic position within the national Islamic finance ecosystem as a guarantee company. The increasing growth of Islamic financing drives the need for more optimal risk mitigation, making the role of guarantees crucial in expanding access to financing, particularly for the micro, small, and medium enterprise (MSME) segment, as well as supporting the strengthening of the Halal Value Chain.

Overall, the synergy between regulatory policies, industry growth, and the role of guarantee institutions such as Askrindo Syariah are key factors in strengthening the foundation of the national Islamic financial ecosystem. With a positive growth outlook, sustained policy support, and the acceleration of digitalization and innovation, Indonesia's Islamic financial industry is expected to increase its contribution to the national economy while strengthening Indonesia's position as a global hub for Islamic economy and finance.

Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen Bisnis

Operational Performance Review Per Busines Segment

Kinerja Per Segmen Bisnis

Kegiatan usaha Perseroan didukung oleh beberapa segmen utama, yaitu segmen produktif, konsumtif, dan *suretyship*, dengan total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri mencapai Rp33,69 triliun untuk tahun 2025. Struktur portofolio ini mencerminkan fokus Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan konsumtif masyarakat.

Pada segmen produktif, produk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah tetap menjadi kontributor utama dengan porsi sebesar 52,40% terhadap total segmen produktif. Sementara itu, pada segmen konsumtif, kontribusi terbesar berasal dari produk penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencatatkan porsi sebesar 72,13%, menunjukkan tingginya peran Perseroan dalam mendukung pembiayaan perumahan masyarakat.

Dari sisi komposisi produk, penjaminan pembiayaan (*cash financing*) mendominasi kinerja produksi Perseroan dengan kontribusi sebesar 99,14% terhadap total produksi IJK Bruto JPAS. Adapun segmen *non-cash financing*, yang terdiri dari produk *suretyship* seperti *Surety Bond* dan Kontra Bank Garansi (KBG), memberikan kontribusi sebesar 0,86% dari total produksi.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat Jumlah pengguna jasa (*new business*) sebanyak 4.164.078 terjamin, meningkat/menurun sebesar 46,81% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 7.828.125 terjamin.

Performance Per Business Segment

The Company's business activities are supported by several key segments, namely the productive, consumer, and suretyship segments, with the total value of self-underwritten guarantees reaching Rp33.69 trillion by 2025. This portfolio structure reflects the Company's focus on maintaining a balance between financing the productive sector and meeting the public's consumer needs.

In the productive segment, the Sharia People's Business Credit (KUR) guarantee product remains the primary contributor, accounting for 52.40% of the total productive segment. Meanwhile, in the consumer segment, the largest contribution comes from the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) guarantee product, which accounts for 72.13%, demonstrating the Company's significant role in supporting housing financing for the public.

In terms of product composition, financing guarantees (cash financing) dominate the Company's production performance, contributing 99.14% to the total gross IJK production of JPAS. As for the non-cash financing segment, which consists of suretyship products such as Surety Bonds and Counter-Bank Guarantees (KBG), it contributed 0.86% of the total production.

In 2025, the Company recorded 4,164,078 new business clients, an increase/decrease of 46.81% compared to 2024, which reached 7,828,125 clients.

Dalam rangka mendorong penguatan segmen *non-cash financing*, Perseroan terus melakukan penyempurnaan metodologi analisis risiko pada tahun 2025 melalui: Penguatan manajemen risiko dan peningkatan *level Risk Maturity Index* (RMI) serta Optimalisasi potensi bisnis secara kewilayahan sesuai dengan titik tumbuh pembiayaan yang disalurkan oleh mitra bisnis.

To support the strengthening of its non-cash financing segment, the Company continued to enhance its risk assessment methodology throughout 2025 by: Strengthening risk management practices and improving its Risk Maturity Index (RMI) level and optimizing regional business potential by aligning business development efforts.

Imbal Jasa Kafalah

Realisasi Imbal Jasa Kafalah (IJK) Bruto Perseroan pada tahun 2025 tercatat tumbuh sebesar 1,63% menjadi Rp834,07 miliar, jika dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp820,65 miliar. Pencapaian ini mencerminkan kinerja usaha yang positif serta kontribusi yang semakin optimal dari aktivitas penjaminan yang dijalankan Perseroan.

Adapun perbandingan kinerja serta proporsi kontribusi masing-masing komponen IJK dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Kafalah Fee

The Company's gross Kafalah Fee (IJK) revenue in 2025 grew by 1.63% to Rp834.07 billion, compared to the 2024 realization of Rp820.65 billion. This achievement reflects positive business performance and an increasingly optimal contribution from the Company's guarantee activities.

The comparison of performance and the proportion of contribution of each IJK component over the past 2 (two) years is presented in the following table:

(dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*)

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*		Kontribusi *Contribution* (%)
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*	
Kafalah Produktif *Productive Kafalah*	780.873	783.605	(2.732)	(0,35)	93,62
Kafalah Konsumtif *Consumptive Kafalah*	46.027	33.730	12.297	36,46	5,52
Kafalah Bank Garansi *Guarantee Bank Kafalah*	6.784	1.510	5.274	349,27	0,81
Kafalah Surety *Surety Kafalah*	381	1.805	(1.424)	(78,89)	0,05
Jumlah *Total*	834.065	820.650	13.415	1,63	100,00

Kafalah Produktif

Perseroan pada tahun 2025 telah mencatat IJK dari kafalah produktif sebesar Rp780,87 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,35% atau Rp2,73 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp783,61 miliar. Meskipun mengalami penurunan, kafalah produktif tetap menjadi kontributor utama terhadap total IJK Perseroan dengan kontribusi sebesar 93,62% dari keseluruhan IJK yang diperoleh pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa segmen kafalah produktif masih menjadi portofolio bisnis yang dominan dalam mendukung kinerja usaha Perseroan.

Productive Kafalah

In 2025, the Company recorded productive kafalah IJK of Rp780.87 billion, recorded a decline of 0.35% or Rp2.73 billion compared to the previous year's figure of Rp783.61 billion. Despite the decline, productive kafalah remained the Company's primary contributor to total Kafalah Fee Income (IJK), accounting for 93.62% of the total IJK generated in 2025. This reflects that the productive kafalah segment continued to be the Company's dominant business portfolio, providing the principal support for its overall business performance.

Kafalah Konsumtif

Perseroan telah mencatat jumlah kafalah konsumtif pada tahun 2025 tumbuh sebesar 36,46% menjadi Rp46,03 miliar, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp33,73 miliar. Selain itu, kafalah konsumtif memberikan kontribusi sebesar 5,52% terhadap IJK tahun 2025.

Consumtive Kafalah

The Company reported that the amount of consumer loans in 2025 grew by 36.46% to Rp46.03 billion, compared to Rp33.73 billion in the previous year. In addition, consumptive kafalah contributed 5.52% of total IJK in 2025.

Kafalah Bank Garansi

Pada tahun 2025, Kafalah Bank Garansi tercatat sebesar Rp6,78 miliar, meningkat signifikan sebesar 349,27% atau Rp5,27 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1,51 miliar. Dengan capaian tersebut, kafalah bank garansi memberikan kontribusi sebesar 0,81% terhadap IJK tahun 2025.

Guarantee Bank Kafalah

In 2025, Guarantee Bank Kafalah is The amount recorded was Rp6.78 billion, representing a significant increase of 349.27%, or Rp5.27 billion, compared with Rp1.51 billion in 2024. With this achievement, bank guarantee kafalah accounted for 0.81% of total IJK in 2025.

Kafalah *Surety*

Perseroan telah mencatat jumlah kafalah *surety* pada tahun 2025 sebesar Rp381 juta, nilai tersebut menurun signifikan sebesar 78,89% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1,81 miliar. Pada tahun 2025, kafalah *surety* telah memberikan kontribusi terhadap jumlah imbal jasa kafalah sebesar 0,05%.

Surety Kafalah

The Company recorded surety kafalah revenue of Rp381 million in 2025, a significant decrease of 78.89% compared to Rp1.81 billion in 2024. In 2025, surety kafalah accounted for 0.05% of total kafalah fees.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Pembahasan mengenai analisis serta kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 disusun dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penyusunan laporan tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

This discussion of the financial analysis and performance for the period ended December 31, 2025, is based on the Company's Financial Statements, which have been prepared in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) applicable in Indonesia. The preparation of these financial statements reflects the Company's commitment to maintaining transparency and accountability in financial reporting.

Laporan Keuangan dimaksud telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) dengan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material, yang mencakup posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Uraian kinerja keuangan Perseroan dalam laporan ini disajikan dengan mempertimbangkan penjelasan auditor eksternal atas catatan Laporan Keuangan, yang merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan ini.

The aforementioned Financial Statements have been audited by the public accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) and received an unqualified opinion in all material respects, covering the Company's financial position, financial performance, and cash flows in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The description of the Company's financial performance in this report is presented taking into account the external auditor's notes to the Financial Statements, which form an integral part of this Annual Report.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Aset

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat peningkatan total aset sebesar 9,80% atau Rp292,60 miliar, dari Rp2,99 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3,28 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh nilai aset pajak tangguhan serta piutang penjaminan ulang bersih yang meningkat signifikan di tahun 2025.

Assets

In 2025, the Company recorded a 9.80% increase in total assets, or Rp292.60 billion, from Rp2.99 trillion in 2024 to Rp3.28 trillion in 2025. This increase was primarily driven by a significant rise in the value of deferred tax assets and net reinsurance receivables in 2025.

Adapun jumlah aset secara rinci disajikan pada tabel berikut:

The total assets in detail are presented in the following table:

(dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*)

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Kas dan Bank *Cash on hand and in banks*	23.870	23.869	1	0,00
Investasi *Investments*	2.375.793	2.039.313	336.480	16,50
Deposito Berjangka untuk Tujuan Tertentu *Time Deposits for Certain Purposes*	50.000	80.000	(30.000)	(37,50)
Piutang Imbal Jasa Kafalah - Bersih *Kafalah Fee Receivables - Net*	1.915	5.429	(3.514)	(64,73)
Piutang Penjaminan Ulang - Bersih *Re-Guarantee Receivables - Net*	60.720	43.219	17.501	40,49
Piutang Hasil Investasi *Investment Income Receivables*	27.280	24.773	2.507	10,12
Biaya Dibayar di Muka *Prepaid Expenses*	827	1.325	(498)	(37,58)
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan *Deferred Acquisition Costs*	36.129	34.781	1.348	3,88
Aset Penjaminan Ulang *Re-Guarantee Assets*	647.000	682.327	(35.327)	(5,18)
Aset Tetap – Bersih *Fixed Assets – Net*	28.516	33.000	(4.484)	(13,59)
Aset Tidak Berwujud – Bersih *Intangible Assets – Net*	2.255	2.909	(654)	(22,48)
Aset Pajak Tangguhan *Deferred Tax Assets*	22.839	13.873	8.966	64,63
Aset Lain-Lain *Other Assets*	1.860	1.584	276	17,42
Jumlah Aset *Total Assets*	3.279.004	2.986.402	292.602	9,80

Kas dan Setara Kas

Perseroan telah mencatat kas dan setara kas pada tahun 2025 sebesar Rp23.87 miliar, nilai tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2024 yakni sebesar Rp23,87 miliar.

Cash and Cash Equivalents

The Company reported cash and cash equivalents of Rp23,87 billion in 2025 this figure did not show a significant increase compared to 2024, when it stood at Rp23,87 billion.

Investasi

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat peningkatan pada investasi sebesar 16,50% menjadi Rp2,38 triliun jika dibandingkan dengan investasi tahun sebelumnya sebesar Rp2,04 triliun.

Investment

In 2025, the Company recorded a 16.50% increase in investments to Rp2.38 trillion, compared to the previous year's investment of Rp2.04 trillion.

Piutang Imbal Jasa Kafalah – Bersih

Perseroan telah mencatat penurunan piutang IJK bersih pada tahun 2025 sebesar 64,73% atau Rp3,51 miliar menjadi Rp1,92 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp5,43 miliar.

Kafalah Fee Receivables – Net

In 2025, the Company recorded a 64.73% decrease in net kafalah fee receivables (IJK), equivalent to Rp3.51 billion, to Rp1.92 billion from Rp5.43 billion in 2024.

Piutang Penjaminan Ulang

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat piutang penjaminan ulang sebesar Rp60,72 miliar, meningkat 40,49% atau Rp17,50 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp43,22 miliar.

Re-Guarantee Receivables

In 2025, the Company had recorded re-guarantee receivables of Rp60.72 billion, an increase of 40.49% or Rp17.50 billion compared to Rp43.22 billion in 2024.

Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi Perseroan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10,12% atau Rp2,51 miliar, dari tahun 2024 sebesar Rp24,77 miliar menjadi Rp27,28 miliar.

Investment Income

The Company's invested income in 2025 increased by 10.12%, or Rp2.51 billion, from Rp24.77 billion in 2024 to Rp27.28 billion.

Aset Penjaminan Ulang

Pada tahun 2025, jumlah aset penjaminan ulang mengalami penurunan sebesar 5,18% dari tahun 2024 sebesar Rp682,33 miliar menjadi Rp647,00 miliar.

Re-Guarantee Assets

In 2025, the amount of re-guarantee assets decreased by 5.18% from Rp682.33 billion in 2024 to Rp647.00 billion.

Aset Tetap – Bersih

Perseroan telah mencatat jumlah aset tetap bersih pada tahun 2025 sebesar Rp28,52 miliar, menurun 13,59% dari tahun 2024 sebesar Rp33,00 miliar.

Fixed Assets – Net

The Company reported fixed assets -net of Rp28.52 billion in 2025, a decrease of 13.59% from Rp33.00 billion in 2024.

Aset Tidak Berwujud – Bersih

Perseroan telah mencatat aset tidak berwujud bersih pada tahun 2025 menurun sebesar 22,48% menjadi Rp2,26 miliar, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp2,91 miliar.

Intangible Assets – Net

The Company reported a 22.48% decrease in intangible assets in 2025 to Rp2.26 billion, compared to Rp2.91 billion in 2024.

Aset Pajak Tangguhan

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat aset pajak tangguhan sebesar Rp22,84 miliar, meningkat 64,63% atau Rp8,97 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp13,87 miliar.

Deferred Tax Assets

In 2025, the Company recorded deferred tax assets of Rp22.84 billion, an increase of 64.63% or Rp8.97 billion compared to Rp13.87 billion in 2024.

Aset Lain-Lain

Perseroan telah mencatat jumlah aset lain-lain tahun 2025 sebesar Rp1,86 miliar, meningkat 17,42% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1,58 miliar.

Other Assets

The Company recorded other assets of Rp1.86 billion in 2025, an increase of 17.42% compared to Rp1.58 billion in 2024.

Liabilitas
Liabilities

Perseroan telah mencatat jumlah liabilitas pada tahun 2025 sebesar Rp2,11 triliun, meningkat 6,06% atau Rp120,65 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1,99 triliun. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan yang cukup signifikan pada utang pajak, utang ta'widh, serta liabilitas imbalan kerja tahun 2025. Adapun jumlah liabilitas secara rinci disajikan pada tabel berikut:

The Company recorded total liabilities of Rp2.11 trillion in 2025, an increase of 6.06% or Rp120.65 billion compared to Rp1.99 trillion in 2024. This increase was primarily driven by a significant rise in tax liabilities, compensation liabilities, and employee benefit liabilities in 2025. The detailed breakdown of liabilities is presented in the following table:

(dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*)

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Utang Ta'widh *Ta'widh Payables*	214	125	89	71,20
Utang Penjaminan Ulang *Re-Guarantee Payables*	33.327	35.820	(2.493)	(6,96)
Utang Pajak *Taxes Payables*	10.055	2.158	7.897	365,94
Cadangan Ta'widh *Ta'widh Reserves*	437.877	367.625	70.252	19,11
Cadangan Imbal Jasa Kafalah yang Belum Merupakan Pendapatan *Unearned Kafalah Fee*	1.402.018	1.356.458	45.560	3,36
Pendapatan Komisi yang Ditangguhkan *Deferred Commission Income*	130.883	137.381	(6.498)	(4,73)
Liabilitas Imbalan Kerja *Employee Benefit Liabilities*	246	134	112	83,58
Akrual dan Utang Lain-Lain *Accruals and Other Payables*	95.867	90.141	5.726	6,35
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	2.110.487	1.989.842	120.645	6,06

Utang Ta'widh

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat utang ta'widh sebesar Rp214 juta, meningkat 71,20% atau Rp89 juta dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp125 juta.

Ta'widh Payables

In 2025, The Company recorded ta'widh payable of Rp214 million, representing an increase of 71.20%, or Rp89 million, compared with the 2024 position of Rp125 million.

Utang Penjaminan Ulang

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat utang penjaminan ulang sebesar Rp33,33 miliar, menurun 6,96% atau Rp2,49 miliar dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp35,82 miliar.

Re-Guarantee Payables

In 2025, the Company recorded re-guarantee liabilities of Rp33.33 billion, a decrease of 6.96%, or Rp2.49 billion, compared with the 2024 position of Rp35.82 billion.

Utang Pajak

Perseroan telah mencatat peningkatan yang signifikan pada utang pajak tahun 2025 sebesar Rp7,90 miliar atau 365,94% menjadi Rp10,06 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,16 miliar.

Taxes Payables

The Company recorded a significant increase in tax payables for 2025 of Rp7.90 billion, or 365.94%, to Rp10.06 billion from Rp2.16 billion in the previous year.

Cadangan Ta'widh

Pada tahun 2025, cadangan ta'widh tercatat sebesar Rp437,88 miliar, meningkat 19,11% atau Rp70,25 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp367,63 miliar.

Ta'widh Reserves

In 2025, the ta'widh reserves were recorded at Rp437.88 billion, an increase of 19.11% or Rp70.25 billion compared to the 2024 figure of Rp367.63 billion.

Cadangan IJK Yang Belum Merupakan Pendapatan

Cadangan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang belum merupakan pendapatan pada tahun 2025 meningkat 3,36% menjadi Rp1,40 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,36 triliun.

Unearned Kafalah Fee (IJK)

Unearned Kafalah Fee (IJK) reserves in 2025 increased by 3.36% to Rp1.40 trillion compared to the previous year's figure of Rp1.36 trillion.

Pendapatan Komisi yang Ditangguhkan

Pada tahun 2025, pendapatan komisi yang ditangguhkan mengalami penurunan sebesar 4,73% dari tahun 2024 sebesar Rp137,38 miliar menjadi Rp130,88 miliar.

Deferred Commission Income

In 2025, deferred commission income decreased by 4.73% from Rp137.38 billion in 2024 to Rp130.88 billion.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan telah mencatat jumlah liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2025 sebesar Rp246 juta, meningkat 83,58% atau Rp112 juta dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp134 juta.

Employee Benefit Liabilities

The Company has recorded employee benefit liabilities for 2025 in the amount of Rp246 million, The amount increased by 83.58%, or Rp112 million, compared with Rp134 million in the 2024 position.

Akrual dan Utang Lain-Lain

Perseroan telah mencatat jumlah akrual dan utang lain-lain tahun 2025 sebesar Rp95,87 miliar, meningkat 6,35% atau Rp5,73 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp90,14 miliar.

Accrual and Other Payables

The Company recorded accrued and other payables of Rp95.87 billion for 2025, an increase of 6.35% or Rp5.73 billion compared to the previous year's figure of Rp90.14 billion.

Ekuitas
Equity

Perseroan mencatat total ekuitas sebesar Rp1,17 triliun, meningkat 17,26% atau Rp171,96 miliar dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp996,56 miliar. Jumlah ekuitas secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

The Company recorded total equity of Rp1.17 trillion, an increase of 17.26%, or Rp171.96 billion, compared with the 2024 position of Rp996.56 billion. The equity balance is detailed in the following table:

(dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*)

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Modal Saham *Share Capital*	400.000	400.000	0	0,00
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Setelah Pajak *Remeasurement of Employee Benefit Liabilities, Net of Tax*	(8.398)	(8.203)	(195)	2,38

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak *Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*	23.234	(7.785)	31.019	(398,45)
Saldo Laba *Retained Earnings*				
Telah Ditentukan Penggunaannya *Appropriated*	590.498	476.910	113.588	23,82
Belum ditentukan penggunaannya *Unappropriated*	163.183	135.638	27.545	20,31
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	1.168.517	996.560	171.957	17,26

Struktur ekuitas Perseroan pada tahun 2025 terdiri atas modal saham sebesar Rp400 miliar serta saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar Rp163,18 miliar.

Pada periode yang sama, Perseroan mencatatkan total saldo laba telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp590,50 miliar, meningkat dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp476,91 miliar, yang mencerminkan akumulasi kinerja keuangan yang positif.

The Company's equity structure in 2025 consists of share capital of Rp400 billion and unappropriated retained earnings of Rp163.18 billion.

During the same period, the Company recorded total appropriated retained earnings of Rp590.50 billion, an increase from the 2024 figure of Rp476.91 billion, reflecting the accumulation of positive financial performance.

Laporan Laba Rugi
Statement of Profit or Loss

(dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*)

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Pendapatan Kafalah *Kafalah Revenue*				
Imbal Jasa Kafalah Bruto *Gross kafalah fees*	834.065	820.650	13.415	1,63
Premi Penjaminan Ulang *Re-guarantee premiums*	(220.622)	(231.067)	10.445	(4,52)
Kenaikan cadangan Imbal Jasa Kafalah yang belum merupakan pendapatan *Increase in unearned premium reserve*	(74.517)	(152.984)	78.467	(51,29)
Jumlah Pendapatan kafalah *Total kafalah Revenue*	538.926	436.599	102.327	23,44
Beban Kafalah *Kafalah expenses*				
Beban Ta'widh *Ta'widh expenses*	(561.289)	(376.115)	(185.174)	49,23
Ta'widh Penjaminan Ulang *Re-guarantee ta'widh*	178.340	139.399	38.941	27,93

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Beban Komisi *Commission expenses*	(24.493)	(23.081)	(1.412)	6,12
Komisi Penjaminan Ulang *Re-guarantee commissions*	71.342	66.992	4.350	6,49
Pendapatan Subrogasi *Recovery income*	83.357	46.117	37.240	80,75
(Kenaikan)/Penurunan Cadangan Ta'widh *(Increase)/decrease outstanding claim reserve*	(76.622)	(91.389)	14.767	(16,16)
Beban Kafalah Lain *Other kafalah expenses*	(2.981)	(1.850)	(1.131)	61,14
Jumlah Beban Kafalah *Total kafalah expense*	(332.346)	(239.927)	(92.419)	38,52
Pendapatan Kafalah bersih *Net kafalah income*	206.580	196.672	9.908	5,04
Pendapatan Investasi *Investment income*	153.658	123.131	30.527	24,79
Beban Usaha *Operating expenses*	(147.950)	(139.710)	(8.240)	5,90
Beban Lain-lain - Bersih *Other expenses - net*	(21.556)	(15.407)	(6.149)	39,91
Laba Sebelum Zakat dan Pajak *Profit before zakat and income tax*	190.732	164.686	26.046	15,82
Zakat *Zakat*	(4.768)	(4.117)	(651)	15,81
Laba Sebelum Pajak *Profit before income tax*	185.964	160.569	25.395	15,82
Beban Pajak Kini *Current income tax*	(31.693)	(24.935)	(6.758)	27,10
Manfaat Pajak Tangguhan *Deferred tax benefit*	8.912	1.161	7.751	667,61
Jumlah Beban Pajak Penghasilan *Total income tax expenses*	(22.781)	(23.774)	993	(4,18)
Laba Bersih Tahun Berjalan *Net profit for the year*	163.183	*136.795*	26.388	19,29
Keuntungan/(Kerugian) Komprehensif Lainnya *Other comprehensive income/(loss)*	30.824	(6.006)	36.830	(613,22)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan *Total comprehensive income for the year*	194.007	130.789	63.218	48,34

Pendapatan Kafalah

Pendapatan Kafalah diperoleh dari hasil pengurangan antara Imbal Jasa Kafalah (IJK) Bruto dengan Beban Penjaminan Ulang, serta penyesuaian atas kenaikan atau penurunan IJK yang belum diakui sebagai pendapatan, ditambah dengan pendapatan Kafalah lainnya.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat pendapatan Kafalah sebesar Rp538,93 miliar, meningkat 23,44% atau Rp102,33 miliar dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp436,60 miliar. Peningkatan ini seiring dengan adanya peningkatan pada imbal jasa kafalah bruto tahun 2025 sebesar 1,63%.

Kafalah Income

Kafalah Income is derived from the difference between gross Kafalah fees (IJK) and re-guarantee expenses, as well as adjustments for increases or decreases in IJK that have not yet been recognized as revenue, plus other kafalah income.

In 2025, the Company recorded kafalah income of Rp538.93 billion, an increase of 23.44%, or Rp102.33 billion, compared with Rp436.60 billion in 2024. This increase aligns with a 1.63% rise in gross kafalah service fees in 2025.

Beban Kafalah

Beban Kafalah mencakup beberapa komponen utama, antara lain beban Ta'widh, Ta'widh atas Penjaminan Ulang, beban komisi, serta penyesuaian atas kenaikan atau penurunan estimasi Ta'widh retensi sendiri. Selain itu, beban ini juga mempertimbangkan pendapatan subrogasi serta komponen beban Kafalah lainnya.

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat beban Kafalah sebesar Rp332,35 miliar, meningkat 38,52% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp239,93 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada beban ta'widh, pendapatan subrogasi, dan beban kafalah lain.

Pendapatan Kafalah Bersih

Perseroan telah mencatat jumlah pendapatan kafalah bersih pada tahun 2025 sebesar Rp206,58 miliar, meningkat 5,04% atau Rp9,91 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp196,67 miliar.

Pendapatan Investasi

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat pendapatan investasi sebesar Rp153,66 miliar, meningkat 24,79% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp123,13 miliar.

Beban Usaha

Pada tahun 2025, beban usaha tercatat sebesar Rp147,95 miliar, meningkat 5,90% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp139,71 miliar.

Laba Sebelum Zakat Dan Pajak

Perseroan telah mencatat laba sebelum zakat dan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp190,73 miliar, meningkat 15,82% atau Rp26,05 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp164,69 miliar.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Pada tahun 2025, laba bersih tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 19,29% menjadi Rp163,18 miliar, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp136,80 miliar.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan telah mencatat peningkatan pada jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp63,22 miliar atau 48,34% menjadi Rp194,01 miliar pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp130,79 miliar.

Kafalah Expenses

Kafalah expenses consist of several key components, including Ta'widh expenses, Re-guarantee ta'widh, commission expenses, and adjustments for increases or decreases in the estimated self-retention Ta'widh. In addition, these expenses also take into account subrogation income and other Kafalah expense components.

In 2025, the Company recorded kafalah expenses of Rp332.35 billion, an increase of 38.52% compared with Rp239.93 billion in 2024. This increase was primarily driven by higher Ta'widh expenses, subrogation income, and other Kafalah expenses.

Net Kafalah Income

The Company recorded net kafalah income of Rp206.58 billion in 2025, an increase of 5.04% or Rp9.91 billion compared to the previous year's figure of Rp196.67 billion.

Investment Income

In 2025, the Company recorded investment income amounting to Rp153.66 billion, representing an increase of 24.79% compared with Rp123.13 billion in 2024.

Operating Expenses

In 2025, the Company recorded operating expenses of Rp147.95 billion, representing an increase of 5.90% compared with Rp139.71 billion in 2024.

Profit Before Zakat And Income Tax

The Company reported profit before zakat and income tax of Rp190.73 billion in 2025, an increase of 15.82% or Rp26.05 billion compared to Rp164.69 billion in 2024.

Net Profit For The Year

In 2025, the Company's net profit for the year increased by 19.29% to Rp163.18 billion, compared to Rp136.80 billion in the previous year.

Total Comprehensive Income For The Year

The Company has recorded an increase in total comprehensive income for the year of Rp63.22 billion, or 48.34%, to Rp194.01 billion in 2025, compared to Rp130.79 billion in the previous year.

Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*)

Uraian *Description*	2025	2024	Pertumbuhan *Growth*	
			Nominal *Amount*	Persentase *Percentage*
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi *Net cash flows generated from operating activities*	297.618	396.915	(99.297)	(25,02)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi *Net cash flows used in investing activities*	(298.786)	(389.411)	90.625	(23,27)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan *Net cash flows used in financing activities*	(28.831)	(4.782)	(24.049)	502,91
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas *Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents*	(29.999)	2.722	(32.721)	(1.202,09)
Kas dan setara kas pada awal tahun *Cash and cash equivalents at the beginning of year*	103.869	101.147	2.722	2,69
Kas dan setara kas pada akhir tahun *Cash and cash equivalents at the end of year*	73.870	103.869	(29.999)	(28,88)

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2025, arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 26,02% menjadi Rp297,62 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp396,92 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada pengeluaran beban kafalah, dan pengeluaran untuk beban usaha.

Cash Flow From Operating Activities

In 2025, net cash flow from operating activities decreased by 26.02% to Rp297.62 billion from Rp396.92 billion in 2024. This decrease was driven by an increase in kafalah expenses and operating expenses.

Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

Perseroan telah mencatat arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 sebesar Rp298,79 miliar, menurun 23,27% dari tahun sebelumnya sebesar Rp389,41 miliar.

Cash Flow Used In Investing Activities

The Company recorded net cash used in investing activities in 2025 of Rp298.79 billion, a decrease of 23.27% from the previous year's figure of Rp389.41 billion.

Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan

Perseroan telah mencatat arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 meningkat signifikan sebesar 502,91% menjadi Rp28,83 miliar dari tahun 2024 sebesar Rp4,78 miliar. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya pembayaran dividen pada tahun 2025.

Cash Flow Used In Financing Activities

The Company reported that net cash used in financing activities in 2025 increased significantly by 502.91% to Rp28.83 billion, up from Rp4.78 billion in 2024. This increase was driven by dividend payments in 2025.

Kemampuan Membayar Utang
Ability to Pay Debt

Kapabilitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari tingkat kesehatan rasio likuiditas serta rasio solvabilitas yang dimiliki.

The Company's ability to meet both its short-term and long-term obligations is reflected in the strength of its liquidity and solvency ratios.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Tingkat likuiditas ini tercermin melalui perhitungan rasio lancar sebagai salah satu ukuran utama.

Rasio lancar sendiri merupakan rasio keuangan yang menggambarkan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini menjadi acuan dalam mengevaluasi kapasitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

Adapun perbandingan kinerja rasio likuiditas Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Liquidity Ratio

Liquidity ratios are indicators used to assess the Company's ability to meet its short-term obligations as they fall due. This level of liquidity is reflected in the calculation of the current ratio, which serves as one of the primary measures.

The current ratio itself is a financial ratio that illustrates the comparison between current assets and short-term liabilities. This ratio serves as a benchmark for evaluating the Company's capacity to meet its short-term obligations in a timely manner.

The comparison of the Company's liquidity ratio performance over the past 2 (two) years is presented in the following table:

Rasio *Ratio*	2025	2024
Rasio Lancar *Current Ratio*	345,92%	421,83%

Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy

Struktur Modal

Perseroan senantiasa menjaga struktur permodalan yang optimal dan kuat sebagai landasan dalam memastikan keberlanjutan usaha di masa mendatang. Pada tahun 2025, Perseroan tidak memiliki perubahan dalam kebijakan maupun pengelolaan permodalan, sehingga komposisi struktur modal Perseroan tetap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Capital Structure

The Company consistently maintains an optimal and strong capital structure as the foundation for ensuring the sustainability of its business in the future. In 2025, the Company has not made any changes to its capital policy or management, so the composition of the Company's capital structure remains as follows:

Struktur Modal *Capital Structure*	2025	Kontribusi *Contribution*	2024	Kontribusi *Contribution*
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	2.110.487	64,36%	1.989.842	66,63%
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	1.168.517	35,64%	996.560	33,37%
Jumlah Aset *Total Assets*	3.279.004	100,00%	2.986.402	100,00%

Kebijakan Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan permodalan Perseroan adalah untuk menjaga tingkat kecukupan modal yang sehat guna mendukung kegiatan usaha, mempertahankan profil risiko dan peringkat pinjaman yang kuat, serta mengoptimalkan nilai tambah bagi Pemegang Saham. Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan permodalan yang ditetapkan oleh regulator eksternal.

Perseroan juga senantiasa mengelola struktur permodalan secara pruden dengan tetap memperhatikan kesinambungan usaha serta optimalisasi manfaat bagi Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko yang efektif.

Berdasarkan ketentuan terbaru Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengubah dan merinci kembali pengaturan dalam POJK 1/2017 melalui POJK perubahan, antara lain POJK 10/2025 dan POJK 11/2025, diatur penyesuaian modal minimum bagi perusahaan penjaminan syariah berdasarkan lingkup usahanya, yaitu untuk lingkup kabupaten/kota sebesar Rp50 miliar, lingkup provinsi sebesar Rp100 miliar, lingkup nasional sebesar Rp250 miliar, serta penjaminan ulang nasional sebesar Rp500 miliar.

Capital Structure Policy

The primary objective of the Company's capital management is to maintain a healthy capital adequacy ratio to support business operations, sustain a strong risk profile and credit rating, and optimize value for Shareholders. In practice, the Company has complied with all capital requirements set by regulators.

The Company also consistently manages its capital structure prudently while prioritizing business sustainability and maximizing benefits for Shareholders and all stakeholders. This approach is taken to ensure a balance between business growth and effective risk management.

Based on the latest regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), which revise and further detail the provisions under POJK 1/2017 through subsequent amendments, including POJK 10/2025 and POJK 11/2025, adjustments to the minimum capital requirements for sharia guarantee companies are stipulated according to their business scope, namely: Rp50 billion for regency/municipality scope, Rp100 billion for provincial scope, Rp250 billion for national scope, and Rp500 billion for national re-guarantee operations.

Dasar Pemilikah Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Perseroan secara berkelanjutan melakukan pengelolaan terhadap struktur permodalan serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan dinamika kondisi perekonomian. Dalam rangka menjaga keseimbangan dan kecukupan modal, Perseroan dapat menempuh berbagai langkah strategis, antara lain melalui penyesuaian kebijakan pembagian dividen kepada Pemegang Saham, penerbitan saham baru, maupun penambahan modal disetor oleh Pemegang Saham.

Basis for The Implementation of Management Policy on Capital Structure

The Company continuously manages its capital structure and makes adjustments as necessary, taking into account the dynamics of economic conditions. In order to maintain capital adequacy and balance, the Company may take various strategic measures, including adjusting its dividend distribution policy to shareholders, issuing new shares, or increasing paid-in capital through shareholder contributions.

Ikatan Material Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Perseroan tidak mencatat adanya komitmen material terkait investasi pada aset atau barang modal sepanjang tahun 2025.

The Company has not recorded any material commitments related to investments in assets or capital goods throughout 2025.

Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah merealisasikan belanja modal yang seluruhnya didanai dari kas internal sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025.

Throughout 2025, the Company has carried out capital expenditures, all of which were funded from internal cash in accordance with the allocations set forth in the 2025 Annual Budget Plan.

Adapun rincian realisasi belanja modal Perseroan selama tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

The details of the Company's capital expenditures for 2025 are presented in the following table:

Investasi Barang Modal *Capital Goods Investment*	Tujuan Investasi *Purpose of Investment*	Nominal (Rp juta) *Amount (Rp million)*
Peralatan Komputer *Computer Equipments*	Untuk menunjang operasional perusahaan *To support the company's operations*	1.194
Peralatan Komputer *Non-Computer Equipments*	Untuk menunjang operasional Perseroan *To support the Company's operations*	159
Peralatan Kantor *Office Equipments*	Untuk menunjang operasional perusahaan *To support the company's operations*	455
Aset dalam Penyelesaian *Construction in Progress*	Untuk menunjang operasional perusahaan *To support the company's operations*	366
Jumlah *Total*		2.174

Peristiwa Penting Setelah Periode Pelaporan Akuntan
Significant Event After The Accountant Reporting Date

Pada tahun 2025, Perseroan memiliki peristiwa penting setelah periode pelaporan akuntan, yakni:

In 2025, the Company had the following significant events after the end of the reporting period:

Rencana Penggabungan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Pada tanggal 23 Desember 2025, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat untuk rencana penggabungan usaha antara PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, yang penyelesaian rencana ini bergantung pada pemenuhan seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Penggabungan Bersyarat.

Proposed Merger of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

On December 23, 2025, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah signed a Conditional Merger Agreement, for the proposed merger between PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, the completion of this proposal will be subject to fulfillment of all of terms and conditions in the Conditional Merger Agreement.

Prospek Usaha Tahun 2026

Business Prospect In 2026

Prospek usaha Perseroan pada tahun 2026 dipandang tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif, seiring dengan proyeksi kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil. Sejumlah lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,0%–5,1%, sementara Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan dalam rentang 4,9%–5,7% yang didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan kinerja ekspor. Kondisi ini menjadi landasan yang kondusif bagi peningkatan aktivitas pembiayaan dan penjaminan.

The Company's business outlook for 2026 is expected to remain on a positive growth trajectory, in line with projections of relatively stable national macroeconomic conditions. Several international institutions, such as the International Monetary Fund, project Indonesia's economic growth to be in the range of 5.0%–5.1%, while Bank Indonesia estimates growth within the range of 4.9%–5.7%, supported by domestic consumption, investment, and export performance. These conditions provide a conducive foundation for increased financing and guarantee activities.

Dari sisi stabilitas ekonomi, inflasi diperkirakan tetap terjaga pada kisaran 2,5%–3,0%, didukung oleh bauran kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi. Stabilitas ini memberikan ruang bagi sektor jasa keuangan, termasuk industri penjaminan syariah, untuk berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan suku bunga yang relatif stabil juga mendukung ekspansi kredit dan pembiayaan yang menjadi *underlying* bisnis Perseroan.

In terms of economic stability, inflation is expected to remain within the 2.5%–3.0% range, supported by a coordinated mix of monetary and fiscal policies. This stability provides room for the financial services sector, including the Islamic guarantee industry, to grow sustainably. Additionally, relatively stable interest rate policies also support credit and financing expansion, which form the core of the Company's business.

Dalam konteks industri keuangan syariah, prospek tahun 2026 menunjukkan momentum yang semakin kuat. Berdasarkan berbagai *outlook* ekonomi syariah, total aset keuangan syariah nasional telah melampaui Rp3.000 triliun dan terus menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan berkembangnya ekosistem halal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbasis syariah. Penguatan sektor Halal *Value Chain* (HVC) serta meningkatnya sertifikasi halal menjadi katalis utama dalam mendorong permintaan pembiayaan dan penjaminan syariah.

Within the context of the Islamic finance industry, the outlook for 2026 indicates increasingly strong momentum. Based on various Islamic economic outlooks, total national Islamic financial assets have exceeded Rp3,000 trillion and continue to show an upward trend, in line with the development of the halal ecosystem and the increasing demand for Sharia-based financing. The strengthening of the Halal Value Chain (HVC) sector and the rise in halal certification serve as key catalysts in driving demand for Sharia financing and guarantees.

Lebih lanjut, kebijakan dan inisiatif strategis dari Bank Indonesia melalui penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peluncuran KEKSI 2025 dan agenda *Sharia Economic and Financial Outlook* (ShEFO) 2026, menegaskan komitmen regulator dalam memperkuat peran sektor syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini membuka peluang yang lebih luas bagi lembaga penjaminan syariah untuk berperan aktif dalam mendukung intermediasi keuangan.

Furthermore, strategic policies and initiatives from Bank Indonesia through the strengthening of the Islamic economy and finance, including the launch of KEKSI 2025 and the Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026 agenda, underscore the regulator's commitment to reinforcing the role of the Islamic sector as a pillar of national economic growth. This opens broader opportunities for Islamic guarantee institutions to play an active role in supporting financial intermediation.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Perseroan memiliki peluang signifikan untuk meningkatkan kinerja usaha melalui optimalisasi peran sebagai lembaga penjaminan. Pertumbuhan pembiayaan syariah, khususnya pada segmen UMKM dan sektor produktif, akan meningkatkan kebutuhan mitigasi risiko melalui skema penjaminan. Selain itu, perluasan digitalisasi layanan, penguatan manajemen risiko, serta inovasi produk menjadi faktor kunci dalam menangkap peluang pasar yang semakin berkembang.

In line with these developments, the Company has significant opportunities to improve business performance by optimizing its role as a guarantee institution. The growth of Sharia financing, particularly in the MSME segment and productive sectors, will increase the need for risk mitigation through guarantee schemes. Additionally, the expansion of digital services, strengthened risk management, and product innovation are key factors in capturing the growing market opportunities.

Secara keseluruhan, prospek usaha Perseroan pada tahun 2026 tetap menjanjikan dengan dukungan kondisi

Overall, the Company's business outlook for 2026 remains promising, supported by stable macroeconomic conditions,

makroekonomi yang stabil, pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan dan regulasi yang mendorong pengembangan sektor jasa keuangan syariah. Dengan memanfaatkan momentum tersebut dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, Perseroan diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai salah satu pelaku utama dalam industri penjaminan syariah serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

sustainable growth in the Islamic finance industry, and Policy and regulatory support that promotes the development of the Islamic financial services sector. By leveraging this momentum while maintaining a prudent approach, the Company is expected to strengthen its position as a leading player in the Islamic guarantee industry and create sustainable value for all stakeholders.

Target dan Realisasi Tahun 2025, Serta Proyeksi 2026

Target and Realization In 2025, as Well as Projectioni In 2026

Dalam penyusunan RKAP tahun 2025, Perseroan menetapkan berbagai asumsi dasar yang mengacu pada arahan Pemegang Saham. Proses penyusunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

In preparing the 2025 Annual Business Plan, the Company established various basic assumptions in accordance with the Shareholders' directives. The preparation process was carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and guided by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Pada tabel berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan anggaran yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025, serta perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2024. Adapun dalam penyusunan target usaha tahun 2026, Perseroan senantiasa mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta memperhatikan perkembangan faktor eksternal, khususnya dinamika kondisi ekonomi dan ketidakpastian iklim bisnis.

The following table presents a comparison between the actual performance for 2025 and stipulated in the 2025 RKAP (Company Work Plan and Budget), as well as a comparison with the actual performance of 2024. In setting business targets for 2026, the Company consistently considers the performance achievements of the previous year and takes into account developments in external factors, particularly economic conditions and business climate uncertainties.

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi

Table of Comparison between Target and Realization

Uraian *Description*	**Dalam Jutaan Rupiah** *In Million Rupiah*			**Dalam Persentase** *In Percentage* **%**		**Target Tahun 2026** *Target in 2026*
	Realisasi 2024 *Realization in 2024*	**Realisasi 2025** *Realization in 2025*	**Target 2025** *Target in 2025*	**Pencapaian** *Achievement*	**Pertumbuhan** *Growth*	
Imbal Jasa Kafalah (IJK) *Kafalah Fee*	820.650	834.065	865.300	96,39	1,63	903.700
Beban Usaha *Operating Expenses*	(139.710)	(147.950)	(156.475)	94,55	5,90	(176.531)
Pendapatan Investasi *Investment Income*	123.131	153.658	150.191	102,31	24,79	161.400
Laba Bersih Tahun Berjalan *Net Profit for the Year*	*136.795*	163.183	123.391	132,25	19,29	151.596
Gearing Ratio (GR)	26,40 kali/ *times*	29,07 kali/ *times*	28,79 kali/ *times*	100,97	10,24%	30,58

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Sasaran Strategis, Strategi Umum Dan Kebijakan Utama Perusahaan Tahun 2025

Sasaran, strategi, serta kebijakan utama Perseroan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika faktor eksternal yang relevan dengan lini bisnis Perseroan. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan keselarasan arah pengembangan usaha dengan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 Perseroan menetapkan berbagai inisiatif strategis dan kebijakan utama yang diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Inisiatif tersebut difokuskan pada upaya menjaga kesinambungan kinerja, meningkatkan daya saing, serta memperkuat fondasi bisnis Perseroan di masa mendatang, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

Sasaran Utama

Pada tahun 2025, sasaran utama Perseroan yakni "Pengembangan Bisnis dengan dukungan penguatan organisasi, SDI unggul, GCG, manajemen risiko, kapabilitas TI dan *service excellent*"..

Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang dilakukan Perseroan pada tahun 2025 di antaranya:

1. Penguatan kapabilitas organisasi
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis

3. Penguatan kapabilitas organisasi
4. Penggunaan TI sebagai *enabler* dan *driver* bisnis

5. Peningkatan kapasitas penjaminan
6. Penguatan pengawasan internal

Strategi

Strategi Perseroan pada tahun 2025, antara lain:

1. Pengembangan *distribution channel*
2. Optimalisasi sinergi BUMN
3. Pemasaran Bersama (Sinergi IFG Group)
4. Pengembangan produk nonpenugasan
5. Pengembangan penggunaan sistem *Financing Guarantee Originating System* (*FGOS*)
6. *Prudent Underwriting* melalui analisis risiko, manajemen klaim & subrogasi
7. Pengelolaan keuangan dan investasi yang efektif
8. Penguatan bisnis KUR dari seluruh penyalur

9. Penguatan organisasi
10. Peningkatan kompetensi SDM

Strategic Objectives, General Strategies, And Key Company Policies In 2025

The Company's objectives, strategies, and key policies, as outlined in the Long-Term Corporate Plan (RJPP) for the 2025 period, were formulated by taking into account the dynamics of external factors relevant to the Company's business lines. This approach was adopted to ensure that the direction of business development aligns with the changes in the strategic environment the Company faces.

In line with this, in 2025 the Company established various strategic initiatives and key policies aimed at strengthening the long-term sustainability of the business. These initiatives are focused on efforts to maintain consistent performance, enhance competitiveness, and strengthen the Company's business foundation for the future, which include the following:

Main Goal

In 2025, the Company's primary goal is "Business development supported by strengthened organizational capabilities, high-quality human resources (HR), Good Corporate Governance (GCG), risk management, information technology (IT) capabilities, and service excellence.".

Strategic Goal

The Company's strategic objectives for 2025 include:

1. Strengthening organizational capabilities
2. Enhancing the effectiveness and efficiency of business processes
3. Strengthening organizational capabilities
4. Leveraging information technology (IT) as an enabler and driver of the business
5. Increasing guarantee capacity
6. Strengthening internal control and supervision

Strategy

The Company's strategies for 2025 include:

1. Development of distribution channels
2. Optimization of state-owned enterprise (SOE) synergies
3. Joint marketing (IFG Group synergy)
4. Development of non-assignment products
5. Development of the Financing Guarantee Originating System (FGOS)
6. *Prudent* underwriting through risk analysis, claims management, and subrogation
7. Effective financial and investment management
8. Strengthening KUR business across all channeling institutions
9. Organizational strengthening
10. Enhancement of human resources (HR) competencies

11. Penguatan budaya kerja AKHLAK, *risk culture*, & *customer centric culture*
12. Implementasi dan penguatan prinsip ESG dalam operasional perusahaan
13. Penguatan tata kelola perusahaan
14. Pemanfaatan sistem yang terintegrasi dan *data analytic*
15. Optimalisasi platform digital
16. *Enhancement Data Analytic System* dalam pengambilan keputusan melalui AI
17. Peningkatan tingkat keamanan sistem digital
18. Mendukung *shared services* dengan IFG Holding
19. Menjaga profitabilitas untuk bisnis penugasan dan peningkatan profitabilitas untuk nonpenugasan
20. Penguatan struktur permodalan
21. Peningkatan bisnis melalui kerja sama penjaminan
22. Peningkatan fokus pada risiko, kepatuhan dan transparansi
23. Memberikan rekomendasi atas permasalahan strategis
24. Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki aplikasi sistem yang berfungsi sebagai bank data perkembangan bisnis dan hasil analisanya.

Kebijakan

Kebijakan Perseroan tahun 2025, di antaranya:

- *Aggresive & Prudent Underwriting.*
- *Cost Efficiency*
- *Conservative Investment*
- *Synergy Business Operation and Governance*
- *Agile Risk Management*
- *Digital Business Driver*

Program Kerja Inti

Program kerja inti yang dilaksanakan Perseroan sepanjang tahun 2025, di antaranya:

1. Pembuatan *on boarding* pegawai
2. Pembuatan *talent pool* dan *succession planning*
3. Optimalisasi potensi bisnis secara kewilayahan sesuai dengan titik tumbuh
4. Pembiayaan yang disalurkan oleh mitra bisnis (program & nonprogram)
5. Melakukan kerja sama co-pemasaran atas penjaminan pembiayaan konsumen dengan asuransi jiwa
6. Pengembangan produk baru nonpenugasan (CF dan NCF)
7. Penerapan *host-to-host* klaim dan subrogasi
8. Pengembangan dan penerapan *Mobile Application Klaim*
9. Pelaksanaan manajemen klaim berbasis bisnis dengan proporsi yang tepat
10. Pemilihan penempatan deposito yang memiliki *eq rate* tinggi
11. Pembuatan master plan penguatan organisasi
12. Penyusunan *job desc*, *career path*, penentuan remunerasi, dan standar jabatan dan fungsional
13. Perbaikan sistem SDM (*recruit* hingga *retire*)

11. Strengthening of AKHLAK work culture, risk culture, and customer-centric culture
12. Implementation and strengthening of ESG principles in the Company's operations
13. Strengthening corporate governance
14. Utilization of integrated systems and data analytics
15. Optimization of digital platforms
16. Enhancement of data analytics systems for decision-making through AI
17. Improvement of digital system security
18. Support for shared services with IFG Holding
19. Maintaining profitability for assignment-based business and improving profitability for non-assignment business
20. Strengthening capital structure
21. Business growth through guarantee cooperation
22. Increased focus on risk, compliance, and transparency
23. Provision of recommendations on strategic issues
24. The Internal Audit Unit (SPI) operates a system application that functions as a database for business development and its analytical results.

Policy

The Company's 2025 policies include:

- *Aggresive & Prudent Underwriting.*
- *Cost Efficiency*
- *Conservative Investment*
- *Synergy Business Operation and Governance*
- *Agile Risk Management*
- *Digital Business Driver*

Work Program

The Company's core work programs for 2025 include:

1. Development of employee onboarding programs
2. Establishment of talent pool and succession planning
3. Optimization of regional business potential in line with financing growth areas
4. Financing disbursed by business partners (program and non-program)
5. Co-marketing cooperation for consumer financing guarantees with life insurance companies
6. Development of new non-assignment products (CF and NCF)
7. Implementation of host-to-host claims and subrogation processes
8. Development and implementation of a mobile claims application
9. Implementation of business-based claims management with appropriate proportioning
10. Selection of deposit placements with high equivalent rates
11. Development of a master plan for organizational strengthening
12. Preparation of job descriptions, career paths, remuneration schemes, and position and functional standards
13. Improvement of HR systems (from recruitment to retirement)

14. Pelaksanaan Kegiatan Bisnis yang Berintegritas Penguatan manajemen risiko dan peningkatan *level Risk Maturity Index*
15. Mendukung pengembangan sistem yang terintegrasi dan *data analytic*
16. Pelaksanaan *Penetration Test* bagi seluruh aplikasi layanan digital
17. Integrasi data kebutuhan operasional bisnis dengan induk dan IFG *Holding* khususnya untuk pengelolaan SDM, TI, dan pengadaan
18. Pelaksanaan training yang terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan posisi jabatan dan unit kerja
19. Penagihan piutang IJK, klaim reas secara rutin kepada cabang melalui rekonsiliasi
20. Mengkaji potensi mitra kerja sama untuk *joint capacity* dalam penjaminan
21. Pelaksanaan kegiatan audit (*assurance*): Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit internal ISO, Audit dengan tujuan tertentu
22. Membangun aplikasi sistem manajemen audit internal (*Internal Audit Management System/IAMS*)

Strategi Pemasaran

Perseroan meyakini bahwa penerapan strategi pemasaran yang efektif dan terarah merupakan faktor penting dalam mendorong pencapaian kinerja yang optimal. Atas dasar keyakinan tersebut, Perseroan secara konsisten merumuskan serta mengimplementasikan berbagai inisiatif pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pasar.

Sebagai wujud komitmen tersebut, sepanjang periode pelaporan Perseroan telah melaksanakan sejumlah program dan langkah strategis di bidang pemasaran, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Compliance review* POJK terkait ketentuan pemasaran bersama.
2. Inisiasi kerja sama pemasaran bersama dengan *life insurance*.
3. Pengembangan *distribution channel*.
4. *Enhanchement monitoring dashboard* modul laporan keuangan yang terintegrasi, *marketshare* dan realisasi beban pemasaran, sebagai media data analisis.
5. Optimalisasi *Online System Application* (OSA) sebagai *tools monitoring Host to Host* (H2H).
6. Implementasi kerja sama *Host to Host* (H2H) kepada mitra bisnis.
7. Perluasan implementasi *Host to Host* (H2H) pada produk dan mitra bisnis.
8. Analisa beban kerja sebagai landasan peningkatan produktivitas pegawai.
9. Penyelarasan *standard operational procedure* terhadap prinsip GCG.
10. *Enhanchement Application Programming Interface* (API) serta *mobile apps* Askrindo Syariah.
11. Optimalisasi Bisnis Program melalui rekonsiliasi data, support kegiatan mitra bisnis,dan penguatan organisasi pemasaran untuk bisnis program

14. Implementation of integrity-based business activities and strengthening of risk management, including improvement of the Risk Maturity Index
15. Support for the development of integrated systems and data analytics
16. Conducting penetration testing for all digital service applications
17. Integration of operational business data requirements with the parent company and IFG Holding, particularly for HR, IT, and procurement management
18. Implementation of structured and continuous training in accordance with job positions and work units
19. Routine collection of Kafalah Fee Income (IJK) receivables and reinsurance claims from branches reconciliation processes
20. Assessment of potential business partners for joint capacity in guarantee activities
21. Implementation of assurance activities: operational audits, performance audits, internal ISO audits, and ad hoc audits
22. Development of an Internal Audit Management System (IAMS) application

Marketing Strategies

The Company believes that the implementation of effective and targeted marketing strategies is a key factor in driving optimal performance. Based on this belief, the Company consistently formulates and implements various marketing initiatives tailored to market needs and dynamics.

As a manifestation of this commitment, throughout the reporting period the Company has carried out a number of programs and strategic measures in the field of marketing, which include the following:

1. Compliance review of OJK regulations related to co-marketing provisions.
2. Initiation of co-marketing cooperation with life insurance companies.
3. Development of distribution channels.
4. Enhancement of the integrated monitoring dashboard for financial reporting, market share, and marketing expense realization as a data analytics tool.
5. Optimization of the Online System Application (OSA) as a monitoring tool for Host-to-Host (H2H) systems.
6. Implementation of Host-to-Host (H2H) cooperation with business partners.
7. Expansion of Host-to-Host (H2H) implementation across products and business partners.
8. Workload analysis as a basis for improving employee productivity.
9. Alignment of standard operating procedures with GCG principles.
10. Enhancement of Application Programming Interface (API) and the Askrindo Syariah mobile application.
11. Optimization of program-based business through data reconciliation, support for business partner activities, and strengthening of the marketing organization for program business.

12. Melaksanakan analisis produk atas kebutuhan principal eksisting terhadap produk penjaminan lainnya.
13. Revitalisasi *term & condition* penjaminan yang berorientasi pada kontinuitas bisnis.
14. Optimalisasi bisnis penjaminan KPR Sejahtera FLPP melalui peningkatan *market share*, rekonsiliasi data dan perbaikan proses bisnis penjaminan.
15. Optimalisasi bisnis penjaminan *project financing*, modal kerja/ investasi, *linkage small medium enterprise*, dan *supply chain financing* melalui inisiasi
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2025 bersama potensi bisnis segmen koorporasi serta penyusunan modal penjaminan unggulan khusus untuk *post financing*.
17. Peningkatan bisnis *non-cash financing* sesuai dengan risk *acceptance* criteria melalui perbaikan tata kelola bisnis KBG, reaktivasi produk KBG dengan mitra bisnis serta kerja sama produk KBG dengan Bank Rakyat Indonesia.
18. Melaksanakan kegiatan organizing, *reconciling*, & *cleansing* data kafalah aktif dengan mitra bisnis.
19. Penyusunan PKS *co-guarantee* dengan perusahaan penjaminan daerah.

12. Product analysis of existing principals' needs for other guarantee products.
13. Revitalization of guarantee terms and conditions oriented toward business continuity.
14. Optimization of KPR Sejahtera FLPP guarantee business through increased market share, data reconciliation, and improvement of guarantee business processes.
15. Optimization of guarantee business for project financing, working capital/investment, SME linkage, and supply chain financing through strategic initiatives.
16. 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) development together with corporate segment business potential, as well as preparation of superior guarantee capital schemes specifically for post-financing.
17. Enhancement of non-cash financing business in accordance with risk acceptance criteria through improvements in KBG business governance, reactivation of KBG products with business partners, and product cooperation with Bank Rakyat Indonesia.
18. Implementation of organizing, reconciling, and cleansing of active kafalah data with business partners.
19. Preparation of co-guarantee cooperation agreements (PKS) with regional guarantee companies.

Pangsa Pasar

Pada tahun 2025, nilai *outstanding* penjaminan Askrindo Syariah tercatat sebesar Rp33,97 miliar. Adapun total *outstanding* industri penjaminan syariah pada periode yang sama mencapai Rp74,11 miliar. Dengan capaian tersebut, pangsa *outstanding* penjaminan Askrindo Syariah terhadap keseluruhan industri penjaminan syariah pada tahun 2025 tercermin sebesar 45,84%.

Market Share

In 2025, Askrindo Syariah's outstanding guarantee value stood at Rp33,97 billion. Meanwhile, the total outstanding value of the sharia guarantee industry during the same period reached Rp74,11 billion. With these results, Askrindo Syariah's share of the total outstanding value of the sharia guarantee industry in 2025 was 45,84%.

Posisi Aksrindo Syariah

Berdasarkan hasil evaluasi yang mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman (analisis SWOT), pada tahun 2025 Perseroan kembali berada pada posisi kuadran 1. Posisi ini mencerminkan bahwa Perseroan tengah berada dalam fase pertumbuhan (*growth*) dengan prospek pengembangan usaha yang positif.

Askrindo Syariah Position

Based on the results of an evaluation that took into account strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT analysis), the Company will once again be positioned in Quadrant 1 by 2025. This position indicates that the Company is currently in a growth phase with positive prospects for business development.

Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Kebijakan pembagian dividen Perseroan ditetapkan berdasarkan Laba Bersih yang dihasilkan, untuk kemudian didistribusikan kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

The Company's dividend policy is determined based on the net income generated, which is then distributed to the shareholders listed in the Company's shareholder registry.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 07/RR-RUPS/2025 dan 05/RR-YKKA/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 disampaikan bahwa pemegang saham menetapkan

Based on the Circular Resolution of the Shareholders of PT Asuransi Pembiayaan Askrindo Syariah Number 07/RR-RUPS/2025 and 05/RR-YKKA/VI/2025 dated June 30, 2025, the shareholders resolved on the appropriation of the

penggunaan laba bersih Perusahaan atas Tahun Buku 2024 sebesar Rp136,79 miliar dengan alokasi sebesar Rp23,21 miliar sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dan selisih laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi dividen tunai sebesar Rp113,59 miliar sebagai cadangan perusahaan. Hasil Keputusan tersebut disampaikan melalui surat dari PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 1086/DIR/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025.

Company's net profit for the 2024 Financial Year amounting to Rp136.79 billion with an allocation of Rp23.21 billion as cash dividends to shareholders and the difference in net profit for the current year after deducting cash dividends of Rp113.59 billion as company reserves. The resolution was communicated through a letter from PT Asuransi Kredit Indonesia Number 1086/DIR/VII/2025 dated July 18, 2025.

Program Kepemilikan Saham Karyawan/Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Perseroan belum menetapkan maupun mengimplementasikan program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen hingga akhir periode 2025.

The Company has not yet established or implemented an employee and/or management stock ownership program through the end of 2025.

Informasi Material yang Berkaitan dengan Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang

Material Information Related To Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and/or Debt Restructuring

Pada tanggal 23 Desember 2025, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar"), dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat untuk rencana penggabungan usaha antara Perusahaan dengan Jamsyar, yang penyelesaian rencana ini bergantung pada pemenuhan seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Penggabungan Bersyarat.

On December23, 2025, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Kredit Indonesia Syariah ("Jamsyar"), and the Company signed a Conditional Merger Agreement in relation to the proposed business merger between the Company and Jamsyar. The completion of this plan is subject to the fulfillment of all terms and conditions stipulated in the Conditional Merger Agreement.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transaction With Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties

Perseroan tidak melaksanakan transaksi yang bersifat material yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak berelasi atau afiliasi hingga akhir periode 2025.

The Company has not engaged in any material transactions involving conflicts of interest with related parties or affiliates through the end of 2025.

Perubahan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan

Changes in Law with Significant Effects

Perseroan tidak mengidentifikasi adanya perubahan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2025.

The Company has not identified any changes or legal provisions that would have a significant impact on the Company's business operations in 2025.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in the Accounting Policy

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:
- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information; and*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability.*

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:
- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Tak berwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:
- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 219: Employee Benefits;*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 236 Impairment of Asset;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets; and*
- *PSAK 240: Investment Property.*



06



Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Pada tahun 2025, Askrindo Syariah terus memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan, transparan, dan berintegritas. Penerapan GCG dilaksanakan secara konsisten dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta selaras dengan ketentuan regulator dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional Askrindo Syariah.

Askrindo Syariah memastikan bahwa seluruh organ perusahaan, meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta komite-komite pendukung lainnya, menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing secara efektif dan profesional. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara keseluruhan dengan optimal, sedangkan Dewan Pengawas Syariah melaksanakan fungsi pengawasan dan memastikan agar setiap kegiatan operasional, produk, dan kebijakan Perusahaan mematuhi prinsip syariah. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan secara *prudent*, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penguatan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal terus dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan pengendalian yang efektif terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Sebagai entitas berbasis syariah, Askrindo Syariah juga mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan seluruh kegiatan usaha dan produk telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Askrindo Syariah turut memperkuat budaya tata kelola melalui penerapan kode etik, *whistleblowing system*, serta peningkatan kesadaran GCG di seluruh lini organisasi. Dengan penguatan tata kelola yang berkelanjutan ini, Askrindo Syariah berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

In 2025, Askrindo Syariah continued to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a key foundation for conducting sustainable, transparent, and integrity-driven business operations. The implementation of GCG was carried out consistently, guided by the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, and aligned with regulatory requirements as well as the sharia values that form the basis of Askrindo Syariah's operations.

Askrindo Syariah ensures that all corporate organs, including the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, Supervisory Board, the Board of Directors, and supporting committees, carry out their respective roles and responsibilities effectively and professionally. The Board of Commissioners performs its overall supervisory function optimally, Meanwhile, the Sharia Supervisory Board carried out its supervisory function and ensured that the Company's operational activities, products, and policies complied with Sharia principles. In addition, the strengthening of risk management, compliance, and internal audit functions continues to be carried out in an integrated manner to ensure effective control over all company activities. As a sharia-based entity, Askrindo Syariah also optimizes the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) in ensuring that all business activities and products comply with sharia provisions.

Askrindo Syariah also strengthens its governance culture through the implementation of a code of ethics, whistleblowing system, and increased GCG awareness across all levels of the organization. Through this continuous strengthening of governance, Askrindo Syariah is committed to enhancing stakeholder trust and supporting sustainable business growth.

Landasan Hukum
Legal Basis

Penerapan aspek-aspek GCG di Perseroan merujuk pada sejumlah ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta relevan dengan bisnis utama Perseroan, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Implementation of GCG principles within the Company refers to a number of laws and regulations applicable in Indonesia which are relevant to the Company's core business, among others:

1. *Law of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 on Personal Data Protection*
2. *Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation*

3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
8. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
9. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
12. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat
18. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
19. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI)
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

3. *Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions*
4. *Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Guarantees*
5. *Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure*
6. *Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions*
7. *Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies*
8. *Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs)*
9. *Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption*
10. *Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*
11. *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions*
12. *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2008 on Guarantee Institutions*
13. *Financial Services Authority Regulation No. 10 of 2025 on Business Licensing and Institutional Arrangements for Guarantee Institutions*
14. *Financial Services Authority Regulation No. 11 of 2025 on the Operations of Guarantee Institutions*
15. *Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector*
16. *Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2023 on the Engagement of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities*
17. *Financial Services Authority Regulation No. 3 of 2023 on Enhancing Financial Literacy and Financial Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and the Public*
18. *Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises*
19. *Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises*
20. *Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.05/2022 dated July 8, 2022 on the Supervision of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI)*
21. *Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.05/2021 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions*
22. *Financial Services Authority Regulation No. 24/POJK.05/2019 on the Business Plans of Non-Bank Financial Services Institutions*

23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/ POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.05/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan
28. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/ POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
35. Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/ SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
39. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah

23. Financial Services Authority Regulation No. 51/ POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies
24. Financial Services Authority Regulation No. 3/ POJK.05/2017 on Good Corporate Governance for Guarantee Institutions
25. Financial Services Authority Regulation No. 2/ POJK.05/2017 on the Operations of Guarantee Institutions
26. Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.05/2017 on Business Licensing and Institutional Arrangements for Guarantee Institutions
27. Financial Services Authority Regulation No. 27/ POJK.05/2016 on Fit and Proper Assessments for Controlling Parties of Insurance Companies, Pension Funds, Financing Companies, and Guarantee Companies
28. Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 4 of 2016 on Information Security Management Systems
29. Financial Services Authority Regulation No. 56/ POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter
30. Financial Services Authority Regulation No. 55/ POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work
31. Financial Services Authority Regulation No. 18/ POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates
32. Financial Services Authority Regulation No. 17/ POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates
33. Financial Services Authority Regulation No. 10/ POJK.05/2014 dated August 27, 2014 on the Risk Rating Assessment of Non-Bank Financial Services Institutions
34. Financial Services Authority Regulation No. 7/ POJK.05/2014 on the Examination of Guarantee Institutions
35. Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 36 of 2014 on Procedures for the Registration of Electronic System Operators
36. Financial Services Authority Circular Letter No. 54/ SEOJK.05/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions
37. Financial Services Authority Circular Letter No. 15/ SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates
38. Financial Services Authority Circular Letter No. 14/ SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates
39. Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 74/DSN-MUI/I/2009 on Sharia Guarantees

Sementara dari sisi internal, Perseroan juga memiliki Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) sebagai berikut:

1. SK Direksi PT JPAS Nomor 073/KEP-DIR/III/2021 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
2. SK Direksi PT JPAS Nomor 0001/SK/G.10/DIR-JPAS/I/2024 tentang *Board Manual*;
3. SK Direksi PT JPAS Nomor 0182/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2023 tentang Pedoman *Code of Conduct*;
4. SK Direksi PT JPAS Nomor 076/KEP-DIR/III/2021 tentang Pedoman Benturan Kepentingan;
5. SK Direksi PT JPAS Nomor 077/KEP-DIR/III/2021 tentang Pedoman Transparansi dan *Disclosure*;
6. SK Direksi PT JPAS Nomor 0034/SK/G.10/DIR-JPAS/VI/2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
7. SK Direksi PT JPAS Nomor 079/KEP-DIR/VI/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Internally, the Company also has a Code of Good Corporate Governance (GCG) Guidelines which was ratified by Decree of the Board of Directors as follows:

1. *Decree of the Board of Directors of PT JPAS Number 073/KEP-DIR/III/2021 regarding Guidelines for Good Corporate Governance (GCG);*
2. *Decree of the Board of Directors of PT JPAS Number 0001/SK/G.10/DIR-JPAS/I/2024 concerning Board Manual;*
3. *Decree of the Board of Directors Number of PT JPAS Number 0182/ SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2023 regarding Code of Conduct Guidelines;*
4. *Decree of the Board of Directors of PT JPAS Number 076/KEP-DIR/III/2021 concerning Guidelines for Conflicts of Interest;*
5. *Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Number 077/KEP-DIR/III/2021 concerning Guidelines for Transparency and Disclosure;*
6. *Decree of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Number 0034/SK/G.10/DIR-JPAS/VI/2022 concerning Guidelines for the Whistleblowing System;*
7. *Decree of the Board of Directors of PT JPAS Number 079/KEP-DIR/VI/2020 concerning Gratification Control Guidelines.*

Prinsip-Prinsip GCG

GCG Principles

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Askrindo Syariah, prinsip-prinsip GCG terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran atau disebut TARIF.

Based on Askrindo Syariah'sGood Corporate Governance Guidelines, the GCG principles consist of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness or TARIF.

Prinsip-Prinsip GCG *GCG Principles*	**Pedoman Pokok Pelaksanaan** *Basic Guidelines for Implementation*
Keterbukaan *Transparency*	a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Pemanku Kepentingan Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, namun tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan Perusahaan harus tertulis secara proporsional dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan. *a. The Company must provide information in a timely, adequate, clear, accurate, and comparable manner and easily accessible to Stakeholders in accordance with their rights.* *b. Information that must be disclosed includes, but is not limited to the Company's vision, mission, business objectives and strategy, financial condition, composition and compensation of the management, controlling shareholders, share ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and their family members in the Company and other companies, risk management system, internal supervision and control system, GCG system and implementation and level of compliance, and important events that may affect the Company's condition.* *c. The principle of openness adopted by the Company does not reduce the obligation to fulfill the confidentiality provisions of the Company in accordance with laws and regulations, office secrets, and personal rights.* *d. Company policies must be written proportionally communicated to Stakeholders.*

Prinsip-Prinsip GCG *GCG Principles*	**Pedoman Pokok Pelaksanaan** *Basic Guidelines for Implementation*
Akuntabilitas *Accountability*	a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*), dan strategi Perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua Organ Perusahaan dan semua pegawai mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ Perusahaan dan semua pegawai harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati. *a. The Company must establish the details of duties and responsibilities of each Company Organ and all employees clearly and in line with the Company's vision, mission, corporate values, and strategy.* *b. The Company must ensure that all Company Organs and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities and roles in the implementation of GCG.* *c. The Company must ensure the existence of an effective internal control system in the management of the Company.* *d. The Company must have performance measures for all levels of the Company that are consistent with the Company's business objectives, and have a reward and punishment system.* *e. In carrying out their duties and responsibilities, each Company Organ and all employees must adhere to the agreed business ethics and code of conduct.*
Pertanggungjawaban *Responsibility*	a. Organ Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan Perusahaan (*by-laws*). b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. *a. The Company's organs must adhere to the principle of prudence and ensure compliance with laws and regulations, articles of association, and Company regulations (by-laws).* *b. The Company must carry out social responsibility by, among others, caring for the community and environmental sustainability, especially around the Company by making adequate planning and implementation.*
Kemandirian *Independency*	a. Masing-masing Organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan/atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. *a. Each Organ of the Company must avoid domination by any party, not affected by certain interests, free from conflict of interest and from any influence or pressure, so that decision making can be done objectively.* *b. Each Organ of the Company must carry out its functions and duties in accordance with the articles of association and laws and regulations, not dominating each other and/or shifting responsibilities between one another.*
Kesetaraan dan Kewajaran *Equality and Fairness*	a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip tranparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. *a. The Company must provide opportunities for Stakeholders to provide input and express opinions for the benefit of the Company and open access to information in accordance with the principles of transparency within the scope of their respective positions.* *b. The Company shall provide equal and fair treatment to Stakeholders in accordance with the benefits and contributions made to the Company.* *c. The Company shall provide equal opportunities in recruitment, career and perform their duties professionally without distinguishing ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.*

Evaluasi Penerapan GCG

Evaluation of GCG Implementation

Perseroan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan faktor/parameter dan metodologi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin dan Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

Every year, the Company conducts aself-assessment of the implementation of GCG principles using factors/parameters and methodologies established by the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulation Number 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions and OJK Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantor Institutions.

Pada Periode tahun 2025, penilaian GCG memperoleh Skor 93,60 atau meningkat dari penilaian GCG tahun sebelumnya sebesar 93,52 dengan kategori "Sangat Baik." Penilaian GCG tersebut menjadi komponen/faktor penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan, berdasarkan SE OJK Nomor 18/SEOJK.05/2018.

In the 2025 period, the GCG assessment yielded a score of 93,60, an improvement from the previous year's score of 93,52, thereby maintaining the "Very Good" category. This GCG assessment also serves as a component of the Financial Soundness Rating of the Company, as stipulated in OJK Circular Letter No. 18/SEOJK.05/2018.

Sejak 2017 Askrindo Syariah telah melakukan sertifikasi ISO 9001. Dalam menjaga implementasi GCG untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa, secara berkala setiap tahunnya Perseroan melakukan *Surveillance* sertifikasi ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu untuk menjaga implementasi sertifikasi ISO secara berkelanjutan.

Since 2017, Askrindo Syariah has held ISO 9001 certification. As part of its commitment to ensuring the consistent implementation of GCG principles in enhancing the quality of its products and services, the Company conducts an annual surveillance audit of its ISO 9001 Quality Management System.

No	Strategi Utama *Main Strategies*	Bobot *Weight*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*
			% Capaian *Achievement*
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah *Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board*	35,00	33,96
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris *Completeness and implementation of the duties of Audit Committee or Board of Commissioners' supporting functions*	5,00	4,92
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal *Implementation of compliance functions, internal auditors, and external auditors*	7,50	7,50
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi *Implementation of risk management, internal control systems, and information technology governance*	10,00	8,73
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain *Implementation of remuneration policies and other facilities*	2,50	2,09
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan *Transparency of the financial and non-financial condition of the Company*	15,00	12,50
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan *Long-term plan and annual work plan and budget*	7,50	7,50
8	Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih *Disclosure of share ownership of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board that reaches 5% or more*	2,50	2,50

No	Strategi Utama *Main Strategies*	Bobot *Weight*	Realisasi Tahun 2025 *Realization in 2025*
			% Capaian *Achievement*
9	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah *Disclosure of financial and family relationships of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board*	5,00	5,00
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan *Disclosure of other important matters to Financial Services Authority*	10,00	8.90
SKOR KESELURUHAN *TOTAL SCORE*		100,00	93,60

Mengacu pada hasil penilaian sebagaimana tercermin pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa total skor implementasi GCG tahun 2025 yang diperoleh Perseroan adalah sebesar 93,60 dari total nilai maksimal 100,00 yang setara dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG: SANGAT BAIK.

Referring to the assessment results as reflected in the table above, it can be seen that the total score of GCG implementation in 2025 obtained by the Company is 93,60 out of a total maximum score of 100.00 which is equivalent to the classification of the quality of GCG implementation: VERY GOOD.

Perbaikan Signifikan Pada Implementasi GCG Tahun 2025

Significant Improvement on GCG Implementation in 2025

Setelah melalui proses *self-assessment* GCG yang cukup komprehensif, Perseroan mendapati bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang dapat ditingkatkan lagi kualitas penerapannya pada tahun-tahun mendatang.

After going through a fairly comprehensive GCG self-assessment process, the Company found that there is still room for improvement that can be improved in the quality of its implementation in the coming years.

Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan sejumlah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan, antara lain:

1. Perseroan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) beserta peraturan turunannya yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan perseroan serta bisnis perseroan.
2. Perseroan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala.
3. Perseroan melaksanakan pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perseroan melaksanakan kebijakan sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan (*Whistleblowing System* atau *WBS*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

In 2025, the Company has made a number of efforts aimed at increasing or improving the quality of the implementation of GCG principles in the Company, among others:

1. *The Company has Good Corporate Governance Guidelines (GCG Guidelines) along with its derivative regulations which are reviewed and updated regularly in accordance with the development of the company and the company's business.*
2. *The Company measures the implementation of Good Corporate Governance on a regular basis.*
3. *The Company implements gratification control in accordance with applicable regulations.*
4. *The Company implements a reporting system policy for alleged irregularities in the Company (Whistleblowing System or WBS) in accordance with applicable provisions in the Company.*

5. Pemegang saham/RUPS telah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi termasuk menetapkan komposisi anggota Dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemegang saham/RUPS telah memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
8. Pemegang saham telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
9. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi telah melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan *Board Manual*.

10. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi telah melakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
11. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti program pengenalan dan melaksanakan program pelatihan/ pengembangan secara berkelanjutan.

12. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi telah melaksanakan rapat secara berkala untuk memastikan bahwa praktik GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
13. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah memiliki organ pendukung untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

14. Perseroan telah menyediakan informasi Perusahaan kepada *stakeholders*.
15. Perseroan telah menyediakan bagi *stakeholders* atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
16. Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan.

5. The shareholders/General Meeting of Shareholders (GMS) appointed and dismissed members of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, including determining the composition of the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors, in accordance with the applicable laws and regulations.
6. Shareholders/RUPS have made decisions necessary to safeguard the Company's long-term and short-term business interests in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

7. The GMS makes decisions through an open and fair process and can be accounted for.
8. Shareholders have implemented Good Corporate Governance in accordance with their authority and responsibility.
9. The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors have carried out their functions, duties, and responsibilities in accordance with the Board Manual.
10. The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors have carried out a clear division of duties, authorities, and responsibilities and determined the factors needed to support the implementation of their duties.
11. The Board of Commissioners and the Board of Directors participated in orientation programs and continuously undertook training and professional development programs.
12. The Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors have conducted regular meetings to ensure that GCG practices have been implemented effectively and sustainably.
13. The Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors were supported by dedicated supporting organs to facilitate the effective execution of their duties and responsibilities.
14. The Company has provided Company information to stakeholders.
15. The Company has provided stakeholders with relevant, adequate, and reliable Company information in a timely and periodic manner.
16. The Company has prepared the Annual Report and Sustainability Report.

Mekanisme dan Struktur GCG

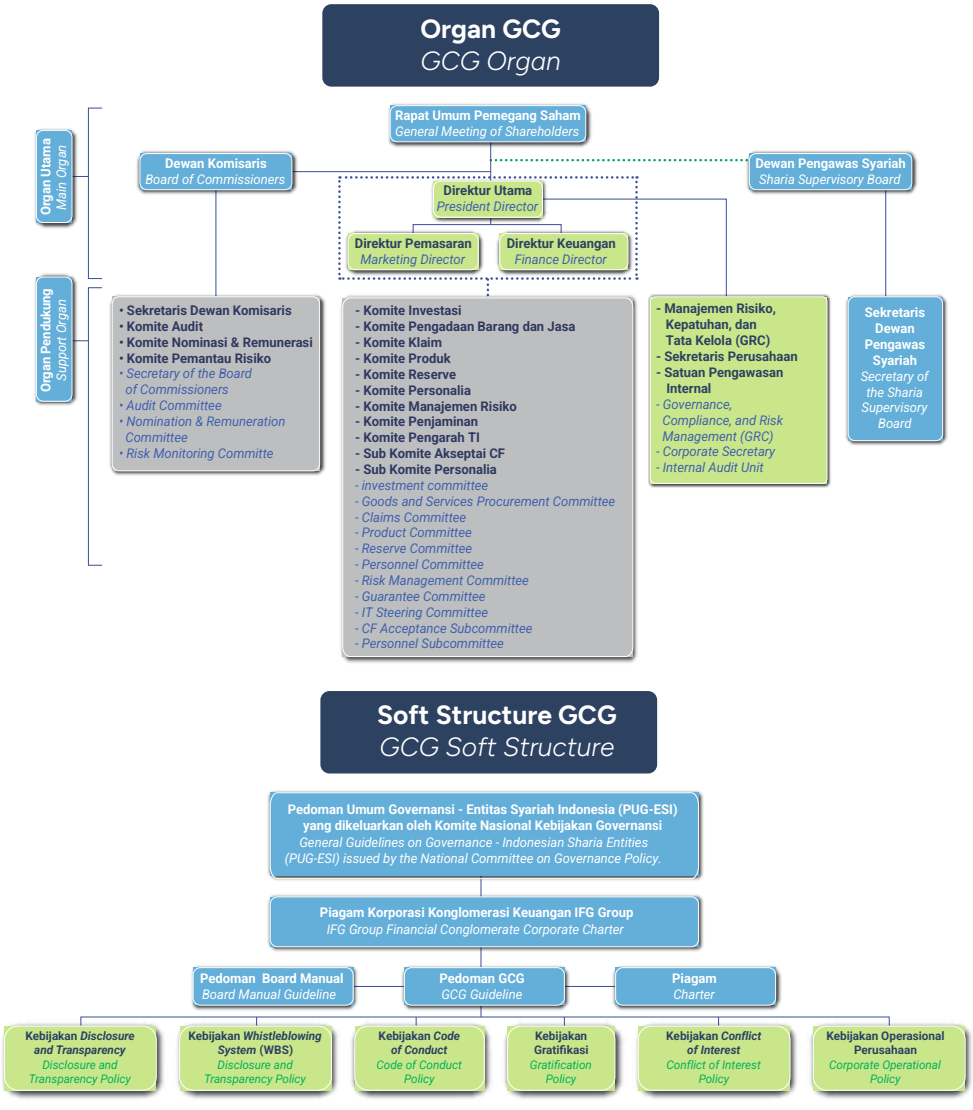
GCG Structure and Mechanism

Agar implementasi GCG berjalan lebih terarah, Perseroan mengoptimalkan keterlibatan organ utama dan organ pendukung dalam proses penerapan GCG yang berkelanjutan. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2007, yang dimaksud dengan organ utama adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Sementara yang berperan sebagai organ pendukung adalah komite maupun unit kerja di bawah organ utama, seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola.

In order for GCG implementation to run more purposefully, the Company optimizes the involvement of the main organs and supporting organs in the process of sustainable GCG implementation. Referring to Law No. 40 of 2007, the main organs are the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors. Meanwhile, the supporting organs are committees and work units under the main organs, such as the Secretary of the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Internal Audit Unit (SPI) and Risk Management, Compliance and Governance.

Selain memiliki struktur organ GCG yang lengkap dan solid, Perseroan juga memiliki perangkat *softstructure* GCG berupa pedoman atau kebijakan internal yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perseroan, seperti Kebijakan Penerapan GCG, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pengelolaan SDM, dan lainnya.

In addition to having a complete and solid GCG organ structure, the Company also has GCG softstructure tools in the form of internal guidelines or policies that must be obeyed by all Company personnel, such as GCG Implementation Policy, Risk Management Policy, HR Management Policy, and others.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG Perseroan yang berfungsi sebagai media formal bagi para pemegang saham atau pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan modal usaha dan inisiatif pengelolaan Perseroan yang akan dijalankan oleh Direksi. Pada pelaksanaannya, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Namun, tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengintervensi tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Direksi.

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest body in the Company's GCG structure that functions as a formal means for shareholders or stakeholders to take strategic decisions relating to the capital invested and Company management initiatives that will be carried out by the Board of Directors. In practice, GMS has the authority which is not delegated to the Board of Commissioners, Board of Director, and Supervisory Board, as stipulated in prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association. Yet, without prejudice to GMS's authority in exercising rights according to the Articles of Association and Legislation, shareholders are not authorized to intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors.

Setiap tahun, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) yang secara umum membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan;
2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Penunjukan Akuntan Publik; dan
4. Putusan hal-hal lain yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dan atau seorang atau lebih Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Every year, the Company convened Annual GMS (AGMS) which generally discusses the following matters:

1. *Approval of Annual Reports;*
2. *Approval of Corporate Work Plan and Budget (RKAP);*
3. *Appointment of Public Accountant;*
4. *Resolution of other matters as proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholder in accordance with the provisions of the Articles of Association.*

Pelaksanaan RUPS 2025

Pada tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan 3 kali RUPS yang pelaksanaannya dilakukan secara sirkuler dan juga daring. Berikut ini adalah sekilas informasi mengenai agenda rapat yang dibahas dalam RUPS tersebut, antara lain:

Implementation Of The 2025 GMS

In 2025, the Company has held 3 GMS, which were conducted circularly and online. The are summary information regarding the meeting agenda discussed at the GMS, among others:

Tanggal Rapat *Meeting Date*	**Agenda Rapat** *Meeting Agenda*
30 Januari 2025 *January 30, 2025*	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah *Approval of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee*
30 Juni 2025 *June 30, 2025*	• Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2024 • Penetapan penggunaan laba (rugi) bersih perseroan tahun buku 2024 • Penetapan remunerasi (gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk direksi dan dewan komisaris tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun buku 2024 bagi direksi dan dewan komisaris atas kinerja tahun buku 2024 • Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 • *Approval of the Annual Report on the Company's condition and operations during the 2024 fiscal year* • *Determination of the allocation of the Company's net profit (loss) for the 2024 fiscal year* • *Determination of remuneration (salaries/honoraria, including benefits and other allowances) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2025 fiscal year, as well as performance bonuses for the 2024 fiscal year for the Board of Directors and the Board of Commissioners based on performance during the 2024 fiscal year* • *Appointment of a public accounting firm to audit the company's financial statements for the 2025 fiscal year*
3 November 2025 *November 3, 2025*	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun Buku 2025 *Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Financial Statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for Fiscal Year 2025*

Informasi Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan 2024

Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan 2024 telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun buku 2024 sehingga tidak ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2025.

Information on Follow-up To The 2024 Annual GMS Results

All of the 2024 Annual GMS resolutions have been carried out entirely during the 2024 financial year, so there's nothing to be disclosed in the 2025 Annual Report.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah salah satu organ utama Perseroan yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan pemberi nasihat kepada Direksi, serta berperan dalam memastikan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG telah berjalan efektif pada seluruh tingkatan organisasi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta menjalankan proses nominasi auditor. Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS.

The Board of Commissioners is one of the Company's main organs that is responsible for conducting supervisory and advisory functions over the Board of Directors, as well as plays a role in ensuring that the GCG principles implementation has been running effectively at all levels of the organization. In addition, the Board of Commissioners also provides remuneration recommendations for members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as performs the auditor nominating process. As a form of accountability regarding implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners submits a supervisory report to the GMS.

Pengungkapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Perseroan memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 00001/SK/G.10/DIR-JPAS/I/2024 tentang *Board Manual*. Pada penerapannya, pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komisaris Perseroan. *Board Manual* Dewan Komisaris memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata kerja Dewan Komisaris dan memuat topik-topik berikut ini:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Dewan Komisaris
- Bab III : Dewan Pengawas Syariah
- Bab IV : Direksi
- Bab V : Kegiatan Antara Organ Perusahaan
- Bab VI : Penutup

Disclosure of Board of Commissioners Work Guideline (Board Manual)

The Company has Work Guidelines of the Board of Commissioners (Board Manual) which was ratified through the Board of Directors' Decree 00001/SK/G.10/DIR-JPAS/I/2024 regarding Board Manual. In practice, these guidelines serve as a reference and work order which is binding and shall be obeyed by all members of the Company's Commissioners. The Board of Commissioners' Board Manual contains regulations relating to the work procedures of the Board of Commissioners and contains the following topics:

- *Chapter I : Introduction*
- *Chapter II : Board of Commissioners*
- *Chapter III : Sharia Supervisory Board*
- *Chapter IV : Directors*
- *Chapter V : Activity Among Company Organs*
- *Chapter VI : Conclusion*

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan.

Duties and Responsibilities

As stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is required to conduct a series of assigned duties and responsibilities, among others as follows:

1. *To provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company.*

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan ke dalam RKAP.
9. Membentuk Komite Audit dan Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS
10. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
11. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris senantiasa berjalan efektif dan optimal, maka Perseroan telah membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing Komisaris dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman profesional, keahlian, dan pendidikan. Berikut ini adalah uraian pemisahan tugas terhadap masing-masing Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KEP/DK/JPAS/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, antara lain:

2. To review, assess, and sign the Company's Long-Term Corporate Plan (RJPP) and Work and Budget Plan (RKAP) prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association.
3. To provide opinions and recommendations to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the RJPP and RKAP.
4. To monitor the Company's activities and provide opinions and recommendations to the GMS on any matters deemed important for the management of the Company.
5. To promptly report to the GMS in the event of indications of declining Company performance.
6. To review periodic reports and the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.
7. To provide explanations, opinions, and recommendations to the GMS regarding the Annual Report upon request.
8. To prepare the annual work program and include it in the RKAP.
9. To establish an Audit Committee and propose a Public Accountant to the GMS.
10. To prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners and retain copies thereof.
11. To report to the Company any share ownership held by themselves and/or their family members in the Company and other companies.
12. To submit a report to the GMS on supervisory duties performed during the preceding financial year.
13. To perform other supervisory and advisory duties insofar as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Segregation of Duties and Responsibilities Of The Board Of Commissioners

Implementation of the Board of Commissioners' duties refers to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-3/MBU/03/2023 of 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. In order for the implementation of the Board of Commissioners' oversight function can be run effectively and optimally, the Company has divided the duties and responsibilities of each Commissioner by taking into account the background of professional experience, expertise, and education. The following is a summary of segregation of duties for each Commissioner under the Board of Commissioners' Decree Number 07/KEP/DK/JPAS/2023 dated August 24, 2023 concerning the Distribution of Duties and Authorities of the Board of Commissioners of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, among others:

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tugas *Duties*
1.	Siti Ma'rifah	Komisaris Utama *President Commissioner*	1. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; *Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as Company's organ;* 2. Pengawasan secara umum atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen; *Conducting general supervision over the management of the Company done by the BOD and management;* 3. Pengawasan atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan manajemen yang terkait dengan bidang Organisasi dan Sumber Daya Insani (SDI), Transformasi Budaya Kerja Perusahaan, serta Sistem Pengendalian Intern Perusahaan; *Supervising the company management run by the Board of Directors and management related to the fields of Organization and Human Capital, Transformation of Company Culture, and the Company's Internal Control System;* 4. Mewakili pelaksanaan hubungan organ Dewan Komisaris dengan pihak internal dan eksternal Perseroan; *Representing relationship between the Board of Commissioners as well as internal and external parties of the Company;* 5. Koordinator pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris lainnya; *Coordinating duties of other Board of Commissioners members;* 6. Menunjuk anggota Komisaris untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris; *Appointing a member of Board of Commissioners to act on behalf of Board of Commissioners;* 7. Menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris; *Designating separation of duties among the Board of Commissioners members;* 8. Menetapkan tugas Sekretaris Dewan Komisaris. *Stipulation of Secretary to Board of Commissioners' duties.* 9. Mencegah segala sesuatu tindakan, keputusan dan kebijakan Direksi yang berdampak kepada kesehatan Perusahaan, masalah hukum dan hal-hal yang diluar kebiasaan praktek Perusahaan. *Preventing all actions, decisions, and policies of the Board of Directors that impacted to the company's health, legal problems and others outside the Company's normal practices.*
2.	Kun Wahyu Wardana	Komisaris *Commissioner*	1. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan; *Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as the company organ;* 2. Pengawasan atas kepengurusan Perusahaan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan kepatuhan dan Sumber Daya Manusia; *Supervision over the Company's management done by the Board of Directors and Management Staff related to compliance and Human Resources;* 3. Pelaksanaaan tugas di bidang Bisnis Perusahaan, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan serta tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris di bidang Manajemen Risiko; *Implementation of duty in the Company's Business, Risk Management and Internal Control System as well as other duties as agreed by the Board of Commissioners in Risk Management;* 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal Perusahaan; *Supervision over implementation of Internal Control Unit's duties;* 5. Mencegah segala sesuatu tindakan, keputusan dan kebijakan Direksi yang berdampak kepada kesehatan perusahaan, masalah hukum dan hal-hal yang diluar kebiasaan praktek Perusahaan. *Preventing all actions, decisions, and policies of the Board of Directors that influence the company's soundness level which causes legal problems and other matters outside of the Company's normal practices.*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tugas *Duties*
3.	Kristina Lestariningsih	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	1. Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan; *Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as the company organ;* 2. Pengawasan secara umum atas kepengurusan perusahaan oleh Direksi dan manajemen; *General supervision toward the company management run by the Board of Directors and management;* 3. Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang *Good Corporate Governance*, bidang akuntansi, keuangan, investasi, dan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan serta tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris; *Supervision over management of the Company by the Board of Directors and Management, related to Good Corporate Governance, Accounting, Finance, Investment and Internal Control System in the Company and other duties as agreed with the Board of Commissioners;* 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal Perusahaan; *Supervision over Internal Control Unit duty implementation;* 5. Mencegah segala sesuatu tindakan, keputusan dan kebijakan Direksi yang berdampak kepada kesehatan perusahaan, masalah hukum dan hal-hal yang diluar kebiasaan praktek Perusahaan. *Preventing all actions, decisions, and policies of the Board of Directors that influence the company's soundness level which causes legal problems and other matters outside of the Company's normal practices.*

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, periode menjabat Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir namun RUPS belum menetapkan penggantinya, maka pelaksanaan tugas-tugas anggota Komisaris yang kosong tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Dewan Komisaris yang kosong untuk sementara waktu.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dipastikan telah memenuhi ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Pemegang Saham dan/atau Kementerian BUMN, serta memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG.

Sepanjang tahun ini, komposisi Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sehingga susunan keanggotannya per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Composition of Membership and Term of Office

As designated in the Articles of Association, term of office of the Board of Commissioners is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) period. If term of office of a member of the Board of Commissioners ends but the GMS has not yet determined a replacement, then the implementation of duties of the vacant Commissioner shall be carried out following the provisions for filling the vacant positions on the Board of Commissioners temporarily.

All members of the Company's Board of Commissioners have met the fit & proper test requirements conducted by the Financial Services Authority (OJK) and/or the Shareholders and/or the Ministry of SOEs, as well as have complied with the provisions in the Law on Limited Liability Company and GCG principles.

Throughout this year, the composition of the Company's Board of Commissioners remained unchanged from the previous year; therefore, as of December 31, 2025, the membership of the Board is as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan Pertama Kali *Legal Basis for First Appointment*	Periode Menjabat *Term of Office*
Siti Ma'rifah	Komisaris Utama *President Commissioner*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Juni 2021. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on June 16, 2021.*	2021-2026

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan Pertama Kali *Legal Basis for First Appointment*	Periode Menjabat *Term of Office*
Kun Wahyu Wardana	Komisaris *Commissioner*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Juni 2021. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on June 16, 2021.*	2021-2026
Kristina Lestariningsih	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2023. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on January 3, 2023.*	2023-2028

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan menyatakan kesanggupan dan kesungguhan untuk selalu menjaga independensi masing-masing selama bertugas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris senantiasa berjalan objektif demi kepentingan Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu upaya dalam menjaga independensinya, di antaranya:

1. Selain Dewan Komisaris, pihak lain tidak diperkenankan campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direksi tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan; dan
4. Dewan Komisaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmennya dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Independence of The Board of Commissioners

All members of the Company's Board of Commissioners expressed their commitment and sincerity to always keep their integrity while carrying out their duties so that the implementation of the Board of Commissioners' oversight function can always be conducted objectively for the interests of the Company. For this reason, the Company has established several provisions that must be fulfilled by the Board of Commissioners as an effort to uphold their independence, as follows:

1. *In addition to the Board of Commissioners, no other party is permitted to interfere in the management of the Company;*
2. *The Board of Commissioners must be able to take decisions objectively, without conflicts of interest and free from any pressure from any party;*
3. *The Board of Directors is not permitted to carry out activities that could interfere with the Independency of the Board of Commissioners in managing the Company; and*
4. *The Board of Commissioners must sign the Integrity Pact as a form of its commitment in carrying out the Company's activities which can lead to a conflict of interest.*

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 12 kali.

Board of Commissioners Meeting

During 2025, the Board of Commissioners has held 12 meetings.

No.	Nama dan Jabatan *Name and Position*	Jumlah Rapat *Number of Meeting*	Kehadiran *attendance*	%
1.	Siti Ma'rifah Komisaris Utama | *President Commissioner*	12	12	100
2	Kun Wahyu Wardana Komisaris | *Commissioner*	12	12	100
3	Kristina Lestariningsih Komisaris Independen | *Independent Commissioner*	12	12	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pada Agenda Rapat, beberapa pembahasan utama meliputi:
1. Pembahasan penjaminan BUS.
2. Tanggapan Dewan Komisaris atas RJPP 2026-2030 Askrindo Syariah.
3. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Pengklasifikasian cabang, agar perusahaan dapat menerapkan pendekatan bobot yang meliputi jumlah mitra yang berkualitas, potensi bisnis serta jenis produknya.
5. Implementasi POJK 11 tahun 2025, agar perusahaan membuat contingency plan berupa simulasi dalam bentuk stress test untuk mengetahui kesiapan perusahaan.
6. Sinkronisasi Top Risk untuk mempertajam akurasi Risk Profile perusahaan.
7. Risk Acceptance Criteria (RAC) dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra bisnis.
8. Peningkatan kualitas Sumber Dayalnsani (SDI) sebagai salah satu Langkah strategis.

Meeting Agenda Of The Board Of Commissioners

The meeting agenda included the following key topics:
1. *Discussion on BUS guarantees.*
2. *The Board of Commissioners' response to Askrindo Syariah's 2026–2030 Long-Term Business Plan (RJPP).*
3. *Appointment of members to the Nomination and Remuneration Committee.*
4. *Classification of branches so that the company can apply a weighted approach that takes into account the number of qualified partners, business potential, and product types.*
5. *Implementation of POJK 11 of 2025, requiring the company to develop a contingency plan in the form of stress tests to assess the company's readiness.*
6. *Synchronization of Top Risks to enhance the accuracy of the company's Risk Profile.*
7. *Risk Acceptance Criteria (RAC) can be tailored to the needs of business partners.*
8. *An improvement in the quality of Human Resources (HR) as one of the strategic steps.*

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of The Board of Commissioners and Board of Directors

Selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat gabungan bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan atau kapan pun apabila diperlukan. Pelaksanaan rapat gabungan menjadi salah satu bentuk pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi.

Selama tahun 2025, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah berlangsung 14 kali dengan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

In addition to organizing internal meetings, the Board of Commissioners also convened joint meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time per month or whenever necessary. Implementation of joint meetings is such a supervision act by the Board of Commissioners over the Company management runs by the Board of Directors.

During 2025, joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors was held 14 times with attendance rate of the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

No.	Nama dan Jabatan *Name and Position*	Jumlah Rapat *Number of Meeting*	Kehadiran *attendance*	*%*
1	Siti Ma'rifah Komisaris Utama | *President Commissioner*	14	14	100
2	Kun Wahyu Wardana Komisaris | *Commissioner*	14	14	100
3	Kristina Lestariningsih Komisaris Independen | *Independent Commissioner*	14	14	100
4	Kokok Alun Akbar Direktur Utama | *President Director*	14	14	100
5	Aviantono Yudihariadi Direktur Keuangan | *Finance Director*	14	14	100
6	Achmad Rizali Direktur Pemasaran | *Marketing Director*	14	14	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pada Agenda Rapat, beberapa pembahasan utama meliputi:
1. Kesiapan manajemen dalam menghadapi shifting COB Program ke No- Program.
2. Prosedur perijinan produk dan implementasinya.
3. Pengembangan penJaminan bisnis FLPP.
4. Pipeline bisnis Non Program dan strategi untuk mengeksekusinya.
5. Penerapan Strategi RKAP 2025 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Proses Bisnis.
6. Bagaimana perkembangan program keagenan dan Tata Kelolanya.
7. Bagaimana realisasi strategi bisnis optimalisasi Maasya.
8. Action plan untuk memaksimalkan penagihan ta'widh
9. 9. Alignment strategi bisnis dengan struktur organisasi dan dukungan IT.
10. Analisis realisasi RKAP didasarkan atas target proposional dan seasonal.
11. Perkembangan Cabang Titik Tumbuh Berdasarkan Potensi Bisnis, Struktur Organisasi, Kompetensi SDI dan Tl.
12. Mitigasi/Action Plan terkait rencana streamlining penjaminan.
13. Progress persiapan Merger (Manajemen Aset, Konsultan dll).
14. Mitigasi aspek compliance atas POJK 11 tahun 2025 khususnya terkait Penjaminan Ulang.

Meeting Agenda of The Board of Commissioners and Board of Directors

The meeting agenda included the following key topics:
1. *Management readiness in addressing the transition from the COB Program to the No-Program model.*
2. *Product licensing procedures and their implementation.*
3. *Development of FLPP business assurance.*
4. *Non-Program business pipeline and strategies for its execution.*
5. *Implementation of the 2025 RKAP Strategy to Improve the Effectiveness and Efficiency of Business Processes.*
6. *Progress of the agency program and its governance.*
7. *Implementation of the Maasya business optimization strategy.*
8. *Action plan to maximize ta'widh9 collections.*
9. *Alignment of business strategy with organizational structure and IT support.*
10. *Analysis of RKAP implementation based on proportional and seasonal targets.*
11. *Development of Growth-Focused Branches Based on Business Potential, Organizational Structure, and SDI and TL Competencies.*
12. *Mitigation/Action Plan related to the guarantee streamlining plan.*
13. *Progress on merger preparations (Asset Management, Consultants, etc.).*
14. *Compliance mitigation regarding POJK 11 of 2025, particularly related to Re-guarantees.*

Pengawasan dan Perkembangan Kegiatan Perseroan

Selain melalui rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan analisa terhadap laporan bulanan yang disampaikan manajemen kepada Dewan Komisaris, dan dalam hal terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dimintakan penjelasan lebih luas, Dewan Komisaris akan meminta penjelasan dari Direksi ataupun Divisi operasional/ non operasional untuk menambah penjelasan yang sebelumnya tidak tertuang dalam laporan bulanan dimaksud.

Supervisory and The Company's Acitivities Progress

In addition to these meetings, the Board of Commissioners also analyzes the monthly reports submitted by management to the Board of Commissioners, and in the event that there are issues that must be explained more broadly, the Board of Commissioners will request explanations from the Board of Directors or operational/non-operational divisions to add explanations that were not previously contained in the monthly report.

Arahan Dewan Komisaris Kepada Direksi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/nasihat/masukan kepada Direksi yang berfokus pada 6 (enam) bidang, antara lain:

Board of Commissioners' Direction to The Board of Directors 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners has provided direction/advice/input to the Board of Directors which focused on 6 (six) areas, as follows:

Bidang *Aspects*	**Jumlah Arahan** *Number of Direction*
Underwriting	31 kali / *times*
Keuangan & Investasi | *Finance & Investment*	14 kali / *times*
Sumber Daya Insani | *Human Resources*	7 kali / *times*
Pengendalian | *Control*	19 kali / *times*
Teknologi Informasi | *Information Technology*	3 kali / *times*
Tata Kelola Perusahaan yang Baik | *Good Corporate Governance*	6 kali / *times*

Masukan Dewan Komisaris tersebut antara lain agar Direksi terus berupaya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan/target Perseroan sesuai RKAP. Masukan/arahan Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain mengenai peningkatkan kinerja Perseroan, perluasan saluran distribusi (*distribution channel*) bisnis, efektivitas penagihan Piutang IJK dan recoveries dari saldo subrogasi, penempatan investasi secara aman dan dalam rangka resiprokal bisnis guna menunjang pemasaran/operasional, manajemen klaim, pengawasan dan *monitoring* terhadap pelaksanan pengembangan *core system,* proses akuntansi dan keuangan serta penerapan sistem pengendalian intern Perseroan, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan, penerapan Manajemen Risiko, serta peningkatan budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif & Kolaboratif).

The Board of Commissioners' input includes, among others, that the Board of Directors continue to strive and commit to achieving the Company's goals/targets in accordance with the RKAP. Input/direction from the Board of Commissioners to the Board of Directors, among others regarding the Company's performance improvement, expansion of business distribution channels, effectiveness of collection of IJK receivables and recoveries from subrogation balances, safe investment placement and in the context of business reciprocity to support marketing/operations, claims management, supervision and monitoring of the implementation of core system development, accounting and financial processes and implementation of the Company's internal control system, implementation of Good Corporate Governance (GCG) and compliance, implementation of Risk Management, as well as improvement of AKHLAK culture (Reliable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive & Collaborative).

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2025

Supervision and Recommendation of The Board of Commissioners In 2025

Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk melakukan *monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners proactively supervises and provides input to the Board of Directors. That such supervisory function is conducted directly, among others by monitoring follow-up action on recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors, as well as through committees under the Board of Commissioners.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap:

1. Laporan keuangan bulanan;
2. Reviu dan analisis RKAP Tahun 2025;
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan
4. Memberikan arahan kepada Direksi untuk bidang operasional/*underwriting*, keuangan dan investasi, SDM dan umum, pengendalian internal, teknologi informasi, dan manajemen risiko.

In 2025, the Board of Commissioners has supervised and monitored:

1. *Monthly financial reporting;*
2. *Review and analysis of the 2025 RKAP;*
3. *Convening meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as joint meetings with the Audit Committee/Internal Audit Unit; and*
4. *Providing directives to the Board of Directors on matters related to operations/underwriting, finance and investment, human resources and general affairs, internal control, information technology, and risk management*

Dewan Komisaris juga telah menyampaikan beberapa laporan/pendapat/masukan kepada Pemegang Saham/RUPS yang meliputi:

1. Agar perusahaan dapat menggambarkan *pipeline* pasar konvensional sebagai pembanding terhadap potensi pasar Syariah.
2. Dalam pengelolaan investasi, agar perusahaan dapat melakukan negosiasi *rate* dengan bank guna mengoptimalkan pengelolaan investasi perusahaan.
3. Agar perusahaan dapat mengupayakan pelaksanaan program-program strategi bisnis yang telah ditetapkan untuk mencapai target RKAP 2025 secara tepat waktu.
4. Agar pengembangan Aplikasi Maasya dapat dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan bisnis *Surety Bond*.

The Board of Commissioners has also submitted report/opinion/recommendation to Shareholders/GMS which includes:

1. *The Company should be able to describe the conventional market pipeline as a benchmark against the potential of the Sharia market.*
2. *In investment management, the Company should be able to negotiate rates with banks in order to optimize the Company's investment management.*
3. *The Company should ensure the implementation of established business strategy programs to achieve the 2025 Work and Budget Plan (RKAP) targets in a timely manner.*
4. *The development of the Maasya Application should be further enhanced to improve the Surety Bond business.*

5. Dalam hal pengklasifikasian cabang, agar perusahaan dapat menerapkan pendekatan bobot yang meliputi jumlah mitra yang berkualitas, potensi bisnis serta jenis produknya.
6. Untuk mengantisipasi implementasi POJK 11 tahun 2025, agar perusahaan membuat *contingency plan* berupa simulasi dalam bentuk *stress test* untuk mengetahui kesiapan perusahaan.
7. Agar perusahaan dapat melakukan sinkronisasi *Top Risk* untuk mempertajam akurasi *Risk Profile* perusahaan.
8. Agar *Risk Acceptance Criteria* (RAC) dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra bisnis.
9. Agar perusahaan dapat melakukan *survey* kepuasan pelanggan secara berkala setiap tahun.
10. Agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sebagar salah satu Langkah strategis.

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris Perseroan mengikuti beberapa kegiatan pelatihan. Seluruh program dan pengembangan kompetensi tersebut bertujuan untuk mengasah kemampuan masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perseroan. Realisasi biaya pelatihan Dewan Komisaris selama tahun 2025 dibukukan sebesar Rp106.107.736. Pelatihan yang diikuti, adalah sebagai berikut:

5. In branch classification, the Company should apply a weighted approach covering the number of qualified partners, business potential, and product types.

6. To anticipate the implementation of POJK 11 of 2025, the Company should prepare a contingency plan in the form of simulations, including stress testing, to assess the Company's readiness.
7. The Company should synchronize its Top Risk framework to enhance the accuracy of the Company's Risk Profile.
8. The Risk Acceptance Criteria (RAC) should be adjusted to meet business partner requirements.
9. The Company should conduct customer satisfaction surveys on a regular annual basis.
10. This is so that the company can improve the quality of its human resources as one of its strategic steps.

Training and/or Competency Development Program For The Board of Commissioners

Throughout 2025, the Company's Board of Commissioners joined in several training activities. All programs and competency development aim to hone the skills of each member of the Board of Commissioners in carrying out supervisory functions over the Company management. Cost incurred to organize the Board of Commissioners training in 2025 amounting to IDR 106.107.736. The training that followed, were as follows:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
1.	Siti Ma'rifah	Komisaris Utama *President Commissioner*	Seminar Nasional dan Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal : Membangun Ketahanan Teknologi Informasi Melalui Audit IT dan penqelolaan Risiko *National Seminar and Conferment of Internal Auditor Competency Certification: Building Information Technology Resilience through IT Auditing and Risk Management*	22-23 Januari 2025 *January 22-23, 2025*	PAI BK : Praktisi Auditor Internal Bersertifikat Kompetensi *PAI BK: Certified Internal Audit Practitioner (Competency-Certified).*
			Workshop Integrating Strategy And Risk Management	21-22 April 2025 *April 21-22, 2025*	GRC *Management*
			Webinar: Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Industri Penjaminan *Webinar: Good Corporate Governance in Supporting Business Growth in the Guarantee Industry.*	28 Mei 2025 *May 28, 2025*	Bintang Cahaya Gempita (BCG)
			Seminar *Driving Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak A udit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management* *Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak A udit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management Seminar*	15 Juli 2025 *July 15, 2025*	IKAI

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
			Workshop "Ethical Risk Culture & Risk Leadership" *"Ethical Risk Culture & Risk Leadership" Workshop*	30 September 2025 *September 30, 2025*	Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan : PPA&K *Center for Accounting and Finance Development*
			Perpanjang Sertifikasi CRGP *Renewal of the Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification*	3 Oktober 2025 *October 3, 2025*	LSMPR
			29th Indonesia *Rendezvous 2025 - Empowering Trust: Connecting The World of Insurance and Reisurance*	15 oktober 2025 *October 15, 2025*	AAUI
2	Kristina Lestariningsih	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	*Workshop Integrating Strategy And Risk Management*	21 April 2025 *April 21, 2025*	GRC *Management*
			Webinar : Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Industri Penjaminan *Webinar: Good Corporate Governance Practices in Supporting Business Growth in the Guarantee Industry.*	28 Mei 2025 *May 28, 2025*	Bintang Cahaya Gempita (BCG)
			Seminar *Driving Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak A udit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management* *Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak A udit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management Seminar*	15 Juli 2025 *July 15, 2025*	IKAI
			National Conference audit for Tomorrow Strategic future ready sustainable	27- 28 Agustus 2025 *August 27-28, 2025*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Asosiasi Perusahaan Penjamnan Indonesia (Asippindo) *Financial Services Authority (OJK) & Indonesian Guarantee Companies Association (Asippindo)*
			Workshop "Ethical Risk Culture & Risk Leadership" *"Ethical Risk Culture & Risk Leadership" Workshop*	30 September 2025 *September 30, 2025*	GRC *Management*
			Perpanjang Sertifikasi CRGP *Renewal of the Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification*	3 Oktober 2025 *October 3, 2025*	LSMPR
			29th Indonesia *Rendezvous 2025 - Empowering Trust: Connecting The World of Insurance and Reisurance*	15 Oktober 2025 *October 15, 2025*	AAUI
			Uji Sertifikasi Skema Komisaris *Commissioner Certification Scheme Assessment*	17 November 2025 *November 17, 2025*	LSP Penjaminan
3	Kun Wahyu Wardana	Komisaris *Commissioner*	Seminar *World Class HR Director School*	22-23 Januari 2025 *January 22-23, 2025*	Inti Pesan Pariwara
			Workshop Integrating Strategy And Risk Management	21-22 April 2026 *April 21-22, 2025*	GRC *Management*
			Webinar : Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Industri Penjaminan *Webinar: Good Corporate Governance Practices in Supporting Business Growth in the Guarantee Industry.*	28 Mei 2025 *May 28, 2025*	Bintang Cahaya Gempita (BCG)

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
			Seminar *Driving Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak A udit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management* *Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak A udit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management Seminar*	15 -17 Juli 2025 *July 15-17, 2025*	IKAI
			Workshop *"Ethical Risk Culture & Risk Leadership"* *"Ethical Risk Culture & Risk Leadership" Workshop*	30 September 2025 *September 30, 2025*	GRC *Management*
			29th Indonesia *Rendezvous 2025 - Empowering Trust: Connecting The World of Insurance and Reisurance*	15 -17 Juli 2025 *July 15-17, 2025*	AAUI
			Uji Sertifikasi Skema Komisaris *Certification Assessment under the Commissioner Competency Scheme.*	17 November 2025 *November 17, 2025*	LSP Penjaminan

Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu organ Perseroan yang turut menjalankan fungsi pengawasan, namun terbatas pada pelaksanaan kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah.

The Sharia Supervisory Board is one of the Company's organs that also carries supervisory function, but is limited to the implementation of business activities based on Sharia principles.

Tugas dan Wewenang

Dalam mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah yang berlangsung di Perseroan, Dewan Pengawas Syariah senantiasa memperhatikan hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangannya, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya.

Duties and Authorities

In overseeing the sharia principles implementation which taken place within the Company, the Sharia Supervisory Board always pays attention to matters which become its duties and authorities, among others:

1. *Ensure compliance with Sharia principles in the Company's operational guidelines and products.*
2. *Supervise the Company's new product development process.*
3. *Request a fatwa from the National Sharia Council for new Company products that have not yet obtained a fatwa.*

4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. *Conduct periodic reviews of compliance with Sharia principles in the Company's business activities and operational mechanisms.*
5. *Request data and information related to aspects of the Company's work units in carrying out its duties and responsibilities.*

Komposisi Keanggotaan

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan mengalami perubahan pada tahun ini sehingga komposisinya per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Membership Composition

Composition of the Company's Sharia Supervisory Board has changed this year so that the composition as of December 31, 2025, are as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan Pertama Kali *Legal Basis For First Appointment*	Periode Menjabat *Term of Office*
M. Cholil Nafis	Ketua Dewan Pengawas Syariah *Chairman of Sharia Supervisory Board*	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 0141/DSN-MUI/II/2023 tanggal 22 Februari 2023. *Circular Resolution of the Shareholders dated February 27, 2023 based on the Recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 0141/DSN-MUI/II/2023 dated February 22, 2023.*	2023-2028
Ahmad Zubaidi	Anggota Dewan Pengawas Syariah *Member of Sharia Supervisory Board*	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor U-0328/ DSN MUI/V/2024 tanggal 20 Mei 2024. *Circular Resolution of the Shareholders dated June 6, 2024 based on the Recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number U-0328/ DSN-MUI/V/2024 dated May 20, 2024.*	2024-2029

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan secara berkala per tiga bulan, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Selama tahun 2025, rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan sebanyak 4 kali dengan uraian tingkat kehadiran sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Meeting

Sharia Supervisory Board meeting shall be held periodically every three months or upon written request by one or more members of the Sharia Supervisory Board, or by one or more shareholders with voting rights. During 2025, the Sharia Supervisory Board meetings was held 4 times with the summary of attendance levels as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendence*	Kehadiran *Attendance*	Tingkat Kehadiran (%) *Attendance Rate (%)*
M. Cholil Nafis	Ketua Dewan Pengawas Syariah *Chairman of Sharia Supervisory Board*	4	4	100%
Ahmad Zubaidi	Anggota Dewan Pengawas Syariah *Member of Sharia Supervisory Board*	4	4	100%

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Sepanjang 2025, Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjalankan fungsi pengawasan terhadap 2 (dua) hal berikut ini, antara lain:

1. Memberikan opini DPS tentang *Compliance* Syariah Berkaitan dengan Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Atas Klaim Reasuransi

Supervision and Recommendation of The Sharia Supervisory Board in 2025

Throughout 2025, the Company's Sharia Supervisory Board has carried out their supervisory function on these 2 (two) following matters, among others:

1. *Providing the Sharia Supervisory Board (DPS) opinion on Sharia compliance regarding the recognition of unearned revenue from reinsurance claims*

2. Memberikan opini DPS tentang Pembiayaan FLPP BTN Konvensional
3. Memberikan opini DPS tentang Penjaminan Ulang/ Reasuransi Konvensional (Non Syariah)
4. Memberikan opini DPS tentang Pelimpahan Portofolio Bisnis PT Asuransi Jasa Raharja Putera Unit Usaha Syariah

2. *Providing the Sharia Supervisory Board (DPS) opinion on the FLPP financing program provided by conventional BTN*
3. *Providing the Sharia Supervisory Board (DPS) opinion on conventional re-guarantee/reinsurance (non-Sharia) arrangements*
4. *Providing the Sharia Supervisory Board (DPS) opinion on the transfer of the business portfolio of PT Asuransi Jasa Raharja Putera Sharia Business Unit*

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga telah melakukan beberapa kegiatan yakni:
1. Anggota Dewan Pengawas Syariah menerima Sertifikasi LSP MUI "Skema Okupasi Pengawas Syariah" dari LSP MUI pada tanggal 24 Juni 2025
2. Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti kegiatan Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah XXI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh DSN MUI pada tanggal 24-25 September 2024
3. Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) DPS XXI Tahun 2025 dengan tema "Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Inoviasi Keuangan Syariah Berkelanjutan tanggal 26-27 September 2025
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah Aktif memberikan Tausiah Jumat bagi manajemen dan pegawai Askrindo Syariah selama tahun 2025

In addition, the Sharia Supervisory Board has also conducted activities, as follows:
1. *Members of the Sharia Supervisory Board (DPS) obtained the LSP MUI Certification for the "Sharia Supervisor Occupational Scheme" from LSP MUI on June 24, 2025*
2. *The Sharia Supervisory Board participated in the XXI Ijtima' Sanawi of the Sharia Supervisory Board in 2025 organized by DSN-MUI on September 24–25, 2024*
3. *The XXI Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) of the Sharia Supervisory Board in 2025 was held under the theme "Strengthening the Role of the Sharia Supervisory Board in Supervising Sustainable Islamic Finance Innovation" on September 26–27, 2025*
4. *Members of the Sharia Supervisory Board actively delivered Friday religious lectures to the management and employees of Askrindo Syariah throughout 2025*

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan usaha penjaminan pembiayaan dengan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

The Sharia Supervisory Board has supervised the implementation of the basic principles for the implementation of a financing guarantee business based on sharia principles organized by PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah during the period January 1 2025 to December 31 2025.

Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan dimaksud yang mencakup aspek pengelolaan terkait dengan aspek syariah pada produk-produk yang dipasarkan dan aspek praktik kegiatan pemasaran yang dilakukan Perusahaan dimaksud.

In order to carry out such supervision, the Sharia Supervisory Board carries out an assessment of the operations of the Company in question which includes management aspects related to the sharia aspects of products being marketed and practical aspects of marketing activities carried out by the Company.

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Training and/or Competency Development Program For The Sharia Supervisory Board

Selama tahun 2025, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan, antara lain:

During 2025, all members of the Company's Sharia Supervisory Board have participated in several training activities, as follows:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
1	Muhammad Cholil Nafis	Ketua Dewan Pengawas Syariah *Chairman of the Sharia Supervisory Board*	*Workshop* praijtima Sanawi DPS tahun 2025 *Pre-Ijtima' Sanawi Sharia Supervisory Board (DPS) Workshop 2025*	24-25 September 2025 *September 24-25, 2025*	DSN MUI

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
2	Ahmad Zubaidi	Anggota Dewan Pengawas Syariah *Member of the Sharia Supervisory Board*	Sertifikasi LSP MUI Skema Sertifikasi Okupasi Pengawas Syariah *LSP MUI Certification "Sharia Supervisor Occupational Certification Scheme"*	24 Juni 2025 *June 24, 2025*	LSP MUI
			Workshop praijtima Sanawi DPS tahun 2025 *2025 Pre-Ijtima Sanawi Workshop of the Sharia Supervisory Board (DPS)*	24-25 September 2025 *September 24-25, 2025*	DSN MUI

Direksi
Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh baik secara kolegial maupun individual atas pengurusan Perseroan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi juga berperan sebagai wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, seluruh anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab.

The Board of Directors is the Company's organ that is fully responsible both collegially and individually over the Company management for the interests and objectives of the Company. The Board of Directors also represents the Company both inside and outside the court regarding all matters and events with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS Resolutions. While carrying out the Company management, all members of the Board of Directors shall perform their duties with full good faith and responsibility.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi wajib menjunjung tinggi hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP dan RKAP dan perubahannya, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

Duties and Responsibilities

In conducting their duties and responsibilities, each member of the Board of Directors shall uphold the following matters, as follows:

1. *To undertake and ensure the implementation of the Company's business operations and activities in accordance with the Company's purposes and objectives.*
2. *To prepare, in a timely manner, the Long-Term Corporate Plan (RJPP), the Company Work Plan and Budget (RKAP), and any amendments thereto, and submit them to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the General Meeting of Shareholders (GMS).*
3. *To provide explanations to the GMS regarding the RJPP and RKAP.*
4. *To maintain the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS Meetings, and Minutes of Board of Directors Meetings.*
5. *To prepare the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as stipulated under the Law on Corporate Documents.*
6. *To prepare the Financial Statements in accordance with Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audit.*

7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen Perusahaan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen Perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan *blueprint* organisasi Perusahaan.
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. To submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification, as well as a report on the Company's rights not recorded in the accounting books, including those resulting from the write-off of receivables.
8. To provide explanations to the GMS regarding the Annual Report.
9. To submit the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, as approved by the GMS, to the Minister responsible for law and human rights affairs in accordance with applicable laws and regulations.
10. To submit reports on changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners to the Minister responsible for law and human rights affairs.
11. To maintain the Shareholders Register, Special Register, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, financial documents, and other corporate documents.
12. To keep at the Company's registered office the Shareholders Register, Special Register, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, financial documents, and other corporate documents.
13. To establish an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on internal control principles, particularly regarding management, recording, safekeeping, and supervisory functions.
14. To submit periodic reports in the manner and within the timeframe prescribed by applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
15. To prepare the Company's organizational structure, including detailed roles and responsibilities.
16. To provide explanations on all matters raised or requested by members of the Board of Commissioners and the Shareholders.
17. To develop and establish the Company's organizational blueprint.
18. To perform other duties and obligations in accordance with the provisions of the Articles of Association and those determined by the GMS pursuant to applicable laws and regulations.

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur

Pembagian tugas Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian target dan tujuan Perseroan pada masa mendatang agar dapat berjalan lebih sistematis, efisien dan efektif. Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing Direktur setelah mempertimbangkan latar belakang keahlian, pengalaman, dan hal lainnya, antara lain sebagai berikut:

Segregation of Duties and Responsibilities of Each Director

Segregation of duties of the Board of Directors is conducted to ensure the implementation and sustainable achievement of targets and objectives of the Company in the coming years to be run more systematically, efficiently and effectively. The following is a description of segregation of duties of each Director by considering the background of expertise, experience, and other matters, among others:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Tugas *Duties*
1.	Kokok Alun Akbar	Direktur Utama *President Director*	Bertanggung jawab terhadap program kerja bidang Satuan Pengawas Internal (SPI), bidang Sekretaris Perusahaan dan Hukum, serta bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola (GRC). *Responsible for the work programs of Internal Audit, Corporate Secretary and Legal, as well as Risk Management, Compliance and Governance (GRC).*
2.	Aviantono Yudihariadi	Direktur Keuangan *Finance Director*	Bertanggung jawab terhadap program kerja bidang Keuangan dan Akuntansi, bidang SDM dan Umum, dan bidang Manajemen Bisnis. *Responsible for the work programs of Finance and Accounting, Human Resources and General Affairs, and Business Management.*
3.	Achmad Rizali	Direktur Pemasaran *Marketing Director*	Bertanggung jawab terhadap program kerja bidang Pemasaran dan Pengembangan Produk, Jaringan, dan bidang Teknologi Informasi. *Responsible for the work program of Marketing and Product Development, Network and Partner Development, Network, and Information Technology.*

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun ini, komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sehingga susunannya per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Composition of Membership and Term of Office

The term of office for members of the Company's Board of Directors is 5 (five) years without prejudice to rights of GMS to dismiss the person concerned at any time following the Articles of Association and applicable regulations.

Throughout the year, the Company's Board of Directors composition has changed from the previous year so as the composition as of December 31, 2025, are as follows:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan Pertama Kali *Legal Basis For First Appointment*	Periode Menjabat *Term of Office*
Kokok Alun Akbar	Direktur Utama *President Director*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 April 2023. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolutions on April 3, 2023.*	2023-2028
Aviantono Yudihariadi	Direktur Keuangan *Finance Director*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Januari 2022. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolutions on January 13, 2022*	2022-2027
	Direktur Pemasaran *Marketing Director*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Januari 2022. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolutions on January 13, 2024.*	
Achmad Rizali	Direktur Pemasaran *Marketing Director*	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 November 2023. *Extraordinary General Meeting of Shareholders Resolution on November 9, 2023.*	2023-2028

Independensi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Direksi Perseroan menyatakan independensinya sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait

Independence of The Board of Directors

In managing their duties and responsibilities, all members of the Company's Board of Directors declare their independence so that every action and decision taken regarding the

pengurusan Perseroan dipastikan terbebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar independensi masing-masing Direktur senantiasa terjaga, Perseroan telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai independensi Direksi, sebagai berikut:
1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan; dan
4. Menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Company management is guaranteed to be free from any pressure or undue influence from any party that is contrary to the provisions of prevailing laws and regulations.

To maintain the independence of each Director, the Company has set several provisions regarding the Board of Directors' independence, as follows:
1. *Besides member of the Board of Directors, no other party is permitted to conduct or interfere in the management of the Company;*
2. *The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without any conflict of interest and free from any pressure from any party;*
3. *The Board of Directors is prohibited from carrying out activities that may affect his/her ability to act independently in managing the Company; and*
4. *Sign the Integrity Pact as a form of commitment of the Board of Directors in carrying out the Company's activities which can lead to conflicts of interest.*

Rapat Direksi

Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Rapat Direksi Perseroan dilaksanakan secara berkala atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Selama tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan 76 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Meeting of The Board of Directors

According to the provisions of Articles of Association and Board Manual, the Company's Board of Directors meetings are held regularly or upon written request from one or more members of the Board of Directors, or by one person or more of the total shares with voting rights. During 2025, the Board of Directors held 76 meetings with attendance rate as presented in the following table:

Nama dan Jabatan *Name and Position*	**Jumlah Rapat** *Number of Meeting*	**Kehadiran** *Attendence*	**%**
Kokok Alun Akbar Direktur Utama | *President Director*	76	76	100
Aviantono Yudihariadi Direktur Keuangan | *Finance Director*	76	76	100
Achmad Rizali Direktur Pemasaran | *Marketing Director*	76	76	100

Agenda Rapat Direksi

Pada Agenda Rapat, beberapa pembahasan utama meliputi:
1. Pengadaan penyedia Asuransi Kesehatan pegawai dan Manajemen tahun 2026
2. *Renewal treaty* dan pensesian portfolio PHK
3. Tindak lanjut sampak POJK No. 11 tahun 2025
4. Pembahasan *Non Disclosure Agreement* dan piagam korporasi
5. Pemberlakuan POJK 11 tahun 2025 terhadap beberapa aspek bisnis
6. Realisasi belanja modal tahun 2025 dan rencana belanja modal tahun 2026
7. KPI pegawai tahun 2025
8. Arahan dalam rangka strategi perusahaan
9. Limit kewenangan akseptasi dan pejabat pengganti

Meeting Agenda of the Board Of Directors

1. *Procurement of health insurance provider for employees and management for 2026.*
2. *Treaty renewal and portfolio cession for PHK.*
3. *Follow-up on the impact of OJK Regulation (POJK) No. 11 of 2025.*
4. *Discussion of the Non-Disclosure Agreement (NDA) and corporate charter.*
5. *Implementation of POJK No. 11 of 2025 on several business aspects.*
6. *Realization of 2025 capital expenditures and the 2026 capital expenditure plan*
7. *Employee Key Performance Indicators (KPIs) for 2025.*
8. *Guidelines in Support of the Company's Strategy*
9. *Authorization limits for underwriting and designation of alternate officers.*

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2025, seluruh anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan. Realisasi biaya untuk mengikuti program pelatihan bagi Direksi di tahun 2025 tercatat sebesar Rp44.765.394. Pelatihan yang diikuti, adalah sebagai berikut:

Training and/or Competency Development Program For The Board of Directors

During 2025, all members of the Company's Board of Directors have participated in several training activities. Cost incurred to organize the Board of Directors training in 2025 amounting to IDR 44.765.394. The training that followed, were as follows:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
1.	Kokok Alun Akbar	Direktur Utama *President Director*	*Webinar Determining the Risk Strategy in the Challenges of Environmental Social and Macro Economic Changes* Penetapan Strategi Risiko Perusahaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Sosial dan Macro Ekonomi *Webinar on Determining Corporate Risk Strategy in Addressing Environmental, Social, and Macroeconomic Changes*	7 Januari 2025 *January 7, 225*	LSPMR Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko *LSPMR – Professional Certification Institute for Risk Management.*
			29th Indonesia Rendezvous 2025 - Empowering Trust: Connecting The World of Insurance and Reisurance	15-17 Oktober 2025 *October 15-17, 2025*	AAUI
			Konferensi Nasional Profesional MR XI - *Towards Golden Indonesia 2045 Risk Manajement as Competitive Edge in A Complex World "Preparedness, Agility, and adaptation"* *XI National Risk Management Professional Conference – Towards Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World: "Preparedness, Agility, and Adaptation"*	27-28 November 2025 *November 27-28, 2025*	LSPMR Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko *LSPMR – Professional Certification Institute for Risk Management.*
2	Aviantono Yudihariadi	Direktur Keuangan *Director of Finance*	*Webinar Determining the Risk Strategy in the Challenges of Environmental Social and Macro Economic Changes* Penetapan Strategi Risiko Perusahaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Sosial dan Macro Ekonomi *Webinar: Determining Corporate Risk Strategies in Addressing Environmental, Social, and Macroeconomic Challenges*	7 Januari 2025 *January 7, 225*	LSPMR Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko *LSPMR – Professional Certification Institute for Risk Management.*
			Webinar : Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dalam Menunjang Perkembangan Bisnis di Industri Penjaminan *Webinar: Good Corporate Governance in Supporting Business Development in the Guarantee Industry*	28 Mei 2025 *May 28, 2025*	Bintang Cahaya Gempita (BCG)
			Training Of Trainer Penjaminan Kredit *Credit Guarantee Training of Trainers (ToT) Program*	18 Agustus 2025 *August 18, 2025*	RGC FIA UI
			Uji Sertifikasi Direktur Investasi *Investment Director Certification Examination*	6 November 2025 *Novemver 6, 2025*	LSP Penjaminan
			Konferensi Nasional Profesional MR XI - Towards Golden Indonesia 2045 *Risk Manajement as Competitive Edge in A Complex World "Preparedness, Agility, and adaptation"* *XI National Risk Management Professional Conference – Towards Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World: "Preparedness, Agility, and Adaptation"*	27-28 November 2025 *November 27-28, 2025*	LSPMR Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko *LSPMR – Professional Certification Institute for Risk Management.*

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Nama Pelatihan *Training Name*	Tanggal *Date*	Penyelenggara *Organizer*
3	Achmad Rizali	Direktur Pemasaran *Director of Marketing*	*Webinar Determining the Risk Strategy in the Challenges of Environmental Social and Macro Economic Changes* Penetapan Strategi Risiko Perusahaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Sosial dan Macro Ekonomi *Webinar: Determining Corporate Risk Strategies in Addressing Environmental, Social, and Macroeconomic Challenges*	7 Januari 2025 *January 7, 225*	LSPMR Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko *LSPMR – Professional Certification Institute for Risk Management.*
			Workshop "Ethical Risk Culture & Risk Leadership"	30 September 2025 *September 30, 2025*	GRC *Management*

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Performance Evaluation of The Board of Directors and Board of Commissioners

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self-assessment*). Setiap akhir tahun, kinerja Dewan Komisaris dievaluasi dengan mengacu pada unsur-unsur penilaian yang telah disusun oleh Komite Audit. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Performance Evaluation of The Board of Commissioners

Performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is conducted regularly using the self-assessment method. At the end of each year, the Board of Commissioners' performance is evaluated according to the assessment indicators prepared by the Audit Committee. Furthermore, the assessment results are submitted and be accounted for in the GMS.

Penilaian Kinerja Direksi

Sementara itu, kinerja Direksi baik secara individual maupun kolektif dievaluasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan unsur-unsur penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Performance Evaluation of The Board of Directors

Meanwhile, the Board of Directors' performance, both individually and collectively is evaluated by the Board of Commissioners based on the predetermined assessment indicators. Performance evaluation of the Board of Directors is conducted at the end of each closing book period. The Board of Directors' performance evaluation results performed by the Board of Commissioners are presented at the GMS.

Pihak Penilai

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.

Assessor Party

Performance assessment results of the Board of Commissioners and the Board of Directors are submitted and be accountable to the shareholders through the Annual GMS.

Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besaran remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah senantiasa megacu pada keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun buku.

Matters relating to procedures, basis for determination, structure, and amount of remuneration received by each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board always refer to the GMS resolutions held during the financial year.

Indikator Kinerja

Pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator berikut ini, antara lain:

1. Remunerasi diberikan dalam hal Perseroan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan bisnis penjaminan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan *peer* Perseroan lainnya; dan
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Performance Indicators

Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the following indicators, among others:

1. *Remuneration is given in the event that the Company gains profits in the fiscal year concerned;*
2. *Remuneration is given with reference to the development of guarantee business;*
3. *Remuneration is given based on the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with their duties and responsibilities;*
4. *Financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicator (KPI);*
5. *Individual work performance;*
6. *Fairness with peers of the Company; and*
7. *Consideration of the Company's long-term objectives and strategies.*

Struktur Remunerasi dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagaimana telah diamanatkan dan diputuskan dalam RUPS Tahunan 2025, maka pada tahun ini Perseroan kembali membagikan remunerasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Remuneration Structure and Total Remuneration For The Board of Commissioners and Board of Directors

As mandated and settled in the 2025 Annual GMS, so in this year the Company distributed remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board with the following description:

Table of Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board In 2025

Jenis Remunerasi *Type of Remuneration*	Jumlah Penerima dalam 1 (Satu) Tahun | *Total Recipients in 1 (One) Year*					
	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board*		Direksi *Board of Directors*	
	Orang *Person*	Jumlah *Nominal*	Orang *Person*	Jumlah *Nominal*	Orang *Person*	Jumlah *Nominal*
Gaji *Salary*	3	Rp 1.408.730.400	2	Rp 403.200.000	3	Rp 3.018.708.000
Tunjangan *Allowance*	Hari Raya Keagamaan *Religious Holidays* Rp 117.394.200 Purna Jabatan *Post-Employment Benefit* Rp 273.623.486 Transportasi *Transportation* Rp 191.184.840		Hari Raya Keagamaan *Religious Holidays* Rp 22.800.000		Hari Raya Keagamaan *Religious Holidays* Rp 251.559.000 Purna Jabatan *Post-Employment Benefit* Rp 577.824.868 Perumahan *Housing Allowance* Rp 990.000.000	
Fasilitas *Benefit*	Fasilitas Kesehatan *Medical Allowance* Rawat Jalan / *Outpatient*: Rp20.000.000 Rawat Inap (kelas kamar/hari) I *Inpatient (Room Class/Day)*: Rp2.000.000 Kacamata Rp 5.250.000 terdiri dari (Frame : 3.500.000,-/2 tahun dan Lensa : 1.750.000/tahun *The glasses cost Rp 5,250,000 and consist of (Frame: 3,500,000 for 2 years and Lenses: 1,750,000 per year)* Bantuan Hukum *Legal Assistance* Diberikan sebesar pemakaian At Cost *Charged based on usage*		Fasilitas Kesehatan *Medical Allowance* Rawat Jalan / *Outpatient*: Rp10.000.000 Rawat Inap (kelas kamar/hari) / *Inpatient (Room Class/Day)*: Rp1.250.000		Kendaraan Dinas *Operational Vehicle* • 1 unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional • *1 unit together with maintenance and operational costs* Fasilitas Kesehatan *Medical Allowance* • Rawat Jalan / *Outpatient*: Rp20.000.000 • Rawat Inap (kelas kamar/hari) / *Inpatient (Room Class/Day)*: Rp2.000.000 • Kacamata Rp 7.000.000 terdiri dari (Frame : 5.000.000,-/2 tahun dan Lensa : 2.000.000/tahun Bantuan Hukum *Legal Assistance* • Diberikan sebesar pemakaian *At Cost* • *Charged based on usage*	
Tantiem *Incentives*	3	-	2	-	3	-

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure of Affiliation With Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, and Major and/or Controlling Shareholders

Pengungkapan mengenai hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali sebagai salah satu kriteria yang digunakan untuk mengukur independensi Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali

Disclosure of affiliations between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders as one of the criteria used to measure the independence of the Board of Commissioners can be seen in the table below, which includes:

1. *Affiliations between fellow members of the Board of Directors;*
2. *Affiliations between members of the Board of Directors and the Board of Commissioner;*
3. *Affialiations between the Board of Directors with the ultimate and/or controlling Shareholders;*
4. *Affiliation between fellow members of the Board of Commissioner; and*
5. *Affiliations between members of the Board of Commissioners with the ultimate and/or controlling shareholder*

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Table of Affiliate Relationship of The Board of Directors, The Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders

Nama *Name*	**Hubungan Keuangan dan Keluarga** *Financial and Family Relationship of*											
	Hubungan Keuangan dengan *Financial Relationship with*						**Hubungan Keluarga dengan** *Family Relationship with*					
	Dewan Komisaris *Board of Commissioner*		**Direksi** *Board of Directors*		**Pemegang Saham Pengendali** *Controlling Shareholders*		**Dewan Komisaris** *Board of Commissioner*		**Direksi** *Board of Directors*		**Pemegang Saham Pengendali** *Controlling Shareholders*	
	Ya *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*	**Ya** *Yes*	**Tidak** *No*
Siti Ma'rifah		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kun Wahyu Wardana		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kristina Lestariningsih		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kokok Alun Akbar		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Aviantono Yudihariadi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Achmad Rizali		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi. Pembentukan Komite Audit Perseroan mengacu pada SK Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 03/ KEP/DK-JPAS/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit.

Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Sementara anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Komite Audit. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris ataupun non-Komisaris dari luar perusahaan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan pada 10 November 2021 sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun isi dari Piagam Komite Audit antara lain adalah:

- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Organisasi dan Keanggotaan
- Bab III: Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hubungan Kerja
- Bab IV: Rapat, Pelaporan Honorarium dan Pembebanan Biaya
- Bab V: Evaluasi Kinerja
- Bab VI: Kode Etik
- Bab VII: Penutup

Kedudukan Komite Audit

Struktur Komite Audit dalam organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Audit Committee

Audit Committee is a supporting organ under the Board of Commissioners that established by and plays a role to assist the implementation of the Board of Commissioners' oversight function over the Company management runs by the Board of Directors. The establishment of the Company's Audit Committee according to the Board of Commissioners' Decree of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Number 03/KEP/DK-JPAS/2024 dated October 1, 2024 concerning Changes in the Composition of Audit Committee Members.

Dismissal and appointment of Chairman of Audit Committee is conducted by the Board of Commissioners and reported to the GMS. Meanwhile, Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners by taking into consideration the Audit Committee Chairman's opinion. Audit Committee members may come from members of the Board of Commissioners or nonCommissioners from outside the company.

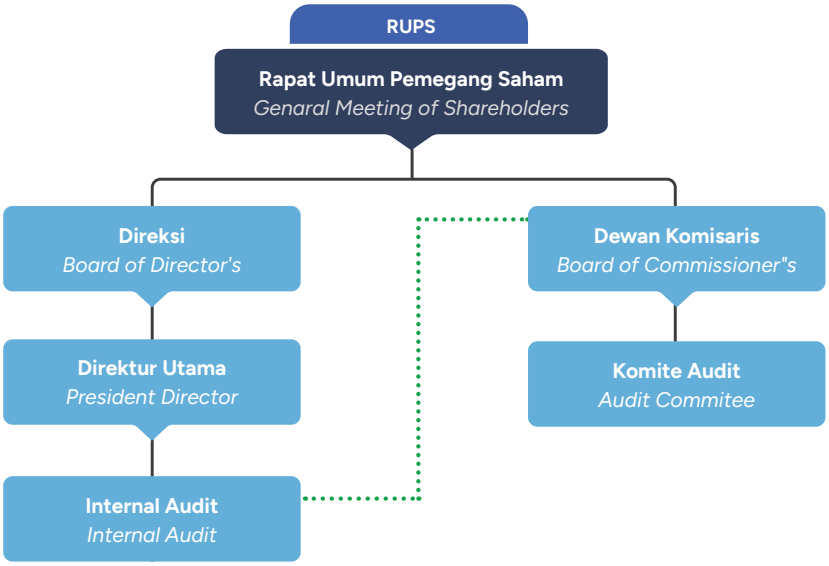
Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee has an Audit Committee Charter which was stipulated on November 10, 2021 as a reference and work guideline for the Audit Committee in carrying out its duties and authorities based on the provisions of the applicable regulations. The contents of the Audit Committee Charter include:

- *Chapter I Introduction*
- *Chapter II: Organization and Membership*
- *Chapter III: Duties, Responsibilities, Authorities and Employment Relations*
- *Chapter IV: Meetings, Honorarium Reporting and Fees*
- *Chapter V: Performance Evaluation*
- *Chapter VI: Code of Conduct*
- *Chapter VII: Closing*

Position of Audit Committee

Audit Committee structure in the Company's organization is as follows:



Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Audit Perseroan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
b. Melakukan evaluasi atas pencapaian rencana kerja dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas *eksternal auditor* dan *internal auditor* dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
e. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi.
f. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris, yang meliputi antara lain:
    a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
    b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya.
    c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
g. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
h. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris, antara lain:

Duties and Responsibilities

The Company's Audit Committee has a number of duties and responsibilities, among others:

a. Prepare and submit annual work plan to the Board of Commissioners for approval.
b. Perform evaluation on the business plan and report to the Board of Commissioners.
c. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of Internal Control System and the effective implementation of external and internal auditors' duties by monitoring and evaluating planning and performing audit to assess the adequacy of internal control, including the financial reporting process.
d. Report to the Board of Commissioners regarding various risks that may be encountered by the Company and risk management implementation performed by the Board of Directors.
e. Examine the alleged error in the resolutions of the Board of Directors' meeting.
f. Provide independent professional opinion to the Board of Commissioners, which includes, among others:
    a. Assess the implementation of activities as well as the audit results conducted by Internal Auditor and External Auditor, thereby the implementation and reporting that below the standards can be prevented.
    b. Provide recommendations regarding improvements on the Company's management control system and its implementation.
    c. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners as long as under the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners based on the prevailing laws and regulations.
g. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure for all information released by the Company.
h. dentify matters that require the Board of Commissioners' attention as well as the Board of Commissioners' duties, are as follows:

a. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
b. Penelaahan atas independensi dan objektivitas Auditor Internal dan Eksternal.
c. Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Eksternal untuk memastikan semua risiko penting telah dikaji.
d. Penelaahan atas efektivitas pengendalian intern Perusahaan.
e. Penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
f. Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

a. Review of financial information that will be issued by the Company, such as financial statements, projections and other financial information.
b. Review the independence and objectivity of Internal and External Auditors.
c. Review the adequacy of the examination conducted by the Internal and External Auditors to ensure that all risks have been assessed.
d. Review the Company's internal control effectiveness.
e. Review on the Company's compliance level with other laws and regulations related to the Company's activities.
f. Examine the alleged error in the decisions of the Board of Directors' meeting or irregularities in the implementation of resolutions of the Board of Directors' meeting.

Komposisi Keanggotaan Dan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan adalah paling lama sama dengan periode menjabat Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dalam menjalankan perannya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Audit (atas persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris) dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan yang independen dari luar Perseroan dengan keahlian di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu atas biaya Perseroan untuk membantu Komite Audit.

Per 31 Desember 2025, susunan Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang dengan uraian sebagai berikut:

Composition of Membership and Term of Office

Term of office of members of the Company's Audit Committee shall be the same as the Board of Commissioners term of office and can be reappointed for the next 1 (one) period without prejudice to the right of the Board of Commissioners to be able to dismiss him/her at any time.

In carrying out its role as a supporting organ for the Board of Commissioners, Audit Committee (upon written approval from the Board of Commissioners) may employ independent experts or consultants from outside the Company with expertise in law and other fields that are deemed necessary at the Company's expense to assist the Audit Committee.

As of December 31, 2025, the composition of the Company's Audit Committee consists of 3 (three) people with the following descriptions:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan *Legal Basis for Appointment*
1.	Kristina Lestariningsih	Ketua *Chairman*	SK Dewan Komisaris Nomor 01/KEP/DK/JPAS/2023. *Board of Commissioners Decree Number 01/KEP/DK/JPAS/2023.*
2	Boedi Dwi Darwanto	Anggota *Member*	SK Dewan Komisaris Nomor 02/KEP/DK-JPAS/2024 tanggal 1 Oktober 2024. *Board of Commissioners Decree Number 02/KEP-DK-JPAS/2024 dated October 1, 2024*
3	Rodih*)	Anggota *Member*	SK Dewan Komisaris Nomor 01/KEP/DK/JPAS/2023 tanggal 27 April 2023 dan berakhir pada tanggal 26 April 2025. *Board of Commissioners Decree Number 01/KEP/DK/JPAS/2023 dated April 27, 2023 which ended on April 26, 2025.*

*) Periode jabatan berakhir pada 23 Juni 2025
) The term of office ended on June 23, 2025.

Profil Ketua Komite Audit

Kristina Lestariningsih
Profil lengkap Ibu Kristina Lestariningsih selaku Ketua Komite Audit Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris.

Profile of Chairman of The Audit Committee

Kristina Lestariningsih
Complete profile of Ms. Kristina Lestariningsih as Chairman of the Company's Audit Committee can be seen in the Chapter Company Profile, Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners.

Profil Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Profil lengkap anggota Komite Audit Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Profile of Audit Committee Members

All members of the Company's Audit Committee are Indonesian citizens (WNI). Complete profiles of members of the Company's Audit Committee can be seen in the following table:

Nama *Name*	**Usia** *Aged*	*Domisili Domiciled*	**Riwayat Pendidikan** *Educational Background*	**Riwayat Karier** *Career Background*
Boedi Dwi Darwanto	63 tahun *63 years old*	Jawa Barat *West Java*	Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro (1988) dan Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1999) *Bachelor of Accounting from Diponegoro University (1988) and Magister of Management from Bogor Agricultural University (IPB), Bogor (1999)*	Beliau menjalani kariernya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan memegang berbagai jabatan. Dimulai sebagai Urusan Administrasi Keuangan (1989) hingga kemudian dipercaya sebagai Satuan Pengawas Intern (1991-1996), Senior Auditor (1996-2006), Pemimpin Cabang (2007-2010), *Group Head Audit* (2010-2013), Wakil Inspektur (2013-2018), hingga pensiun pada Desember 2018. Beliau kemudian menjabat sebagai *Auditor* Badan Audit Dana Pensiun BRI (2019-2020) dan Kepala Bagian Audit PT Bringin Karya Sejahtera (2021-2023). *He pursued his career at Bank Rakyat Indonesia (BRI), holding various positions. He began as a Finance Administration Officer in 1989 and was later entrusted with roles such as Internal Audit Unit (1991–1996), Senior Auditor (1996–2006), Branch Manager (2007 2010), Audit Group Head (2010–2013), Deputy Inspector (2013–2018), before retiring in December 2018. He subsequently served as Auditor at the Audit Board of BRI Pension Fund (2019–2020) and as Head of Audit Division at PT Bringin Karya Sejahtera (2021–2023).*
Rodih	44 Tahun *44 years old*	Jakarta	Sarjana Sains Jurusan Matematika dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (2002-2007) *Bachelor of Science in Mathematics from Bogor Agricultural University (IPB), Bogor (2002-2007)*	Sebelum bergabung di Perseroan, beliau sempat bekerja di sejumlah perusahaan termasuk di PT Askrindo (Persero) yang merupakan Perusahaan Induk Perseroan. Berikut ini adalah ringkasan riwayat kerja beliau, antara lain: a. *Supervisor* Divisi Reasuransi di PT Asuransi Artarindo (2014-2016) b. *Junior Supervisor Underwriting (Surety)* di PT Askrindo (2016-2017) c. *Junior Supervisor* Biro Aktuaria di PT Askrindo (2017-2018) d. *Supervisor* Biro Aktuaria di PT Askrindo (2018-2020) e. Manager Biro Aktuaria (Aktuaris Madya) di PT Askrindo (2020-sekarang) *Before joining the Company, he worked for several companies including PT Askrindo (Persero) which is the Company's Holding Company. The following is a summary of his employment history, among others:* *a. Supervisor of Reinsurance Division at PT Asuransi Artarindo (2014-2016)* *b. Junior Supervisor Underwriting (Surety) at PT Askrindo (2016-2017)* *c. Junior Supervisor of Actuarial Bureau at PT Askrindo (2017-2018)* *d. Supervisor of Actuarial Bureau (Actuarial Intermediate) at PT Askrindo (2018-2020)* *e. Manager of Actuarial Bureau (Actuarial Intermediate) at PT Askrindo (2020-present)*

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah mengadakan 15 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2025, the Audit Committee has held 15 meetings with details as follows:

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Ketua Komite Audit *Chairman of Audit Committee*	Anggota Komite Audit *Member of Audit Committee*	Anggota Komite Audit *Member of Audit Committee*
1	8 Januari 2025 *January 8, 2025*	Pembahasan rencana kerja audit tahunan 2025 *Discussion of the 2025 Annual Audit Plan*	1	1	1
2	16 Januari 2025 *January 16, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 31 Desember 2024 *Discussion of the Evaluation of the Financial Statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2024*	1	1	1
3	20 Februari 2025 *February 20, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 31 Januari 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of January 31, 2025*	1	1	1
4.	17 Maret 2025 *March 17, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 28 Februari 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of February 28, 2025*	1	1	1
5	17 April 2025 *April 17, 2025*	Pembahasan tindak lanjut audit BPK *Discussion of the Follow-up Actions on the BPK*	1	1	1
6	24 April 2025 *April 24, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 31 Maret 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of March 31, 2025*	1	1	1
7	15 Mei 2025 *May 15, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 30 April 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of April 30, 2025*	1	1	1
8	16 Juni 2025 *June 16, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 31 Mei 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of May 31, 2025*	1	1	1
9	23 Juni 2025 *June 23, 2025*	Pembahasan tindak lanjut temuan OJK khusus Desk TI *Discussion of the Follow-up Actions on OJK Findings Related to the IT Desk*	1	1	1
10	18 Juli 2025 *July 18, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 30 Juni 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of June 30, 2025*	1	1	1
11	7 Agustus 2025 *August 7, 2025*	Pembahasan realisasi RKAT dan tindak lanjut hasil audit internal semester I tahun 2025 *Discussion of the RKAT Realization and Follow-up Actions on Internal Audit Findings for the First Semester of 2025*	1	1	1

12	21 Agustus 2025 *August 21, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 31 Juli 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of July 31, 2025*	1	1	1
13	15 September 2025 *September 15, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 31 Agustus 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of August 31, 2025*	1	1	1
14	27 November 2025 *November 27, 2025*	Pembahasan tindak lanjut hasil audit BPK, OJK dan progres audit SPI *Discussion of Follow-up Actions on BPK and OJK Audit Findings and the Progress of Internal Audit (SPI)*	1	1	1
15	15 Desember 2025 *December 15, 2025*	Pembahasan evaluasi laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah posisi 30 November 2025 *Discussion of the Evaluation of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Financial Statements as of November 30, 2025*	1	1	1
	Jumlah Rapat Komite Audit *Total Meetings of the Audit Committee*		15	15	15
	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*		15	15	15
	Tingkat Kehadiran (%) *Attendance Rate (%)*		100	100	100

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Selama tahun 2025, Komite Audit telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan yang pelaksanaannya, antara lain:

Training and/or Competency Development Program For Audit Committee

During 2025, Audit Committee has participated in several training activities in which such implementation was, as follows:

No	Pelatihan *Training*	Waktu *Date*	Tempat *Place*	Penyelenggara *Organizer*
1	*Workshop Integrating Strategy And Risk Management*	21-22 April 2025 *April 21-22, 2025*	Jakarta	GRC *Management*
2	*Seminar Driving Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak Audit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management*	15 Juli 2025 *July 15, 2025*	Jakarta	IKAI
3	*National Conference audit for Tomorrow Strategic future ready sustainable*	27-28 Agustus 2025 *August 27-28, 2025*	Medan	IIA Indonesia
4	*Workshop "Ethical Risk Culture & Risk Leadership"*	30 September 2025 *September 30, 2025*	Jakarta	GRC *Management*

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2025

Selama tahun 2025, Komite Audit telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

1. *Review* dan analisis atas Laporan Kinerja dan Keuangan, meliputi: laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Duties Implementation In 2025

During 2025, the Audit Committee has realized the following work program:

1. *Review and analysis of performance and financial reports, including monthly, quarterly, and annual financial statements, and reporting the results to the Board of Commissioners.*

2. *Review* dan analisis terhadap pengelolaan sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
3. *Review* dan analisis atas pengendalian dan penerapan GCG, manajemen risiko dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
4. *Review* dan analisis terhadap hasil-hasil temuan audit pengawasan eksternal maupun internal beserta rekomendasi tindak lanjutnya serta upaya dan kendala yang dihadapi.
5. Menghadiri rapat antara lain dengan Dewan Komisaris, Direksi, SPI, atau rapat tentang pembahasan masalah-masalah temuan auditor eksternal maupun internal Perusahaan.
6. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja KAP atas pelaksanaan audit laporan keuangan Perusahaan dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris.
7. Evaluasi atas penunjukan auditor eksternal oleh KAP.
8. Evaluasi atas penunjukan konsultan manajemen beserta hasilnya.
9. Mengikuti seminar, *workshop*, pelatihan terkait dengan tugas Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/KEP/DK/JPAS/2022 tanggal 25 Juli 2022. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris atas penyelenggaraan perusahaan yang sehat dan menguntungkan serta meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif, efisien dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
1. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi;
2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur remunerasi, kebijakan remunerasi, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Struktur remunerasi, kebijakan remunerasi, dan besaran remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2. *Review and analysis of the internal control system management and the effectiveness of the external and internal auditors' duties.*
3. *Review and analysis of the implementation of Good Corporate Governance (GCG), risk management, and applicable company regulations.*
4. *Review and analysis of findings from external and internal audit supervision, including follow-up recommendations, as well as related efforts and challenges encountered.*
5. *Attending meetings with, among others, the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Internal Audit Unit (SPI), or meetings discussing matters related to external and internal audit findings of the Company.*
6. *Assessment and evaluation of the Public Accounting Firm's (KAP) performance in conducting the company's financial statement audit and submission of the report to the Board of Commissioners.*
7. *Evaluating the appointment of the external auditor through the Public Accounting Firm (KAP).*
8. *Evaluating the appointment of management consultants and the results of their engagements.*
9. *Participating in seminars, workshops, and training programs related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.*

Nomination and Remuneration Committee

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee based on Decree of the Board of Commissioners Number 02/KEP/DK/JPAS/2022 dated July 25, 2022. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee is taken in order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities as well as the supervisory function by the Board of Commissioners for the implementation of a healthy and profitable company as well as improving the company's performance effectively, efficiently and independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Duties and Responsibilities

The Company's Nomination and Remuneration Committee has a number of duties and responsibilities, among others:

Regarding the Remuneration Policy:
1. *Evaluating the Remuneration Policy;*
2. *Evaluating the suitability of the remuneration policy with the implementation of the policy;*
3. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
   a. *Remuneration structure, remuneration policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;*
   b. *Remuneration structure, remuneration policy, and the amount of remuneration for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.*

Terkait dengan Kebijakan Nominasi:

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon karyawan satu tingkat di bawah Direksi.

Regarding Nomination Policy:

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders;*
3. *Provide recommendations regarding prospective employees one level below the Board of Directors.*

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berlaku sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali. Dewan Komisaris berhak sewaktu-waktu untuk meninjau kembali keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Composition of Membership and Term of Office

The term of office of the members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company is the same as the term of office of the Board of Commissioners and can be extended 1 (one) time. The Board of Commissioners reserves the right at any time to review the membership of the Nomination and Remuneration Committee.

Per 31 Desember 2025, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee is as follows:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan *Legal Basis for Appointment*
1.	Siti Ma'rifah	Ketua *Chairman*	SK Dewan Komisaris No. 02/KEP/DK/JPAS/2022 tanggal 25 Juli 2022 *Board of Commissioners Decree No. 04/DK/JPAS/2022 dated July 25, 2022.*
2.	Kun Wahyu Wardana	Anggota *Member*	SK Dewan Komisaris No. 02/KEP/DK/JPAS/2022 tanggal 25 Juli 2022 *Board of Commissioners Decree No. 04/DK/JPAS/2022 dated July 25, 2022.*
3.	Antoni Ludfi Arifin	Anggota *Member*	SK Dewan Komisaris No. 04/KEP/DK-JPAS/2025 tanggal 29 September 2025 *Board of Commissioners Decree No. 04/DK/JPAS/2025 dated September 29, 2025.*

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap Ibu Siti Ma'rifah selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris.

Profile of Chairman of The Nomination and Remuneration Committee

Complete profile of Ms. Siti Ma'rifah as Chairman of the Company's Nomination and Remuneration Committee can be seen in the Chapter Company Profile, Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil lengkap Bapak Kun Wahyu Wardana selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris. Profil lengkap anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

A complete profile of Mr. Kun Wahyu Wardana, a member of the Company's Nomination and Remuneration Committee, can be found in the "Company Profile" section, under the "Board of Commissioners Profile" subsection. A complete profile of the members of the Company's Nomination and Remuneration Committee can be found in the following table:

Nama *Name*	Usia *Age*	Domisili *Domicile*	Riwayat Pendidikan *Educational Background*	Riwayat Karier *Career Background*
Antoni Ludfi Arifin	49 tahun *49 years old*	Bekasi, Jawa Barat *Bekasi, West java*	1. Doktoral Management Science, MSDM, 2017 2. S2 Degree (*master's degree*), *School of Management*, University of Sahid - Jakarta, 3. Majoring: *Marketing Management*, 2008. 4. S1 Degree, *Faculty of Economics*, University of Sahid – Jakarta, 2005, 5. Diploma Degree, *Faculty of Agriculture*, University of Lampung, 1998, *1. Doctoral Degree in Management Science (Human Resource Management), 2017* *2. Master's Degree (S2), School of Management, Universitas Sahid – Jakarta,* *3. Major in Marketing Management, 2008* *4. Bachelor's Degree (S1), Faculty of Economics, Universitas Sahid – Jakarta, 2005* *5. Diploma Degree, Faculty of Agriculture, Universitas Lampung, 1998*	1. 2024-*until now*, Lecturer S3 UNJ 2. 2023-*until now*, Lecturer of Paramadina University (Non Permanen/Dosen Luar Biasa) 3. 2016-*until Now*, Lecturer at STIAMI Institute, Lektor Kepala/ Associate Professor 4. 29 Januari 2024-2025, *Commissioner at* PT Sumber Daya Multi Cendekia (Jadihebat.id) 5. November 2021- Januari 2024, *Division Head of Syaria Guarantee* PT Jamkrida Jakarta 6. 14 May 2018- November 2021, *Division Head of HR & GA* PT Jamkrida Jakarta 7. 2016-2017, *Corporate Coach and Trainer* PT Kimia Farma (Persero), Tbk & PT Pharmasolindo 8. Oct 2014- 12 May 2018, *Training Manager* PT Pharmasolindo 9. August 2010 until September 2014, *Product Manager of Analgesic Product* PT. Pharmasolindo 10. January 2009 *until* July 2010, *Product Manager* PT. Dipa Puspa Labsains 11. July 2008 *until* December 2008, *Manager Project* PT. Widya Pustaka 12. October 1, 2005 – June 30, 2008, *Account Manager* PT. Belle Pratama 13. December 2003 – September 31, 2005, *Product Manager* OTC (Herbal) PT. Kimia Farma (Persero), Tbk (Head Office) in Jakarta. 14. April 2003 – December, 2003, *Junior Product Manager* OTC (Herbal) PT. Kimia Farma (Persero), Tbk (Head Office), in Jakarta 15. March 2002 – March, 2003, *Area Supervisor* OTC *Representative* PT. Kimia Farma (Persero), Tbk in Bali 16. March 2001- February, 2002, *Over the Counter* ("OTC") *Representative at* PT. Kimia Farma (Persero), Tbk in Palembang
				1. 2024–present, Lecturer, Doctoral Program (S3), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) *2. 2023–present, Lecturer, Universitas Paramadina (Non-Permanent Lecturer / Adjunct Lecturer)* *3. 2016–present, Lecturer, STIAMI Institute; Associate Professor (Lektor Kepala)* *4. 29 January 2024–2025, Commissioner, PT Sumber Daya Multi Cendekia (Jadihebat.id)* *5. November 2021–January 2024, Head of Sharia Guarantee Division, PT Jamkrida Jakarta* *6. 14 May 2018–November 2021, Head of Human Resources & General Affairs Division, PT Jamkrida Jakarta* *7. 2016–2017, Corporate Coach and Trainer, PT Kimia Farma (Persero) Tbk & PT Pharmasolindo* *8. October 2014–12 May 2018, Training Manager, PT Pharmasolindo* *9. August 2010–September 2014, Product Manager (Analgesic Products), PT Pharmasolindo* *10. January 2009–July 2010, Product Manager, PT Dipa Puspa Labsains* *11. July 2008–December 2008, Project Manager, PT Widya Pustaka* *12. 1 October 2005–30 June 2008, Account Manager, PT Belle Pratama* *13. December 2003–30 September 2005, Product Manager OTC (Herbal), PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Head Office), Jakarta* *14. April 2003–December 2003, Junior Product Manager OTC (Herbal), PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Head Office), Jakarta* *15. March 2002–March 2003, Area Supervisor OTC Representative, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Bali* *16. March 2001–February 2002, Over-the-Counter (OTC) Representative, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Palembang*

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 3 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee has held 3 meeting with details as follows:

No.	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi *Chairman of Nomination and Remuneration Committee*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi *Member of Nomination and Remuneration Committee*	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi *Member of Nomination and Remuneration Committee*
1	*Career Plan* 2026	1	1	1
2	Kebijakan SDM *Human Resources Policy (HR Policy)*	1	1	1

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/KEP/DK/JPAS/2023 tanggal 16 Januari 2023. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dilakukan dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris atas penyelenggaraan perusahaan yang sehat dan menguntungkan serta meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif, efisien dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

The Company has established a Risk Monitoring Committee based on Decree of the Board of Commissioners Number 02/KEP/DK/JPAS/2023 dated Januari 16, 2023. The establishment of the Risk Monitoring Committee is taken in order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities as well as the supervisory function by the Board of Commissioners for the implementation of a healthy and profitable company as well as improving the company's performance effectively, efficiently and independently in accordance with the principles of Good Corporate Governance at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko Perseroan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, antara lain:
   a. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko perusahaan dengan pelaksanaannya, antara lain risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
   b. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaannya, sebagaimana tertuang dalam poin sebelumnya.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

Duties and Responsibilities

The Company's Risk Monitoring Committee has a number of duties and responsibilities, among others:

1. *Monitor and evaluate the conformity between risk management policies and their implementation, including:*
   a. Monitor and evaluate the suitability of the company's risk management policies and their implementation, including strategic risk, operational risk, insurance risk, credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, compliance risk and reputation risk.
   b. Monitor and evaluate the conformity between integrated risk management policies and their implementation, as stated in the previous point.
   c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the suitability of risk management policies and integrated risk management with their implementation to ensure that the Askrindo Syariah Financing Guarantee has managed risks adequately.

d. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum penjaminan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:

   a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan tugas Komite Manajemen Risiko.
   b. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, termasuk pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dengan perusahaan induk dan perusahaan anak.
   d. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.

3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

d. Review and provide opinions to the Board of Commissioners on general guarantee policies and other policies required by regulators submitted by the Board of Directors for approval by the Board of Commissioners.

2. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners, including:

a. Monitor the implementation of the work plan of the Risk Management Work Unit and the duties of the Risk Management Committee.
b. Monitor the implementation of the work plan of the Integrated Risk Management Work Unit and the duties of the Integrated Risk Management Committee.
c. Provide recommendations to the Board of Commissioners to increase the effectiveness of the implementation of risk management at PT Guarantee Financing Askrindo Syariah, including the implementation of risk management in an integrated manner with the parent company and subsidiary companies.
d. Provide evaluation results of regulator responses (assessments) related to risks to the Board of Commissioners.

3. Carry out certain other tasks related to the function and scope of duties of the Risk Oversight Committee given by the Board of Commissioners.

Komposisi Keanggotaan dan Masa Jabatan

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berlaku sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali. Dewan Komisaris berhak sewaktu-waktu untuk meninjau kembali keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

Per 31 Desember 2025, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Composition of Membership and Term of Office

The term of office of the members of the Risk Monitoring Committee of the Company is the same as the term of office of the Board of Commissioners and can be extended 1 (one) time. The Board of Commissioners reserves the right at any time to review the membership of the Risk Monitoring Committee.

As of December 31, 2025, the composition of the Company's Risk Monitoring Committee is as follows:

No	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Dasar Hukum Penunjukan *Legal Basis for Appointment*
1.	Kun Wahyu Wardana	Ketua *Chairman*	SK Dewan Komisaris Nomor 08/KEP/DK/JPAS/2023 tanggal 04 September 2023. *Board of Commissioners Decree Number 08/DK/JPAS/2023 dated September 4, 2023.*
2.	Kristina Lestariningsih	Anggota *Member*	SK Dewan Komisaris Nomor 08/KEP/DK/JPAS/2023 tanggal 04 September 2023. *Board of Commissioners Decree Number 08/DK/JPAS/2023 dated September 4, 2023.*
3.	Delyuzar Syamsi	Anggota *Member*	SK Dewan Komisaris No.001/KEP/DK/JPAS/2024 tanggal 31 Juli 2024. *Board of Commissioners Decree Number 001/KEP/DK/JPAS/2024 dated July 31, 2024.*

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap Bapak Kun Wahyu Wardana selaku Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris.

Profile of Chairman of The Risk Monitoring Committee

Complete profile of Mr. Kun Wahyu Wardana as Chairman of the Company's Risk Monitoring Committee can be seen in the Chapter Company Profile, Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap Ibu Kristina Lestariningsih selaku Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Dewan Komisaris.

Profile of Risk Monitoring Committee Members

Complete profile of Ms. Kristina Lestariningsih as Member of the Company's Risk Monitoring Committee can be seen in the Chapter Company Profile, Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners.

Profil lengkap Bapak Delyuzar Syamsi selaku Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan, Sub-Bab Profil Anggota Komite Audit.

Complete profile of Mr. Delyuzar Syamsi as Member of the Company's Risk Monitoring Committee can be seen in the Chapter Good Corporate Governance, Sub-chapter Profile of the Audit Committee Member.

Nama *Name*	**Usia** *Aged*	**Domisili** *Domiciled*	**Riwayat Pendidikan** *Educational Background*	**Riwayat Karier** *Career Background*
Delyuzar Syamsi	61 tahun *61 years old*	Tangerang Selatan *South Tangerang*	• Sarjana Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang - Sumatera Barat (1990) • *Master of Business Administration*, Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009) • *Bachelor of Management, Faculty of Economics, Andalas University, Padang - West Sumatra (1990)* • *Master of Business Administration, Faculty of Economics & Business, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2009)*	Karier beliau dimulai di Bank Negara Indonesia sebagai Analis Kredit hingga menjabat sebagai *Assistant Vice President* (1992-2006). Beliau kemudian bergabung dengan Bank Muamalat (2006 2016) sebagai Asisten Direktur Funding dan Layanan hingga menjadi *Executive Director of Muamalat Institute*. Perjalanan karier beliau berlanjut sebagai Komite Pemantau Risiko PT BNI Syariah (2017-2021), Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia (2021-2022) dan sebagai Direktur PT Induk Harta Insan Karimah (2020-2023). *He began his career at Bank Negara Indonesia as a Credit Analyst and advanced to the position of Assistant Vice President (1992–2006). He then joined Bank Muamalat (2006–2016), where he served as Assistant Director of Funding and Services before being appointed Executive Director of the Muamalat Institute. His professional journey continued as a member of the Risk Monitoring Committee at PT BNI Syariah (2017–2021), followed by a similar role at PT Bank Syariah Indonesia (2021–2022), and as Director of PT Induk Harta Insan Karimah (2020–2023).*

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan 5 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meeting

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee has held 5 meetings with details as follows:

No.	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Ketua Komite Pemantau Risiko *Chairman of Risk Monitoring Committee*	Anggota Komite Pemantau Risiko *Member of Risk Monitoring Committee*	Anggota Komite Pemantau Risiko *Member of Risk Monitoring Committee*
1	6 Februari 2025 *February 6, 2025*	Kolaborasi GRC-SPI dalam Aspek Pengawasan dan Manajemen Risiko *RC–SPI Collaboration in the Aspects of Supervision and Risk Management*	1	1	1
2	17 April 2025 *April 17, 2025*	1. *Compliance Checking Semester* II/2024 2. *Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Toleraance* 3. *Risk Acceptance Criteria (RAC)* 4. Profil Risiko Triwulan I/2025 *1. Semester II/2024 Compliance Checking* *2. Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Tolerance* *3. Risk Acceptance Criteria (RAC)* *4. Q1/2025 Risk Profile*	1	1	1
3	23 Juni 2025 *June 23, 2025*	1. *Risk & Control Self Assessment* 2. *Business Continuity Managament,* 3. Tindak Lanjut Temuan IT oleh OJK *1. Risk and Control Self-Assessment (RCSA)* *2. Business Continuity Management (BCM)* *3. Follow-up on OJK Findings Related to IT*	1	1	1
4	23 Agustus 2025 *August 23, 2025*	1. Profil Risiko Semester I/2025 2. *Top Risk* RKAP Triwulan II/2025 3. *Compliance Checking* Smt I/2025 *1. Risk Profile for Semester I/2025* *2. Top Risks of RKAP Q2/2025* *3. Semester I/2025 Compliance Checking*	1	1	1
5	10 November 2025 *November 10, 2025*	1. *Top Risk* RKAP Triwulan III/2025 2. *Stress Test* 3. *Good Corporate Governance* (GCG) 4. *Risk Maturity Index* (RMI) *1. Top Risks of RKAP Q3/2025* *2. Stress Testing* *3. Good Corporate Governance (GCG)* *4. Risk Maturity Index (RMI)*	1	1	1
1	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko *Total Meetings of the Risk Monitoring Committee*		5	5	5
	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*		5	5	5
	Tingkat Kehadiran (%) *Attendance Rate (%)*		100	100	100

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

During 2025, the Risk Monitoring Committee has implemented the following work programs:

1. *Monitoring and evaluating the alignment between the risk management policy and its implementation.*
2. *Monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and the Risk Management fun*

Organ Pendukung Direksi *Supporting*

Direksi membentuk komite-komite yang bertugas membantu kegiatan pengelolaan dan pengurusan Perseroan untuk secara khusus menangani wilayah kerja tertentu. Berikut ini adalah uraian dan gambaran singkat mengenai komite-komite di bawah Direksi:

Organs of The Board of Directors

The Board of Directors established committees that are responsible for assisting the management and the course of the Company to specifically handle certain work areas. The following is a description and brief description of the committees under the Board of Directors:

No	Nama Komite *Committee Name*	Keanggotaan *Membership*	Keanggotaan *Membership*
1.	Komite Produk *Product Committee*	Ketua: Direktur Bidang/Pejabat Setingkat Sekretaris: Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk (PPP) Anggota: • Direksi & SEVP • Kepala Divisi *Suretyship* • kepala Divisi Operasional • Seluruh Kepala Departmen di Divisi Operasional • Seluruh Kepala Departemen di Divisi PPP • Kepala Manajemen Risiko • Kepala Unit *Legal Drafting* • Kepala Unit Subrogasi dan Penagihan • Legal Korporat	a. Melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan dan Prosedur Produk yang diajukan. b. Melakukan evaluasi dan usulan atas konten Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan produk dengan mitra bisnis. c. Melakukan evaluasi atas kinerja produk penjaminan yang telah dan akan dipasarkan dan membuat rekomendasi terkait upaya peningkatan yang diperlukan. d. Menyelenggarakan rapat Komite Produk dalam hal (i) terdapat usulan PKS/produk baru atau perubahan atas PKS/produk yang telah ada yang perlu didaftarkan kepada regulator terkait dan/atau melibatkan DPS untuk memperoleh persetujuan dari aspek syariah; atau (ii) adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait dengan produk penjaminan dan/atau pemasarannya; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Produk.
		Chairman: Supervising Director/ Executive at equal level Secretary: Head of Marketing & Product Development Division (PPP) *Members:* • *Directors & SEVP* • *Head of Suretyship Division* • *Head of Operations Division* • *All Department Heads in the Operations Division* • *All Department Heads in the PPP Division* • *Head of Risk Management* • *Head of Legal Drafting Unit* • *Head of Subrogation and Billing Unit* • *Corporate Legal*	*a. Evaluate the proposed Product Policies and Procedures submitted.* *b. Conduct evaluations and suggestions on the content of Cooperation Agreements (PKS) and products with business partners.* *c. Evaluate the performance of guarantee products that have been and will be marketed and make recommendations regarding the necessary improvement efforts.* *d. Hold a Product Committee meeting in the event that there is a proposal for a PKS/new product or an amendment to an existing PKS/ product that needs to be registered with the relevant regulator and/or involves a DPS to obtain approval from the sharia aspect; or (ii) there are new provisions issued by regulators related to the guarantee product and/or its marketing; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Product Committee.*

No	Nama Komite *Committee Name*	Keanggotaan *Membership*	Keanggotaan *Membership*
2.	Komite Penjaminan *Guarantee Committee*	Ketua: Direktur Utama Sekretaris: Kepala Divisi Operasional Anggota: • Direksi • Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk (PPP) • Kepala Divisi *Suretyship* • Seluruh Kepala Departemen di Divisi Operasional • Kepala Manajemen Risiko • Kepala Subrogasi dan Penagihan *Chairman: President Director* *Secretary: Head of Operations Division* *Members:* • *Directors* • *Head of Marketing and Product Development (PPP) Division* • *Head of Suretyship Division* • *All Head of Departments in the Operations Division* • *Head of Risk Management* • *Head of Subrogation and Collection*	a. Melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman (termasuk kebijakan & Prosedur) penjaminan dengan pelaksanaan kegiatan penjaminan yang mencakup antara lain kegiatan akseptasi, aktuaria, penjaminan ulang, klaim, dan subrogasi; b. Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat atas Kebijakan Penjaminan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator; c. Memberikan rekomendasi atas setiap Kebijakan Penjaminan khususnya akseptasi dan klaim yang menjadi limit pejabat yang diberi kewenangan limit akseptasi dan klaim; d. Memutuskan kegiatan penjaminan antara lain persetujuan akseptasi termasuk *terms* & kondisi yang disyaratkan; e. Menjaga kehati-hatian dalam kegiatan akseptasi, aktuaria, *reguarantee*, klaim dan subrogasi agar dapat mendapatkan manfaat maksimal bagi setiap pemangku kepentingan; f. Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup Komite Penjaminan *a. Evaluate the guidelines suitability (including policies & Prosedurs) of guarantees with the implementation of guarantee activities which include acceptance, actuarial, reinsurance, claims and subrogation activities;* *b. Review and provide opinions on the Guarantee Policy and other policies required by the regulator;* *c. Give recommendations on each Guarantee Policy, especially acceptances and claims that becomes the official limit who are given the authority for acceptance and claims limits;* *d. Decide on guarantee activities among others, acceptance agreement including terms & conditions required;* *e. Maintain prudence in acceptances, actuarial, regulatory, claims and subrogation activities in order to get maximum benefits for each stakeholder;* *f. Carry out certain other tasks related to the function and scope of the Guarantee Committee.*

No	Nama Komite *Committee Name*	Keanggotaan *Membership*	Keanggotaan *Membership*
3.	Komite Manajemen Risiko *Risk Management Committee*	Ketua: Direktur Utama Sekretaris: Kepala Manajemen Risiko (MR) Anggota: • Direksi & SEVP • Seluruh Kepala Divisi atau Pejabat Tertinggi di Unit Kerja dimaksud Kepala Perencanaan Strategis • Kepala Sekretaris Perusahaan & Hukum *Chairman:President Director Secretary: Head of Risk Management (MR) Members:* • *Directors & SEVP - All Division Heads or Supreme* • *Officials in the Work Unit concerned* • *Head of Strategic Planning* • *Chief Corporate & Legal Secretary*	a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas: • Penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko, penetapan selera risiko *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* yang diambil; • Penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko korporat; • Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan/prosedur normal, regulasi dan melampaui rencana bisnis dan limit yang telah ditetapkan sebelumnya yang belum diatur dalam komite lainnya; • Budaya sadar risiko *(risk awareness)* agar terbentuk dalam setiap aktivitas perusahaan; • Pengambilan keputusan tentang kebijakan dan strategi perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko operasional maupun non-operasional yang bersifat strategis dan korporat yang dapat mempengaruhi terhadap kesinambungan usaha perusahaan. b. Melakukan kajian dan pemantauan atas Profil Risiko Perusahaan serta upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh Manajemen terhadap faktor-faktor risiko utama. c. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko. d. Melakukan pembahasan terhadap laporan-laporan risiko termasuk laporan tingkat risiko. e. Melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko. f. Menjalin kerja sama dengan konsultan dari luar, akuntan, asesor atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite. *a. Evaluate and recommend:* • *Formulation of policies and guidelines for risk management including risk management strategies, determination of risk appetite and risk tolerance taken;* • *Improve the implementation of corporate risk management;* • *Determination of matters related to business decisions that deviate from normal policies/ procedures, regulations and exceed business plans and predetermined limits that have not been regulated in other committees;* • *Risk awareness culture in order to be formed in every company activity;* • *Decision making regarding company policies and strategies related to strategic and corporate operational and non-operational risk management that can affect the sustainability of the company's business.* *b. Review and monitor the Company's Risk Profile as well as mitigation efforts undertaken by Management against the main risk factors.* *c. Monitor the adequacy of identification, measurement, monitoring, control and risk management information system.* *d. Discussions on risk reports including risk level reports.* *e. Oversee the Company's compliance with the Articles of Association, Financial Service Authority Regulation as well as other laws and regulation relating to risk management.* *f. In collaboration with external consultants, accountants, assessors or other external parties who provide advice to the Committee.*

No	Nama Komite *Committee Name*	Keanggotaan *Membership*	Keanggotaan *Membership*
4.	Komite Personalia *Human Resources Committee*	Ketua: Direktur Keuangan Sekretaris: Kepala Divisi SDM & Umum Anggota: • Direksi & SEVP • Seluruh Kepala Divisi atau Pejabat Tertinggi di Unit Kerja dimaksud Kepala Manajemen Risiko • Kepala Sekretaris Perusahaan & Hukum *Chairman: Director of Finance Secretary: Head of HR & General Affairs Division Members:* • *Directors & SEVP* • *All Division Heads or Executives in the concerned Work Unit* • *Head of Risk Management* • *Head of Corporate Secretary & Legal*	a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas rumusan kebijakan dan arahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya insani di JPAS. b. Tugas pada butir a) tersebut di atas antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: • Remunerasi dan insentif pegawai; • Mutasi dan rotasi pegawai; • Promosi, demosi, detasering, dan pemutusan hubungan kerja pegawai; • Disiplin pegawai; • Hal-hal lain yang terkait dengan penanganan masalah pegawai terkait dengan pihak eksternal dan hubungan industrial. c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan personalia yang telah ditetapkan. d. Menjalin kerja sama dengan konsultan dari luar atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite. *a. Conduct evaluation and give recommendations on the formulation of policies and directions relating to human resource management in JPAS.* *b. The duties as aforementioned in point a) above includes the following:* • *Remuneration and employee incentives;* • *Employee movements and rotation;* • *Promotion, demotion, detasering, and termination of employee employment;* • *Discipline of employees;* • *Other matters related to handling employee problems related to external parties and industrial relations.* *c. Evaluate the implementation of policies and personnel management that have been determined.* *d. In collaboration with external consultants or other external parties who provide advice to the Committee.*
5.	Komite Investasi *Investment Committee*	Ketua: Direktur Keuangan Sekretaris: Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Anggota: • Direksi & SEVP • Seluruh Kepala Divisi atau Pejabat Tertinggi di Unit Kerja dimaksud Kepala Manajemen Risiko • Kepala Departemen Akuntansi • Kepala Departemen TI • Kepala Perencanaan Strategis *Chairman: Director of Finance Secretary: Head of Finance and Accounting Division Members:* • *Directors & SEVP* • *Head of Marketing and Product Development Division* • *Head of Risk Management* • *Head of the Accounting Department* • *Head of IT Department* • *Head of Strategic Planning*	a. Merumuskan kebijakan dan arahan investasi. b. Memantau pelaksanaan kebijakan, Prosedur dan arahan investasi yang telah ditetapkan. c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan arahan investasi yang telah ditetapkan. d. Menjaga kehati-hatian dalam kegiatan investasi agar dapat mendapatkan manfaat maksimal bagi setiap pemangku kepentingan. *a. Formulate investment policies and directions.* *b. Monitor the implementation of policies, Prosedur and investment directives that have been determined.* *c. Evaluate the implementation and direction of the investment that has been determined.* *d. Maintain prudence in investment activities in order to get maximum benefit for each stakeholder.*

No	Nama Komite *Committee Name*	Keanggotaan *Membership*	Keanggotaan *Membership*
6.	Komite Pengadaan Barang dan Jasa *Goods and Services Procurement Committee*	Ketua: Direktur Keuangan Sekretaris: Kepala Divisi SDM & Umum Anggota: • Direksi & SEVP • Kepala Manajemen Risiko • Kepala Departemen Akuntansi & Keuangan • Kepala Perencanaan Strategis • Kepala Bagian Umum *Chairman: Director of Finance* *Secretary: Head of HR & General Division* *Members:* • *Directors & SEVP* • *Head of Risk Management* • *Head of the Department of Accounting & Finance* • *Head of Strategic Planning* • *Head of General Affairs*	a. Melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang & Jasa yang diajukan. b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang & Jasa. c. Melakukan evaluasi atas kinerja Pengadaan Barang & Jasa yang telah dilakukan termasuk vendor yang digunakan dan membuat rekomendasi terkait upaya perbaikan yang diperlukan. d. Menyelenggarakan rapat Komite Pengadaan Barang & Jasa dalam hal (i) terdapat usulan PKS dengan vendor atas Pengadaan Barang & Jasa baru atau perubahan atas PKS yang telah dibuat; atau (ii) adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait dengan Pengadaan Barang & Jasa; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Pengadaan Barang & Jasa. *a. Evaluate the proposed Policies and Procedures for Procurement of Goods & Services submitted.* *b. Evaluate the implementation of Goods & Services procurement activities.* *c. Evaluate the performance of procurement of Goods & Services that have been performed including the vendors used and make recommendations related to the necessary improvement efforts.* *d. Organize meetings of the Goods & Services Procurement Committee in the event that (i) there is a PKS proposal with a vendor for the procurement of new Goods & Services or changes to the PKS that have been made; or (ii) there are new provisions issued by regulators relating to the Procurement of Goods & Services; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Goods & Services Procurement Committee.*
7.	Komite Ta'widh (Klaim) *Ta'widh Committee (Claim)*	Ketua : Direktur Bidang Sekretaris : Koordinator Klaim dan Subrogasi Anggota: • Kepala Divisi Operasional • Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi • Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola • Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk • Kepala Departemen Klaim • Legal Korporat dan Bisnis *Chairman: Director in charge* *Secretary : Claims and Subrogation Coordinator* *Members :* • *Head of Operational Division* • *Head of Finance and Accounting Division* • *Head of Risk Management, Compliance and Governance Division* • *Head of Marketing and Product Development Division* • *Head of Claims Department* • *Corporate and Business Legal*	a. Melakukan evaluasi atas usulan Klaim yang diajukan. b. Menyelenggarakan rapat Komite Klaim dalam hal (i) terdapat usulan Klaim dengan Limit Direksi; atau (ii) Potensi adanya gugatan hukum atau panggilan/ mediasi oleh Instansi terkait; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Klaim. c. Menyimpang dari poin (b) di atas, Komite Klaim dapat menunjuk salah satu atau beberapa anggota Komite Klaim untuk menyampaikan pandangan atau rekomendasi sesuai dengan keahliannya dalam bentuk disposisi tertulis tanpa melakukan rapat Komite Klaim. *a. Evaluate the proposed Claims submitted.* *b. Holding a Claims Committee meeting in the event that (i) there is a Claim proposal with a Directors Limit; or (ii) There is a potential for a lawsuit or subpoena/mediation by the relevant agency; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Claims Committee.* *c. Deviating from point (b) above, the Claims Committee may appoint one or several members of the Claims Committee to convey views or recommendations according to their expertise in the form of a written disposition without convening a Claims Committee meeting.*

No	Nama Komite *Committee Name*	Keanggotaan *Membership*	Keanggotaan *Membership*
8	Komite Pengarah TI *IT Steering Committee*	Ketua: Direktur Bidang Sekretaris: Kepala Desk Teknologi Informasi Anggota: • Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk • Kepala Divisi Operasional • Koordinator Klaim dan Subrogasi • Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi • Kepala Divisi SDM & Umum • Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola • Kepala Sekretaris Perusahaan dan Hukum *IT Steering Committee Chairperson: Director in charge Secretary: Desk Head of Information Technology Member:* • *Head of Marketing and Product Development Division* • *Head of Operations Division* • *Claims and Subrogation Coordinator* • *Head of Finance and Accounting Division* • *Head of HR & General Division* • *Head of Risk Management and Governance Division* • *Head of Corporate Secretary and Legal*	a. Sebagai komite perumus kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi Perseroan; b. Menyinergikan dan mengintegrasikan rencana strategis Teknologi Informasi yang mengakomodir seluruh unit kerja; c. Memastikan kesesuaian rencana belanja/investasi unit kerja agar tidak ada tumpang tindih (*redundancy*) dalam inisiatif Teknologi Informasi; d. Memberikan arahan serta *review* atau evaluasi berkala implementasi Teknologi Informasi untuk memastikan keselarasan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dengan *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) dan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan; e. Memberikan arahan dan evaluasi terkait perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang dibutuhkan oleh Perseroan; f. Memberikan arahan dan pendampingan perumusan *Master Plan* TI; g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan implementasi tahunan *Master Plan* TI Perseroan; h. Memutuskan pelaksanaan prioritas program kerja TI dan anggarannya agar selalu selaras dengan tujuan bisnis dengan tetap memperhatikan *Master Plan* TI. *a. As the formulation committee of the Company's Information Technology policies and procedures;* *b. Synergize and integrate Information Technology strategic plans that accommodate all work units;* *c. Ensure the suitability of spending/investment plans of work units so that there is no overlap (redundancy) in Information Technology initiatives;* *d. Provide direction and periodic review or evaluation of Information Technology implementation to ensure alignment of the company's long term plan (RJPP) with the Information Technology Master Plan (MPTI) and adjustments to policies and procedures according to established standards;* *e. Provide direction and evaluation related to the formulation of IT policies, standards and procedures required by the Company;* *f. Provide direction and assistance in the formulation of the IT Master Plan;* *g. Monitoring and evaluating the preparation, implementation, and annual implementation of the Company's IT Master Plan;* *h. Deciding on the implementation of IT work program priorities and budgets so that they are always aligned with business objectives while taking into account the IT Master Plan.*

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab memelihara citra dan reputasi perusahaan, serta berperan sebagai penghubung *(liaison officer)* antara Perseroan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 0149/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Struktur Organisasi. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Corporate Secretary has the duty and responsibility of maintaining the company's image and reputation, as well as acting as a liaison officer among the Company, the public, and other stakeholders. The establishment of Corporate Secretary refers to the Decree of the Board of Directors Number 0149/SK/G.10/DIR-JPAS/ XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 regarding Organizational Structure. The appointment and dismissal of Head of Corporate Secretary is conducted by the President Director upon the Board of Commissioners' approval.

Profil Kepala Sekretaris Perusahaan & Hukum

Profil lengkap Bapak Catur Heru Putranto selaku Kepala Sekretaris Perusahaan & Hukum dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, Sub-Bab Profil Pejabat Eksekutif.

Profile of The Head of Corporate Secretary & Legal

Complete profile of Mr. Catur Heru Putranto as Head of Corporate Secretary & Legal can be seen in the Chapter Company Profile, Sub-chapter Profile of the Executive Officers.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan menjalankan peran sebagai *compliance officer* yang bertugas memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dan menjaga kualitas kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga bertugas menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Corporate Secretary Functions

Corporate Secretary performs the role as a compliance officer in charge of ensuring the GCG principles implementation and maintaining the quality of the Company's compliance with applicable regulations. Besides, Corporate Secretary is also in charge of administering and keeping the Company documents, including but not limited to the List of Shareholders, Special Lists and minutes of the Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings, and GMS.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor 0064/KEP-DIR/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan dan Hukum, adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

Based on the Board of Directors' Decree Number 0064/ KEP-DIR/X/2019 dated October 13, 2019, concerning Guidelines for Corporate Secretary and Legal, hereby the duties and responsibilities of Corporate Secretary according to its functions are as follows:

Kesekretariatan

1. Menyusun jadwal, membuat undangan dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal Perusahaan dan pertemuan penting lainnya, antara lain:
   - Rapat Direksi yang diadakan minimal 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun;
   - Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
   - RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masing-masing setiap tahun sekali;
   - Rapat Kerja yang diadakan pada tiap tahun dan Rapat Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya.
2. Menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, RADIKOM dan RUPS Tahunan;

Secretariat

1. *Prepare schedule, invitations and arrange implementation of Directors meetings both with internal and external parties and other important meetings, including:*
   - *Board of Directors Meetings held at least12 (twelve) times in 1 (one) year;*
   - *Board of Commissioners and the Board of Directors meetings quarterly (three) months or as needed;*
   - *Ratification of the RKAP and Ratification of Financial Statements which are held annually;*
   - *Work Meetings which are held every year and the Budget Preparation Meeting RKAP in the following year.*
2. *Prepare and ensure the agenda of Board of Directors, BOD BOC Meetings and Annual GMS meetings;*

3. Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan/atau keputusan serta masalah non-rutin yang signifikan. Agenda rapat tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan;
4. Menyampaikan Risalah Rapat kepada seluruh anggota Direksi;
5. Melakukan perbaikan atas risalah Rapat Direksi (jika ada keberatan atau usulan perbaikan) yang disampaikan Direksi;
6. Mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS;
7. Menyusun program kerja/kegiatan dan kebutuhan anggaran Unit Kerja Sekretaris Perusahaan dan Hukum;
8. Menghadiri rapat Direksi, RADIKOM, RUPS dan membuat Risalah Rapat serta proses pengesahannya;
9. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, pelaporan perusahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi Lainnya; dan
10. Membuat daftar khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain.

3. Ensure that the agenda of the meeting has covered issues that require concern and/or decisions and significant non-routine issues. The agenda for the meeting is submitted altogether with the invitation;
4. Disseminate the Minutes of Meeting to all of the Board of Directors members;
5. Revise the of the Board of Directors Meeting (if there are objections or suggestions for improvement) submitted by the Board of Directors;
6. Manage and ensure that the Shareholders, Board of Commissioners and Directors has attended the GMS;
7. Develop work programs/activities and budget requirements for the Corporate Secretary and Legal Work Unit;
8. Attend meetings of the Board of Directors, RADIKOM, GMS and prepare Minutes of Meetings and the process of ratification;
9. Carry out administrative activities, corporate reporting and other protocol duties of the Board of Directors; and
10. Prepare a special list containing share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as their families in other companies and companies.

Komunikasi Perusahaan

1. Memastikan bahwa setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah menerima program pengenalan Perusahaan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru Direksi/ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah mengenai Perusahaan, sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada Perusahaan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dan Hukum, yang meliputi antara lain:
   - Informasi atau Pengetahuan Internal
     - Anggaran Dasar Perusahaan;
     - Latar belakang dan sejarah Perusahaan;
     - Misi dan visi Perusahaan serta maksud dan tujuan Perusahaan;
     - Struktur organisasi Perusahaan;
     - Tugas, tanggung jawab dan hak/ kewenangan serta fasilitas yang diperuntukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
     - Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perusahaan setiap tahun;
     - Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir;
     - Program bisnis dan jenis produk Perusahaan;

Corporate Communications

1. Ensure that every member of Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board has participated in to the Company's orientation program when first appointed. Purpose of the program is to inform the new Board of Directors/Board of Commissioners/Sharia Supervisory Board members about the Company thereby the new members can make their contribution as prompt as possible to the Company. The orientation material shall be prepared by the Corporate Secretary and Legal, which includes, among others:
   - *Internal Information or Knowledge*
     - Company's articles of association;
     - Company background and history;
     - Mission, vision, as well as purpose and objectives of the Company;
     - Organization structure of the Company;
     - Duties, responsibilities and rights/ authorities as well as facilities designated for Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board;
     - Annual Work and Budget Plan for the Company;
     - The Company's Performance growth for the last 5 (five) years;
     - The Company's business program and types of products;

- Keberadaan bangunan dan lingkungan kantor, kantor cabang, Perusahaan Afiliasi, organisasi/ asosiasi; dan
- Sumber Daya Manusia

- Informasi atau Pengetahuan Eksternal
  - Posisi Perusahaan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan *stakeholders* lain;
  - Undang-undang dan peraturan terkait; dan
  - Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya.
- Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahaan, perkenalan dengan para Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Cabang dan Karyawan di Perusahaan serta program lainnya.

2. Menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, media massa dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
3. Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait;
4. Membina hubungan dengan investor/mitra bisnis/ instansi luar Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;
5. Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan objektif atas pernyataan dari masyarakat, pemasok dan karyawan;
6. Memberikan penjelasan jawaban dan informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait secara relevan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra Perusahaan;
7. Memastikan Laporan Tahunan Perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait;
8. Memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS Tahunan;
9. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam situs Perusahaan maupun situs Perusahaan online secara berkala;
10. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk *Press Release* atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi;
11. Pemberian informasi yang dibutuhkan mengenai data atau kinerja (*performance*) Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Mendokumentasikan semua arsip Perusahaan, termasuk kegiatan program pengenalan dan pengembangan bagi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi;
13. Memberikan informasi yang relevan kepada *stakeholders*; dan
14. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris tepat waktu.

- Existence of buildings and office environment, branch offices, affiliated companies, organizations/ associations; and
- Human Resources

- *External Information or Knowledge*
  - Company's position compared to business partners, competitors and other *stakeholders*;
  - Related laws and regulations; and
  - Relationships and obligations with regulators and other relevant institutions.
- *The orientation program can be provided in form of presentations, meetings or visits to Company facilities, introductions to Division Heads, Department Heads, Branch Heads and Employees in the Company and other programs.*

2. *Maintain relationships with external agencies, such as government agencies, state-owned enterprises, private sector, mass media and the public in order to collect and publish information;*
3. *Manage information and review all information including its legal impact and prepare the information as prudent as possible which will be communicated to related parties;*
4. *Fostering relationships with investors/ business partners/agencies outside the Company and Affiliated Companies;*
5. *Timely and accurately prepare and publish objective responses to statements from the public, suppliers and employees;*
6. *Provide explanations of answers and information provided to relevant parties, thereby not causing misleading or confusion that may affect the Company's reputation;*
7. *Ensure that the Company's Annual Report is prepared in accordance with applicable regulations and submitted to related parties;*
8. *Ensure that the approval of the Annual Report shall be included in the Annual GMS agenda;*
9. *Update the information material presented on the Company's website and the Company's website online periodically;*
10. *Coordinate preparation and provision of materials for Press Release regarding statements at the Board of Directors level;*
11. *Providing required information regarding the data or performance of the Company in accordance with the laws and regulations;*
12. *Documenting all Company records, including the introduction and development program activities for the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Directors members;*
13. *Provide relevant information to stakeholders; and*
14. *Coordinate the preparation of accurate and reliable Quarterly and Annual Management Reports. Quarterly and Annual Management Reports are submitted to the Board of Commissioners on time.*

Implementasi GCG

1. Membina kerja sama yang baik dengan divisi atau unit terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Promosi dan Pencitraan Perusahaan

1. Membangun terbentuknya citra Perusahaan (*image*) yang positif oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan;
2. Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap pemangku kepentingan untuk menyampaikan berita dari Perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab serta membangun citra positif Perusahaan;
3. Menyampaikan perkembangan Perusahaan kepada masyarakat melalui pelaporan keterbukaan informasi dalam bentuk siaran pers, situs dan melayani permintaan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan.

GCG Implementation

1. *Build a harmonious cooperation with related division or unit to oversee the Company's compliance with the law and regulation;*
2. *Ensure that the Company has complied regulation on disclosure requirements in line with the GCG principles implementation.*

Corporate Promotion and Reputation

1. *Build positive corporate image among the Company's interested parties;*
2. *Control external and internal communication strategy management with all stakeholders to disseminate news from the Company transparently and with accountability as well as build positive image of the Company;*
3. *Disseminate the Company's progress to the society through information disclosure reporting, such as press release, website and inquiry to information related to the Company.*

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan Memorandum No. 0013/KPT/MEMO/G.7/SKP-JPAS/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025, berikut adalah kegiatan perusahaan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025:

Report on The Implementation of Duties of Corporate Secretary For 2025

Throughout 2025, Corporate Secretary has carried out a number of activities in accordance with his duties and responsibilities. In accordance with the Memorandum No. 0013/KPT/MEMO/G.7/SKP-JPAS/1/2026 dated January 13, 2026 concerning the Corporate Secretary Duties Implementation Report in 2025, the following are company activities that have been carried out throughout 2025:

No	Area	Kegiatan Dilakukan *Activities Performed*
1	Keterbukaan Informasi *Information Disclosure*	1. Pengelolaan *Website* Selama tahun 2025, telah dilakukan *update* pada *website* perusahaan sebanyak 499 kali. 2. Publikasi Media Selama tahun 2025, perusahaan telah melakukan 234 kali publikasi terkait perusahaan baik melalui *website* internal maupun media elektronik lainnya. 3. Pemberitaan Negatif Berdasarkan pencarian terhadap pemberitaan negatif, selama tahun 2025 terdapat 3 konten berita yang negatif dengan jumlah publikasi sebanyak 14 kali, baik melalui portal *online* maupun media lainnya. 1. *Website Management* *During 2025, the company's website was updated 499 times.* 2. *Media Publications* *During 2025, the Company has carried out 234 company-related publications through internal website and other electronic media.* 3. *Negative News Coverage* *Based on a review of negative media coverage, during 2025 there were three negative news items, with a total of 14 publications across online news portals and other media channels.*

No	Area	Kegiatan Dilakukan *Activities Performed*
2	Penyusunan Laporan Tahunan *Annual Report Preparation*	Melakukan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlajutan Tahun Buku 2025 dengan tema " MEMBERI ARTI, MENEBAR MANFAAT, MENUMBUHKAN KEBERKAHAN". *Prepare the 2025 Annual Report and Sustainability Report with the theme "GIVING MEANING, SPREADING BENEFITS AND FOSTERING BLESSINGS."*
3	Penyampaian Laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Submission of Reports to the Financial Services Authority (OJK)*	Menyampaikan laporan wajib secara periodik kepada OJK selaku regulator. *Submitted mandatory reports periodically to the OJK as the regulator.*
4	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan *Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS)*	Pada tahun 2025, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu RUPS 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2024 3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun Buku 2025 *In 2025, the General Meeting of Shareholders (GMS) was held three times, namely the GMS* *1. Approval of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah* *2. Approval of the Annual Report on the Company's condition and operations for the financial year 2024* *3. Appointment of the Public Accounting Firm (External Auditor) for the audit of the 2025 financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*
5	Penyelenggaraan Rapat Internal *Implementation of Internal Meetings*	1. Rapat Direksi Selama tahun 2025, telah dilakukan 76 kali rapat Direksi dengan tingkat kehadiran Direksi 100%. 2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radirkom) Selama tahun 2025, telah dilakukan 14 kali Radirkom dengan tingkat kehadiran 100%. *1. Board of Directors Meeting* *Throughout 2023, the Board of Directors has held 76 meetings with a 100% attendance rate of the Board of Directors.* *2. Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners (Radirkom) During 2023, Radirkom has held 14 times with a 100% attendance rate.*
6	Pengawasan Pelaksanaan GCG *Supervision of GCG Implementation*	Melakukan penilaian GCG bersama-sama dengan Divisi GRC (*Governance, Risk, and Compliance*) dengan skor 93,60. Selanjutnya, hasil penilaian *self-assessment* tersebut disampaikan kepada regulator, dalam hal ini OJK. *Conducted a GCG assessment in collaboration with the GRC (Governance, Risk, and Compliance) Division, achieving a score of 93.52. Moreover, the self-assessment results are submitted to the regulator, in this case to OJK.*
7	Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)*	Selama tahun 2025 telah terlaksana sebanyak 53 kegiatan CSR. *During 2025, there were 53 CSR activities carried out.*

No	Area	Kegiatan Dilakukan *Activities Performed*
8	Pemberian *Sponsorship* dan Iklan Kemitraan *Sponsorship and Partnership Advertising*	Selama tahun 2025, perusahaan telah 55 kali berpartisipasi dalam kegiatan *sponsorship* yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga, 7 kali iklan kemitraan, dan 48 kali untuk kegiatan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup beberapa jenis, antara lain sponsorship untuk *Award*, kegiatan Golf, asosiasi pengusaha/ masyarakat, *charity*, maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN atau Kementerian Bidang Perekonomian (Kemenko). *Sponsorship* dimaksud dalam rangka mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan dengan memberikan dukungan dalam bentuk materi ke beberapa mitra atau rekanan. *During 2025, the company participated 55 times in sponsorship activities organized by several institutions, 7 times in partnership advertisements, and 48 times for other activities. The activities carried out include several types, including sponsorship for Awards, Golf activities, business / community associations, charity, and activities organized by the Ministry of BUMN or the Ministry of Economic Affairs (Kemenko). Sponsorship is intended to support the sustainability of the company's business by providing material support to several partners or associates.*
9	Kegiatan Perusahaan *Company Activities*	Melaksanakan sejumlah kegiatan penting Perseroan. *Conducted a number of important activities of the Company.*
10	Pengelolaan *Merchandise* dan *Souvenir* *Merchandise and Souvenir Management*	Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal yaitu *stakeholders* dan Mitra Bisnis, perusahaan menggunakan *merchandise* dan *souvenir* sebagai media promosi. *In order to improve relations with external parties, namely stakeholders and business partners, the company uses merchandise and souvenirs as promotion tools.*
11	Penerimaan Penghargaan *Award Acceptance*	Selama tahun 2025, Perseroan berhasil menerima 5 penghargaan sebagai berikut: 1. Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik Kategori Anak Perusahaan BUMN pada 14th Anugerah BUMN 2025 2. Best CEO in Business Resilience Award pada 14th Anugerah BUMN 2025 3. *The Excellence Performance Sharia Guarantor Company 2025 (Based on Financial Performance 2024)* pada *14th Sharia Award 2025* 4. Mitra Pendukung Program Pendidikan pada Anugerah Kemandirian 2025 5. Top 100 CEO and Future Leaders Forum 2025 *During 2025, the Company managed to receive 4 awards as follows:* *1. Best Corporate Organization Transformation in the Category of BUMN Subsidiary at the 1411 BUMN Award 2025.* *2. Best CEO in Business Resilience Award at the 14th BUMN Award 2025.* *3. The Excellence Performance Sharia Guarantor Company 2025 (Based on Financial Performance 2024) at the 14th Sharia Award 2025.* *4. Education Program Supporting Partner at the Anugerah Kemandirian 2025.* *5. 5. Top 100 CEO and Future Leaders Forum 2025*

No	Area	Kegiatan Dilakukan *Activities Performed*
12	Sertifikasi dan Pemeringkat *Certifications and Ratings*	Selama tahun 2025, Perseroan berhasil mendapatkan 4 sertifikasi dan 1 pemeringkat yaitu: a. *Certificate of Registration "Anti-Bribery Management System - ISO 37001:2016".* b. *Certificate of Registration "Quality Management System-ISO 9001:2015* c. *Certificate of Registration '1nformation Security Management System - ISO 27001:2013* d. Label Taat Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) e. Peringkat idA+ / *Stable (Single A Plus; Stable Outlook)* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) *During 2025, the Company succeeded in obtaining 4 certifications and 1 rating, namely:* *a. Certificate of Registration for Anti-Bribery Management System – ISO 37001:2016.* *b. Certificate of Registration for Quality Management System – ISO 9001:2015.* *c. Certificate of Registration for Information Security Management System – ISO 27001:2013.* *d. Zakat Compliance Label from the National Board of Zakat (BAZNAS).* *e. Credit rating of idA+ / Stable (Single A Plus; Stable Outlook) from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).*

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025, antara lain:

Training and/or Competency Development Program For Corporate Secretary

The Corporate Secretary participated in various training programs held throughout 2025, including:

No	Pelatihan *Training*	Waktu *Date*	Tempat *Place*	*Penyelenggara* *Organizer*
1	*Certified Professional Legal Auditor*	28-30 September 2025 *September 28-30, 2025*	Jakarta/*Offline*	PT Media SDM Indonesia
2	*Compliance Management Fundamentals With Certfication*	19-21 Agustus 2025 *August 19-21, 2025*	*Online*	CRMS
3	Audit Legal Perjanjian Kerja Sama *Legal Audit of the Cooperation Agreement*	6-7 Maret 2025 *March 6-7, 2025*	*Online*	Media Edutama Indonesia

Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Internal Audit Unit (SPI)

Perseroan telah membentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai fungsi Audit Internal yang berperan sebagai mitra strategis Manajemen dalam memastikan efektivitas pengelolaan serta pengawasan kinerja Perseroan. Secara organisasi, SPI berada di bawah koordinasi langsung Direktur Utama dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, SPI berpedoman pada Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Tahun 2025 yang telah memperoleh persetujuan pada tanggal 13 Januari 2025.

The Company has established an Internal Oversight Unit (SPI) to serve as the Internal Audit function, acting as a strategic partner to Management in ensuring the effectiveness of the Company's management and performance oversight. Organizationally, the SPI operates under the direct coordination of the CEO and is responsible for reporting to the CEO. In carrying out its duties, the SPI adheres to the 2025 Annual Audit Work Plan (RKAT), which was approved on January 13, 2025.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang menjadi fokus pelaksanaan fungsi SPI:

Tugas SPI:

1. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mengevaluasi sistem yang ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan, rencana, prosedur, undang undang, dan peraturan yang dapat memiliki dampak signifikan pada perusahaan.
3. Mengevaluasi sarana untuk mengamankan, memverifikasi, dan memvalidasi keberadaan aset perusahaan.
4. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan oleh perusahaan.
5. Mengevaluasi operasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi atau program sedang dilaksanakan sesuai rencana perusahaan.
6. Memantau dan mengevaluasi proses tata kelola perusahaan.
7. Memantau dan mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko perusahaan.
8. Mengevaluasi kualitas kerja auditor eksternal dan tingkat koordinasi dengan auditor internal.
9. Melakukan layanan konsultasi terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan *control* yang sesuai dengan tujuan dan rencana perusahaan.
10. Melaporkan secara berkala: tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja audit internal terkait dengan rencana kerjanya.
11. Mengevaluasi operasi spesifik atas permintaan manajemen.

Duties and Responsibilities

The following are the scope of duties and responsibilities that form the focus of the SPI's functions:

Duties of SPI:

1. *Evaluating the reliability and integrity of information and the systems used to identify, measure, classify, and report such information.*
2. *Evaluating the systems established to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations that may have a significant impact on the company.*
3. *Evaluating the mechanisms used to safeguard, verify, and validate the existence of company assets.*
4. *Evaluating the effectiveness and efficiency of the resources used by the company.*
5. *Evaluating operations or programs to ensure whether the results are consistent with established objectives and targets, and whether operations or programs are being implemented in accordance with the company's plans.*
6. *Monitoring and evaluating the corporate governance process.*
7. *Monitoring and evaluating the effectiveness of the company's risk management process.*
8. *Evaluating the performance quality of external auditors and the level of coordination with internal auditors.*
9. *Providing consulting services related to governance, risk management, and controls in accordance with the company's objectives and plans.*
10. *Periodically reporting the objectives, authority, responsibilities, and performance of internal audit in relation to its work plan.*
11. *Evaluating specific operations.*

Dalam menjalankan tugasnya, SPI memiliki tanggung jawab untuk:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit internal operasional/proses bisnis dan keuangan perusahaan melalui penilaian kinerja terkait aktivitas pengendalian internal, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberi saran perbaikan.
2. Memberikan penjelasan hasil audit internal atau pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama dan melakukan *monitoring* tindak lanjut atas hasil audit internal yang telah ditetapkan.
3. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan.
4. Memberikan layanan konsultasi kepada unit kerja yang membutuhkan.

In carrying out its duties, the SPI is responsible for:

1. *Assisting the President Director in conducting internal audits of the company's operational/business processes and financial activities through performance assessments related to internal control activities, management, and implementation, and providing recommendations for improvement.*
2. *Providing explanations of internal audit results or the implementation of SPI duties to the President Director and monitoring the follow-up actions on agreed audit findings.*
3. *Conducting evaluations of the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes in accordance with applicable laws and regulations and company policies.*
4. *Providing consulting services to work units that require assistance.*

Independensi auditor internal

Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk memungkinkan aktivitas audit internal dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka:

1. Kepala SPI harus melaporkan langsung kepada Direktur Utama.
2. Independensi SPI dalam aktivitas audit internal harus bebas campur tangan unit kerja/satuan kerja/divisi lainnya dalam lingkup: ruang lingkup audit internal, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya.
3. Kepala SPI harus mengungkapkan campur tangan sebagaimana disebutkan di atas kepada Dewan Komisaris dan mendiskusikan implikasinya.
4. Berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.
5. Kepala SPI diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar audit internal sehingga harus disiapkan beberapa pengamanan untuk membatasi kendala terhadap independensi dan obyektivitas penyajian pelaporan.

Internal Auditor Independence

The Head of the Internal Audit Unit (SPI) is responsible to the President Director. In order to enable the internal audit function to carry out its responsibilities, the following applies:

1. *The Head of SPI must report directly to the President Director.*
2. *The independence of SPI in internal audit activities must be free from interference by other work units/ divisions within the scope of internal audit activities, audit execution, and reporting of results.*
3. *The Head of SPI must disclose any such interference as mentioned above to the Board of Commissioners and discuss its implications.*
4. *Maintain direct interaction with the Board of Commissioners and the Audit Committee.*
5. *The Head of SPI is expected to have roles and/or responsibilities outside internal auditing; therefore, safeguards must be established to limit constraints on independence and objectivity in reporting.*

Profil Kepala SPI

Jabatan Kepala SPI Perseroan pada periode 2025 masih diemban oleh Bapak Sumarjono berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 024/KET-DIR/III/2020.

Informasi lebih lengkap mengenai profil Bapak Sumarjono selaku Kepala SPI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, khususnya pada Subbab Profil Pejabat Eksekutif.

Profile of Head of SPI

Mr. Sumarjono continues to serve as the Company's Head of SPI for the 2025 term, pursuant to Board of Directors Decision No. 024/KET-DIR/III/2020.

More detailed information regarding Mr. Sumarjono's profile as Head of SPI can be found in the Company Profile section, specifically in the Executive Profile subsection.

Struktur dan Kedudukan SPI

SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyampaian laporan. Selain itu, secara fungsional SPI juga memiliki hubungan pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Penjelasan lebih lanjut mengenai posisi SPI dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

SPI Structure and Position

The SPI reports directly to the President Director regarding the performance of its oversight functions and the submission of reports. In addition, the SPI also reports functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee. Further details regarding the SPI's position within the Company's organizational structure are as follows:

1. SPI membantu Direktur Utama untuk menjalankan fungsi *assurance* dan *advisory* bagi Perusahaan;
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal;
3. SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama;
4. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
5. Kepala Satuan Pengawasan Internal bekerja secara independen dan objektif serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan tugas pengawasan internal sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. SPI assists the President Director to carry out the assurance and advisory functions for the Company;
2. SPI is led by the Head of Internal Audit unit (IAU);
3. SPI is under and responsible directly to the President Director;
4. Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director, upon the Board of Commissioners' approval;
5. Head of SPI works independently and objectively, as well as is positioned in such a way that enable him/her to perform internal audit duties as mandated by the prevailing rules and regulation.

Pihak Yang Mengangkat/ Memberhentikan Kepala SPI

Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal berada pada Direktur Utama, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Party Who Appointed/ Dismissed Head of SPI

The authority to appoint and dismiss the Head of the Internal Audit Unit rests with the President Director, subject to prior approval from the Board of Commissioners.

Sertifikasi/ Kualifikasi Internal Auditor

Jumlah personel SPI per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 4 orang yang telah memiliki sertifikasi dan kompetensi yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kepemilikan sertifikasi dan kualifikasi tersebut merupakan bagian dari program pengembangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh auditor internal.

Adapun kualifikasi dan/atau sertifikasi yang dimiliki oleh SPI adalah sebagai berikut:
1. Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) Manajerial oleh YPIA/Jakarta tahun 2022.
2. Sertifikasi *Qualified Certificate Risk Officer* (QCRO) oleh LSP MKS/*Online* tahun 2020.
3. Sertifikasi Pengendali Teknis pada BPKP oleh Pusdiklat BPKP/Bogor tahun 2019.
4. Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) oleh LSPMR/Bogor tahun 2017.
5. Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah (SAAP) oleh IAIBPKP/Bogor tahun 2017.
6. Sertifikasi Auditor Ahli Muda pada BPKP oleh Pusdiklat BPKP/Bogor tahun 2010.
7. Sertifikasi Auditor Ahli Pertama pada BPKP oleh Pusdiklat BPKP/Bogor tahun 2008.
8. Sertifikasi Auditor Pelaksana Lanjutan pada BPKP oleh Pusdiklat BPKP/Bogor tahun 2004.
9. Sertifikasi Auditor Pelaksana pada BPKP oleh Pusdiklat BPKP/Jakarta tahun 1999.

Internal Auditor Certification/ Qualification

As of December 31, 2025, the SPI had a total of 4 personnel who possessed the necessary certifications and competencies to support the performance of their duties and responsibilities. The acquisition of these certifications and qualifications is part of a development program comprising education and training activities attended by internal auditors.

The qualifications and/or certifications held by the SPI are as follows:
1. Qualified Internal Auditor (QIA) Managerial Level by YPIA Jakarta, in 2022.
2. Qualified Certificate Risk Officer (QCRO) by LSP MKS/ Online, in 2020.
3. Technical Controller Certification from BPKP conducted by BPKP Training Center/Bogor, in 2019.
4. Certified Risk Management Professional (CRMP) by LSPMR/Bogor, in 2017.
5. Government Accounting Expert Certification (SAAP) by IAI-BPKP, Bogor, in 2017.
6. Intermediate-Level Expert Auditor Certification from BPKP conducted by BPKP Training Center/Bogor, in 2010.
7. First-Level Expert Auditor Certification from BPKP conducted by BPKP Training Center/Bogor, in 2008.
8. Advanced Implementing Auditor Certification from BPKP conducted by BPKP Training Center/Bogor, in 2004.
9. Implementing Auditor Certification from BPKP conducted by BPKP Training Center/Jakarta, in 1999.

Laporan Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2025

SPI telah merealisasikan seluruh program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT), termasuk pelaksanaan kegiatan audit di luar RKAT (Non-RKAT) pada tahun 2025. Implementasi tersebut mencakup berbagai area strategis yang menjadi prioritas pengawasan, antara lain sebagai berikut:

Report on The Implementation of Duties of IAU in 2025

SPI has completed all work programs outlined in the Annual Audit Work Plan (RKAT), including the conduct of audit activities outside the scope of the RKAT (Non-RKAT) in 2025. This implementation covers various strategic areas that are priorities for oversight, including the following:

No	Ruang Lingkup *Scope*
1	Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 pada Departemen Teknologi Informasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Internal Audit of the Information Security Management System (ISMS) ISO 27001:2013 at the Information Technology Department of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
2	Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Internal Audit of the Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015 at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
3	Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada Departemen Umum dan Departemen Keuangan & Investasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Internal Audit of the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 at the General Department and Finance & Investment Department of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
4	Audit Kinerja Departemen SDM PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Performance Audit of the Human Resources Department of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
5	Audit Legal PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Legal Audit of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
6	Audit 8 (delapan) Kantor Cabang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Svariah. *Audit of 8 (eight) branch offices of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
7	Audit Kinerja *Underwriting* PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Performance Audit of Underwriting at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
8	Audit TI PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *IT Audit of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.*
9	Audit Internal Proses Pencatatan Piutang Bank Nagari Syariah Pada Kantor Cabang Kelas III Padang Atas Rekomendasi Temuan Oleh Regulator (OJK) Tahun 2025. *Internal Audit of the Receivables Recording Process for Bank Nagari Syariah at the Class III Padang Branch Office based on recommendations from regulatory findings (OJK) in 2025.*
10	Audit Internal Proses Pencatatan Piutang IJK Non Program Atas Rekomendasi Temuan Oleh Regulator (OJK) Tahun 2025. *Internal Audit of the Receivables Recording Process for IJK Non-Program based on recommendations from regulatory findings (OJK) in 2025.*

Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) Tahun 2025

Annual Audit Work Plan (RKAT) in 2025

Rencana Kerja *Work Plan*	Target Penyelesaian *Completion Target*	Penyelesaian *Completion*
Pengawasan internal SPI *SPI Internal Audit*	Sepanjang tahun *Throughout the year*	1. Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 pada Departemen Teknologi Informasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan laporan NCR tertanggal 13 Februari 2025. 2. Melanjutkan implementasi aplikasi *Internal Audit Management System* (IAMS). 3. *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM). 4. Audit Kinerja Departemen SDM PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 dan laporan hasil audit terbit tanggal 29 Desember 2025. 5. Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 periode tahun 2024 pada tanggal 28 Februari 2025. 6. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025 dengan laporan NCR tertanggal 3 Juli 2025. 7. Audit Legal PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 8 April 2025 dan matrik konfirmasi telah terkirim tanggal 29 Desember 2025. 8. Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada tanggal 24 Juli 2025. 9. Audit 8 (delapan) Kantor Cabang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 2 September 2025 dan 8 (delapan) laporan hasil audit telah terbit antara tanggal 17 Desember 2025 s.d. 29 Desember 2025. 10. Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 periode tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan laporan NCR tertanggal 11 November 2025. 11. Pendampingan Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada tanggal 17 November 2025. 12. Audit Kinerja *Underwriting* PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2025 (masih berjalan).

Rencana Kerja *Work Plan*	**Target Penyelesaian** *Completion Target*	**Penyelesaian** *Completion*
		1. *Internal Audit of the ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) at the Information Technology Department of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the 2024 period, conducted on January 13, 2025, with an NCR report dated February 13, 2025.* 2. *Continuing the implementation of the Internal Audit Management System (IAMS) application.* 3. *Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM).* 4. *Performance Audit of the Human Resources Department at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the 2024 period, conducted on February 12, 2025, with the audit report issued on December 29, 2025.* 5. *Assistance in the Conduct of the 2024 External Audit of the ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) on February 28, 2025.* 6. *Internal Audit of the ISO 9001:2015 Quality Management System (QMS) at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the 2024 period, conducted on March 25, 2025, with an NCR report dated July 3, 2025.* 7. *Legal Audit of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the 2024 period, conducted on April 8, 2025, with the confirmation matrix sent on December 29, 2025.* 8. *Assistance with the External Audit of the ISO 9001:2015 Quality Management System (QMS) on July 24, 2025.* 9. *Audit of 8 (eight) branches of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the 2025 period, conducted on September 2, 2025, with 8 (eight) audit reports issued between December 17, 2025, and December 29, 2025.* 10. *Internal Audit of the Anti-Bribery Management System (ABMS) ISO 37001:2016 for the 2024 period, conducted on October 27, 2025, with an NCR report dated November 11, 2025.* 11. *Assistance with the Implementation of the External Audit of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) on November 17, 2025.* 12. *Performance Audit of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's Underwriting for the 2025 period, conducted on December 23, 2025 (still in progress).*
Maintenance review dan *monitoring* tindak lanjut hasil audit. *Maintenance review and follow-up monitoring of audit findings.*	Sepanjang tahun *Throughout the year*	1. *Monitoring* tindak lanjut atas temuan Laporan PSA 62 KAP PwC GA-Tahun Buku 2025 (terselesaikan pada bulan Februari 2025). 2. *Monitoring* tindak lanjut atas temuan eksternal-BPK untuk periode pemeriksaan tahun 2023. 3. *Monitoring* tindak lanjut atas temuan eksternal-OJK untuk periode pemeriksaan tahun 2024 dan 2025. 4. *Monitoring* tindak lanjut atas temuan eksternal *surveillance* untuk ISO 27001:2013 (periode surveillance 2024 dan 2025), ISO 9001:2015 (periode *surveillance* 2024), ISO 37001:2016 (periode *surveillance* 2024). 5. *Monitoring* tindak lanjut atas temuan audit internal untuk pelaksanaan RKAT periode tahun 2024 dan 2025. 6. *Monitoring* lanjutan tindak lanjut atas temuan eksternal-OJK untuk periode pemeriksaan tahun 2025 dengan *due date* per 30 Oktober 2025. 7. *Monitoring* lanjutan tindak lanjut atas temuan eksternal-OJK untuk periode pemeriksaan tahun 2025 dan KAP RSM untuk periode pemeriksaan Tahun Buku 2024 dengan *due date* per 30 November 2025. 8. *Monitoring* lanjutan tindak lanjut atas temuan eksternal-OJK untuk periode pemeriksaan tahun 2025 dan KAP RSM untuk periode pemeriksaan Tahun Buku 2024 dengan *due date* per 31 Desember 2025. 1. *Monitoring of follow-up actions on findings from PSA 62 Report by PwC GA for Fiscal Year 2023 (to be completed by February 2025).* 2. *Monitoring of follow-up actions on external findings from the BPK for the 2023 audit period.* 3. *Monitoring of follow-up actions on external findings from the OJK for the 2024 and 2025 audit periods.* 4. *Monitoring of follow-up actions on external surveillance findings for ISO 27001:2013 (surveillance periods 2024 and 2025), ISO 9001:2015 (surveillance period 2024), and ISO 37001:2016 (surveillance period 2024).* 5. *Monitoring of follow-up actions on internal audit findings regarding the implementation of the Annual Work Plan (RKAT) for the 2024 and 2025 fiscal years.* 6. *Continued monitoring of follow-up actions on external OJK findings for the 2025 audit period, with a due date of October 30, 2025.* 7. *Follow-up monitoring of actions taken on external OJK findings for the 2025 audit period and KAP RSM for the 2024 fiscal year audit period, with a due date of November 30, 2025.* 8. *Follow-up monitoring of actions taken regarding external findings from the OJK for the 2025 audit period and from KAP RSM for the 2024 fiscal year audit period, with a due date of December 31, 2025.*

Rencana Kerja *Work Plan*	**Target Penyelesaian** *Completion Target*	**Penyelesaian** *Completion*
Koordinasi dan kolaborasi internal dan eksternal terkait pengawasan.	Sepanjang tahun	1. Pembahasan Realisasi RKAT 2024 Triwulan IV 2024 Bersama SKAI IFG di Askrindo. 2. Pembahasan RKAT 2025 dengan Komite Audit, Dewan Komisaris dan jajaran Direksi. 3. Pembaharuan *Audit Charter* 2025. 4. Finalisasi Penyusunan RKAT 2025. 5. Koordinasi seluruh unit kerja SKAI IFG (Kepala SKAI) via zoom pada tanggal 26 Maret 2025. 6. Pembahasan dengan PUT terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil audit eksternal oleh OJK pemeriksaan tahun 2025 *via zoom* tanggal 28-29 April 2025. 7. Menghadiri SKAI *Talk Legal Audit Beyond Compliance*: Audit Legal sebagai Pilar Penguatan GRC yang diselenggarakan oleh IFG tanggal 22 Mei 2025. 8. Pembahasan dengan PUT terkait dengan tindak lanjut (TL) draft report PSA 62-KAP RSM pada tanggal 22 Mei 2025. 9. *Training* Desain dan Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (IcoFR) yang diselenggarakan oleh FKSPI tanggal 27-28 Mei 2025. 10. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Atas Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor BA-3/PD.12/2025 tanggal 8 Mei 2025 kepada OJK tanggal 28 Mei 2025. 11. Pelatihan Antikorupsi Tematik Investigatif yang diselenggarakan oleh KPK pada tanggal 23 – 26 Juni 2025. 12. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 2 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 30 Juni 2025. 13. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 3 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 31 Juli 2025. 14. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 4 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 28 Agustus 2025. 15. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 5 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 30 September 2025. 16. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 6 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 30 Oktober 2025. 17. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 8 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 28 November 2025. 18. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi tahap 9 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung OJK pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun 2025 Nomor LHPL-4/PD.12/2025 tanggal 22 Mei 2025 kepada OJK tanggal 31 Desember 2025.

Rencana Kerja *Work Plan*	**Target Penyelesaian** *Completion Target*	**Penyelesaian** *Completion*
Internal and external coordination and collaboration regarding oversight.	*Throughout the year*	1. *Discussion of the Implementation of the 2024 Budget Plan for the Fourth Quarter of 2024 with SKAI IFG at Askrindo.* 2. *Discussion of the 2025 Budget Plan with the Audit Committee, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.* 3. *Update of the 2025 Audit Charter.* 4. *Finalization of the 2025 RKAT Draft.* 5. *Coordination meeting with all SKAI IFG units (SKAI Head) via Zoom on March 26, 2025.* 6. *Discussion with PUT regarding the Audit Findings Report from the 2025 external audit conducted by OJK via Zoom on April 28–29, 2025.* 7. *Attendance at the SKAI Talk: Legal Audit Beyond Compliance—Legal Audit as a Pillar of GRC Strengthening, organized by IFG on May 22, 2025.* 8. *Discussion with PUT regarding follow-up (TL) on the draft PSA 62-KAP RSM report on May 22, 2025.* 9. *Training on the Design and Implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) organized by FKSPI on May 27–28, 2025.* 10. *Submission of Follow-Up Actions on Recommendations regarding the Report on the Results of the OJK's On-Site Inspection (BAP) at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. BA-3/PD.12/2025 dated May 8, 2025, to the OJK on May 28, 2025.* 11. *Thematic Investigative Anti-Corruption Training organized by the KPK on June 23–26, 2025.* 12. *Submission of the Phase 2 Follow-up on Recommendations regarding the OJK On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on June 30, 2025.* 13. *Submission of Phase 3 Follow-up Actions on the Recommendations regarding the OJK's On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on July 31, 2025.* 14. *Submission of Phase 4 Follow-up Actions on the Recommendations from the OJK's On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on August 28, 2025.* 15. *Submission of Follow-up Actions on Phase 5 Recommendations regarding the OJK On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on September 30, 2025.* 16. *Submission of Follow-up Actions on Phase 6 Recommendations regarding the OJK On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on October 30, 2025.* 17. *Submission of Follow-up Actions on Phase 8 Recommendations regarding the OJK On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on November 28, 2025.* 18. *Submission of the Follow-up to Phase 9 Recommendations regarding the OJK On-Site Inspection Report on PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the Year 2025, No. LHPL-4/PD.12/2025 dated May 22, 2025, to the OJK on December 31, 2025.*

Rencana Kerja *Work Plan*	**Target Penyelesaian** *Completion Target*	**Penyelesaian** *Completion*
Pendampingan pelaksanaan audit eksternal. *Assistance with the conduct of external audits.*	Sepanjang tahun *Throughout the year*	1. Pendampingan atas pelaksanaan general audit (GA) oleh KAP RSM Indonesia periode tahun buku 31 Desember 2024 dan pendampingan telah selesai pada tanggal 30 Juni 2025. 2. Pendampingan atas pelaksanaan Pemenuhan Data Penjaminan, Klaim, Subrogasi dan IJP oleh BPK dengan surat tugas nomor 2/ST/I/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal: a. Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07)-Perhitungan Subsidi Bunga/ Margin KUR Tahun 2024 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (PT BSI) dan pendampingan telah selesai pada tanggal 14 Februari 2025. b. Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07)-Perhitungan Subsidi Bunga/ Margin KUR, Subsidi Bunga Kredit dan Subsidi Bantuan Uang Muka Tahun 2024 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan pendampingan telah selesai pada tanggal 27 Februari 2025. 3. Pendampingan atas pelaksanaan Pemeriksaan Langsung OJK terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2025 dengan surat tugas nomor ST-28/PD.12/2025 tanggal 5 Maret 2025, ST-29/PD.12/2025 tanggal 5 Maret 2025 tanggal 5 Maret 2025, ST-30/PD.12/2025 tanggal 5 Maret 2025, ST-31/PD.12/2025 tanggal 5 Maret 2025, ST-32/PD.12/2025 tanggal 5 Maret 2025 dan ST-33/PD.12/2025 tanggal 5 Maret 2025 dan pendampingan telah selesai pada tanggal 8 Mei 2025. 4. Pendampingan atas pelaksanaan Pemenuhan Data Penjaminan, Klaim, Subrogasi dan IJP oleh BPK dengan surat tugas nomor 79/T/ST/ANGGOTA-VII/PBN.01/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Pemeriksaan Kinerja atas Sinergi Kredit/Pembiayaan Segmen Usaha Ultra Mikro dan Mikro serta Digitalisasi Bisnis Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2025 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. dan pendampingan telah selesai pada tanggal 16 September 2025. 5. Pendampingan atas pelaksanaan *general audit* (GA) oleh KAP RSM Indonesia periode tahun buku 31 Desember 2025 dimulai tanggal 10 Oktober 2025 (masih berjalan). *1. Assistance with the general audit (GA) conducted by KAP RSM Indonesia for the fiscal year ending December 31, 2024; the assistance was completed on June 30, 2025.* *2. Assistance regarding the fulfillment of data on guarantees, claims, subrogation, and IJP by the BPK pursuant to assignment letter No. 2/ST/I/01/2025 dated January 10, 2025, regarding:* *a. Financial Statements for the Subsidy Expenditure Budget Section (BA.999.07)—Calculation of KUR Interest/Margin Subsidies for 2024 at PT Bank Syariah Indonesia Tbk (PT BSI), and the assistance was completed on February 14, 2025.* *b. Financial Report of the Subsidy Expenditure Budget Section (BA.999.07)—Calculation of KUR Interest/Margin Subsidies, Credit Interest Subsidies, and Down Payment Assistance Subsidies for 2024 at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and the assistance was completed on February 27, 2025.* *3. Assistance regarding the implementation of the OJK's On-Site Inspection of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah in 2025, pursuant to assignment letters No. ST-28/PD.12/2025 dated March 5, 2025, ST-29/PD. 12/2025 dated March 5, 2025, ST-30/PD.12/2025 dated March 5, 2025, ST-31/PD.12/2025 dated March 5, 2025, ST-32/PD. 12/2025 dated March 5, 2025, and ST-33/PD.12/2025 dated March 5, 2025, and the assistance was completed on May 8, 2025.* *4. Supervision of the implementation of Data Compliance for Guarantees, Claims, Subrogation, and IJP by the BPK via assignment letter No. 79/T/ST/ANGGOTA-VII/PBN. 01/08/2025 dated August 19, 2025 regarding the Performance Audit on Credit/Financing Synergy for the Ultra-Micro and Micro Business Segments as well as Business Digitalization for the 2023 to the First Semester of 2025 at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., its Subsidiaries, and Other Related Institutions in DKI Jakarta, North Sumatra, East Kalimantan, Banten, West Java, Central Java, East Java, Bali, and West Nusa Tenggara. The assistance was completed on September 16, 2025.* *5. Assistance regarding the general audit (GA) conducted by KAP RSM Indonesia for the fiscal year ending December 31, 2025, began on October 10, 2025 (still in progress).*

Non Rencana Kerja Audit Tahunan (Non-RKAT) Tahun 2025

Adapun aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal Perseroan di luar Rencana Kerja Audit Tahunan (Non-RKAT) pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Non- Annual Audit Work Plan (RKAT) in 2025

The oversight activities carried out by the Company's Internal Audit Unit outside the scope of the Annual Audit Work Plan (Non-RKAT) in 2025 include the following:

1. Pendampingan Pelaksanaan Stock Opname Fisik Bilyet Deposito Dan Perhitungan Aset Surat Berharga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode Desember 2024 yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2025 dengan laporan hasil pendampingan tertanggal 1 Maret 2025.
2. Pendampingan Pelaksanaan Stock Opname Fisik Bilyet Deposito Dan Perhitungan Aset Surat Berharga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode Maret 2025 yang dilaksanakan tanggal 15 April 2025 dengan laporan hasil pendampingan tertanggal 15 Mei 2025.
3. Pendampingan Pelaksanaan Stock Opname Fisik Bilyet Deposito Dan Perhitungan Aset Surat Berharga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode Juni 2025 yang dilaksanakan tanggal 22 Juli 2025 dengan laporan hasil pendampingan tertanggal 21 Agustus 2025.
4. Audit Internal Proses Pencatatan Piutang Bank Nagari Syariah Pada Kantor Cabang Kelas III Padang Atas Rekomendasi Temuan Oleh Regulator (OJK) Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 dengan laporan hasil audit terbit tanggal 30 Juli 2025.
5. Audit Internal Proses Pencatatan Piutang IJK Non Program Atas Rekomendasi Temuan Oleh Regulator (OJK) Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025 dengan laporan hasil audit terbit tanggal 30 Juli 2025.
6. Pendampingan Pelaksanaan *Stock Opname* Fisik Bilyet Deposito Dan Perhitungan Aset Surat Berharga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode September 2025 yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2025 (masih berjalan).

Selain itu, SPI turut melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan auditor eksternal, khususnya yang berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kantor Akuntan Publik (KAP), di samping hasil audit internal.

1. *Assistance with the physical inventory of deposit certificates and the calculation of securities assets at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the December 2024 period, conducted on January 10, 2025, with an assistance report dated March 1, 2025.*
2. *Assistance in the Physical Inventory of Deposit Certificates and the Calculation of Securities Assets of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the March 2025 period, conducted on April 15, 2025, with an assistance report dated May 15, 2025.*
3. *Assistance in the Physical Inventory of Deposit Certificates and the Calculation of Securities Assets at PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the June 2025 period, conducted on July 22, 2025, with an assistance report dated August 21, 2025.*
4. *Internal Audit of the Bank Nagari Syariah Receivables Recording Process at the Class III Branch Office in Padang Regarding Findings Recommendations by the Regulator (OJK) for 2025, conducted on May 8, 2025, with the audit report issued on July 30, 2025.*
5. *Internal Audit of the Recording Process for Non-Program IJK Receivables Based on Findings and Recommendations by the Regulator (OJK) for 2025, dated May 30, 2025, with the audit report issued on July 30, 2025.*
6. *Assistance in the Implementation of the Physical Stock Take of Deposit Certificates and the Calculation of Securities Assets of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for the September 2025 period, conducted on October 10, 2025 (still in progress).*

In addition, SPI monitors the follow-up on recommendations resulting from external audits, particularly those conducted by the Supreme Audit Agency (BPK), the Financial Services Authority (OJK), and public accounting firms (KAP), as well as the results of internal audits.

No	Jenis Audit *Audit Type*	Temuan *Findings*	Hasil *Results*			
			S	BS	BD	TD
Audit Eksternal *External Audit*						
1	Audit KAP RSM Tahun 2025 *KAP RSM Audit for 2025*	26	26	-	-	-
2	Pemeriksaan Langsung OJK Terhadap PT JPAS Tahun 2025 *On-site Inspection by OJK of PT JPAS in 2025*	36	36	-	-	-
3	Audit Eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 *External audit of Information Security Management System (ISMS) ISO 27001:2013*	5	5	-	-	-
4	Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *External Audit of ISO 9001:2015 Quality Management System*	8	8	-	-	-
5	Audit Eksternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 *External Audit of Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016*	10	10	-	-	-

No	Jenis Audit *Audit Type*	Temuan *Findings*	Hasil *Results*			
			S	BS	BD	TD
Audit Internal *Internal Audit*						
1	Audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 *Internal audit of Information Security Management System (ISMS) ISO 27001:2013*	5	5	-	-	-
2	Audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Internal audit of ISO 9001:2015 Quality Management System*	8	8	-	-	-
3	Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 *Internal Audit of Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001:2016*	5	5	-	-	-
4	Audit 8 (delapan) Kantor Cabang *Audit of 8 (eight) Branch Offices*	75	75	-	-	-
5	Audit Kinerja Departemen SDM *HR Department Performance*	4	4	-	-	-
6	Audit Legal Pada Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk *Legal Audit of Marketing & Product Development Division*	4	4	-	-	-
7	Audit TI *IT Audit*	2	2	-	-	-

Keterangan
Remark
S = Selesai / *Completed*
BS = Belum Selesai / *Incomplete*
BD = Belum Ditindaklanjuti / *Not Yet Followed Up*
TD = Tidak Dapat Ditindaklanjuti / *Not Eligible for Further Process*

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi SPI

Anggota SPI turut berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

Training and/or Competency Development Program For IAU

SPI members participated in a number of training activities held in 2025, including the following:

No.	Pelatihan *Training*	Waktu *Date*	Tempat *Place*	Penyelenggara *Organizer*
1	Audit Internal Modern : Tools, Teknik dan Tanggung Jawab *Modern Internal Auditing: Tools, Techniques, and Responsibilities*	24 Agustus 2025 *August 24, 2025*	*Online*	PT Media SDM Indonesia
2	Pelatihan Audit Legal bagi Internal Auditor *Legal Audit Training for Internal Auditors*	25 Februari 2025 *February 25, 2025*	*Online*	Asosiaisi Auditor Internal
3	*Seminar Driving Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak Audit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management*	15 Juli 2025 *July 15, 2025*	*Online*	IKAI
4	Seminar Nasional dan Pengukuhan Gelar Kompetensi Auditor Internal : Membangun Ketahanan Teknologi Informasi Melalui Audit IT dan Pengelolaan Risiko *National Seminar and Certification Ceremony for Internal Auditor Competency: Building Information Technology Resilience Through IT Audits and Risk Management*	22-23 Januari 2025 *January 22–23, 2025*	Jakarta/*Offline*	PAI BK
5	*National Conference audit for Tomorrow Strategic future ready sustainable*	27-28 Agustus 2025 *August 27–28, 2025*	Medan/*Offline*	IIA Indonesia

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

SPI telah melaksanakan reviu berjenjang atas Laporan Keuangan serta secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Dari sisi sistem, Askrindo Syariah telah mengimplementasikan aplikasi Caretech sebagai *core system* dalam pengelolaan data produksi dan keuangan.

Selain itu, Perseroan telah menerapkan *Three Lines Model* melalui keberadaan fungsi Divisi GRC yang berperan dalam mengidentifikasi risiko salah saji material sehingga potensi kesalahan, termasuk yang disebabkan oleh *fraud*, dapat dideteksi secara dini. Dengan penerapan tersebut, Laporan Keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan telah terjaga dari risiko salah saji material, yakni kekeliruan dalam pencatatan akuntansi yang dapat memengaruhi tingkat keakuratan laporan keuangan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di Askrindo Syariah dinilai telah memadai.

Review of The Effectiveness of The Internal Control System

SPI has conducted a multi-tiered review of the Financial Statements and regularly holds coordination meetings with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board. From a systems perspective, Askrindo Syariah has implemented the Caretech application as its core system for managing operational and financial data.

Additionally, the Company has adopted the Three Lines Model through the establishment of the GRC Division, which plays a role in identifying material misstatement risks so that potential errors—including those caused by fraud—can be detected early. With this implementation, the Financial Statements used as the basis for decision-making have been safeguarded against the risk of material misstatement, namely accounting errors that could affect the accuracy of the financial statements.

Statement of The Board of Directors and/or Board of Commissioners on The Adequacy of The Internal Control System

The Board of Directors and/or the Board of Commissioners state that the internal control system implemented at Askrindo Syariah is deemed adequate.

Kepatuhan Dan Tata Kelola

Compliance And Govenance Unit

Perseroan telah membentuk Unit Kepatuhan yang secara organisasi berada dalam lingkup Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan GCG. Dalam pelaksanaan fungsinya, Unit Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola berada di bawah naungan Departemen Kepatuhan serta dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Company has established a Compliance Unit, which is organizationally part of the Risk Management, Compliance, and Corporate Governance Division. In carrying out its functions, the Compliance Unit reports directly to the President Director and is led by a Division Head appointed by the President Director, taking into account recommendations from the Board of Commissioners.

In carrying out its functions, the Compliance and Governance Function operates under the Compliance Department and is led by the Head of the Risk Management, Compliance, and Governance Division, who reports directly to the President Director.

Piagam Kepatuhan

Piagam Kepatuhan beserta PROSEDUR Kepatuhan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direksi pada tanggal 16 Oktober 2017. Dokumen tersebut memuat berbagai ketentuan utama, antara lain sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Misi dan Tujuan Kepatuhan
- Bab III : Prinsip Kepatuhan
- Bab IV : Definisi dan Ruang Lingkup
- Bab V : Pengelolaan Risiko Kepatuhan
- Bab VI : Wewenang dan Tanggung Jawab
- Bab VII : Hubungan Kerja
- Bab VIII : Pelaporan
- Bab IX : Penutup

Compliance Charter

The Compliance Charter and Compliance Procedures were established and approved by the Board of Directors on October 16, 2017. The documents contain various key provisions, including the following:

- *Chapter I : Introduction*
- *Chapter II : Mission and Compliance Objectives*
- *Chapter III : Compliance Principle*
- *Chapter IV : Definition and Scope*
- *Chapter V : Compliance Risk management*
- *Chapter VI : Authority and Responsibility*
- *Chapter VII : Employment Relations*
- *Chapter VIII : Reporting*
- *Chapter IX : Closing*

Tugas & Tanggung Jawab Unit Kepatuhan & GCG

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 080/KEP-DIR/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 mengenai Struktur Organisasi, tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG.
2. Menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG).
3. Melaksanakan program *monitoring* praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.
4. Membina kerja sama yang baik dengan divisi atau unit usaha terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Duties & Responsibilities of Compliance & GCG Unit

Pursuant to Board of Directors Decision No. 080/KEP-DIR/III/2021 dated March 9, 2021, regarding the Organizational Structure, the duties and responsibilities of the Compliance Unit include the following:

1. *Organize and coordinate management practices of compliance and GCG.*
2. *Prepare guidelines for corporate governance practices (GCG).*
3. *Carry out a monitoring program for GCG implementation practices in related company functions.*
4. *Foster Good cooperation with related divisions or business units to monitor the Company's compliance with laws and regulations.*
5. *Ensure that the Company has complied with the regulations regarding disclosure requirements in line with the GCG principles implementation.*

Auditor Eksternal
External Auditor

Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor independen yang dinilai memiliki kompetensi, profesionalisme, dan objektivitas untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

The Company's Board of Commissioners has appointed KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners as the independent auditor, which is deemed to possess the competence, professionalism, and objectivity to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the period ending December 31, 2025.

Adapun daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

The following is a list of Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants that have provided audit services for the Company's Financial Statements over the past 5 (five) years:

Tahun *Years*	Nama KAP *KAP Name*	Nama Akuntan *Accountant Name*	Biaya *Fee*	Jasa yang Diberikan *Service Provided*
2025	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Adrian Adisetyo Winoto	Rp1.150.000.000	Audit Laporan Keuangan *Financial Statements Audit*
2024	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Bimo Iman Santoso	Rp1.132.200.000	Audit Laporan Keuangan *Financial Statements Audit*
2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Herry Setiadie	Rp1,250,000,000	Audit Laporan Keuangan *Financial Statements Audit*
2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Herry Setiadie	Rp1.200 juta I million	Audit Laporan Keuangan *Financial Statements Audit*
2021	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	M. Jusuf Wibisana	Rp910 juta I million	Audit Laporan Keuangan *Financial Statements Audit*

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan langkah strategis yang diterapkan oleh manajemen guna memastikan seluruh aktivitas operasional Perseroan berlangsung sesuai dengan standar profesional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini dirancang, diimplementasikan, dan diawasi secara menyeluruh oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dengan dukungan aktif dari manajemen tingkat menengah hingga seluruh karyawan. Secara mendasar, penerapan Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk menjamin kecukupan pengendalian pada aspek operasional dan keuangan, menghasilkan pelaporan keuangan yang andal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

The Internal Control System is a strategic measure implemented by management to ensure that all of the Company's operational activities are conducted in accordance with professional standards and applicable laws and regulations. This system is designed, implemented, and comprehensively monitored by the Board of Commissioners and the Board of Directors, with active support from middle management down to all employees. Fundamentally, the implementation of the Internal Control System aims to ensure adequate controls over operational and financial aspects, produce reliable financial reporting, enhance the effectiveness and efficiency of business processes, and ensure compliance with applicable regulations.

Dalam upaya menjaga keamanan investasi serta melindungi aset Perseroan, penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif senantiasa menjadi prioritas utama. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan suatu kerangka kerja pengendalian internal yang komprehensif dan menjadi acuan bagi seluruh unsur organisasi, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

In an effort to safeguard investments and protect the Company's assets, the implementation of an effective Internal Control System remains a top priority. In this regard, the Company has established a comprehensive internal control framework that serves as a reference for all organizational units, covering the following aspects:

1. Lingkungan pengendalian internal Perseroan dilaksanakan secara disiplin dan terstruktur, terdiri dari:
   a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan.
   b. Filosofi dan gaya Manajemen Perseroan.
   c. Cara pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya.
   d. Pengorganisasian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
   e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perseroan;
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan;
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan
6. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi dari SPI.

1. The Company's internal control environment is performed in a disciplined and structured manner, consisting of:
   a. Integrity, ethical values, and competence of employees.
   b. PhiloProsedurhy and style of the Company's Management.
   c. Procedures of exercising its powers and responsibilities.
   d. Organizing and developing Human Resources.
   e. Attention and direction taken by the Board of Directors.
2. Assessment of business risk management, which is a process to identify, to analyze and to assess relevant risk management;
3. Control activities, defines as actions taken in a process of controlling the Company's activities at each level and unit in the organizational structure of the Company, among others regarding the authority, authorization, verification, reconciliation, work performance assessment, segregation of duties and security of the Company's assets;
4. Information and communication systems, which is a process of presenting reports on operational, financial, as well as compliance with the provisions of the laws and regulations by the Company;
5. Monitoring means the process of assessing the quality of internal control system, including internal audit function at each level and unit within the Company's organizational structure, so it can be implemented optimally; and
6. Ensure the follow-up actions on recommendations from IAU.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Dengan Kerangka yang Diakui Internasional

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) merupakan lembaga yang mengembangkan kerangka konseptual pengendalian internal yang saat ini banyak diadopsi oleh perusahaan. Dalam kerangka tersebut, pengendalian internal dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan peran Direksi, manajemen, serta seluruh karyawan, yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas dan efisiensi operasional Perseroan tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang andal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, konsep pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan telah selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kerangka COSO.

Conformity of Internal Control System With International Recognized Framework

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is an organization that developed a conceptual framework for internal control that is currently widely adopted by companies. Under this framework, internal control is viewed as a process involving the Board of Directors, management, and all employees, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the organization's objectives.

The Company's operational effectiveness and efficiency are reflected in the preparation of reliable financial statements and compliance with applicable laws and regulations. Therefore, the internal control concept implemented by the Company is aligned with the principles established in the COSO framework.

Penilaian dan Pernyataan Direksi Atas Efektivitas SPI Tahun 2025

Pelaksanaan aktivitas pengendalian internal sepanjang tahun 2025 berjalan secara optimal dan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk kepentingan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Sistem Pengendalian Internal tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam sistem pengendalian internal Perseroan. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan yang memerlukan tindak lanjut oleh unit kerja terkait sebagai bagian dari proses penyempurnaan.

Kesimpulan tersebut turut diperkuat oleh hasil penilaian auditor eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, yang disampaikan dalam paparan *closing meeting* terkait pelaksanaan general audit atas laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah pada tanggal 13 Maret 2026. Berdasarkan keseluruhan hasil penilaian tersebut, manajemen Perseroan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan telah berjalan secara efektif.

Assessment and Statements of The Board oof Directors on The SPI Effectiveness in 2025

The implementation of internal control activities throughout 2025 proceeded optimally and provided reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting, including the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

Based on the results of the evaluation through the implementation of the 2025 Annual Internal Control System Oversight Work Program (PKPT), it can be concluded that there are no significant weaknesses in the Company's internal control system. However, there are several observations that require follow-up by the relevant departments as part of the improvement process.

This conclusion is further supported by the findings of the external auditor, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm, presented during the closing meeting regarding the general audit of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah's financial statements on March 13, 2026. Based on the overall results of this assessment, the Company's management states that the internal control system over financial reporting has been operating effectively.

Manajemen Risiko
Risk Management

Perseroan menyadari bahwa setiap kegiatan usaha mengandung potensi risiko yang perlu dikelola secara cermat dan terukur. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi landasan utama dalam menjalankan bisnis penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

Pengelolaan risiko di Perseroan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu Manajemen Risiko Korporat dan Manajemen Risiko Operasional, yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan usaha. Implementasi manajemen risiko dilakukan secara terstruktur melalui pembentukan komite internal, pelaksanaan evaluasi risiko secara berkala, serta pemantauan berkesinambungan terhadap aktivitas bisnis guna memastikan efektivitas pengendalian risiko di seluruh tingkatan organisasi.

Secara organisasi, fungsi pengelolaan risiko berada pada Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Company recognizes that every business activity carries potential risks that must be managed carefully and systematically. Therefore, the implementation of comprehensive risk management serves as the cornerstone of our sharia-based financing guarantee business.

Risk management at the Company focuses on two main aspects, namely Corporate Risk Management and Operational Risk Management, which support each other in maintaining business stability and sustainability. Risk management is implemented in a structured manner through the formation of internal committees, the conduct of periodic risk assessments, and continuous monitoring of business activities to ensure the effectiveness of risk controls at all levels of the organization.

Organizationally, the risk management function falls under the Risk Management, Compliance, and Governance Division, which reports directly to the President Director.

Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Manajemen Risiko memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengorganisasi dan mengkoordinasi kegiatan manajemen dan pengelolaan risiko korporat maupun operasional secara tepat dan sistematis, mulai dari penyusunan rencana kerja, penyusunan ketentuan pengelolaan risiko sesuai dengan tata kelola dokumen Perseroan, dan pembuatan *review* risiko.
2. Mengorganisasikan proses pengelolaan risiko korporat mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko serta pencatatan dan pelaporan.

Duties and Responsibilities

The Risk Management Unit is responsible for carrying out the following duties and responsibilities:

1. *Organize and coordinate corporate and transactional risk management activities appropriately and systematically, starting from the preparation of work plans, the preparation of risk management provisions in accordance with the governance of corporate documents, and the preparation of risk reviews.*
2. *Organize the corporate risk management process starting from risk identification, risk analysis, risk evaluation, and risk treatment as well as recording and reporting.*

Profil Kepala Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola (GRC) Perseroan hingga akhir tahun 2025 berada di bawah kepemimpinan Ibu Wisnoe Marety.

Informasi lebih rinci mengenai profil Ibu Wisnoe Marety selaku Pjs. Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan, khususnya pada Subbab Profil Pejabat Eksekutif.

Profile of Head of Risk Management Department

The Company's Risk Management, Compliance, and Governance (GRC) Division through the end of 2025 is led by Mrs. Wisnoe Marety.

More detailed information regarding the profile of Mrs. Wisnoe Marety as Act. Head of the Risk Management, Compliance, and Governance Division can be found in the Company Profile section, specifically in the Executive Profile subsection.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Dalam struktur organisasi Perseroan, penyelenggaraan Sistem Manajemen Risiko berada dalam lingkup Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Secara garis besar, pengelolaan risiko dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu Manajemen Risiko Korporat dan Manajemen Risiko Operasional.

Penerapan manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis melalui keterlibatan aktif setiap unit kerja serta dukungan komite-komite yang dibentuk secara khusus. Pengawasan atas implementasinya dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko, pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko, evaluasi berkala, serta penyusunan laporan *monitoring* aktivitas usaha guna memastikan pengendalian risiko yang komprehensif di tingkat korporasi.

Dari sisi infrastruktur, Perseroan juga telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran melalui Surat Keputusan Direksi No. 0155/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2024.
- Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran melalui Surat Keputusan Direksi No. 0145/SK/G.10/DIR-JPAS/X/2025.

Risk Management System Implementation

Within the Company's organizational structure, the implementation of the Risk Management System falls under the purview of the Risk Management, Compliance, and Governance Division, which reports directly to the President Director. Broadly speaking, risk management is categorized into two main aspects: Corporate Risk Management and Operational Risk Management.

The implementation of risk management has been integrated into all business processes through the active involvement of each work unit and the support of specially formed committees. Oversight of its implementation is carried out through the Risk Monitoring Committee, the use of risk management information systems, periodic evaluations, and the preparation of business activity monitoring reports to ensure comprehensive risk control at the corporate level.

In terms of infrastructure, the Company has also refined its Risk Management policies and procedures, which include the following:

- *General Risk Management Policy (GRMP), approved by the President Director and Marketing Director through Board of Directors Decree No. 0155/SK/G.10/DIR-JPAS/III/2024.*
- *Information Technology Risk Management (ITRM) Policy, approved by the President Director and Marketing Director through Board of Directors Decree No. 0145/SK/G.10/DIR-JPAS/X/2025.*

- Kebijakan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran melalui Surat Keputusan Direksi No. 0158/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2025.
- Kebijakan *Business Continuity Management System* (BCMS) yang telah disahkan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0169/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2025.

Selain itu, penerapan Sistem Manajemen Risiko turut diperkuat oleh standar manajemen berbasis ISO yang terstruktur dan teruji, sehingga memberikan landasan yang kokoh dalam implementasinya. Adapun standar ISO yang diterapkan dan dikelola oleh Perseroan meliputi:
- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015,
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, dan
- Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013.

- *Risk Acceptance Criteria (RAC) Policy, approved by the President Director and Marketing Director through Board of Directors Decree No. 0158/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2025.*
- *Business Continuity Management System (BCMS) Policy, approved by the President Director and Finance Director through Board of Directors Decree No. 0169/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2025.*

In addition, the implementation of the Risk Management System is further strengthened by structured and proven ISO-based management standards, thereby providing a solid foundation for its implementation. The ISO standards implemented and managed by the Company include:
- *ISO 9001:2015 Quality Management System,*
- *ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, and*
- *ISO 27001:2013 Information Security Management System.*

Penetapan Nilai Kapasitas Risiko dan Selera Risiko

Sebagai wujud komitmen dalam menerapkan manajemen risiko yang *prudent* dan selaras dengan prinsip syariah, manajemen secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap Kapasitas Risiko dan Selera Risiko pada setiap lini kegiatan penjaminan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tingkat eksposur risiko yang dihadapi Perseroan tetap berada dalam batas kemampuan keuangan dan operasional, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah.

Adapun penetapan nilai Kapasitas Risiko dan Selera Risiko untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Determination of Risk Capacity and Risk Appetite Values

As part of its commitment to implementing prudent risk management in accordance with Sharia principles, management continuously evaluates Risk Capacity and Risk Appetite across all lines of guarantee business. This measure is intended to ensure that the Company's level of risk exposure remains within the limits of its financial and operational capabilities, and is consistent with the principles of prudence and Sharia requirements.

The Risk Capacity and Risk Appetite values set for 2025 are as follows:

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Nilai Kapasitas Risiko *Risk Capacity Value*	Nilai Selera Risiko *Risk Appetite Value*	Nilai Toleransi Risiko *Risk Tolerance Value*	Nilai Batasan Risiko *Risk Limit Value*
124,262	74,557	86,983	62,131

Hasil Reviu atas Sistem Manajemen Risiko

Dari sisi struktur dan kerangka kerja, implementasi Manajemen Risiko Perseroan sepanjang tahun 2025 menunjukkan berbagai penyempurnaan yang signifikan. Perseroan telah melakukan penyesuaian serta pembaruan terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kebijakan dari *holding* dan induk Perseroan.

Penilaian tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Petunjuk Teknis Nomor 8 tentang Penilaian Indeks Kematangan Risiko di lingkungan BUMN. Evaluasi dilakukan terhadap dua aspek utama, yaitu Aspek Dimensi dan Aspek Kinerja.

Review Results of The Risk Management System

In terms of structure and framework, the Company's implementation of risk management throughout 2025 has seen a number of significant improvements. The Company has made adjustments and updates to its General Risk Management Policy to ensure compliance with applicable regulations, including policies from the Company's holding company and parent company.

The assessment of the maturity level of risk management implementation for Fiscal Year 2024 was conducted in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 2 of 2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as Technical Guideline No. 8 on the Assessment of the Risk Maturity Index within State-Owned Enterprises. The evaluation focused on two main aspects: the Dimensional Aspect and the Performance Aspect.

Berdasarkan hasil penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025 untuk Tahun Anggaran 2024, Perseroan memperoleh skor sebesar 2,16 dari skala 5, berada pada fase 2 (berkembang).

Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa inisiatif strategis yang diidentifikasi sebagai *Opportunity for Improvement* (OFI) pada tahun 2025, yaitu:
1. Kerangka dan Kepatuhan risiko
2. Organisasi dan tata kelola risiko
3. Proses dan kontrol risiko

Penilaian Tingkat Risiko Tahun 2025

Risiko utama yang dihadapi Perseroan pada tahun 2025 adalah 8 (delapan) peristiwa risiko. Dalam melakukan pengukuran tingkat risiko, Perseroan mengacu pada ketentuan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan serta POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Berdasarkan 8 (delapan) peristiwa risiko tersebut yang dilakukan pemantauan sepanjang tahun 2025 diperoleh hasil profil risiko yaitu:
1. Lima risiko yang masuk kategori risiko *High*, satu dapat diturunkan menjadi *Moderate to High*, tiga dapat diturunkan menjadi *Low to Moderate* dan satu lainnya dapat diturunkan menjadi *Low*.
2. Satu risiko yang masuk kategori risiko *Moderate to High* dapat diturunkan menjadi kategori *Low to Moderate*.
3. Satu risiko yang masuk kategori risiko *Moderate*, tetap *Moderate*.
4. Satu risiko yang masuk kategori risiko *Low to Moderate,* dapat diturunkan menjadi kategori risiko *Low*.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN, hasil penilaian peringkat komposit risiko PT JPAS posisi per 31 Desember 2025 disampaikan sebagai berikut:

Hasil penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko diperoleh berdasarkan profil risiko utama PT Askrindo tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pencapaian Nilai Eksposur Risiko dibandingkan dengan target Risiko Residual
   Dari 8 risiko utama PT JPAS pada tahun 2025, terdapat 6 risiko yang nilai eksposur risikonya lebih rendah dari target risiko residual dan terdapat 2 peristiwa risiko yang nilai eksposur risikonya lebih tinggi dari target risiko residual, sehingga berdasarkan perhitungan pencapaian total nilai eksposur dibandingkan dengan target risiko residual diperoleh nilai 78.
2. Pencapaian Output Pelaksanaan Kegiatan Perlakuan Risiko dibandingkan dengan Target Total Output Perlakuan Risiko

Based on the results of the 2025 Risk Maturity Index (RMI) assessment for Fiscal Year 2024, the Company received a score of 2.16 on a scale of 5, placing it in Phase 2 (developing).

Based on the results of this evaluation, several strategic initiatives have been identified as Opportunities for Improvement (OFI) for 2025, namely:
1. *Risk Framework and Compliance*
2. *Risk Organization and Governance*
3. *Risk Processes and Controls*

2025 Risk Level Assessment

The primary risk facing the Company in 2025 is eight (8) Risk Events. In measuring risk levels, the Company refers to the provisions of POJK No. 17/POJK.03/2014 regarding the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates and POJK No. 44/POJK.05/2020 regarding the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.

Based on the monitoring of the eight (8) risk events throughout 2025, the Company's risk profile was as follows:

1. *Five risks were initially classified as High. Of these, one was reduced to Moderate to High, three were reduced to Low to Moderate, and one was reduced to Low.*
2. *One risk initially classified as Moderate to High was reduced to Low to Moderate.*
3. *One risk initially classified as Moderate remained at the Moderate level.*
4. *One risk initially classified as Low to Moderate was reduced to Low.*

Based on the Technical Guidelines of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 dated 26 October 2023 concerning the Technical Guidelines for SOE Risk Management Reporting, the composite risk rating assessment of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT JPAS) as of 31 December 2025 is presented as follows.

The Risk Management Implementation Quality Assessment was conducted based on PT Askrindo Syariah's 2025 key risk profile, with the following results:

1. *Achievement of Risk Exposure Value Compared with the Residual Risk Target*
   Of PT JPAS's eight (8) key risks in 2025, six (6) recorded risk exposure values below their residual risk targets, while two (2) recorded risk exposure values above their residual risk targets. Based on the calculation of the overall achievement of risk exposure values against the residual risk targets, a score of 78 was obtained.
2. *Achievement of Risk Treatment Implementation Output Compared with the Targeted Total Risk Treatment Output*

Kegiatan perlakuan risiko dilakukan untuk dapat mengurangi tingkat eksposur risiko. Pada tahun 2025, pencapaian output pelaksanaan kegiatan perlakuan atas 8 risiko utama dari total 14 mitigasi/perlakuan risiko rata-rata telah terealisasi sebesar 88%, sehingga berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 80.

3. Realisasi Biaya Pelaksanaan Perlakuan Risiko dibandingkan Anggaran Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan perlakuan risiko untuk tahun 2025, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran, sehingga diperoleh nilai 80.
4. Ketepatan Penilaian Risiko yang meliputi:
   a. Identifikasi Risiko
      Tidak ada risiko baru yang mempengaruhi penurunan kinerja pada periode berjalan, sehingga diperoleh nilai 90.
   b. Kuantifikasi Risiko
      Realisasi perhitungan nilai dampak dan nilai probabilitas memiliki deviasi negatif tidak lebih dari 5% dengan nilai dampak dan probabilitas yang ditargetkan pada periode berjalan, sehingga diperoleh nilai 90.
   c. Rencana Perlakuan Risiko
      Rencana perlakuan Risiko dapat menurunkan sebagian besar nilai eksposur risiko residual dibandingkan target residual pada periode berjalan, sehingga berdasarkan perhitungan rata-rata diperoleh nilai 80.
   d. Prioritisasi Risiko
      Seluruh Risiko dari struktur korporasi tidak ada yang baru yang mempengaruhi penurunan kinerja, sehingga diperoleh skor 90.

Berdasarkan 4 indikator Ketepatan Penilaian Risiko, diperoleh nilai 87,5.

Risk treatment activities were carried out to reduce the level of risk exposure. In 2025, the implementation of risk treatment activities for the eight (8) key risks achieved an average realization rate of 88% out of a total of fourteen (14) planned risk mitigation/treatment measures. Based on the assessment, a score of 80 was obtained.

3. *Actual Risk Treatment Implementation Costs Compared with the Budget the actual costs incurred for implementing risk treatment activities in 2025 were lower than the allocated budget, resulting in a score of 80.*
4. *Accuracy of Risk Assessment, comprising the following aspects:*
   a. *Risk Identification*
      No new risks emerged during the reporting period that significantly affected the Company's performance. Accordingly, a score of 90 was obtained.
   b. *Risk Quantification*
      The actual impact and probability values showed a negative deviation of no more than 5% from the targeted impact and probability values for the reporting period. Accordingly, a score of 90 was obtained.
   c. *Risk Treatment Plan*
      The risk treatment plans successfully reduced most residual risk exposure values relative to the targeted residual risk levels for the reporting period. Based on the average assessment, a score of 80 was obtained.
   d. *Risk Prioritization*
      No new risks were identified across the corporate risk structure that adversely affected the Company's performance. Accordingly, a score of 90 was obtained.

Based on these four indicators of Risk Assessment Accuracy, the Company achieved an overall score of 87.5.

Indikator Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2025

Quality Indicators for Risk Management Implementation in 2025

No.	Parameter	Bobot	Nilai Komponen Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Component Values Quality Implementation Management Risk*	Tingkat Risiko Inheren *Risk Level Inheren*
1	Pencapaian nilai eksposur risiko dibandingkan dengan target risiko residual *Achievement of Risk Exposure Value Compared with the Residual Risk Target*	30%	78	23,25
2	Pencapaian output pelaksanaan perlakuan risiko dibandingkan dengan target total output perlakuan Risiko *Achievement of Risk Treatment Implementation Output Compared with the Target Total Risk Treatment Output*	20%	80	16,00
3	Realisasi anggaran pelaksanaan perlakuan risiko dibandingkan dengan anggaran *Actual Risk Treatment Implementation Expenditure Compared with the Budget*	20%	80	16,00

No.	Parameter	Bobot	Nilai Komponen Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Component Values Quality Implementation Management Risk*	Tingkat Risiko Inheren *Risk Level Inheren*
4	Ketepatan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, rencana perlakuan risiko, dan prioritisasi Risiko *Accuracy of Risk Assessment, including Risk Identification, Risk Quantification, Risk Treatment Planning, and Risk Prioritization*	30%	87,5	26,25
Total Nilai *Total Score*				81,5
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Quality of Risk Management Implementation*				Fair

Sumber: Salinan Keputusan Deputi Keuangan & MR KBUMN No SK-7/DKU.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 (Diolah)
Source: Copy of the Decree of the Deputy for Finance & Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-7/DKU. MBU/10/2023 dated October 26, 2023 (Processed)

Analisis Risiko Perseroan

The Company's Risk Analysis

Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi

Setelah melalui rangkaian evaluasi risiko yang komprehensif, Unit Kerja Manajemen Risiko menetapkan 9 (sembilan) jenis risiko utama yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Types of Risk and Mitigation Efforts

After conducting a comprehensive risk assessment, the Risk Management Unit identified 9 (nine) major risk categories that are deemed to have a significant impact on the Company's business continuity, as follows:

No.	Profil Risiko *Risk Profile*	Penjelasan Singkat Risiko *Risk Brief Description*	Mitigasi Risiko *Risk Mitigation*
1	Risiko Kredit *Credit Risk*	Risiko kredit adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/ atau dapat dikendalikan akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan *Credit risk refers to the potential loss, whether controllable or uncontrollable, arising from the failure of other parties to fulfill their obligations to the Company*	Dalam penempatan investasi, Perseroan selalu menjaga prinsip kehati-hatian yaitu dengan mematuhi kebijakan regulator. Salah satu bentuk komitmen Manajemen terhadap pengelolaan aset investasi yaitu dengan menetapkan SK Direksi Nomor 057/ KEP-DIR/IX/2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Investasi yang penyusunannya didasarkan POJK Nomor 2/ POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan risiko investasi, Perseroan membentuk Komite Investasi yang berfungsi untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi Perseroan, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah melakukan pengelolaan risiko kredit dengan penempatan pada sukuk negara dan deposito ditempatkan pada bank-bank yang sehat, baik ditinjau dari indikator CAR, LDR maupun NPF serta dikaitkan dengan kerja sama operasional (*reciprocal business*). Hanya sebagian kecil aset produktif Perseroan yang diinvestasikan dalam bentuk reksadana syariah, deposito BPD syariah/ bank syariah swasta/BPRS, dan sukuk korporasi. *In placing investments, the Company adheres to the principle of prudence by complying with regulatory policies. As a form of Management's commitment to investment asset management, the Company issued the Board of Directors Decree No. 057/KEPDIR/IX/2019 concerning Investment Management Policies and Guidelines, which is based on POJK No. 2/POJK.05/2017 regarding the Operation of Guarantee Institutions.* *To enhance investment risk management, the Company established an Investment Committee to assist the Board of Directors in formulating investment policies and strategies and evaluating their implementation.* *PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah manages credit risk by placing funds in government sukuk and deposits at financially sound banks based on CAR, LDR, and NPF indicators and aligned with reciprocal business arrangements. Only a small portion of productive assets are invested in sharia mutual funds, regional* *development bank sharia deposits, sharia private bank/BPRS deposits, and corporate sukuk.*

No.	Profil Risiko *Risk Profile*	Penjelasan Singkat Risiko *Risk Brief Description*	Mitigasi Risiko *Risk Mitigation*
2	Risiko Pasar *Market Risk*	Risiko pasar adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar terhadap posisi aset, liabilitas, dan ekuitas *Market risk is the potential loss that cannot be controlled and/or can be controlled due to overall changes in market conditions on the position of assets, liabilities, and equity.*	Perusahaan menjaga risiko pasar dengan menempatkan sukuk negara dan sukuk korporasi secara *Hold to Maturity* (HTM) guna mencegah penurunan harga aset investasi secara signifikan terhadap kondisi pasar. Kebijakan valuasi aset khusus untuk aset investasi telah diatur dalam pedoman investasi, untuk deposito menggunakan nilai nominal, untuk surat berharga menggunakan nilai pasar wajar. *The Company maintains market risk by placing state sukuk and corporate sukuk on a Hold to Maturity (HTM) basis to prevent a significant decline in the price of investment assets against market conditions.* *Specific asset valuation policies for investment assets have been regulated in the investment guidelines, for deposits using nominal value, for securities using fair market value.*
3	Risiko Likuiditas *Liquidity Risk*	Risiko likuiditas adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. *Liquidity risk is the potential loss that cannot be controlled and/or can be controlled due to the Company's inability to meet maturing liabilities from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's financial activities and condition. or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.*	Perseroan tetap menjaga likuiditas Perusahaan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dari aset lancar yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Liabilitas Perusahaan telah terakomodir oleh komposisi aset yang memadai mengingat penempatan investasi Perusahaan mayoritas ditempatkan pada portofolio jangka pendek yaitu deposito. Dengan demikian Perusahaan mampu memenuhi ketentuan yaitu rasio likuiditas Perusahaan di atas 120%. Perusahaan telah menerapkan pengelolaan kesesuaian aset dan liabilitas sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.05/2017. *The Company continues to maintain its liquidity to be able to fulfill its short-term obligations from the current assets owned by the Company.* *The Company is able to fulfill its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from liquid assets that can be easily converted into cash, without disrupting the Company's activities and financial condition.* *The Company's liabilities have been accommodated by an adequate asset composition considering that the majority of the Company's investment placement is placed in short-term portfolios, namely deposits. Thus the Company is able to fulfill the provisions of the Company's liquidity ratio above 120%.* *The Company has implemented the management of the suitability of assets and liabilities in accordance with POJK Number 2/POJK.05/2017.*

No.	Profil Risiko *Risk Profile*	Penjelasan Singkat Risiko *Risk Brief Description*	Mitigasi Risiko *Risk Mitigation*
4	Risiko Operasional *Operational Risk*	Risiko operasional adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan. *Operational risk is the potential loss that cannot be controlled and/or can be controlled due to inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Company's operations.*	Dalam rangka pengelolaan Risiko Operasional Perseroan telah melakukan beberapa langkah seperti: 1. Perusahaan memiliki rumusan kebijakan, tata laksana, standar operasional prosedur yang mencakup ketentuan umum produk, proses bisnis, proses pengambilan keputusan, alur pelaporan/komunikasi dan dokumentasi kebijakan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Perusahaan tersebut dilakukan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkala. Perbaikan Prosedur dilakukan secara terus menerus dalam rangka untuk meningkatkan layanan dan kebutuhan pasar yang dinamis guna mengurangi potensi kerugian akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal. 2. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 telah diperbaharui sebagai bukti komitmen untuk standarisasi proses bisnis. Sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap *zero fraud tolerance* terutama terhadap aspek penyuapan. Perusahaan membangun sistem manajemen anti penyuapan dan untuk pertama kalinya Perusahaan meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 Manajemen Anti Penyuapan pada 2021. 3. Program Pelatihan Dasar-Dasar Reasuransi, Pelatihan dan Pembekalan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) Anamrot Level II, Pelatihan Dasar Aktuaria Asuransi Umum Batch I Tahun 2025, Pelatihan Profesi Skema Tenaga Ahli Penjaminan Syariah, Pelatihan Skema Analisis Penjaminan, Pelatihan Tenaga Ahli Penjaminan Syariah, Uji Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO), serta Uji Sertifikasi Tenaga Ahli Penjaminan Syariah. 4. Sistem Manajemen Keamanan Informasi telah diimplementasikan dengan selalu memperbaharui dan m*emonitoring* pelaksanaan kebijakan dan prosedur unit kerja teknologi informasi. *In order to manage Operational Risk, the Company has taken several steps, such as:* *1. The Company has formulated policies, procedures, standard operating procedures that include general product provisions, business processes, decision-making processes, reporting/communication flows and policy documentation, risk management and internal control. The implementation of the Company's policies and procedures is regularly monitored, evaluated and improved. Prosedur improvements are carried out continuously in order to improve services and dynamic market needs to reduce potential losses due to inadequacy and/or malfunction of internal processes.* *2. ISO 9001:2015 Quality Management Certification has been renewed as evidence of commitment to standardization of business processes. As a form of the Company's commitment to zero fraud tolerance, especially on the aspect of bribery. The Company built an anti-bribery management system and for the first time the Company achieved ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management Certification in 2021.* *3. Fundamentals of Reinsurance, Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification Preparation Program – Anamrot (Level II), Fundamentals of General Insurance Actuarial Science Training – Batch I, 2025, Professional Training for the Sharia Guarantee Specialist Certification Scheme, Guarantee Analysis Certification Scheme Training, Sharia Guarantee Specialist Training, the Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification Examination, and the Sharia Guarantee Specialist Certification Examination Program.* *4. The Information Security Management System has been implemented by constantly updating and monitoring the implementation of information technology work unit policies and procedures.*

No.	Profil Risiko *Risk Profile*	Penjelasan Singkat Risiko *Risk Brief Description*	Mitigasi Risiko *Risk Mitigation*
5	Risiko Hukum *Legal Risk*	Risiko hukum adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. *Legal risk is the potential loss that cannot be controlled and/or can be controlled arising from lawsuits and/or weaknesses in legal aspects.*	Pengendalian risiko hukum dilakukan sejak proses pembentukan suatu produk dan atau layanan Perusahaan serta penyusunan kebijakan. Hal ini dilakukan demi mencegah dan meminimalisir kelemahan dalam aspek yuridis atau ketiadaan hukum. Legal risk control is carried out since the process of forming a product and or service of the Company as well as formulating policies. This is done to prevent and minimize weaknesses in juridical aspects or the absence of law.
6	Risiko Reputasi *Reputational Risk*	Risiko reputasi adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. *Reputation risk is a potential loss that cannot be controlled and/or can be controlled due to a decrease in the level of trust of stakeholders stemming from negative perceptions of the Company.*	Dalam 1 tahun terakhir Perusahaan mampu menjaga reputasi Perusahaan, dengan pengelolaan risiko reputasi berupa: 1. Perseroan telah melakukan tanggung jawab sosialnya yang dapat meningkatkan reputasi Perusahaan dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 2. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki reputasi yang baik Peningkatan pencapaian nilai skor *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai kriteria BUMN. 3. Perseroan telah mempublikasikan Pedoman pengendalian gratifikasi yang dimuat di web Perusahaan. 4. Perseroan telah melakukan pembaharuan Prosedur Penanganan Pengaduan/Keluhan Pelanggan. *In the last 1 year the Company was able to maintain the Company's reputation, with reputation risk management in the form of:* *1. The Company has carried out its social responsibility that can improve the Company's reputation by implementing Corporate Social Responsibility (CSR) to participate in sustainable economic development to improve the quality of life that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general.* *2. The Board of Commissioners and the Board of Directors have a good reputation Improvement in the achievement of Good Corporate Governance (GCG) scores according to SOE criteria.* *3. The Company has published a gratification control guideline posted on the Company's website.* *4. The Company has updated the Customer Complaint Handling Procedure.*

No.	Profil Risiko *Risk Profile*	Penjelasan Singkat Risiko *Risk Brief Description*	Mitigasi Risiko *Risk Mitigation*
7	Risiko Penjaminan *Guarantee Risk*	Risiko penjaminan adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada *principal* maupun *obligee* sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan rate IJK atau kontribusi (*pricing*), penggunaan penjaminan ulang, dan/atau penanganan klaim. *Guarantee risk refers to the risk of the Company's failure to fulfill its obligations to the principal or obligee, arising from inadequate risk selection (underwriting) processes, improper pricing of the kafalah fee (IJK) or contributions, suboptimal use of re-guarantees, and/or ineffective claims handling.*	Perusahaan menjaga risiko penjaminan dengan beberapa tindakan antara lain: 1. Perusahaan memiliki produk dan bisnis penjaminan yang beragam, dengan rancangan berpedoman kepada Prosedur Pengembangan produk. 2. Perusahaan memiliki komposisi dan diversifikasi portofolio bisnis. 3. Penetapan Imbal Jasa Kafalah (IJK)/premi dilakukan merujuk pada data estimasi klaim/*Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat keuntungan dan kerugian, hasil investasi dan *reguarantee*. IJK dapat dilakukan *review* sesuai dengan tuntutan pasar. 4. Dalam rangka mengamankan bisnis akseptasi Kafalah dan memenuhi ketentuan regulasi maka telah dilakukan penyebaran risiko dengan mendapatkan *back up reguarantee* dari Perusahaan reasuransi maupun asuransi dalam bentuk *treaty* atau fakultatif dengan struktur *reguarantee* yang memadai. 5. Semua Direksi memiliki latar belakang di bidang keuangan khususnya asuransi & perbankan. 6. Pada level manajerial telah dilaksanakan *Certified Risk Management Officer* (CRMO) dari LSPMR 7. *Review* efektivitas sistem pengendalian risiko selain dilakukan oleh auditor internal juga dilakukan oleh auditor eksternal. 8. Terdapat penyempurnaan Prosedur Operasional terkait usulan perubahan limit dan ketentuan putusan akseptasi *cash financing* (CF) dan *non cash financing* (NCF) *The Company maintains underwriting risk with several measures, among others:* *1. The Company has a variety of underwriting products and businesses, with designs guided by product development procedures.* *2. The company has a composition and diversification of business portfolios.* *3. Determination of the Kafalah Service Fee (IJK)/premium is carried out by referring to data on estimated claims/Non Performing Financing (NPF) and the level of profits and losses, investment returns and reguarantees. IJK can be reviewed in accordance with market demands.* *4. In order to secure the Kafalah acceptance business and meet regulatory requirements, risk spreading has been carried out by obtaining back up reguarantees from reinsurance and insurance companies in the form of treaty or facultative with an adequate reguarantee structure.* *5. All Directors have a background in finance, especially insurance & banking.* *6. At the managerial level, the Certified Risk Management Officer (CRMO) from LSPMR has been implemented.* *7. Review of the effectiveness of the risk control system is not only carried out by internal auditors but also by external auditors.* *8. There is an improvement in the Operational Prosedur related to the proposed changes in limits and provisions of Cash Financing (CF) and Non-Cash Financing (NCF) acceptance decisions.*

No.	Profil Risiko *Risk Profile*	Penjelasan Singkat Risiko *Risk Brief Description*	Mitigasi Risiko *Risk Mitigation*
8	Risiko Strategis *Strategic Risk*	Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. *Strategic risk is the risk due to the Company's inaccuracy in taking and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.*	Dalam mengelola risiko strategis, Perseroan melakukan dan mengidentifikasi perubahan atas faktor internal dan eksternal yang dapat memiliki dampak material terhadap rencana strategis Perusahaan. Selain itu, Perusahaan mengoptimalkan kerja sama selain dengan Bank Umum Syariah (dan/atau UUS) juga dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penetrasi ke ceruk *market non* perbankan yang memberikan kinerja positif, penguatan SDM khususnya di bisnis melalui pembentukan departemen yang lebih spesifik yaitu unit penjaminan *non cash financing* untuk produk *suretyship* dan transaksi perdagangan serta unit subrogasi serta penguatan Pemasaran dengan mendirikan Teras Mitra di Kantor Cabang. Perusahaan meraih peringkat idA+ dari pemeringkat PT Pefindo. Hal ini menunjukkan komitmen manajemen dalam mencapai sasaran strategisnya yaitu memiliki karakteristik keamanan keuangan yang kuat dibandingkan Perusahaan lainnya di Indonesia. Walaupun, Perusahaan mungkin akan terpengaruh oleh perubahan kondisi bisnis yang merugikan dibandingkan Perusahaan lain dengan peringkat yang lebih tinggi. *In managing strategic risk, the Company conducts and identifies changes in internal and external factors that can have a material impact on the Company's strategic plan. In addition, the Company optimizes cooperation not only with Sharia Commercial Banks (and/or UUS) but also with Regional Development Banks (BPD). Penetration into non-banking niche markets that provide positive performance, strengthening human resources, especially in business through the establishment of more specific departments, namely non-cash financing guarantee units for suretyship products and trade transactions and subrogation units and strengthening Marketing by establishing Teras Mitra at Branch Offices.* *The Company achieved idA+ rating from the rating agency PT Pefindo. This demonstrates management's commitment in achieving its strategic objective of having strong financial security characteristics compared to other companies in Indonesia. However, the Company may be affected by adverse changes in business conditions compared to other companies with higher ratings.*
9	Risiko Kepatuhan *Compliance Risk*	Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan *Compliance risk is the risk due to the Company not complying and/or not implementing the provisions of laws and regulations applicable to the Company.*	Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan, dilakukan pengendalian risiko kepatuhan berupa: 1. *Review*/uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan prosedur baru maupun eksisting. 2. Memberikan pendapat kepatuhan. 3. Kajian kepatuhan atas produk atau aktivitas baru. 4. Analisis dampak peraturan eksternal yang baru. 5. Perusahaan memenuhi obyek kepatuhan terhadap OJK dan UU dengan menjaga *Gearing Ratio* Usaha Produktif tidak melebihi 20x dan *Gearing Ratio* Total tidak melebihi 40x. 6. Perusahaan telah memenuhi kewajiban mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan ke OJK. 7. Perusahaan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. *In order to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities carried out by the Company are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and the provisions of laws and regulations, compliance risk control is carried out in the form of:* *1. Review/compliance test on the design of new and existing policies and procedures.* *2. Providing compliance opinion.* *3. Compliance review of new products or activities.* *4. Impact analysis of new external regulations.* *5. The Company fulfills the object of compliance with OJK and the Law by maintaining Productive Business Gearing Ratio not exceeding 20x and Total Gearing Ratio not exceeding 40x.* *6. The Company has fulfilled the obligation to submit Monthly Reports every month to OJK.* *7. The Company has implemented Good Corporate Governance.*

Penilaian dan Pernyataan Direksi Atas Efektivitas Manajemen Risiko Tahun 2025

Perseroan secara berkala melaksanakan penelaahan terhadap efektivitas Sistem Manajemen Risiko melalui koordinasi yang intensif antar divisi dan komite terkait. Dalam pelaksanaannya, Direksi didukung oleh Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Tata Kelola serta Satuan Pengawasan Internal, dengan arahan strategis dari Dewan Komisaris guna melakukan analisis yang komprehensif serta merumuskan langkah-langkah pengelolaan dan mitigasi risiko yang tepat.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Manajemen Risiko sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang efektif. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tersebut menjadi dasar penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di masa mendatang.

Assessment and Statement of The Board of Directors of The Risk Management Effectiveness in 2025

The Company periodically reviews the effectiveness of its Risk Management System through intensive coordination among relevant divisions and committees. In carrying out this process, the Board of Directors is supported by the Risk Management, Compliance, and Governance Division and the Internal Audit Unit, with strategic guidance from the Board of Commissioners, to conduct comprehensive analyses and formulate appropriate risk management and mitigation measures.

The results of the evaluation of the implementation of the Risk Management System throughout 2025 indicate effective performance. The findings and recommendations resulting from this process serve as a crucial foundation.

Program Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Unit Manajemen Risiko

Anggota Unit Kerja Manajemen Risiko telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

Training and/or Competency Development Program For Risk Management Unit

Members of the Risk Management Unit participated in various training activities held throughout 2025, including the following:

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
1	Konferensi Nasional Profesional MR XI - *Towards Golden* Indonesia 2045 : *Risk Manajement as Competitive Edge in A Complex World "Preparedness, Agility, and Adaptation"* *11th National Conference of Risk Management Professionals - Towards Golden Indonesia 2045: Risk Management as a Competitive Edge in a Complex World "Preparedness, Agility, and Adaptation"*	27 - 28 November 2025 *November 27–28, 2025*	*Offline*	LSPMR
2	Uji Sertifikasi - *Certified Risk Management Officer* - CRMO *Certification Exam - Certified Risk Management Officer (CRMO)*	5 Mei 2025 *May 5, 2025*	Jakarta/*Offline*	LSPMR
3	*Masterclass* Program LSPMR: Mitigasi Risiko dalam transformasi digital *LSPMR Masterclass Program: Risk Mitigation in Digital Transformation*	3-4 Juli 2025 *July 3–4, 2025*	*Online*	LSPMR
4	Pelatihan & Pembekalan Sertifikasi CRMO Anamrot (Level II) *Anamrot CRMO Certification Training and Orientation (Level II)*	28-30 April 2025 *April 28–30, 2025*	*Online*	LSPMR
5	Perpanjang Sertifikasi CRMO *Renew CRMO Certification*	3 Oktober 2025 *October 3, 2025*	*Online*	LSPMR
6	Perpanjang Sertifikasi CRMP *Renew CRMP Certification*	3 Oktober 2025 *October 3, 2025*	*Online*	LSPMR
7	*Workshop "Ethical Risk Culture & Risk Leadership"* *Workshop on "Ethical Risk Culture & Risk Leadership"*	30 September 2025 *September 30, 2025*	*Online*	GRC Manajemen
8	*Workshop Integrating Strategy And Risk Management* *Workshop on Integrating Strategy and Risk Management*	21-22 April 2025 *April 21–22, 2025*	*Online*	GRC Manajemen
9	Webinar Manajemen Risiko sebagai Integrator Implementasi POJK 12 2024 *Webinar on Risk Management as an Integrator for the Implementation of POJK 12 2024*	31 Januari 2025 *January 31, 2025*	*Online*	GIRMA

No.	Pelatihan *Trainings*	Waktu *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
10	*Virtual Round Table Discussion : CSR and Fraud Navigating the Ethical and Legal Challenges* *Virtual Roundtable Discussion: CSR and Fraud—Navigating the Ethical and Legal Challenges*	25 Januari 2025 *January 25, 2025*	*Online*	ACFE
11	*Webinar Determining the Risk Strategy in the Challenges of Environmental Social and Macro Economic Changes :* Penetapan Strategi Risiko Perusahaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Sosial dan Macro Ekonomi *Webinar: Determining the Risk Strategy in the Face of Environmental, Social, and Macroeconomic Changes: Establishing a Corporate Risk Strategy to Address Environmental, Social, and Macroeconomic Changes*	7 Januari 2025 *January 7, 2025*	*Online*	LSPMR
12	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 *Level 6 Risk Management Training and Certification*	25 Februari 2026 *February 25, 2026*	Jakarta	Muamalat Institute
13	Seminar *Driving Enterprice Value Through Strategic Risk Oversight : The Critical Role Of Oversight Boards and Internak Audit In Strengthening Risk Governance an Portfolio Management* *Seminar: Driving Enterprise Value Through Strategic Risk Oversight: The Critical Role of Oversight Boards and Internal Audit in Strengthening Risk Governance and Portfolio Management*	15 Juli 2025 *July 15, 2025*	Jakarta	IKAI

Akses Informasi Perseroan
Access To Company Information

Dalam upaya menjaga konsistensi penerapan prinsip transparansi di seluruh kegiatan usaha, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang terbuka, luas, dan mudah diakses oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui penyajian data dan laporan pada situs resmi Perseroan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

In an effort to maintain consistency in the application of transparency principles across all business activities, the Company is committed to providing open, comprehensive, and easily accessible information to the public and stakeholders. This transparency is achieved through the publication of data and reports on the Company's official website, in accordance with the provisions of Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure.

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Manajemen telah menetapkan Pedoman Transparansi dan Pengungkapan Informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 077/KEP-DIR/III/2021.

To reinforce this commitment, Management has established the Transparency and Information Disclosure Guidelines, as set forth in Board of Directors Decision No. 077/KEP-DIR/III/2021.

Situs Web
Website

Perseroan memandang bahwa media yang paling efektif dalam penyampaian informasi kepada publik adalah melalui situs web resmi, yaitu www.askrindosyariah.co.id. Pengelolaan situs tersebut dilakukan oleh Tim Pengelola Situs yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan.

The Company believes that the most effective medium for conveying information to the public is through its official website, www.askrindosyariah.co.id. The website is managed by the Website Management Team, which operates under the coordination of the Corporate Secretary.

Dalam pelaksanaannya, Tim Pengelola Situs bertanggung jawab untuk memastikan bahwa situs resmi Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan keterbukaan informasi bagi pihak eksternal serta melakukan pembaruan konten secara berkala agar informasi yang disajikan tetap relevan, mutakhir, dan akurat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, situs web Perseroan menyajikan berbagai informasi umum, laporan kinerja, serta data penting lainnya, antara lain sebagai berikut:

- Informasi Perusahaan, yang berisi informasi mengenai Sejarah dan Profil Perseroan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, *Core Values*, Makna Logo, *Company Profile*, Manajemen;
- Produk dan Layanan, berisi informasi mengenai Kafalah Pembiayaan Konsumtif, Kafalah Pembiayaan Produktif, Kafalah *Suretyship*, Maasya, dan Layanan Digital;
- Tata Kelola Perusahaan, berisi informasi mengenai SK & Perizinan, KPKU, Kebijakan Seleksi Pemasok, Laporan GCG, Anggaran Dasar, Piagam Audit Internal, Pedoman Komite Audit, Kebijakan *Anti Fraud*, Prosedur Pengaduan Pelanggan, Pedoman GCG, *Whistleblowing System*, *Code of Conduct*, Transparansi & *Disclosure*, Benturan Kepentingan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, *Board Manual*, Piagam Komite Pemantau Risiko;
- Kinerja Perseroan, berisi informasi mengenai Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Berkelanjutan, Ikhtisar Keuangan;
- Informasi Lainnya, berisi informasi mengenai Pemeringkatan, Penghargaan, Sertifikasi, Peluang Karir, Peluang Pemosok, Berita, Video, Publikasi Penanganan Pengaduan Pelanggan;
- Hubungi Kami, berisi informasi mengenai Kantor Pusat, Kantor Cabang, Pengaduan Pelanggan, *Whistleblowing System* (WBS), *Frequently Ask Question* (FAQ).

E-Mail Perseroan

Selain menyediakan situs web yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, Perseroan juga menyediakan sarana komunikasi alternatif yang efektif dan efisien bagi para pemangku kepentingan, yaitu melalui alamat surat elektronik resmi Perseroan: sekper@askrindosyariah.co.id.

Media Sosial

Selain mengoptimalkan penggunaan situs web dan surat elektronik, Perseroan juga secara aktif mengelola berbagai kanal media sosial, antara lain sebagai berikut:

- Instagram : @askrindo_syariah
- Youtube : Askrindo Syariah
- Facebook : Askrindo Syariah
- X : @AskrindoSyariah

In its operations, the Website Management Team is responsible for ensuring that the Company's official website consistently complies with information disclosure requirements for external parties and regularly updates content to ensure that the information presented remains relevant, up-to-date, and accurate.

In accordance with applicable laws and regulations, the Company's website provides various general information, performance reports, and other important data, including the following:

- *Company Information, which contains information on Company History and Profile, Vision and Mission, Organizational Structure, Core Values, Logo Meaning, Company Profile, Management;*
- *Products and Services, containing information about Consumptive Financing Kafalah, Productive Financing Kafalah, Suretyship Kafalah, Maasya, and Digital Services;*
- *Corporate Governance, contains information regarding SK & Licensing, KPKU, Supplier Selection Policy, GCG Report, Articles of Association, Audit Committee, Audit Charter, Anti-Fraud Policy, Customer Complaint Procedure, GCG Guidelines, Risk Management Policy, Whistleblowing System, Code of Conduct, Transparency & Disclosure, Conflict of Interest, Gratification Control Guidelines, Board Manual, Risk Monitoring Committee Charter;*
- *Company Performance, contains information on Annual Reports, Financial Reports, Sustainability Reports, Financial Highlights;*
- *Other Information, contains information regarding Ratings, Awards, Certifications, Career Opportunities, Vendor Opportunities, News, Videos, Publications for Handling Customer Complaints;*
- *Contact Us, contains information about the Head Office, Branch Offices, Customer Complaints, Whistleblowing System (WBS), Frequently Ask Questions.*

Corporate E-Mail

In addition to providing a website that is easily accessible to the public, the Company also offers an effective and efficient alternative communication channel for stakeholders via the Company's official email address: sekper@askrindosyariah.co.id.

Social Media

In addition to optimizing the use of its website and email, the Company also actively manages various social media channels, including the following:

- *Instagram : @askrindo_syariah*
- *Youtube : Askrindo Syariah*
- *Facebook : Askrindo Syariah*
- *X : @AskrindoSyariah*

Benturan Kepentingan Terkait Hubungan Berelasi

Conflicts of Interests with Related Parties

Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 076/KEP-DIR/III/2021. Pedoman tersebut telah didistribusikan kepada seluruh karyawan dan memuat ketentuan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan.

The Company's Good Corporate Governance (GCG) Guidelines have been established through Board of Directors Decision No. 076/KEP-DIR/III/2021. These guidelines have been distributed to all employees and contain policy provisions regarding the handling of conflicts of interest.

Dalam menghadapi potensi maupun kondisi yang berhubungan dengan konflik kepentingan, Insan Perseroan:

1. Dilarang melakukan kegiatan dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan.
2. Dilarang menerima, memberi, dan/atau meminta hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan baik dari Mitra Kerja, Penyedia Barang/Jasa serta Mitra Usaha lainnya.
3. Dilarang menerima, memberi, dan/atau meminta barang/uang/setara uang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan baik dari Mitra Kerja, Penyedia Barang/Jasa serta Mitra Usaha lainnya.
4. Dilarang bersikap diskriminatif/tidak adil untuk memenangkan Penyedian Barang/Jasa, Mitra Kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan.
5. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan luar Perusahaan.
6. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian ditugaskan kepadanya untuk mengurus atau mengawasinya.
7. Membuat pernyataan potensi konflik kepentingan apabila terdapat hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.

In dealing with potential or actual situations involving conflicts of interest, the Company's individual:

1. *In dealing with potential or actual situations involving conflicts of interest, Company personnel shall: Is prohibited to carry out activities and/or use the Company's assets for personal, family, and/or group interests.*
2. *Is prohibited to accept, give, and/or ask for gifts in any form related to their position in the Company, both from Business Partners, Goods/Services Providers and other Business Partners.*
3. *Is prohibited to receive, give, and/or ask for goods/money/money equivalent in any form related to their position in the Company, both from Business Partners, Goods/Services Providers and other Business Partners.*
4. *Is prohibited to be discriminatory/unfair to win the provision of goods/services, certain business partners with the intention of receiving compensation for services for personal, family, and/or group interests.*
5. *Is prohibited to use confidential information and business data of the Company for external purposes.*
6. *Is prohibited to be directly or indirectly involved in intentionally participating in the contracting, procurement, which at the time the act was carried out, all or part of it was assigned to him to manage or supervise it.*
7. *Make a statement of potential conflicts of interest if there is a blood relationship in the nuclear family relationship with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or members of the DPS.*

Perseroan tidak memiliki laporan pelanggaran yang berkaitan dengan transaksi maupun pengelolaan benturan kepentingan yang berdampak merugikan Perseroan sepanjang tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan efektivitas Perseroan dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan internal, sekaligus menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan serta kesadaran seluruh karyawan dalam mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku di lingkungan Perseroan.

The Company received no reports of violations related to transactions or the management of conflicts of interest that adversely affected the Company throughout 2025. This reflects the Company's effectiveness in implementing and communicating internal policies, while also demonstrating the high level of compliance and awareness among all employees in adhering to the applicable rules and regulations within the Company.

Perkara Penting
Important Cases

Perseroan menghadapi 4 permasalahan dan/atau perkara hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Direksi pada tahun 2025.

The Company faced 4 legal issues and/or cases involving the Company and/or members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025.

Sanksi Administratif
Administrative Sanction

Perseroan tidak memperoleh sanksi administratif dari regulator maupun otoritas terkait lainnya sepanjang tahun 2025.

The Company did not receive any administrative sanctions from regulators or other relevant authorities throughout 2025.

Kode Etik
Code of Conduct

Perseroan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif bagi seluruh karyawan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan serta implementasi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT JPAS Nomor 0182/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2023.

The Company is strongly committed to creating a healthy, safe, and conducive work environment for all employees. This commitment is realized through the development and implementation of the Code of Business and Work Ethics (Code of Conduct), which was established pursuant to PT JPAS Board of Directors Decision No. 0182/SK/G.10/DIR-JPAS/XII/2023.

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai Etika Bisnis Perseroan serta Etika Kerja Insan Perseroan yang berfungsi sebagai acuan dalam membentuk, mengarahkan, dan menyesuaikan perilaku karyawan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Ketentuan dalam pedoman ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, baik dalam lingkungan internal perusahaan maupun dalam interaksi eksternal, guna mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan secara berkelanjutan.

These guidelines contain provisions regarding the Company's Business Ethics and the Work Ethics of the Company's personnel, serving as a reference for shaping, guiding, and aligning employee behavior in accordance with applicable ethical standards. The provisions in these guidelines are binding and must be adhered to, both within the company's internal environment and in external interactions, to support the sustainable achievement of the Company's vision and mission.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Perseroan menetapkan nilai-nilai etis yang secara tegas dijadikan standar perilaku bagi seluruh Insan Perseroan. Ketentuan pokok kode etik ini dituangkan dalam Kebijakan *Code of Conduct* (AS-POL-M1-18) yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu:
1. Etika Bisnis; dan
2. Etika Kerja.

Dalam Etika Bisnis, diatur ketentuan sebagai berikut:
1. Standar Etika yang berkaitan dengan kegiatan bisnis:
   a. Etika hubungan Perseroan dengan Pemerintah;
   b. Etika hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham;

Main Subjects of Code of Conduct

The The Company's Code of Ethics establishes ethical values that are explicitly set as standards of conduct for all Company personnel. The key provisions of this Code of Ethics are set forth in the Code of Conduct Policy (AS-POL-M1-18), which consists of two main sections, namely:
1. *Business Ethics; and*
2. *Workplace Ethics.*

The Business Ethics section contains the following provisions:
1. *Ethical Standards related to business activities:*
   a. *Ethics regarding the Company's relationship with the Government;*
   b. *Ethics regarding the Company's relationship with Shareholders;*

c. Etika hubungan Perseroan dengan Pegawai;
d. Etika hubungan Perseroan dengan Mitra Kerja;
e. Etika hubungan Perseroan dengan Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*);
f. Etika hubungan Perseroan dengan Pesaing (Kompetitor);
g. Etika hubungan Perseroan dengan Masyarakat;
h. Etika hubungan Perseroan dengan Media Massa.

2. Standar Etika antara Jajaran Manajemen dan Pegawai:
   a. Perilaku sebagai Atasan dan Bawahan;
   b. Perilaku sebagai Bawahan dan Atasan;
   c. Perilaku sebagai Rekan Kerja.

Sementara itu, dalam Etika Kerja, ketentuan yang diatur meliputi:
a. Komitmen Insan Perseroan;
b. Etika dalam menjaga nama baik Perseroan;
c. Etika dalam menjaga hubungan baik antar pegawai;
d. Etika dalam menjaga kerahasiaan data, informasi, serta aset Perseroan;
e. Etika dalam menghindari benturan kepentingan dan praktik penyuapan;
f. Etika terkait pemberian hadiah/imbalan dan jamuan bisnis;
g. Etika larangan keterlibatan dalam kegiatan politik;
h. Etika larangan penyalahgunaan kedudukan;
i. Etika penggunaan fasilitas teknologi informasi;
j. Etika terkait perilaku asusila serta penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Sosialisasi Kode Etik dan Penegakannya

Dalam rangka memastikan efektivitas internalisasi Pedoman Kode Etik, Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi materi Kode Etik kepada seluruh karyawan melalui berbagai media komunikasi internal yang tersedia. Di samping itu, penyampaian secara langsung juga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, serta jajaran manajemen eksekutif kepada unit kerja di bawah koordinasinya.

Perseroan juga menetapkan kewajiban bagi seluruh pimpinan di setiap tingkatan untuk memastikan bahwa pedoman etika bisnis dan etika kerja dipahami, dipatuhi, serta diimplementasikan secara konsisten di masing-masing unit kerja.

c. *Ethics regarding the Company's relationship with Employees;*
d. *Ethics of the Company's relationships with Business Partners;*
e. *Ethics of the Company's relationships with Goods/Services Providers (Suppliers);*
f. *Ethics of the Company's relationships with Competitors;*
g. *Ethics of the Company's relationships with the Community;*
h. *Ethics of the Company's relationships with the Media.*

2. *Ethical Standards between Management and Employees:*
   a. *Behavior as a Supervisor and Subordinate;*
   b. *Behavior as a Subordinate and Supervisor;*
   c. *Behavior as a Coworker.*

Meanwhile, regarding Work Ethics, the provisions include:

a. *Commitment of Company Personnel;*
b. *Ethics in safeguarding the Company's reputation;*
c. *Ethics in maintaining good relations among employees;*
d. *Ethics in safeguarding the confidentiality of data, information, and Company assets;*
e. *Ethics in avoiding conflicts of interest and bribery practices;*
f. *Ethics regarding the giving of gifts/rewards and business entertainment;*
g. *Ethics regarding the prohibition of involvement in political activities;*
h. *Ethics regarding the prohibition of abuse of position;*
i. *Ethics regarding the use of information technology facilities;*
j. *Ethics regarding immoral behavior and the abuse of narcotics and illegal drugs.*

Dissemination of Code of Conduct and its Enforcement

To ensure the effective internalization of the Code of Ethics Guidelines, the Company continuously disseminates information regarding the Code of Ethics to all employees through various available internal communication channels. In addition, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and executive management also provide direct briefings to the work units under their coordination.

The Company also mandates that all leaders at every level ensure that business ethics and work ethics guidelines are understood, adhered to, and consistently implemented within their respective work units.

Pemberlakuan dan Penerapan Kode Etik Bagi Seluruh Level Jabatan

Perseroan menumbuhkan kesadaran kolektif di seluruh insan perusahaan bahwa keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan setiap elemen organisasi, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Sebagai wujud komitmen atas pemahaman, kepatuhan, dan implementasi Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta karyawan diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas setiap tahun.

Enforcement and Application of Code of Conduct For All Levels of Position

The Company fosters a collective awareness among all members of the organization that the successful implementation of the Code of Ethics is a shared responsibility involving every element of the organization, including the Board of Commissioners and the Board of Directors.

As a demonstration of their commitment to understanding, complying with, and implementing the Business Ethics and Work Ethics Guidelines, all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees are required to sign an integrity pact annually.

Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan berbagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja. Setiap karyawan yang mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran Kode Etik dapat melaporkan temuan tersebut secara langsung kepada pimpinan unit kerja atau bagian terkait dengan tembusan kepada Direksi.

Selanjutnya, setiap pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Insan Perusahaan yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran *Code of Conduct* harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Jika laporan benar, pelapor tidak dikenakan sanksi atau hukuman apapun, namun apabila pelapor juga terlibat dalam pelanggaran tersebut dan/atau laporannya terbukti palsu, maka pelapor dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Atasan langsung harus menindaklanjuti laporan tersebut dan segera melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Atasan langsung secara proaktif meneliti dan mengawasi seluruh pegawai yang mungkin terkait dengan pelanggaran *Code of Conduct* tanpa menunggu laporan tentang dugaan pelanggaran *Code of Conduct* dari pegawai/ pelapor maupun berdasarkan informasi dari pihak luar Perusahaan.

Enforcement and Sanctions For Code of Conduct Violations

The Company has established various forms of sanctions for violations of the Code of Ethics, commensurate with the severity of the violation, as stipulated in the Business and Work Ethics Guidelines. Any employee who becomes aware of or suspects a violation of the Code of Ethics may report such findings directly to the head of the relevant work unit or department, with a copy to the Board of Directors.

Furthermore, every violation of the Code of Conduct will be addressed in accordance with applicable regulations, taking into account the following matters:

1. *Every Company Personnel who report suspected violations of the Code of Conduct shall attached their identity clearly.*
2. *The Company shall be maintained the confidentiality of the rapporteur's identity, except if necessary, in following up on the report in accordance with Company policy.*
3. *If the report is true, the rapporteur is not subject to any sanctions or penalties, but if the rapporteur is also involved in the violation and/or the report is proven false, then the rapporteur is subject to sanctions in accordance with prevailing regulations.*
4. *Direct superiors should follow up on the report and immediately reported to the Board of Directors to take action in accordance with prevailing regulations.*
5. *Direct supervisors proactively examine and supervise all employees who may be related to the Code of Conduct's violations without waiting for a report on the alleged violation of the Code of Conduct from the employee/rapporteur or based on information from parties outside the Company.*

Mekanisme dan Proses Penanganan Pengaduan

Setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti secara profesional melalui proses evaluasi dan pemeriksaan yang komprehensif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi dianalisis secara objektif sehingga pihak yang berwenang dapat menentukan tingkat pelanggaran serta menetapkan tindakan disipliner yang sesuai.

Mechanisms and Processes of Handling Complaint

Every report of a suspected violation received will be professionally addressed through a comprehensive evaluation and investigation process. This step is taken to ensure that all information is analyzed objectively so that the relevant authorities can determine the severity of the violation and impose appropriate disciplinary measures.

Penanganan kasus pelanggaran berada di bawah tanggung jawab Divisi SDM dan Umum yang bertugas melakukan kajian serta verifikasi atas setiap laporan yang masuk. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Komite Personalia untuk dirumuskan menjadi rekomendasi tindakan, seperti pembinaan, pemberian sanksi disiplin, atau langkah perbaikan lainnya. Rekomendasi tersebut selanjutnya ditelaah oleh Direktur Keuangan guna memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan Perseroan, sebelum akhirnya ditetapkan keputusan akhir oleh Direktur Utama.

The handling of violation cases falls under the responsibility of the Human Resources and General Affairs Division, which is tasked with reviewing and verifying every report received. The results of the investigation are then submitted to the Personnel Committee to be formulated into recommendations for action, such as counseling, the imposition of disciplinary sanctions, or other corrective measures. These recommendations are subsequently reviewed by the Chief Financial Officer to ensure their compliance with the Company's policies and regulations, before a final decision is ultimately made by the Chief Executive Officer.

Dalam hal diperlukan pendalaman lebih lanjut atas suatu kasus sebelum keputusan sanksi ditetapkan, Direktur Utama berwenang untuk menugaskan Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan investigasi tambahan. Hasil investigasi tersebut kemudian dilaporkan kembali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Keuangan dan Komite Personalia, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan dalam proses penanganan pelanggaran.

If further investigation of a case is required before a sanction decision is made, the CEO has the authority to assign the Internal Audit Unit (SPI) to conduct an additional investigation. The results of this investigation are then reported back to the CEO with copies to the Chief Financial Officer and the Personnel Committee, as a commitment to transparency and fairness in the process of handling violations.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2025

Perseroan tidak memiliki laporan terkait pelanggaran atas Kode Etik sepanjang tahun 2025.

Total Code of Conduct Violations in 2025

The Company received no reports of violations of the Code of Ethics throughout 2025.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Perseroan memahami bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan menyeluruh merupakan hal yang penting dalam setiap aspek kegiatan operasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Sejalan dengan upaya tersebut, Perseroan terus berkomitmen membangun hubungan industrial yang sehat dan harmonis antara perusahaan dan karyawan, serta menjalankan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan praktik korporasi yang baik.

The Company recognizes that the consistent and comprehensive application of Good Corporate Governance (GCG) principles is essential in every aspect of its operations. This is done to ensure the Company's long-term sustainability. In line with these efforts, the Company remains committed to fostering healthy and harmonious industrial relations between the Company and its employees, as well as conducting all business activities in accordance with sound corporate practices.

Dalam rangka memperkuat implementasi nilai-nilai yang tertuang dalam Pedoman Kode Etik, Perseroan telah menetapkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0034/SK/G.10/DIR-JPAS/VI/2022. Pedoman ini menjadi acuan dan mekanisme bagi seluruh karyawan untuk melaporkan setiap dugaan perilaku tidak etis, baik yang telah terjadi maupun masih berupa indikasi kecurangan atau pelanggaran terhadap Kode Etik Perseroan.

To strengthen the implementation of the values outlined in the Code of Ethics Guidelines, the Company has established the Whistleblowing System Guidelines through Board of Directors Decision No. 0034/SK/G.10/DIR-JPAS/VI/2022. These guidelines serve as a reference and mechanism for all employees to report any suspected unethical behavior, whether it has already occurred or is merely an indication of fraud or a violation of the Company's Code of Ethics.

Melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran tersebut, Perseroan mendorong seluruh karyawan untuk lebih responsif dan proaktif dalam melaporkan setiap indikasi tindakan kecurangan, pelanggaran hukum, ketentuan perusahaan, kode etik, maupun benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perseroan. Pelaporan dapat dilakukan secara aman tanpa rasa takut, selama disertai dengan bukti awal yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Ruang lingkup pelaporan atau pengungkapan yang dapat diproses lebih lanjut oleh Tim mencakup, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap perusahaan akibat terjadinya Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penyuapan.
2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Askrindo Syariah maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara/lainnya.
3. Peraturan internal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
4. Permasalahan Akuntansi dan pengendalian intern atas Laporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
5. Permasalahan yang menyangkut independensi audit, baik oleh Internal Audit maupun oleh Eksternal Audit.
6. Perilaku Insan Perusahaan yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi perusahaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
7. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan.
8. Perbuatan yang melanggar etika, susila dan norma keProseduranan.

Pihak Pengelola Laporan

Adapun pihak-pihak yang berperan dalam proses penanganan laporan pengaduan melalui WBS, antara lain:

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

1. Melakukan pengawasan dan penasehatan atas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
2. Memastikan bahwa laporan pelanggaran terlapor Direksi sudah ditindaklanjuti.
3. Memberikan pengarahan kepada Direksi atas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
4. Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pengaduan dugaan pelanggaran kepada Menteri Negara BUMN.

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor Direksi.
2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran terlapor Direksi.

Through the implementation of this whistleblowing system, the Company encourages all employees to be more responsive and proactive in reporting any indications of fraudulent acts, violations of the law, company regulations, the Code of Ethics, or conflicts of interest occurring within the Company. Reports can be made safely and without fear, provided they are accompanied by sufficient and verifiable preliminary evidence.

Types of Violations That Can Be Reported

The scope of reporting or disclosure that can be further processed by the Team includes the following:

1. *Acts that can cause financial or non-financial losses to the company due to Corruption, Collusion, Nepotism and Bribery.*
2. *Violation of laws and regulations both related to the implementation of the Askrindo Syariah program as well as those related to the laws and regulations of State-Owned Enterprises/others.*
3. *Internal regulations that have the potential to cause harm to the Company.*
4. *Accounting problems and internal control over financial statements that have the potential to result in material misstatements in the financial statements.*
5. *Issues concerning audit independence, both by Internal Audit and by External Audit.*
6. *Disrespectful behavior of the Company's personnel that has the potential to tarnish the reputation of the company and/or which results in losses for the company.*
7. *Misuse of position for other interests outside the company.*
8. *Acts that violate ethics, morality and decency norms.*

Reporting Manager

The parties involved in the process of handling complaints submitted through the WBS include:

Board of Commissioners

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners in implementing the Whistleblowing System, including:

1. *Supervise and advise on the implementation of theWhistleblowing System.*
2. *Ensure that reports of violations reported by the Board of Directors have been followed up.*
3. *Provide direction to the Board of Directors on the implementation of the Whistleblowing System.*
4. *Provide suggestions/recommendations for follow-up on reports of alleged violations to the State Minister for SOEs.*

Audit Committee

Duties and responsibilities of the Audit Committee in implementing the Whistleblowing System, including:

1. *Review complaints related to the reported Directors.*
2. *Carry out an examination of the reported violations of the Board of Directors.*

3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
5. Membuat laporan posisi tindak lanjut laporan pengaduan kepada Dewan Komisaris.

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

1. Memastikan telah dilaksanakannya Sistem Pelaporan Pelanggaran secara efektif.
2. Memastikan bahwa laporan pelanggaran terlapor karyawan sudah ditindaklanjuti.
3. Mendorong untuk dilaksanakan sosialisasi berkelanjutan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran.
4. Menjamin identitas pelapor dan memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor.

Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Internal dalam penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, meliputi:

1. Menerima perintah dari Direktur Utama untuk melaksanakan investigasi dan pemeriksaan terlapor karyawan.
2. Melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama.
4. Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan penghargaan bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang terbukti kebenarannya.
5. Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan sanksi bagi pelapor atas laporan pelanggaran yang tidak terbukti kebenarannya.
6. Melaksanakan administrasi dan laporan atas kegiatan yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
7. Membuat laporan posisi tindak lanjut laporan pengaduan kepada Direktur Utama.

Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan serta kesesuaian dengan kebutuhan Perseroan, Direksi dapat membentuk Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran yang bertugas menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Tim ini terdiri atas perwakilan Satuan Pengawasan Internal, Divisi Sumber Daya Manusia, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola, serta Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan.

Adapun tanggung jawab Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran terkait kasus penyuapan mencakup, antara lain:

1. Mensyaratkan penilaian dan jika diperlukan, penyelidikan terhadap setiap penyuapan, atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan, yang dilaporkan, terdeteksi atau layak diduga.

3. *Submit a report on the results of the examination to the Board of Commissioners.*
4. *Carry out administration and reports on activities related to the Whistleblowing System.*
5. *Make a position report on the follow-up to the complaint report to the Board of Commissioners.*

Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors in implementing the Whistleblowing System include:

1. *Ensure that the Whistleblowing System has been implemented effectively.*
2. *Ensure that the reported employee violation reports have been followed up.*
3. *Encourage continuous socialization of the Whistleblowing System to be carried out.*
4. *Guarantee the identity of the reporter and provide protection to witnesses and reporters.*

Internal Control Unit

The duties and responsibilities of the Internal Control Unit in implementing the Whistleblowing System, include:

1. *Receive orders from the President Director to carry out investigations and inspections of reported employees.*
2. *Conduct investigations and collect evidence as well as examine the substance of the reported violations.*
3. *Submit a report on the results of the examination to the President Director.*
4. *Propose to the President Director to reward the whistleblower for a proven violation report.*
5. *Propose to the President Director to impose sanctions on the whistleblower for reports of violations that are not proven to be true.*
6. *Carry out administration and reports on activities related to the Whistleblowing System.*
7. *Make a position report on the follow-up to the complaint report to the President Director.*

Whistleblowing System Management Team

To ensure the effectiveness of implementation and alignment with the Company's needs, the Board of Directors may establish a Whistleblowing System Management Team tasked with receiving and following up on all incoming reports. This team consists of representatives from the Internal Audit Unit, the Human Resources Division, the Risk Management, Compliance, and Governance Unit, and the Corporate Secretary Unit.

The responsibilities of the Whistleblowing System Management Team regarding bribery cases include, among others:

1. *Requires an assessment and if necessary, an investigation of any bribery, or violations of the anti-bribery policy or of the anti-bribery management system, that are reported, detected or reasonably suspected.*

2. Mensyaratkan tindakan yang tepat ketika penyelidikan mengungkapkan setiap penyuapan, atau pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan.
3. Memberdayakan dan mengaktifkan penyidik (*investigator*).
4. Mensyaratkan kerja sama dalam penyelidikan dengan personal yang relevan.
5. Mensyaratkan status dan hasil penyelidikan dilaporkan kepada Direksi.
6. Mensyaratkan agar penyelidikan dilakukan secara rahasia dan hasil penyelidikan bersifat rahasia.

Mekanisme Penanganan Pengaduan

1. Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran oleh Insan Perusahaan atau terlapor melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Satuan Pengawasan Internal menerima dan menyeleksi pengaduan yang diterima dan melaporkan kepada Direktur Utama
3. Pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran dalam hal terlapor adalah Direksi kepada Dewan Komisaris
4. Direktur Utama menetapkan terlapor dan menindaklanjuti laporan pelanggaran kepada:
   a. Pemegang Saham apabila terlapor Dewan Komisaris.
   b. Dewan Komisaris apabila terlapor Direksi.

   c. Satuan Pengawasan Internal apabila terlapor Karyawan.
5. Pemegang Saham dan Dewan Komisaris menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan investigasi apabila terlapor karyawan
   a. Melakukan *interview* kepada pelapor dan memastikan kecukupan bukti untuk ditindaklanjuti.
   b. Melakukan pemeriksaan kepada terlapor dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama.
   c. Direktur Utama dan/atau Direksi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Internal.
7. Satuan Pengawasan Internal membuat laporan posisi tindak lanjut pelanggaran Karyawan kepada Direktur Utama yang meliputi antara lain jumlah pengaduan, saluran pelaporan yang digunakan oleh pelapor dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

2. *Requires appropriate action when an investigation reveals any bribery, or violation of the anti-bribery policy or anti-bribery management system.*

3. *Empower and activate investigators (investigators).*

4. *Requires cooperation in investigations with relevant personnel.*
5. *Requires the status and results of the investigation to be reported to the Board of Directors.*
6. *Requires that the investigation be carried out in secret and the results of the investigation are confidential.*

Complaint Handling Mechanism

1. *The Whistleblower submits the alleged violation by the Company's Personnel or the reported person through the reporting channel that has been determined by the company.*
2. *The Internal Audit Unit receives and selects complaints received and reports to the President Director*

3. *The Whistleblower may convey the alleged violation in the event that the reported party is the Board of Directors to the Board of Commissioners*
4. *The President Director determines the reported party and follows up on the violation report to:*
   a. *Shareholders if reported to the Board of Commissioners.*
   b. *Board of Commissioners if reported to the Board of Directors.*
   c. *Internal Control Unit if the employee is reported*

5. *Shareholders and the Board of Commissioners follow up on reports of violations in accordance with their respective authorities.*
6. *The Internal Control Unit carries out an investigation if an employee is reported*
   a. *Conducting interviews with reporters and ensuring the adequacy of evidence for follow-up.*
   b. *Conducting inspections to the reported party and submitting the report on the results of the examination to the President Director.*
   c. *The President Director and/or the Board of Directors follow up on the report on the results of the Internal Audit Unit inspection.*
7. *The Internal Control Unit makes a report on the position of follow-up on employee violations to the President Director which includes, among other things, the number of complaints, the reporting channel used by the complainant and the follow-up that has been carried out.*

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan berbagai sarana pelaporan untuk penyampaian pengaduan pelanggaran, yang dapat dilakukan melalui:

- Telepon *Direct* :+62 816 1777 7630
- SMS :+62 816 1777 7630
- WA :+62 816 1777 7630
- E-mail : wbs@askrindosyariah.co.id
- Surat : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- Lainnya :Sarana pelaporan lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

Perlindungan Bagi Pelapor

1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Pelapor mendapatkan perlindungan antara lain:
   a. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.
   b. Mengizinkan pelaporan tanpa nama.
   c. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
   d. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal perusahaan.
3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset atau menjaga reputasi perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/*reward* kepada Pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.

Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran

1. Setiap sikap, perilaku, tindakan Insan Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma etika merupakan pelanggaran.

Violation Report Channel

The Company provides various reporting channels for submitting complaints regarding violations, which can be done through:

- *Direct Phone :+62 816 1777 7630*
- *SMS :+62 816 1777 7630*
- *WA :+62 816 1777 7630*
- *E-mail :wbs@askrindosyariah.co.id*
- *Letter :Whistleblowing System Team PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*
- *Others :Other reporting channel determined by the Company.*

Protection For The Reporter

1. *The company has a clear and impartial commitment to support and protect all whistleblowers who inform the company of violations that occur in the company. The whistleblower gets protection, among others:*
   a. *The identity of the Whistleblower is guaranteed by the Company.*
   b. *Allow anonymous reporting.*
   c. *The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, retaliation, discrimination or disciplinary action against reports made in good faith or on the basis of a reasonable belief from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to any party.*
   d. *Protection against whistleblowers also applies to parties conducting investigations and parties providing information related to the complaint/ disclosure.*
2. *Protection and confidentiality guarantees are not provided to the Whistleblower who is proven to have made a false report and/or slander. If the results of the investigation conclude and it can be proven that the submitted report contains false reports, slander, without a clear basis, the Whistleblower can be sued back or be subject to sanctions in accordance with the laws and regulations or the company's internal regulations.*
3. *If the results of the investigation conclude and it can be proven that the reporting submitted by the Whistleblower contains the truth and can return money/assets or maintain the company's reputation, then the Company will give awards/rewards to the Whistleblower in accordance with the Company's internal regulations.*

Violation and Sanction

Violation

1. *Every attitude, behavior, action of the Company's personnel that is not in accordance with applicable regulations and ethical norms is a violation.*

2. Setiap Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran merupakan pelanggaran.
3. Terhadap pelanggaran Insan Perusahaan yang diduga mengandung unsur melawan hukum, tindak pidana atau pelanggaran perdata dapat diteruskan kepada lembaga yang berwenang menangani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sanksi kepada Insan Perusahaan

1. Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan Insan Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma etika dikenakan sanksi moral dan administratif.
2. Sanksi moral dapat ditetapkan oleh pengelola sistem pelaporan pelanggaran.
3. Sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Askrindo Syariah.

Evaluasi dan Sosialisasi *Whistle Blowing System*

Guna menjamin efektivitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi serta menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh insan Perseroan maupun para pemangku kepentingan.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan secara rutin melakukan peninjauan terhadap implementasi sistem pelaporan pelanggaran untuk memastikan kesesuaian dan relevansi pedoman dengan kebutuhan operasional serta menilai tingkat efektivitas penerapannya. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan pedoman sistem pelaporan pelanggaran secara berkelanjutan, termasuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun perubahan anggaran dasar yang terkait dengan sistem pelaporan pelanggaran.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam upaya menyamakan persepsi serta mengurangi potensi perbedaan pemahaman individu terhadap penerapan pedoman sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan perusahaan, Perseroan secara berkesinambungan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada pihak internal maupun eksternal, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap sistem pelaporan pelanggaran harus dijadikan acuan oleh Insan Perusahaan maupun oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Pemahaman sistem pelaporan pelanggaran diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan capain kinerja yang lebih baik secara terus menerus dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait.

2. *Any Violation Reporting System Manager who does not carry out his duties properly and does not follow up on reports of violations is a violation.*
3. *The violation of the Company's Personnel which is suspected to contain elements of against the law, criminal acts or civil violations can be forwarded to the authorized institution to handle it in accordance with the provisions of the legislation.*

Sanctions to Company's Individual

1. *Attitudes, behavior, actions and words of the Company's Personnel that are not in accordance with applicable regulations and ethical norms are subject to moral and administrative sanctions.*
2. *Moral sanctions can be set by the manager of the violation reporting system.*
3. *Administrative sanctions as stipulated in the Askrindo Syariah Company Regulations.*

Evaluation and Socialization of Whistleblowing System WBS

To ensure the effective implementation of the whistleblowing system, the Company conducts regular evaluations and provides ongoing training to all employees and stakeholders.

Evaluation of the Implementation of the Whistleblowing System

The Company regularly reviews the implementation of its whistleblowing system to ensure that the guidelines remain appropriate and relevant to operational needs, and to assess the effectiveness of their implementation. Based on the results of these reviews, the Company is committed to continuously improving and developing the guidelines for the whistleblowing system, including making adjustments to changes in laws and regulations as well as amendments to the Articles of Association related to the whistleblowing system.

Whistleblowing System Socialization

In an effort to align perceptions and reduce potential differences in understanding regarding the implementation of the whistleblowing system guidelines within the company, the Company continuously conducts outreach activities for both internal and external parties, subject to the following conditions:

1. *The understanding of the whistleblowing system must be used as a reference by the Company's Individuals as well as by all Stakeholders. An understanding of the whistleblowing system is needed by the company to continuously improve the achievement of better performance while taking into account the interests of the parties involved.*

2. Bagi pihak internal, sosialisasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen Insan Perusahaan untuk melaporkan apabila diketahui terdapat indikasi maupun potensi penyimpangan dan pelanggaran di lingkungan perusahaan.
3. Bagi pihak eksternal, sosialisasi diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terwujud proses bisnis yang sehat serta terbebaskan aktivitas perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.
4. Sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Insan Perusahaan maupun pihak lain mengetahui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran.

2. For internal parties, socialization is directed at increasing understanding and growing awareness and commitment of the Company's individuals to report if it is known that there are indications or potential deviations and violations within the company.

3. For external parties, socialization is directed at providing an understanding of the whistleblowing system established by the company, so that healthy business processes are realized and ensures that the company's activities are free from activities that can harm the company.
4. Continuous socialization is carried out to facilitate and ensure that all Company's Individuals and other parties are aware of the Whistleblowing System.

Pernyataan Anti-Gratifikasi, Korupsi, dan Penyuapan

Statements of Anti-Gratification, Corruption, and Bribery

Perseroan senantiasa menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, suap, dan gratifikasi. Dalam rangka mendukung komitmen tersebut, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi program pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company consistently upholds the principles of good corporate governance, including a commitment to creating a work environment free from corruption, bribery, and gratuities. To support this commitment, the Company continuously conducts awareness campaigns regarding its gratuity control program in accordance with applicable laws and regulations.

Sesuai dengan ketentuan dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris serta pejabat satu tingkat di bawah Direksi dilarang untuk memberikan, menawarkan, maupun menerima pemberian dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari pejabat pemerintah maupun pihak lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan atau sebagai imbalan atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

In accordance with the provisions of the Board Manual, members of the Board of Commissioners and officers one level below the Board of Directors are prohibited from giving, offering, or receiving gifts of any kind, whether directly or indirectly, to or from government officials or other parties that could influence decision-making or as a reward for actions contrary to legal provisions.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaan pribadi kepada instansi pemerintah yang berwenang sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

In addition, the Board of Commissioners and the Board of Directors are also required to report their personal assets to the relevant government authorities as a form of implementing the principles of transparency and accountability.

Pernyataan Penolakan Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Declaration of Prohibition to Fund Political Activities

Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat satu tingkat di bawah Direksi tidak diperkenankan menanggapi maupun memenuhi permintaan sumbangan dari pihak mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini mencakup permintaan dari pejabat atau pegawai instansi pemerintah, partai politik, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan tersebut ditetapkan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan, serta mencegah timbulnya konflik kepentingan, praktik korupsi, maupun penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan operasional secara profesional, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials one level below the Board of Directors are not permitted to respond to or comply with requests for donations from any party, whether directly or indirectly. This provision covers requests from officials or employees of government agencies, political parties, or other parties associated with the Company's activities, particularly those related to the procurement of goods and services.

This policy is established to maintain integrity and transparency in all of the Company's business activities, as well as to prevent conflicts of interest, corrupt practices, and abuse of authority. Thus, the Company is committed to conducting its operations professionally, complying with applicable laws and regulations, and building trust among all stakeholders.

07



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance Highlights

Ikhtisar Kinerja Ekonomi

Economic Performance Highlights

(Dalam juta Rupiah / *In million Rupiah*)

Keterangan *Description*	Satuan *Unit*	2025	2024	2023
Jumlah Produk dan Layanan yang Ditawarkan *Total Offered Products and Services*				
Produk/Layanan *Produkcts/Services*	Aktivitas I *Activities*	4	4	4
Kinerja Keuangan *Finansial Performance*				
Pendapatan Kafalah Bersih *Net Kafalah Income*	Rp Juta I *Million*	206.580	196.672	224.307
Laba Bersih Tahun Berjalan *Net Income for the Year*	Rp Juta I *Million*	163.183	*136.795*	154.368
Jumlah Aset *Total Assets*	Rp Juta I *Million*	3.279.004	2.986.402	2.550.858
Jumlah Liabilitas *Total Liabilities*	Rp Juta I *Million*	2.110.487	1.989.842	1.683.930
Jumlah Ekuitas *Total Equity*	Rp Juta I *Million*	1.168.517	996.560	866.928
Nilai Ekonomi yang Ditahan *Retained Economic Value*	Rp Juta I *Million*	103.376	98.089	129.434

Ikhtisar Kinerja Lingkungan

Environmental Performance Highlights

Keterangan *Description*	Satuan *Unit*	2025	2024	2023
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Dihasilkan *Generated Greenhouse Gas (GHG) Emission*				
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Cakupan 1 yang Dihasilkan *Generated Greenhouse Gas (GHG) Emission Scope 1*	TonCo2-eq	404,31	415,62	404,31
Emisi GRK Cakupan 2 yang Dihasilkan *Generated GHG Emission Scope 2*	TonCo2-eq	29,79	23,834	29,79
Jumlah Emisi GRK yang Dihasilkan *Total Generated GCG Emission*	TonCo2-eq	374,52	439,45	434,10
Pengurangan Emisi GRK yang Dihasilkan* *Reduction of Generated GCG Emission**	TonCo2-eq	(63,93)	5,09	(720,66)

Ikhtisar Kinerja Sosial

Social Performance Highlights

Keterangan *Description*	Satuan *Unit*	2025	2024	2023
Kecelakaan Kerja *Work Accident*	Kasus *Case*	Nihil *None*	Nihil *None*	Nihil *None*
Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) *Corporate Social Responsibility (CSR) Fund*	Juta Rupiah *Million Rupiah*	547	229	220
Customer Satisfaction Index (CSI) *Customer Satisfaction Index (CSI)*	Persen *Percent*	95,46	92,76	91,51
Pengaduan Nasabah yang Masuk dan Telah Selesai *Customer Complaint Received and Resolved*	Kasus *Case*	9	8	37

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Report

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan lingkungan sebaga bentuk tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program Keberlanjutan, Perseroan berpedoman pada:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
6. Pedoman CSR Bidang Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Informasi mengenai pencapaian kinerja dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan disampaikan secara terpisah dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2025.

Namun demikian, laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Tahun 2025.

The Company is committed to developing its business not only from an economic perspective, but also by prioritizing social and environmental aspects as part of its responsibility in supporting sustainable development. In implementing its sustainability programs, the Company is guided by the following regulations and standards:

1. *Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection*
2. *Law No. 13 of 2003 concerning Manpower*
3. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies*
4. *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies*
6. *CSR Environmental Guidelines issued by the Ministry of Environment*

Information regarding the Company's performance achievements and implementation of social and environmental responsibility is presented separately in the 2025 Sustainability Report.

However, this report remains an integral and inseparable part of the 2025 Annual Report.

08



Laporan Keuangan

Financial Report

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024

Daftar Isi | **Halaman/ *Page*** | ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi — ***Directors' Statement Letter***

Laporan Auditor Independen — ***Independent Auditors' Report***

Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 — ***Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024***

Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	3	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	4	*Statements of Cash Flows*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5	*Statements of Sources and Distributions of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6	*Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	7	*Notes to the Financial Statements*

Danantara Indonesia

ASKRINDO Syariah

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama/ *Name*	:	Kokok Alun Akbar
Alamat Kantor/ *Office Address*	:	Menara Jamsostek (Menara Utara) Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12710
No. Telepon/ *Phone Number*	:	021-3517525
Jabatan/ *Title*		Direktur Utama/ *President Director*
Nama/ *Name*	:	Aviantono Yudihariadi
Alamat Kantor/ *Office Address*	:	Menara Jamsostek (Menara Utara) Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12710
No. Telepon/ *Phone Number*	:	021-3517525
Jabatan/ *Title*	:	Direktur Keuangan/ *Finance Director*

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS AS AT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

We, the undersigned:

declare that :

1. *Responsible for the preparation and the presentation of the Company's Financial Statement;*
2. *The Company's Financial Statements has been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's Financial Statements;*
   b. *The Company's Financial Statements does not contain any material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts;*
4. *Responsible for the Company's internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 13 Maret 2026/
Jakarta, March 13, 2026

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors*



Kokok Alun Akbar	Aviantono Yudihariadi
Direktur Utama/	Direktur Keuangan/
President Director	*Finance Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00222/2.1030/AU.1/09/1481-1/1/III/2026

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("the Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distributions of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Informasi lain
Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami, membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards on Auditing established by IAPI.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Adrian Adisetyo Winoto
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1481/
Public Accountant License Number: AP.1481

Jakarta, 13 Maret 2026/*March 13, 2026*

00222

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
Kas dan bank	4, 35	23,870	23,869	*Cash on hand and in banks*
Investasi	5, 35	2,375,793	2,039,313	*Investments*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	6, 35	50,000	80,000	*Time deposits for certain purposes*
Piutang imbal jasa *kafalah* - bersih	7, 35	1,915	5,429	*Kafalah fee receivables - net*
Piutang penjaminan ulang - bersih	8, 35	60,720	43,219	*Re-guarantee receivables - net*
Piutang hasil investasi	9, 35	27,280	24,773	*Investment income receivables*
Biaya dibayar dimuka		827	1,325	*Prepaid expenses*
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	11	36,129	34,781	*Deferred acquisition costs*
Aset penjaminan ulang	12	647,000	682,327	*Re-guarantee assets*
Aset tetap - bersih	13	28,516	33,000	*Fixed assets - net*
Aset tidak berwujud - bersih		2,255	2,909	*Intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	10c	22,839	13,873	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain		1,860	1,584	*Other assets*
JUMLAH ASET		**3,279,004**	**2,986,402**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Utang *ta'widh*	14	214	125	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	15, 35	33,327	35,820	*Re-guarantee payables*
Utang pajak	10a	10,055	2,158	*Taxes payables*
Cadangan *ta'widh*	16	437,877	367,625	*Ta'widh reserves*
Cadangan imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan	17	1,402,018	1,356,458	*Unearned kafalah fees*
Pendapatan komisi yang ditangguhkan	18	130,883	137,381	*Deferred commission income*
Liabilitas imbalan kerja	19	246	134	*Employee benefit liabilities*
Akrual dan utang lain-lain	20	95,867	90,141	*Accruals and other payables*
JUMLAH LIABILITAS		**2,110,487**	**1,989,842**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 400.000 saham Modal ditempatkan dan disetor - 400.000 saham	21	400,000	400,000	*Share capital - Rp1,000,000 (full amount) par value per share* *Authorised - 400,000 shares* *Issued and paid-up 400,000 shares*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		(8,398)	(8,203)	*Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	5	23,234	(7,785)	*Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		590,498	476,910	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		163,183	135,638	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		1,168,517	996,560	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**3,279,004**	**2,986,402**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
PENDAPATAN *KAFALAH*				***KAFALAH INCOME***
Imbal jasa *kafalah* bruto	23	834,065	820,650	*Gross kafalah fees*
Premi penjaminan ulang	24, 35	(220,622)	(231,067)	*Re-guarantee premiums*
Kenaikan cadangan imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan	25	(74,517)	(152,984)	*Increase in unearned kafalah fees*
Jumlah pendapatan *kafalah*		538,926	436,599	***Total kafalah income***
BEBAN *KAFALAH*				***KAFALAH EXPENSES***
Beban *ta'widh*	26, 35	(561,289)	(376,115)	*Ta'widh expenses*
Ta'widh penjaminan ulang	27, 35	178,340	139,399	*Re-guarantee ta'widh*
Beban komisi	28	(24,493)	(23,081)	*Commission expenses*
Komisi penjaminan ulang	29	71,342	66,992	*Re-guarantee commissions*
Pendapatan subrogasi	30, 35	83,357	46,117	*Subrogation income*
Kenaikan *cadangan ta'widh*	31	(76,622)	(91,389)	*Increase in ta'widh reserves*
Beban *kafalah* lain		(2,981)	(1,850)	*Other kafalah expenses*
Jumlah beban *kafalah*		(332,346)	(239,927)	***Total kafalah expense***
Pendapatan *kafalah* bersih		206,580	196,672	***Net kafalah income***
Pendapatan investasi	32, 35	153,658	123,131	*Investment income*
Beban usaha	33, 35	(147,950)	(139,710)	*Operating expenses*
Beban lain-lain - bersih	34, 35	(21,556)	(15,407)	*Other expenses - net*
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK		190,732	164,686	***PROFIT BEFORE ZAKAT AND INCOME TAX***
Zakat	36	(4,768)	(4,117)	*Zakat*
LABA SEBELUM PAJAK		185,964	160,569	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10b			***INCOME TAX EXPENSES***
Beban pajak kini		(31,693)	(24,935)	*Current income tax*
Manfaat pajak tangguhan		8,912	1,161	*Deferred tax benefit*
Jumlah beban pajak penghasilan		(22,781)	(23,774)	***Total income tax expenses***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		163,183	136,795	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain				*Other comprehensive income*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali imbalan kerja	19	(250)	21	*Remeasurements of - employee benefits*
- Efek pajak terkait	10c	55	(5)	*Related tax effect -*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
- Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	5	31,019	(6,022)	*Unrealised gain/(loss) on - marketable securities through other comprehensive income, after tax*
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lainnya		30,824	(6,006)	*Other comprehensive income/(loss)*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**194,007**	**130,789**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN OF EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital* Rp	(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak/ *Unrealised (loss)/gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax* Rp	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax* Rp	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity* Rp	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated* Rp		
SALDO PER 1 JANUARI 2024		**400,000**	**(1,763)**	**(8,219)**	**322,542**	**154,368**	**866,928**	***BALANCE AS OF JANUARY 1, 2024***
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	136,795	136,795	*Net profit for the year*
Pembentukan cadangan umum	21	--	--	--	154,368	(154,368)	--	*Allowances for general reserve*
Dividen	22	--	--	--	--	(1,157)	(1,157)	*Dividend*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	5	--	(6,022)	--	--	--	(6,022)	*Unrealised gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak		--	--	16	--	--	16	*Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*
SALDO PER 31 DESEMBER 2024		**400,000**	**(7,785)**	**(8,203)**	**476,910**	**135,638**	**996,560**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2024***
Laba bersih tahun berjalan		--	--	--	--	163,183	163,183	*Net profit for the year*
Pembentukan cadangan umum	21	--	--	--	113,588	(113,588)	--	*Allowances for general reserve*
Dividen	22	--	--	--	--	(22,050)	(22,050)	*Dividend*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	5	--	31,019	--	--	--	31,019	*Unrealised loss on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak				(195)			(195)	*Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax*
SALDO PER 31 DESEMBER 2025		**400,000**	**23,234**	**(8,398)**	**590,498**	**163,183**	**1,168,517**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2025***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari kafalah		675,937	663,707	*Kafalah receipts*
Penerimaan kas dari hasil investasi		134,983	113,306	*Investment income receipts*
Penerimaan kas dari lain-lain		83,357	46,117	*Other receipts*
Pengeluaran beban kafalah		(424,494)	(243,652)	*Payment for kafalah expenses*
Pengeluaran untuk beban usaha		(131,929)	(127,127)	*Payment for operating expenses*
Pengeluaran untuk pajak penghasilan		(23,796)	(25,537)	*Payment for income taxes*
Pengeluaran untuk zakat		(6,936)	(6,306)	*Payment for zakat*
Pengeluaran lain-lain		(9,504)	(23,593)	*Payment for others*
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		**297,618**	**396,915**	***Net cash flows generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penempatan deposito berjangka		(1,937,800)	(866,850)	*Time deposits investment*
Pencairan deposito berjangka		1,796,000	914,600	*Time deposits redemption*
Penempatan sukuk		(986,300)	(567,573)	*Placement of sukuk*
Pencairan sukuk		818,685	182,286	*Redemption of sukuk*
Penempatan reksa dana		(75,000)	(55,000)	*Placement of mutual funds*
Pencairan reksa dana		95,122	15,000	*Redemption of mutual funds*
Penambahan aset tetap		(8,894)	(13,598)	*Acquisition of fixed assets*
Penambahan aset tidak berwujud		(324)	(184)	*Acquisition of intangible assets*
Pelepasan aset lain-lain		(275)	1,908	*Disposal of other assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(298,786)**	**(389,411)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran untuk sewa		(5,624)	(4,782)	*Payment for lease*
Pembayaran dividen		(23,207)	--	*Payment of dividends*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(28,831)**	**(4,782)**	***Net cash flows used in financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(29,999)	2,722	***NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4	103,869	101,147	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	**73,870**	**103,869**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas dan bank	4	23,870	23,869	*Cash on hand and in banks*
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu	5	50,000	80,000	*Time deposits for certain purposes*
		73,870	**103,869**	

* Lihat Catatan 39 untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas.

** See Note 39 for the additional cash flows information.*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES
AND DISTRIBUTIONS OF ZAKAT FUNDS
For the Years Ended
As of December 31, 2025 and 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Sumber dana zakat			*Source of zakat funds*
Zakat Perusahaan	4,768	4,117	*Zakat from the Company*
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat	(6,936)	(6,306)	*Distribution of zakat funds to zakat management entity*
Penurunan dana zakat	(2,168)	(2,189)	*Decrease in zakat funds*
Saldo dana zakat pada awal tahun	8,471	10,660	*Balance of zakat funds at the beginning of year*
Saldo dana zakat pada akhir tahun	**6,303**	**8,471**	***Balance of zakat funds at the end of year***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Years Ended
As of December 31, 2025 *and* 2024
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
Sumber dana kebajikan			*Source of qardhul hasan funds*
Pendapatan non-halal	--	--	*Non-halal income*
Penggunaan dana kebajikan	--	--	*Usage of qardhul hasan funds*
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan	--	--	*Increase/(decrease) in qardhul hasan funds*
Saldo dana kebajikan pada awal tahun	--	--	*Balance of qardhul hasan funds at the beginning of year*
Saldo dana kebajikan pada akhir tahun	**--**	**--**	***Balance of qardhul hasan funds at the end of year***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements taken as a whole

1. Umum / *1. General*

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61610.AH.01.01 tanggal 3 Desember 2012.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 45 dated November 29, 2012 by Hadijah, S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-61610.AH.01.01 dated December 3, 2012.

Perubahan anggaran dasar terakhir disahkan dengan Akta Notaris No. 37 tanggal 19 Februari 2025 oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan tempat kedudukan perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0101334 tanggal 24 Februari 2025.

The latest amendments to the articles of association were ratified by Notarial Deed No. 37 dated February 19, 2025 by Hadijah, S.H., Notary in Jakarta, regarding the changes to the Board of Directors and Board of Commissioners. The amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0101334 dated February 24, 2025.

Perusahaan menyelenggarakan usaha jasa meliputi penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

The Company operates a service business including financing guarantees in accordance with sharia principles.

Perusahaan telah memperoleh izin sebagai perusahaan penjaminan sesuai keputusan Menteri Keuangan No. KEP-777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012.

The Company is licensed to operate as a sharia guarantee according to the decision of the Minister of Finance No. KEP-777/KM.10/2012 dated December 28, 2012.

Perusahaan memiliki kantor pusat yang berdomisili di Menara Jamsostek (Menara Utara) Lantai 19 Jl. Gatot Subroto No. Kav.38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12710. Perusahaan memiliki 2 kantor cabang yang terletak di Jakarta dan 14 kantor cabang di luar Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit).

The Company has its head office domiciled at Jamsostek Tower (North Tower) 19th Floors Jl. Gatot Subroto No. Kav. 38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan `subdistrict, South Jakarta 12710. The Company has 2 branch offices located in Jakarta and 14 branch offices outside Jakarta as of December 31, 2025, and 2024 (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan masing-masing memiliki 149 dan 156 karyawan (tidak diaudit).

As at December 31, 2025 and 2024, the Company has 149 and 156 employees, respectively (unaudited).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, komposisi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2025 and 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board are as follows:

	2025	2024	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Siti Ma'rifah	Siti Ma'rifah	*President Commissioner*
Komisaris	Kristina Lestariningsih	Kristina Lestariningsih	*Commissioner*
Komisaris	Kun Wahyu Wardana	Kun Wahyu Wardana	*Commissioner*

	2025	2024	
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Kokok Alun Akbar	Kokok Alun Akbar	*President Director*
Direktur Keuangan	Aviantono Yudihariadi	Aviantono Yudihariadi	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	Achmad Rizali	Achmad Rizali[1)]	*Marketing Director*

1) Telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-174/PD.02/2024 tanggal 5 April 2024.

1) Has received OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-174/PD.02/2024 dated April 5, 2024.

	2025	2024	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Muhammad Cholil Nafis	Muhammad Cholil Nafis	*Chairman*
Anggota	Ahmad Zubaidi[1)]	Ahmad Zubaidi	*Member*

1) Telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-84/PD.02/2025 tanggal 5 Februari 2025.

1) Has received OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-84/PD.02/2025 dated February 5, 2025.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 401 “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Berdasarkan PSAK No. 401 (Berlaku efektif 1 Januari 2024), laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan Posisi Keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vi) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(vii) Catatan atas laporan keuangan.

2. Material Accounting Policies Information

The principal accounting policy adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Company in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards (“IFAS”) issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant.

The financial statements are prepared in accordance with SFAS No. 401, “Presentation of Sharia Financial Statements”. Based on SFAS No. 401 (Effective on January 1, 2024), a complete sharia entity financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in equity;
(iv) Statement of cash flows;
(v) Statement of sources and distributions of zakat funds;
(vi) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(vii) Notes to the financial statements.

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.	*The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian financial accounting standards. The financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets measured at fair value through other comprehensive income. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.*
Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Perusahaan sesuai prinsip-prinsip syariah.	*Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows, and statement of changes in equity represent the financial statements reflecting the Company's commercial activities in accordance with sharia principles.*
Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank dan deposito berjangka untuk tujuan tertentu.	*The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash and cash in banks and time deposits for certain purposes.*
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.	*Statement of sources and distributions of zakat funds shows the source of funds, distribution during the year and undistributed zakat fund as at point in time.*
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.	*Statement of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan during the year and the remaining balance qardhul hasan funds as at point in time.*
Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, disajikan dalam jutaan Rupiah.	*Figures in the financial statements are expressed in million Rupiah, unless otherwise stated.*
Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi (”mata uang fungsional”). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.	*Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency at the primary economy environment in which the Company operates (“functional currency”). The functional currency of the Company is Rupiah.*
Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini,	*The preparation of financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on management’s best knowledge of current*

hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula (lihat Catatan 3).

b. Standar Baru dan Amendemen atas Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

c. Penjabaran mata uang asing

Mata uang fungsional dan penyajian

Hal-hal yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

events and activities, actual results may differ from those estimates (refer to Note 3).

b. New Accounting Standard and Amendment to Standards which have been Effective in the Current Year

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information; and*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability.*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 219: Employee Benefits;*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 236 Impairment of Asset;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets; and*
- *PSAK 240: Investment Property.*

c. Foreign currency translation

Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Angka-angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional currency of the Company. Figures in the financial statements are rounded in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Transaksi dan saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Transactions and balances
Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at statement of financial position date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currencies monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing adalah Rp16.782 dan Rp16.157 untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS").

As at December 31, 2025 and 2024, the exchange rate used is the Bank Indonesia middle rate of Rp16,782 and Rp16,157, respectively, for 1 United States Dollar ("US Dollar").

d. Akad penjaminan syariah
Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah adalah akad *kafalah*.

d. Sharia guarantee contract
The contract used for sharia guarantee contract is kafalah.

Imbal jasa *kafalah* ("IJK")
Imbal jasa *kafalah* dari terjamin dicatat sebesar nilai bersih, setelah diskonto, sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

Kafalah fees
Kafalah fees from guarantee are accounted for, net of any discounts, in accordance with the terms of contracts.

IJK ditangguhkan merupakan bagian dari IJK yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan.

Unearned kafalah fees represent portion of the kafalah fee written relating to the unexpired terms of coverage guarantee.

Pembentukan imbal jasa *kafalah* ditangguhkan dihitung berdasarkan IJK neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan sertifikat *kafalah* berakhir (proporsional harian).

Unearned kafalah fees are determined and calculated based on net kafalah fees in proportion to the number of days until the kafalah certificate expires (daily proportion).

Kenaikan/ penurunan atas imbal jasa *kafalah* yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara IJK belum menjadi hak periode berjalan dan periode lalu.

Increase/ decrease in unearned kafalah fees represent the difference between the balance of unearned kafalah fees for current and prior period.

Penyajian imbal jasa *kafalah* dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menunjukkan jumlah imbal jasa bruto.

Presentation of kafalah fees in the profit or loss and other comprehensive represents gross fees.

Komisi penjaminan ulang
Komisi penjaminan ulang merupakan komisi yang diterima dari mitra penjaminan ulang dengan persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayar ke mitra penjaminan ulang.

Re-guarantee commissions
Re-guarantee commissions are commissions receipt from re-guarantee partners with certain percentage of premium paid to re-guarantee partners.

Komisi penjaminan ulang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu penjaminan.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau terjadi *ta'widh* atas pembiayaan yang dijaminkan, jumlah pendapatan imbalan jasa *kafalah* dan komisi penjaminan ulang yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan jasa administrasi *kafalah*
Pendapatan jasa administrasi *kafalah* diakui seluruhnya saat sertifikat *kafalah* ("SK") diterbitkan.

Beban komisi
Komisi diberikan kepada agen dan penerima jaminan sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Beban komisi besarnya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJK. Beban komisi dicatat sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan.

Premi penjaminan ulang
Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko *ta'widh*. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dicatat sebagai aset penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Ta'widh (klaim)
Cadangan *ta'widh* adalah jumlah yang menjadi tanggungan Perusahaan sehubungan dengan *ta'widh* yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk *ta'widh* yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Ta'widh meliputi *ta'widh* disetujui (*settled ta'widh*), *ta'widh* dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas *ta'widh* yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") dan beban penyelesaian *ta'widh*. *Ta'widh* tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi *ta'widh*. Bagian *ta'widh* yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban *ta'widh* pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban *ta'widh*. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban *ta'widh* pada saat realisasi.

Re-guarantee commissions is recorded as unearned revenue and amortised over the period of the guarantee.

If there is an accelerated repayment or there is a ta'widh of the guarantee receivables, the amount of kafalah fees and deferred re-guarantee commissions are entirely recognised to profit or loss for the current year.

Kafalah administrative service income
Kafalah administrative service income is fully recognised when kafalah certificates ("SK") were issued.

Commission expenses
Commission given to agents and recipients of the guarantee related to insurance coverage. Commission expenses are expressed as a certain percentage of the IJK. Commission expenses are recorded as prepaid expenses and amortised over the guarantee period.

Re-guarantee premiums
Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee partners to transfer the ta'widh risk. The amount of re-guarantee premium entitled to re-guarantee partners is defined based on type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee.

Ta'widh (claims)
Ta'widh reserves represent outstanding ta'widh and the Company's estimate of ta'widh already incurred but not yet reported. This account is stated in the statement of financial position based on the insurance technical review.

Ta'widh consist of settled ta'widh, outstanding ta'widh including ta'widh incurred but not yet reported ("IBNR") and ta'widh settlement expenses. Ta'widh are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee ta'widh portion received from re-guarantee partners are recognised as deduction from ta'widh expenses in the same period as the recognition of ta'widh expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from ta'widh expenses upon realisation.

Penyajian beban *ta'widh* dalam laba rugi menunjukkan jumlah *ta'widh* bruto, *ta'widh* penjaminan ulang, dan kenaikan/ penurunan cadangan *ta'widh*. *Ta'widh* penjaminan ulang disajikan sebagai pengurang *ta'widh* bruto.

Ta'widh expenses in the profit or loss represent gross ta'widh, re-guarantee ta'widh, and increase/ decrease in ta'widh reserves. Re-guarantee ta'widh are presented as deduction from gross ta'widh.

Cadangan atas *ta'widh* bruto dibuat berdasarkan taksiran beban *ta'widh* yang akan dibayar sesuai dengan *ta'widh* yang diterima Perusahaan sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan *ta'widh* dari reasuradur untuk cadangan atas *ta'widh* bruto dicatat sebagai cadangan *ta'widh* penjaminan ulang pada aset penjaminan ulang.

Provision for estimated gross ta'widh is made for the full estimated costs of ta'widh to be paid in respect of ta'widh notified to the Company until the reporting date. Reinsurance recoveries of the provision for estimated gross ta'widh is recorded as estimated re-guarantee ta'widh in re-guarantee assets.

Perusahaan menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha ("LoB"). Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk *ta'widh* yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk *ta'widh* yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

The Company establishes its reserves by line of business ("LoB"). There are two categories of reserve: reserves for reported ta'widh and reserves for incurred but not yet reported ("IBNR") ta'widh.

Cadangan Perusahaan untuk *ta'widh* yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan *ta'widh* yang sudah dilaporkan. Perusahaan membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

The Company's reserves for reported ta'widh are based on estimates of future payments to settle reported ta'widh. The Company bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

Perusahaan membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi dan metode gabungan (seperti *Bornhuetter-Ferguson*), termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim, dan rasio biaya.

The Company establishes IBNR reserves using triangulation method and hybrid methods (such as Bornhuetter-Ferguson), including discount rate assumptions, claim ratio, and expense ratio.

Perubahan jumlah estimasi liabilitas *ta'widh*, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah cadangan *ta'widh* dengan *ta'widh* yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Changes in the amount of estimated total ta'widh liabilities as a result of further review and differences between estimated ta'widh and ta'widh paid are recognised in the profit or loss in the period when the changes occur.

Piutang penjaminan ulang
Piutang penjaminan ulang merupakan piutang atas pembayaran *ta'widh* ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjaminan ulang.

Re-guarantee receivables
Re-guarantee receivables represent receivables for the payment of ta'widh to the recipient of the guarantee which is the responsibility of the re-guarantee partners.

e. Kas dan bank
Kas dan bank mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

e. Cash on hand and in banks
Cash on hand and in banks include cash on hand and in banks which are not restricted and not pledged as collateral for borrowings.

f. Investasi
Deposito berjangka
Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal. Hasil investasi dari nisbah bagi hasil deposito berjangka diakui atas dasar proporsi waktu dan nisbah bagi hasil yang berlaku.

f. Investments
Time deposits
Time deposits are stated at nominal value. Investment income from the profit sharing nisbah of time deposits is recognised on a time proportion basis, and prevailing profit sharing nisbah.

Investasi pada efek-efek
Efek-efek adalah investasi pada efek-efek yang terdiri dari sukuk dan reksa dana. Efek- efek diklasifikasikan atas dasar tujuan investasi atau intensi dari manajemen.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/ atau pasar modal syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kas kontraktual yang berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan diamortisasi disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/ atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Penyertaan reksa dana disajikan sebesar nilai aset bersih. Keuntungan/ kerugian belum direalisasi akibat kenaikan/ penurunan nilai aset bersih unit penyertaan reksa dana disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Penentuan nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Investments in marketable securities
Marketable securities are investments in securities which consist of sharia bonds and mutual funds. Securities are classified on the basis of investment objectives or management's intentions.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/ or sharia capital markets, including Government Islamic Securities and other securities following sharia principles.

Investment in marketable securities, specifically sharia bonds, are classified based on business model and contractual cash flows in accordance with SFAS No. 410 on "Accounting for Sharia Bonds" as follows:

1) At amortised cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/ or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
2) At fair value securities are stated at fair value through statement of profit or loss and other comprehensive income. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss; and
3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Investments in mutual funds are stated at net asset value. Unrealised gain/ loss due to increase/ decrease in net assets of mutual fund is presented in the current year's other comprehensive income.

Determination of fair value
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar investasi dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

When available, the Company measures the fair value of investments using the quoted price in an active market for that instrument.

Investasi dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu- waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Investment is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid- offer spread or significant increase in the bid- offer spread or there are few recent transactions.

Nilai wajar untuk investasi yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti harga kuotasi di Bursa Efek dan Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI").

The fair value of investment traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date, from credible sources. This includes quoted market price in Stock Exchange and Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA").

Untuk investasi yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar terkini investasi lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas estimasian terhadap aset bersih investasi tersebut.

For investment with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another investment which substantially has the same characteristic or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset of the investment.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa investasi mengalami penurunan nilai. Investasi diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa (atau peristiwa-peristiwa) yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas investasi yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of investments

The Company assesses at each statement of financial position date whether there is objective evidence that investment is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the investment that can be reliably estimated.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the impairment provision

menyesuaikan akun penyisihan penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

account. The amount of the reversal is recognised in profit or loss.

Penghentian pengakuan
Penghentian pengakuan investasi dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset tersebut berakhir, atau ketika investasi tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Derecognition
Investments are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, Company evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).

g. Biaya dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Prepaid expenses
Prepaid expenses are amortised over the periods of benefit using the straight-line method.

h. Aset tetap - bersih
Aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut. Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

h. *Fixed assets - net*
Fixed assets exclude land are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that are directly attributable to the acquisitions of the assets. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated useful life of the assets as follows:

	Tahun/ *Years*	
Bangunan dan Renovasi	8 - 20	*Buildings and Renovation*
Peralatan komputer	4	*Computer equipments*
Peralatan non-komputer	4	*Non-computer equipments*
Peralatan kantor	8	*Office equipments*
Kendaraan	8	*Vehicles*

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi di periode yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan didepresiasi.

Repair and maintenance expenses are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred. Expenditure which extends the useful life of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated and any resulting gains or losses are recognised in the profit or loss.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai. Depresiasi mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to the fixed assets accounts when the construction is completed. Depreciation is charged from such date.

i. Zakat dan dana kebajikan

Zakat menurut istilah *syara* (hukum Islam) adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara*.

i. Zakat and qardhul hasan funds

Zakat according to syara (the Islamic law) means expending an amount of certain possession by giving to people, who have rights to accept under terms determined by syara.

Perusahaan tidak mengakui penerimaan pendapatan yang berasal dari denda dan penerimaan non-halal lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari denda dan penerimaan non-halal lainnya dialokasikan untuk dana kebajikan dan dicatat sebagai liabilitas Perusahaan.

The Company does not recognise income received from fines and other non-halal income. Income received from fines and other non-halal income are allocated for qardhul hasan funds and recognised as liabilities of the Company.

j. Beban usaha

Beban usaha dan beban lain-lain diakui sesuai masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

j. Operating expenses

Operating and other expenses are recognised according to beneficial period in the current year (accrual basis).

k. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan memiliki program imbalan pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

k. Employee benefit liabilities

The Company has defined benefit plans. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laba rugi.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain pada ekuitas pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas dan pada neraca.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income in equity in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amendemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in a profit or loss as past service costs.

I. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

I. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a) pengakuan awal goodwill; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a) the initial recognition of goodwill; or
b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination, at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a

pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax regulations) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Company offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a) The Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b) The deferred tax assets and the deferred tax liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either:

   i. the same taxable entity; or
   ii. different taxable entities which intend to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
   viii. Entitas atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari

m. Transactions with related parties

The Company enters into transactions with related parties as defined in SFAS 224 (Revised 2015) "Related Party Disclosures". The nature of transactions and balance of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to each others);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   iii. Both entities are joint venture of the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
   viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key

kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Definisi pihak-pihak berelasi untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan
b. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Pemerintah yang dimaksud oleh Perusahaan sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan anak perusahaan namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 35.

n. Sewa

Perusahaan Sebagai Penyewa (*Lessee*)

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

(a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
(b) Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
(c) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak

management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

The definition of related parties for the Company is as follows:

a. The Government that has control of, or joint control, or significant influence over, the reporting entity; and

b. Other entity that is a related party because it is controlled or jointly controlled, or is significantly influenced by the same government over the reporting entity and the other entity.

The Government referred to by the Company as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and their subsidiaries but do not include Local Government-Owned Companies.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 35.

n. Leases

The Company as Lessee

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

(a) The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;

(b) The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits of the use of assets during the period of use; and
(c) The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has this right when it has the decision-making

ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:

- *The Company has the right to operate the asset; or*
- *The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Perusahaan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur aset hak guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

After the commencement date, the Company measures the right-of-use assets under the cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that

penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan. Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur liabilitas sewa dengan:
(a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
(b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
(c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi *revision*.

After the commencement date, the Company shall measure the lease liability by:
(a) Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
(b) Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
(c) Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Lease liabilities is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Company estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah.

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered

Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

3. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting

3. Critical Accounting Estimates and Judgements

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements which require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Financial Accounting Standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

Key sources of estimation uncertainty:

a. Estimasi *ta'widh*

Perusahaan wajib membentuk cadangan untuk pembayaran *ta'widh* yang timbul. Cadangan ini merupakan biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan *ta'widh* yang telah terjadi, tetapi masih dalam proses pada tanggal laporan posisi keuangan. Perusahaan menetapkan cadangan berdasarkan jenis produk, jenis dan periode penjaminan dan tahun kejadian. Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk *ta'widh* yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk *ta'widh* yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

a. Estimated ta'widh

The Company is required to establish reserves for payment of ta'widh that arise. These reserves represent the expected ultimate cost to settle claims occurring prior to, but still outstanding as of the statement of financial position date. The Company establishes its reserves by product line, type and extent of coverage and year of occurrence. There are two categories of reserve: reserves for ta'widh reported and reserves for ta'widh incurred but not reported ("IBNR").

Cadangan Perusahaan untuk *ta'widh* yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan *ta'widh* yang sudah dilaporkan. Perusahaan membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

The Company's reserves for ta'widh reported are based on estimates of future payments to settle reported ta'widh. The Company bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

Perusahaan membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode teknik perhitungan teknis oleh aktuaris.

The Company's establishes IBNR reserves using an actuarial technical calculation method.

b. Aset penjaminan ulang
Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang juga dihitung dengan menggunakan metode di atas. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor - faktor seperti counterparty dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui dimana terdapat bukti objektif bahwa Perusahaan tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

b. Re-guarantee assets
Assets arising from re-guarantee contracts are also computed using the above methods. In addition, the recoverability of these assets are assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Company may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured.

c. Liabilitas imbalan kerja
Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

c. Employee benefit liabilities
Employee benefit liabilities are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves using assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and others.

d. Nilai wajar dari instrumen keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Perusahaan melakukan penilaian tentang kondisi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dari agunan.

d. Fair value of financial instruments
Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgement is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Group makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.

e. Penurunan nilai instrumen keuangan
Perusahaan menilai penurunan nilai piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat pertimbangan, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat pertimbangan atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat piutang telah diungkapkan dalam Catatan 7 dan 8 atas laporan keuangan.

e. Impairment of financial instruments
The Company assesses its receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amounts of receivables are disclosed in Notes 7 and 8 to the financial statements.

4. Kas dan Bank / *4. Cash on Hand and in Banks*

	2025	2024	
Kas	**344**	**325**	***Cash on hand***
Bank			***Cash in banks***
Pihak berelasi (Catatan 35)			***Related parties (Note 35)***
Rupiah	15,156	14,883	*Rupiah*
Dolar AS	174	168	*US Dollar*
Sub Jumlah	15,330	15,051	*Sub Total*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2,078	1,578	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	937	1,845	*PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
PT Bank Nagari, Unit Syariah	862	644	*PT Bank Nagari, Sharia Unit*
PT Bank Syariah Bukopin	454	739	*PT Bank Syariah Bukopin*
PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah	400	33	*PT BPD Jawa Tengah, Sharia Unit*
PT Bank DKI, Unit Syariah	204	203	*PT Bank DKI, Sharia Unit*
PT Bank CIMB Niaga Tbk, Unit Usaha Syariah	173	1,569	*PT Bank CIMB Niaga Tbk, Sharia Business Unit*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	157	891	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank NTB Syariah	121	107	*PT Bank NTB Syariah*
PT BPD Kalimantan Selatan, Unit Syariah	65	109	*PT BPD Kalimantan Selatan, Sharia Unit*
PT Bank Jabar Banten Syariah	55	110	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	6	242	*PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*
Lainnya (di bawah Rp100 juta)	2,684	382	*Others (below Rp100 millions)*
Sub Jumlah	8,196	8,493	*Sub Total*
Jumlah	**23,870**	**23,869**	***Total***

5. Investasi / *5. Investments*

	2025	2024	
Sukuk	1,761,635	1,546,390	*Sharia bonds*
Deposito berjangka	563,600	421,800	*Time deposits*
Reksa dana	50,558	71,123	*Mutual funds*
Jumlah	**2,375,793**	**2,039,313**	***Total***

a) Sukuk / *a) Sharia Bonds*

	2025				
	Biaya perolehan/ *Cost*	Amortisasi/ *Amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Pihak berelasi (Catatan 35)	547,996	(4,739)	543,257	--	*Related Parties (Note 35)*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Pihak berelasi (Catatan 35)	1,192,585	3,241	1,218,378	22,552	*Related Parties (Note 35)*
Jumlah	**1,740,581**	**(1,498)**	**1,761,635**	**22,552**	***Total***

	2024				
	Biaya perolehan/ *Cost*	Amortisasi/ *Amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Pihak berelasi (Catatan 35)	636,478	(3,102)	633,376	--	*Related Parties (Note 35)*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Pihak berelasi (Catatan 35)	919,355	2,567	913,014	(8,908)	*Related Parties (Note 35)*
Jumlah	**1,555,833**	**(535)**	**1,546,390**	**(8,908)**	***Total***

b) Deposito Berjangka / *b) Time Deposits*

Deposito berjangka	2025	2024	***Time deposits***
Pihak berelasi (Catatan 35)	**374,450**	**278,450**	***Related Parties (Note 35)***
Pihak ketiga			***Third Parties***
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	86,500	27,000	*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk*
PT Bank Mega Syariah Tbk	19,300	2,000	*PT Bank Mega Syariah Tbk*
PT Bank Jabar Banten Syariah	16,500	26,000	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	16,000	2,000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	12,000	10,000	*PT Bank Aceh Syariah*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Unit Syariah	8,450	7,450	*PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sharia Unit*
PT BPRS Dinar Ashri	6,000	3,000	*PT BPRS Dinar Ashri*
PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah	5,250	6,250	*PT BPD Jawa Tengah, Unit Syariah*
PT Bank Jawa Timur Tbk, Unit Syariah	5,000	7,000	*PT Bank Jawa Timur Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	3,650	3,650	*PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
PT Bank KB Bukopin Syariah	3,500	37,000	*PT Bank KB Bukopin Syariah*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	2,500	2,500	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Syariah	1,500	3,500	*PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Sharia Unit*
PT Bank CIMB Niaga Tbk, Unit Usaha Syariah	1,000	--	*PT Bank CIMB Niaga Tbk, Sharia Business Unit*
PT Bank Nagari, Unit Syariah	1,000	1,000	*PT Bank Nagari, Sharia Unit*
PT Bank NTB Syariah	1,000	1,000	*PT Bank NTB Syariah*
PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	--	2,000	*PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan*
PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	--	2,000	*PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung*
Sub Jumlah	189,150	143,350	*Sub Total*
Jumlah	**563,600**	**421,800**	***Total***

Suku bunga deposito berjangka per tahun berkisar antara 1,74% - 6,44% pada tahun 2025 untuk mata uang Rupiah (2024: 2,22% - 7,24%).

The time deposits annual interest at rates ranging between 1.74% - 6.44% in 2025 for Rupiah balances (2024: 2.22% - 7.24%).

c) Reksa dana / *c) Mutual Funds*

	2025			
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)***	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
Pihak berelasi (Catatan 35)	**20,000**	**20,173**	**173**	***Related Parties (Note 35)***
Pihak ketiga				***Third Parties***
RDST Manulife Syariah Proteksi Utama I	10,000	10,075	75	*RDST Manulife Syariah Proteksi Utama I*
RDST Avrist Sukuk Berkah 6	5,000	5,192	192	*RDST Avrist Sukuk Berkah 6*
RDST Syailendra Capital Protected Fund Syariah 4	5,000	5,098	98	*RDST Syailendra Capital Protected Fund Syariah 4*
RDST Trimegah Terproteksi Syariah 5	5,000	5,118	118	*RDST Trimegah Terproteksi Syariah 5*
RDST Sucorinvest Syariah Proteksi 2	4,876	4,902	26	*RDST Sucorinvest Syariah Proteksi 2*
Sub Jumlah	29,876	30,385	509	*Sub Total*
Jumlah	**49,876**	**50,558**	**682**	***Total***

	2024			
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)***	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
Pihak berelasi (Catatan 35)	**40,000**	**40,737**	**737**	***Related Parties (Note 35)***
Pihak ketiga				***Third Parties***
RDST Manulife Syariah Proteksi Utama I	10,000	10,045	45	*RDST Manulife Syariah Proteksi Utama I*
RDST Capital Sharia Optimal Protected Fund 10	5,000	5,178	178	RDST Capital Sharia Optimal *Protected Fund 10*
RDST Avrist Sukuk Berkah 6	5,000	5,114	114	RDST Avrist Sukuk Berkah 6
RDST Syailendra Capital Protected Fund Syariah 4	5,000	5,051	51	RDST Syailendra Capital *Protected Fund Syariah 4*
RDST Sucorinvest Syariah Proteksi 2	5,000	4,998	(2)	RDST Sucorinvest Syariah *Proteksi 2*
Sub Jumlah	30,000	30,386	386	Sub Total
Jumlah	**70,000**	**71,123**	**1,123**	***Total***

Mutasi penghasilan komprehensif lain untuk kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dan reksadana yang diukur pada nilai wajar:

The movements in other comprehensive income for unrealized losses on marketable securities and mutual funds measured at fair value:

	2025	**2024**	
Saldo awal	(7,785)	(1,763)	*Beginning balance*
Perubahan nilai wajar	21,105	(6,771)	*Change in fair value*
Realisasi ke laba rugi	9,914	749	*Realized in the profit or loss*
Saldo akhir	**23,234**	**(7,785)**	***Ending balance***

6. Deposito Berjangka Untuk Tujuan Tertentu / *6. Time Deposits For Certain Purposes*

	2025	**2024**	
Pihak berelasi (Catatan 35)	50,000	80,000	*Related parties (Note 35)*
Jumlah	**50,000**	**80,000**	***Total***

Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati dengan mitra, Perusahaan wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka yang akan dipergunakan sebagai pelengkap persyaratan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Perusahaan dapat menentukan jangka waktu penempatan deposito. Pada tahun 2025 dan 2024 semua deposito memiliki periode dibawah tiga bulan.

In accordance with the cooperation agreement with partners, the Company are required to allocated certain amount of fund in the form of time deposits which will be utilised as the fulfillment of requirement on cooperation agreement. The Company could determined the period of time deposits placement. In 2025 and 2024 all time deposits has period below three months.

7. Piutang Imbal Jasa Kafalah – Bersih / *7. Kafalah Fee Receivables - Net*

Piutang imbal jasa *kafalah* terdiri atas jumlah yang terutang kepada Perusahaan oleh pemegang sertifikat *kafalah*, Pemerintah Republik Indonesia (“PEN program”), atau agen-agen.

Kafalah fee receivables consist of amounts owed to the Company by the kafalah certificate, Government of Indonesia (“PEN program”), or agents.

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 35)	2,480	5,784	*Related parties (Note 35)*
Pihak ketiga	1,062	2,793	*Third parties*
	3,542	8,577	
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,627)	(3,148)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - neto	**1,915**	**5,429**	***Total - net***

Berdasarkan umur piutang / *Based on aging receivables*

	2025	2024	
0 - 90 hari	1,091	1,510	*0 - 90 days*
91 - 180 hari	65	217	*91 - 180 days*
181 - 270 hari	5	28	*181 - 270 days*
271 - 365 hari	26	54	*271 - 365 days*
> 365 hari	2,355	6,768	*> 365 days*
	3,542	8,577	
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,627)	(3,148)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - neto	**1,915**	**5,429**	***Total - net***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	3,148	4,775	*Beginning balance*
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 34)	(1,521)	(1,627)	*Reversal during the year (Note 34)*
Saldo akhir	**1,627**	**3,148**	***Ending balance***

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang imbal jasa kafalah.

The Board of Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover for possible losses on uncollectible kafalah fee receivables.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

8. Piutang Penjaminan Ulang - Bersih / *8. Re-Guarantee Receivables - Net*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 35)	61,565	43,627	*Related parties (Note 35)*
Pihak ketiga	55	301	*Third parties*
	61,620	43,928	
Dikurangi:			***Less:***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(900)	(709)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - neto	**60,720**	**43,219**	***Total - net***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	709	715	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 34)	191	--	*Provision during the year (Note 34)*
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 34)	--	(6)	*Reversal during the year (Note 34)*
Saldo akhir	**900**	**709**	***Ending balance***

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

The Board of Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover for possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

9. Piutang Hasil Investasi / *9. Investment Income Receivables*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 35)			*Related parties (Note 35)*
Bagi hasil sukuk	**27,280**	**24,773**	*Sukuk profit sharing*

10. Perpajakan / *10. Taxation*

a. Utang pajak / *a. Taxes payables*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan:			***Corporate income tax:***
Tahun 2025	5,421	--	*Year 2025*
Tahun 2024	--	490	*Year 2024*
Pajak lainnya:			***Other taxes:***
Pasal 21	2,080	1	*Article 21*
Pasal 23	90	75	*Article 23*
Pasal 25	2,416	1,553	*Article 25*
Pasal 4 (2)	19	10	*Article 4 (2)*
Bea Materai	29	29	*Stamp Duty*
Jumlah	**10,055**	**2,158**	***Total***

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expenses*

	2025	2024	
Kini	31,693	24,935	*Current*
Tangguhan	(8,912)	(1,161)	*Deferred*
Jumlah	**22,781**	**23,774**	***Total***

Rekonsiliasi antara beban pajak Perusahaan dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak Perusahaan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's total tax expenses and the amounts computed by multiplying the Company's income before tax with the statutory tax rates are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum zakat dan pajak	190,732	164,686	*Profit before zakat and income tax*
Pajak dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku	41,961	36,231	*Tax calculated with applicable tax rate*
Perbedaan permanen:			*Permanent difference:*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(33,805)	(25,876)	*Income subject to final tax*
Beban pajak final	3,879	3,146	*Final tax expenses*
Biaya yang tidak diperkenankan	10,746	10,273	*Non-deductible expenses*
Beban pajak penghasilan	**22,781**	**23,774**	***Income tax expense***

Perhitungan taksiran beban pajak kini dan utang pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The calculation of estimated current tax expense and corporate income tax payable of the Company are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum zakat dan pajak	190,732	164,686	*Profit before zakat and income tax*
Beda tetap:			***Permanent differences:***
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(153,658)	(117,619)	*Income subject to final tax*
Beban pajak final	17,632	14,299	*Final tax expenses*
Biaya yang tidak diperkenankan	48,847	46,699	*Non-deductible expenses*
	(87,179)	(56,621)	
Beda waktu:			***Timing differences:***
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang imbal jasa *kafalah*	(1,330)	(1,632)	*Allowance for impairment of kafalah fee receivables*
Cadangan *ta'widh*	42,248	6,430	*Ta'widh reserves*
Liabilitas imbalan kerja	(137)	66	*Employee benefit liabilities*
Aset hak-guna	4,043	(574)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(4,317)	984	*Lease liabilities*
	40,507	5,274	
Penghasilan kena pajak	144,060	113,339	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan	31,693	24,935	*Income tax expenses*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak dibayar dimuka	(26,272)	(24,445)	*Prepaid taxes*
Pajak penghasilan kurang bayar	**5,421**	**490**	***Income tax underpayment***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended December 31, 2025 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return.

c. Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

c. Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities at reporting dates consist of the following:

	2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/(charged) to profit and loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang imbal jasa *kafalah* dan piutang penjaminan ulang	849	(293)	--	556	*Allowance for impairment of kafalah fee receivables and re-guarantee receivables*
Cadangan *ta'widh*	12,727	9,295	--	22,022	*Ta'widh reserves*
Liabilitas imbalan kerja	29	(30)	55	54	*Employee benefit liabilities*
Aset hak-guna	(1,884)	890	--	(994)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	2,152	(950)	--	1,202	*Lease liabilities*
Jumlah	**13,873**	**8,912**	**55**	**22,839**	***Total***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ *Credited/(charged) to profit and loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lainnya/ *Credited to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang imbal jasa *kafalah* dan piutang penjaminan ulang	1,208	(359)	--	849	*Allowance for impairment of kafalah fee receivables and re-guarantee receivables*
Cadangan *ta'widh*	11,312	1,415	--	12,727	*Ta'widh reserves*
Liabilitas imbalan kerja	19	15	(5)	29	*Employee benefit liabilities*
Aset hak-guna	(1,758)	(126)	--	(1,884)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	1,936	216	--	2,152	*Lease liabilities*
Jumlah	**12,717**	**1,161**	**(5)**	**13,873**	***Total***

Direksi berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan di atas dapat digunakan di masa yang akan datang.

The Board of Directors believe that the deferred tax assets balance above can be recovered in the future.

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

d. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

11. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan / *11. Deferred Acquisition Costs*

	2025	2024	
Produktif	17,346	12,175	*Productive*
Konsumtif	18,721	22,373	*Consumptive*
Bank garansi	23	31	*Bank guarantee*
Surety	39	202	*Surety*
Jumlah	**36,129**	**34,781**	***Total***

12. Aset Penjaminan Ulang / *12. Re-Guarantee Assets*

	2025	2024	
Cadangan IJK yang belum merupakan pendapatan (Catatan 17)	472,603	501,560	*Unearned kafalah fees (Note 17)*
Ta'widh dalam proses (Catatan 16)	129,276	118,387	*Ta'widh in process (Note 16)*
Ta'widh yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Catatan 16)	45,121	62,380	*Ta'widh incurred but not yet reported (Note 16)*
Jumlah	**647,000**	**682,327**	***Total***

Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset penjaminan ulang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Board of Directors believe that there is no impairment of re-guarantee assets as of December 31, 2025 and 2024.

13. Aset Tetap - Bersih / *13. Fixed Assets - Net*

	2025	2024	
Kepemilikan langsung	19,552	21,435	*Direct ownership*
Aset hak-guna	8,964	11,565	*Right-of-use assets*
Jumlah	**28,516**	**33,000**	***Total***

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	4,151	--	--	--	4,151	*Land*
Bangunan dan renovasi	17,042	--	--	--	17,042	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	16,513	1,194	--	199	17,906	*Computer equipments*
Peralatan non-komputer	1,635	159	--	--	1,794	*Non-computer equipments*
Kendaraan	871	--	--	448	1,319	*Vehicles*
Peralatan kantor	3,582	455	--	--	4,037	*Office equipments*
Aset dalam penyelesaian	689	366	--	(647)	408	*Construction in progress*
Sub Jumlah	44,483	2,174	--	--	46,657	*Sub Total*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	5,983	6,568	(4,889)	--	7,662	*Buildings*
Kendaraan	15,726	743	(2,983)	--	13,486	*Vehicles*
Sub Jumlah	21,709	7,311	(7,872)	--	21,148	*Sub Total*
Jumlah	66,192	9,485	(7,872)	--	67,805	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan dan renovasi	(6,670)	(1,789)	--	--	(8,459)	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	(11,784)	(1,813)	--	--	(13,597)	*Computer equipments*
Peralatan non-komputer	(1,326)	(150)	--	--	(1,476)	*Non-computer equipments*
Kendaraan	(563)	(109)	--	--	(672)	*Vehicles*
Peralatan kantor	(2,705)	(196)	--	--	(2,901)	*Office equipments*
Sub Jumlah	(23,048)	(4,057)	--	--	(27,105)	*Sub Total*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	(2,982)	(5,124)	4,889	--	(3,217)	*Buildings*
Kendaraan	(7,162)	(4,767)	2,962	--	(8,967)	*Vehicles*
Sub Jumlah	(10,144)	(9,891)	7,851	--	(12,184)	*Sub Total*
Jumlah	(33,192)	(13,948)	7,851	--	(39,289)	***Total***
Nilai buku bersih	**33,000**				**28,516**	***Net book value***

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan						***Cost***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	4,151	--	--	--	4,151	*Land*
Bangunan dan renovasi	9,613	5,319	--	2,110	17,042	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	13,270	3,442	--	(199)	16,513	*Computer equipments*
Peralatan non-komputer	1,430	205	--	--	1,635	*Non-computer equipments*
Kendaraan	871	--	--	--	871	*Vehicles*
Peralatan kantor	3,260	322	--	--	3,582	*Office equipments*
Aset dalam penyelesaian	2,250	350	--	(1,911)	689	*Construction in progress*
Sub Jumlah	34,845	9,638	--	--	44,483	*Sub Total*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	7,035	3,960	(5,012)	--	5,983	*Buildings*
Kendaraan	13,709	4,946	(2,929)	--	15,726	*Vehicles*
Sub Jumlah	20,744	8,906	(7,941)	--	21,709	*Sub Total*
Jumlah	55,589	18,544	(7,941)	--	66,192	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan dan renovasi	(5,092)	(1,578)	--	--	(6,670)	*Buildings and renovation*
Peralatan komputer	(10,593)	(1,191)	--	--	(11,784)	*Computer equipments*
Peralatan non-komputer	(1,193)	(133)	--	--	(1,326)	*Non-computer equipments*
Kendaraan	(454)	(109)	--	--	(563)	*Vehicles*
Peralatan kantor	(2,443)	(262)	--	--	(2,705)	*Office equipments*
Sub Jumlah	(19,775)	(3,273)	--	--	(23,048)	*Sub Total*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	(3,939)	(4,055)	5,012	--	(2,982)	*Buildings*
Kendaraan	(5,719)	(4,358)	2,915	--	(7,162)	*Vehicles*
Sub Jumlah	(9,658)	(8,413)	7,927	--	(10,144)	*Sub Total*
Jumlah	(29,433)	(11,686)	7,927	--	(33,192)	***Total***
Nilai buku bersih	**26,156**				**33,000**	***Net book value***

Seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya. Direksi berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

All fixed assets were insured against fire, theft and other possible risk. The Board of Directors believe that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the Board of Directors' evaluation, there have been no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as at December 31, 2025 and 2024.

Aset hak-guna

Jumlah pengeluaran kas untuk aset hak-guna di bayar dimuka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp6.720 (2024: Rp3.960).

Right-of-use assets

The total cash outflow for right-of-use assets paid in advance for the year ended December 31, 2025 was Rp6,720 (2024: Rp3,960).

	2025	2024	
Jumlah diakui di laba rugi			***Amounts recognised in profit or loss***
Bunga atas liabilitas sewa	716	820	*Interest on lease liabilities*
Beban penyusutan aset hak-guna			*Depreciation of right-of-use assets*
Beban Usaha (Catatan 33)	9,891	8,413	*Operating Expense (Note 33)*
Beban sewa dengan nilai			*Expenses relating to short-term*
rendah atau jangka pendek	4,157	5,858	*or low value lease*

Liabilitas Sewa / ***Lease Liabilities***

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Beban Bunga/ *Interest Expense*	Pembayaran/ *Payment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Kendaraan	9,784	591	716	(5,624)	5,467	*Vehicles*
Jumlah	**9,784**	**591**	**716**	**(5,624)**	**5,467**	***Total***

	2024					
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Beban Bunga/** ***Interest Expense***	**Pembayaran/** ***Payment***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Kendaraan	8,800	4,946	820	(4,782)	9,784	*Vehicles*
Jumlah	**8,800**	**4,946**	**820**	**(4,782)**	**9,784**	***Total***

14. Utang Ta'widh / *14. Ta'widh Payables*

Akun ini seluruhnya merupakan pembayaran ta'widh kepada mitra (pihak ketiga).

This account entirely represent payables for the payment of ta'widh to partners (third parties).

15. Utang Penjaminan Ulang / *15. Re-Guarantee Payables*

	2025	**2024**	
Pihak berelasi (Catatan 35)	33,076	33,071	*Related parties (Note 35)*
Pihak ketiga	251	2,749	*Third parties*
Jumlah	**33,327**	**35,820**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

16. Cadangan *Ta'widh* / *16. Ta'widh Reserves*

Cadangan *ta'widh* merupakan pembentukan cadangan atas *ta'widh* yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The ta'widh reserves is the reserve of ta'widh that might occur in the coming years onto the guarantee that has not matured yet.

Cadangan *ta'widh* dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi aktuarial. Termasuk dalam cadangan *ta'widh* adalah *ta'widh* dalam proses dan *Incurred But Not Reported* ("IBNR").

Reserves for ta'widh are recorded in the statement of financial position based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Included in the reserves for ta'widh are ta'widh in process and Incurred But Not Reported ("IBNR").

	2025			2024			
	Ta'widh **bruto/*Gross ta'widh***	**Aset penjaminan ulang/*Re-guarantee assets***	**Cadangan *ta'widh* retensi sendiri/** ***Estimated own retention ta'widh***	***Ta'widh*** **bruto/*Gross ta'widh***	**Aset penjaminan ulang/*Re-guarantee assets***	**Cadangan *ta'widh* retensi sendiri/** ***Estimated own retention ta'widh***	
Produktif	401,639	(161,407)	240,232	345,002	(166,324)	178,678	*Productive*
Konsumtif	34,090	(11,830)	22,260	20,830	(13,833)	6,997	*Consumptive*
Bank garansi	1,397	(842)	555	945	(350)	595	*Bank guarantee*
Surety	751	(318)	433	848	(260)	588	*Surety*
Jumlah	**437,877**	**(174,397)**	**263,480**	**367,625**	**(180,767)**	**186,858**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk dalam cadangan *ta'widh* adalah cadangan *ta'widh* yang terjadi namun belum dilaporkan sebesar Rp100.094 (2024: Rp57.846).

As at December 31, 2025, included in ta'widh reserves is ta'widh reserves incurred but not yet reported amounting to Rp100,094 (2024: Rp57,846).

17. Cadangan Imbal Jasa *Kafalah* yang belum Merupakan Pendapatan / *17. Unearned Kafalah Fees*

	2025			2024			
	Bruto/*Gross*	Aset penjaminan ulang/*Re-guarantee assets*	Bersih/*Net*	Bruto/*Gross*	Aset penjaminan ulang/*Re-guarantee assets*	Bersih/*Net*	
Produktif	1,192,213	(367,633)	824,580	1,130,267	(380,647)	749,620	*Productive*
Konsumtif	206,032	(103,952)	102,080	222,384	(120,091)	102,293	*Consumptive*
Bank garansi	3,280	(900)	2,380	2,393	(561)	1,832	*Bank guarantee*
Surety	493	(118)	375	1,414	(261)	1,153	*Surety*
Jumlah	**1,402,018**	**(472,603)**	**929,415**	**1,356,458**	**(501,560)**	**854,898**	***Total***

18. Pendapatan Komisi yang Ditangguhkan / *18. Deferred Commission Income*

	2025	2024	
Produktif	107,930	111,221	*Productive*
Konsumtif	22,636	25,896	*Consumptive*
Bank garansi	275	186	*Bank guarantee*
Surety	42	78	*Surety*
Jumlah	**130,883**	**137,381**	***Total***

19. Liabilitas Imbalan Kerja / *19. Employee Benefit Liabilities*

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dihitung oleh aktuaris independen KKA Riana & Rekan, dalam laporannya masing-masing tertanggal 29 Januari 2026 dan 24 Februari 2025, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit".*

The liability for employee benefits as at December 31, 2025 and 2024 are calculated by independent actuary, KKA Riana & Rekan, respectively, in their reports dated January 29, 2026 and February 24, 2025, respectively, using the "Projected Unit Credit" method.

Pada tahun 2023, Perusahaan menunjuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-197/KM.6/2004 tanggal 24 Mei 2004.

In 2023, the Company has appointed Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia whose establishment has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. KEP-197/KM.6/2004 dated May 24, 2004.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2025		2024		
Tingkat diskonto	6.50%		7.00%		*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	4.00%		4.00%		*Future salary increase*
Tingkat kematian	TMI - 2019		TMI - 2019		*Mortality rate*
Tingkat cacat	3.00% of TMI - 2019		3.00% of TMI - 2019		*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	Usia/*Age*	Tingkat/*Rate*	Usia/*Age*	Tingkat/*Rate*	*Resignation rate*
	< 39	5.0%	< 39	5.0%	
	40 - 45	3.0%	40 - 45	3.0%	
	46 - 49	3.0%	46 - 49	3.0%	
	≥ 50	0.0%	≥ 50	0.0%	
Usia pensiun normal	56 tahun/*years old*		56 tahun/*years old*		*Normal retirement age*
Usia pensiun dini	45 tahun/*years old*		45 tahun/*years old*		*Early retirement age*
Proporsi pengambilan pensiun dini	1%		1%		*Proportion of early retirement*

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris untuk mengestimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The following are the key matters disclosed in the actuarial report to estimate employee benefits obligations as at December 31, 2025 and 2024.

	2025			
	Imbalan pensiun/ ***Pension benefit***	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/** ***Total***	
Nilai kini liabilitas yang didanai	15,479	--	15,479	*Present value of funded obligation*
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	208	38	246	*Present value of unfunded obligation*
Nilai wajar aset program	(19,070)	--	(19,070)	*Fair value of plan assets*
Surplus	(3,383)	38	(3,345)	*Surplus*
Dampak pembatasan aset	3,591	--	3,591	*Effect of assets limitations*
Jumlah	**208**	**38**	**246**	***Total***

	2024			
	Imbalan pensiun/ ***Pension benefit***	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/** ***Total***	
Nilai kini liabilitas yang didanai	12,222	--	12,222	*Present value of funded obligation*
Nilai kini liabilitas yang tidak didanai	104	30	134	*Present value of unfunded obligation*
Nilai wajar aset program	(16,887)	--	(16,887)	*Fair value of plan assets*
Surplus	(4,561)	30	(4,531)	*Surplus*
Dampak pembatasan aset	4,665	--	4,665	*Effect of assets limitations*
Jumlah	**104**	**30**	**134**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefit liabilities recognised in the statement of financial position are as follows:

	2025			
	Imbalan pensiun/ ***Pension benefit***	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/** ***Total***	
Pada awal tahun	104	30	134	*At the beginning of the year*
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	1,678	8	1,686	*Total charged to the profit or loss*
Iuran dari perusahaan	(1,815)	--	(1,815)	*Company's contribution*
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	250	--	250	*Total amount recognised in other comprehensive income*
Pembayaran manfaat atas liabilitas yang tidak didanai	(9)	--	(9)	*Benefit payment of the unfunded obligation*
Pada akhir tahun	**208**	**38**	**246**	***At the end of the year***

	2024			
	Imbalan pensiun/ ***Pension benefit***	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/** ***Total***	
Pada awal tahun	64	25	89	*At the beginning of the year*
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	1,508	5	1,513	*Total charged to the profit or loss*
Iuran dari perusahaan	(1,447)	--	(1,447)	*Company's contribution*
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(21)	--	(21)	*Total amount recognised in other comprehensive income*
Pada akhir tahun	**104**	**30**	**134**	***At the end of the year***

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amount recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2025			
	Imbalan pensiun/ *Pension benefit*	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Laporan laba rugi:				***Statement of profit or loss:***
Beban jasa kini	1,670	6	1,676	*Current service cost*
Beban bunga	8	2	10	*Interest cost*
	1,678	8	1,686	
Penghasilan komprehensif lain:				***Other comprehensive income:***
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi aktuaria	250	--	250	*Loss arising from changes in actuarial assumptions*

	2024			
	Imbalan pensiun/ *Pension benefit*	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Laporan laba rugi:				***Statement of profit or loss:***
Beban jasa kini	1,504	3	1,507	*Current service cost*
Beban bunga	4	2	6	*Interest cost*
	1,508	5	1,513	
Penghasilan komprehensif lain:				***Other comprehensive income:***
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi aktuaria	(21)	--	(21)	*Gain arising from changes in actuarial assumptions*

Mutasi nilai kini kewajiban adalah sebagai berikut:

The movement in the presents value of obligation are as follows:

	2025			
	Imbalan pensiun/ *Pension benefit*	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Pada awal periode	12,326	30	12,356	*At the beginning of the period*
Biaya jasa kini	1,670	6	1,676	*Current service cost*
Kerugian aktuaria	1,486	--	1,486	*Actuarial loss*
Biaya bunga	842	2	844	*Interest cost*
Imbalan yang dibayar	(629)	--	(629)	*Benefits paid*
Jumlah	**15,695**	**38**	**15,733**	***Total***

	2024			
	Imbalan pensiun/ *Pension benefit*	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Pada awal periode	10,166	25	10,191	*At the beginning of the period*
Biaya jasa kini	1,504	3	1,507	*Current service cost*
Kerugian aktuaria	67	--	67	*Actuarial loss*
Biaya bunga	681	2	683	*Interest cost*
Imbalan yang dibayar	(92)	--	(92)	*Benefits paid*
Jumlah	**12,326**	**30**	**12,356**	***Total***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets are as follows:

	2025			
	Imbalan pensiun/ *Pension benefit*	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Pada awal periode	16,887	--	16,887	*At the beginning of the period*
Pendapatan bunga dari aset program	1,153	--	1,153	*Interest income from plan assets*
Kontribusi perusahaan	1,814	--	1,814	*Company's contribution*
Imbalan yang dibayar	(629)	--	(629)	*Benefits paid*
Kerugian aktuaria	(155)	--	(155)	*Actuarial loss*
Jumlah	**19,070**	**--**	**19,070**	***Total***

	2024			
	Imbalan pensiun/ *Pension benefit*	**Manfaat persiapan pensiun/*Pre-retirement benefit***	**Jumlah/ *Total***	
Pada awal periode	14,612	--	14,612	*At the beginning of the period*
Pendapatan bunga dari aset program	979	--	979	*Interest income from plan assets*
Kontribusi perusahaan	1,447	--	1,447	*Company's contribution*
Imbalan yang dibayar	(92)	--	(92)	*Benefits paid*
Kerugian aktuaria	(59)	--	(59)	*Actuarial loss*
Jumlah	**16,887**	**--**	**16,887**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025, durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja adalah 12.29 tahun (2024: 12.96 tahun).

As of December 31, 2025, the weighted average duration of the defined benefits obligation was 12,29 years (2024: 12,96 years).

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan pada asumsi aktuaria yang relevan, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan kerja.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in relevant actuarial assumptions, with all other variables held constant, to the obligation for employee benefits.

	Dampak terhadap imbalan kerja 31 Desember 2025/ *Impact on employee benefits December 31, 2025*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/*Present Value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase 1%*	(1,197)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease 1%*	1,353	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase 1%*	1,438	*Salary incremental rate*
	Penurunan/*Decrease 1%*	(1,290)	

	Dampak terhadap imbalan kerja 31 Desember 2024/ *Impact on employee benefits December 31, 2024*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Nilai kini kewajiban imbalan kerja/*Present Value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase 1%*	(968)	*Discount rate*
	Penurunan/*Decrease 1%*	1,096	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase 1%*	1,100	*Salary incremental rate*
	Penurunan/*Decrease 1%*	(988)	

Meskipun analisis tidak memperhitungkan distribusi penuh arus kas yang diharapkan atas rencana tersebut, analisis tersebut memberikan perkiraan sensitivitas dari asumsi yang ditampilkan di tabel di atas.

Although the analysis does not take into account the full distribution of cash flows expected under the plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumption as shown in the above table.

20. Akrual dan Utang Lain-Lain / *20. Accruals and Other Payables*

	2025	2024	
Pendapatan IJK diterima di muka	31,210	32,307	*Kafalah Income in advance*
Bonus, tantiem dan THR	20,333	12,541	*Bonus, tantiem and THR*
Titipan jaminan	9,732	11,361	*Guarantee deposit*
Utang komisi	7,948	8,515	*Commission payables*
Utang zakat	6,303	8,471	*Zakat payables*
Liabilitas sewa	5,467	9,784	*Lease liabilities*
Gaji dan Tunjangan	4,538	1,568	*Salaries and allowances*
Jasa profesional	2,353	2,361	*Professional fee*
Legal	2,239	139	*Legal expense*
Lain-lain (di bawah Rp2,000)	5,744	3,094	*Others (under Rp2,000)*
Jumlah	**95,867**	**90,141**	***Total***

21. Modal Saham / *21. Share Capital*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2025 and 2024 was as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/*Number of shares*	Persentase/ *Percentage*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Asuransi Kredit Indonesia	399,999	0.999998	399,999	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	0.000002	1	*Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo*
Jumlah	**400,000**	**1.00**	**400,000**	***Total***

Saldo laba yang telah dicadangkan / *Appropriated retained earnings*

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Perusahaan di Indonesia wajib untuk membentuk cadangan wajib sekurang-kurangnya sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan wajib tersebut.

Based on Indonesia Limited Company Law No. 40 Year 2007, companies in Indonesia are required to set up a statutory reserve to a minimum of 20% of the Company's issued and paid up share capital. The Law does not set the period of time within which this statutory reserve should be created.

Perusahaan membentuk penyisihan cadangan wajib pada 31 Desember 2025 sebesar Rp113.588 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. 07/RR-RUPS/2025 tanggal 30 Juni 2025.

The Company has set up a statutory reserves as at December 31, 2025 amounting to Rp113,588 based on the the General Meeting of Shareholders No. 07/RR-RUPS/2025 dated June 30, 2025.

Perusahaan membentuk penyisihan cadangan wajib pada 31 Desember 2024 sebesar Rp154.368 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. 09/RR-RUPS/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang telah disahkan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 8 Januari 2025 oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta.

The Company has set up a statutory reserves as at December 31, 2024 amounting to Rp154,368 based on the the General Meeting of Shareholders No. 09/RR-RUPS/2024 dated December 20, 2024, which was ratified in Notarial Deed No. 12 dated January 8, 2025 by Hadijah, S.H., Notary in Jakarta.

22. Dividen / 22. *Dividends*

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 07/RR-RUPS/2025 dan 05/RR-YKKA/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 disampaikan bahwa pemegang saham menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan atas Tahun Buku 2024 sebesar Rp136.795 dengan alokasi sebesar Rp23.207 sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dan selisih laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi dividen tunai sebesar Rp113.588 sebagai cadangan perusahaan. Hasil Keputusan tersebut disampaikan melalui surat dari PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor 1086/DIR/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025.

Based on the Circular Resolution of the Shareholders of PT Asuransi Pembiayaan Askrindo Syariah Number 07/RR-RUPS/2025 and 05/RR-YKKA/VI/2025 dated June 30, 2025, the shareholders resolved on the appropriation of the Company's net profit for the 2024 Financial Year amounting to Rp136,795 with an allocation of Rp23,207 as cash dividends to shareholders and the difference in net profit for the current year after deducting cash dividends of Rp113,588 as company reserves. The resolution was communicated through a letter from PT Asuransi Kredit Indonesia Number 1086/DIR/VII/2025 dated July 18, 2025

Berdasarkan Memorandum No. 0004/KPT/ MEMO/I.4/MBS-JPAS/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal penggunaan formulasi perhitungan pencadangan dividen tahun 2024 sebesar 10% dari laba bersih tahun berjalan dibagi dengan jumlah bulan pada periode berjalan, maka dibentuk pencadangan dividen tahun 2024 pada laporan keuangan periode Desember 2024 sebesar Rp1.157. Pembentukan formulasi cadangan dividen tersebut didasarkan pada realisasi penambahan modal disetor yang terlambat dari rencana awal pada triwulan IV 2024, menjadi triwulan I 2025.

Based on Memorandum No. 0004/KPT/ MEMO/I.4/MBS-JPAS/I/2025 dated January 8, 2025, regarding the use of the dividend reserve calculation formula for 2024, which is 10% of the net profit for the current year divided by the number of months in the current period, a dividend reserve for 2024 is established in the financial statements for the December 2024 period amounting to Rp1,157. The establishment of this dividend reserve formula is based on the delayed realization of additional paid-up capital, which was initially planned for quarter 4 of the year 2024 but has been moved to quarter 1 of the year 2025.

23. Imbal Jasa *Kafalah* Bruto / 23. *Gross Kafalah Fees*

	2025	2024	
Produktif	780,873	783,605	*Productive*
Konsumtif	46,027	33,730	*Consumptive*
Bank garansi	6,784	1,510	*Bank guarantee*
Surety	381	1,805	*Surety*
Jumlah	**834,065**	**820,650**	***Total***

24. Premi Penjaminan Ulang / 24. *Re-Guarantee Premiums*

	2025	2024	
Produktif	212,164	226,651	*Productive*
Konsumtif	5,803	3,453	*Consumptive*
Bank garansi	2,497	480	*Bank guarantee*
Surety	158	483	*Surety*
Jumlah	**220,622**	**231,067**	***Total***

Termasuk di dalam premi penjaminan ulang bruto adalah beban IJK *loss limit*, yaitu premi yang dibayarkan kepada Pemerintah terkait penjaminan PEN sebesar 1% dari plafon

Included in gross re-guarantee premiums is IJK loss limit, which is the fee paid to the government related to PEN guarantee amounting to 1% from financing plafond. The

pembiayaan. Pemerintah menanggung *ta'widh* PEN apabila jumlah *ta'widh* yang dibayarkan perusahaan sudah mencapai 90% dari total premi dibayar.

government bears the PEN ta'widh if the number of ta'widh paid by the company reaches 90% of premium paid.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

25. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Imbal Jasa *Kafalah* yang belum Merupakan Pendapatan

25. Increase (Decrease) In Unearned Kafalah Fees

	2025	2024	
Produktif	74,960	163,847	*Productive*
Konsumtif	(213)	(9,949)	*Consumptive*
Bank garansi	548	(1,627)	*Bank guarantee*
Surety	(778)	713	*Surety*
Jumlah	**74,517**	**152,984**	***Total***

26. Beban *Ta'widh*

26. Ta'widh Expenses

	2025	2024	
Produktif	522,774	327,601	*Productive*
Konsumtif	38,515	40,231	*Consumptive*
Bank garansi	--	8,283	*Bank guarantee*
Jumlah	**561,289**	**376,115**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

27. *Ta'widh* Penjaminan Ulang

27. Re-Guarantee Ta'widh

	2025	2024	
Produktif	154,656	113,199	*Productive*
Konsumtif	23,684	23,715	*Consumptive*
Bank garansi	--	2,485	*Bank guarantee*
Jumlah	**178,340**	**139,399**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

28. Beban Komisi

28. Commission Expenses

	2025	2024	
Produktif	20,639	19,539	*Productive*
Konsumtif	3,659	3,224	*Consumptive*
Bank garansi	32	221	*Bank guarantee*
Surety	163	97	*Surety*
Jumlah	**24,493**	**23,081**	***Total***

29. Komisi Penjaminan Ulang / *29. Re-Guarantee Commissions*

	2025	2024	
Produktif	65,536	60,871	*Productive*
Konsumtif	5,052	5,344	*Consumptive*
Bank garansi	670	551	*Bank guarantee*
Surety	84	226	*Surety*
Jumlah	**71,342**	**66,992**	***Total***

30. Pendapatan Subrogasi / *30. Subrogation Income*

	2025	2024	
Produktif	60,488	40,821	*Productive*
Konsumtif	22,859	4,042	*Consumptive*
Bank garansi	--	966	*Bank guarantee*
Surety	10	288	*Surety*
Jumlah	**83,357**	**46,117**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

31. Kenaikan Cadangan *Ta'widh* / *31. Increase In Ta'widh Reserves*

	2025	2024	
Produktif	(61,554)	(86,419)	*Productive*
Konsumtif	(15,263)	(4,998)	*Consumptive*
Bank garansi	40	504	*Bank guarantee*
Surety	155	(476)	*Surety*
Jumlah	**(76,622)**	**(91,389)**	***Total***

32. Pendapatan Investasi / *32. Investment Income*

	2025	2024	
Bagi hasil:			*Profit sharing:*
Sukuk	110,958	91,761	*Sukuk*
Deposito berjangka	28,471	28,641	*Time deposits*
Reksa dana	4,114	1,886	*Mutual funds*
Keuntungan/(kerugian) penjualan reksa dana	1,526	208	*Gain/(loss) on sale of mutual funds*
Keuntungan penjualan sukuk	8,589	635	*Gain on sale of sukuk*
Jumlah	**153,658**	**123,131**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

33. Beban Usaha / *33. Operating Expenses*

	2025	2024	
Kepegawaian	79,876	74,084	*Employee*
Umum	38,360	38,887	*General*
Pemasaran	13,137	13,005	*Marketing*
Penyusutan dan Amortisasi	14,926	12,514	*Depreciation and Amortization*
Pelatihan	1,651	1,220	*Development*
Jumlah	**147,950**	**139,710**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

34. Beban Lain-Lain - Bersih / *34. Other Expenses - Net*

	2025	2024	
Pajak pendapatan investasi	17,632	14,299	*Investment income tax*
Cadangan piutang imbal jasa *kafalah* dan piutang penjaminan ulang (Catatan 7 dan 8)	(1,330)	(1,633)	*Kafalah fee receivable and re-guarantee receivable provision (Note 7 and 8)*
Lainnya	5,254	2,741	*Others*
Jumlah	**21,556**	**15,407**	***Total***

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 35 for details of related parties balance and transactions.

35. Saldo dan Transaksi Dengan Pihak- Pihak Berelasi / *35. Related Parties Balances and Transactions*

a. Perusahaan Milik Negara dan Anak Perusahaan / *a. State Owned Enterprises and Subsidiaries*

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan Milik Negara. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Nasional, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asrinda Arthasangga, PT PNM Investment Management, PT Permodalan Nasional Madani, PT Asuransi BRI Life, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Pegadaian (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management, PT Asuransi Jiwa IFG, dan PT Asuransi Kredit Indonesia adalah entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Perusahaan. Perusahaan memiliki penempatan kas dan kas di bank, investasi, deposito berjangka untuk tujuan tertentu, piutang imbal jasa *kafalah*,

The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State Owned Enterprises. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Nasional, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Asrinda Arthasangga, PT PNM Investment Management, PT Permodalan Nasional Madani, PT Asuransi BRI Life, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Pegadaian (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management, PT Asuransi Jiwa IFG, and PT Asuransi Kredit Indonesia are entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with The Company. The Company has placement in cash and cash in banks, investments, time deposits for certain purposes, kafalah fee receivables,

piutang penjaminan ulang, piutang hasil investasi, utang penjaminan ulang, imbal jasa *kafalah*, premi penjaminan ulang, beban *ta'widh*, *ta'widh* penjaminan ulang, pendapatan subrogasi, pendapatan investasi, beban usaha dan beban lain-lain.

re-guarantee receivables, investment income receivables, re-guarantee payables, re- guarantee premiums, ta'widh expenses, re-guarantee ta'widh, subrogation income, investment income, operating expenses and other expense.

Ringkasan transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The summary of transactions with related parties during the years ended December 31, 2025 and 2025 are as follows:

	2025	2024	
Aset:			***Assets:***
Kas dan bank (Catatan 4)			***Cash on hand and in banks (Note 4)***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	15,042	14,035	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	29	533	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	43	271	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42	44	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	15,156	14,883	*Sub Total*
Dolar AS			*US Dollar*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	174	168	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	15,330	15,051	

	2025				
	Biaya perolehan/ *Cost*	Amortisasi/ *Amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	
Sukuk (Catatan 5a)					***Sharia bonds (Note 5a)***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Pemerintah Republik Indonesia					*The Government of the Republic of Indonesia*
SBSN SERI PBS004	67,084	1,722	68,806	--	*SBSN SERI PBS004*
SBSN SERI PBS023	66,738	(1,705)	65,033	--	*SBSN SERI PBS023*
SBSN SERI PBS028	66,345	(940)	65,405	--	*SBSN SERI PBS028*
SBSN SERI PBS005	65,031	182	65,213	--	*SBSN SERI PBS005*
SBSN SERI PBS012	59,744	(2,635)	57,109	--	*SBSN SERI PBS012*
SBSN SERI PBS029	51,435	288	51,723	--	*SBSN SERI PBS029*
SBSN SERI PBS022	47,893	(1,796)	46,097	--	*SBSN SERI PBS022*
SBSN SERI PBS015	34,231	(362)	33,869	--	*SBSN SERI PBS015*
SBSN SERI PBS033	18,466	77	18,543	--	*SBSN SERI PBS033*
SBSN SERI PBS003	12,737	197	12,934	--	*SBSN SERI PBS003*
SBSN SERI PBS030	11,794	111	11,905	--	*SBSN SERI PBS030*
SBSN SERI PBS032	9,645	275	9,920	--	*SBSN SERI PBS032*
SBSN SERI PBS025	3,528	(153)	3,375	--	*SBSN SERI PBS025*
PT Permodalan Nasional Madani					*PT Permodalan Nasional Madani*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PNM Tahap II Tahun 2023	10,000	--	10,000	--	*Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PNM Tahap II Tahun 2023*
PT Pegadaian (Persero)					*PT Pegadaian (Persero)*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 Seri A	10,000	--	10,000	--	*Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 Seri A*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Tahun 2025 Seri A	5,325	--	5,325	--	*Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V Tahun 2025 Seri A*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk					*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025	5,000	--	5,000	--	*Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)					*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B	3,000	--	3,000	--	*Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B*
	547,996	(4,739)	543,257	--	

	2025				
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Amortisasi/ *Amortized***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)***	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Pemerintah Republik Indonesia					*The Government of the Republic of Indonesia*
SBSN SERI PBS030	220,317	497	223,419	2,605	*SBSN SERI PBS030*
SBSN SERI PBS034	173,527	23	176,387	2,837	*SBSN SERI PBS034*
SBSN SERI PBS005	114,057	(11)	116,749	2,703	*SBSN SERI PBS005*
SBSN SERI PBS038	105,307	14	107,844	2,523	*SBSN SERI PBS038*
SBSN SERI PBS004	96,169	792	99,995	3,034	*SBSN SERI PBS004*
SBSN SERI PBS039	79,175	43	81,328	2,110	*SBSN SERI PBS039*
SBSN SERI PBS033	74,513	53	76,443	1,877	*SBSN SERI PBS033*
SBSN SERI PBS032	73,157	1,124	74,921	640	*SBSN SERI PBS032*
SBSN SERI PBS040	68,691	25	68,826	110	*SBSN SERI PBS040*
SBSN SERI PBS029	49,747	36	51,299	1,516	*SBSN SERI PBS029*
SBSN SERI PBS003	44,652	160	45,705	893	*SBSN SERI PBS003*
SPNS01062026	28,941	452	29,436	43	*SPNS01062026*
SBSN SERI PBS025	16,988	(748)	17,098	858	*SBSN SERI PBS025*
SPNS06042026	14,383	398	14,823	42	*SPNS06042026*
SPNS09032026	13,746	266	14,029	17	*SPNS09032026*
SBSN SERI PBS015	11,991	(97)	12,594	700	*SBSN SERI PBS015*
SPNS10022026	2,432	90	2,525	3	*SPNS10022026*
SPNS12012026	2,312	101	2,413	--	*SPNS12012026*
SPNS04052026	1,602	35	1,642	5	*SPNS04052026*
SBSN SERI PBS028	878	(12)	902	36	*SBSN SERI PBS028*
	1,192,585	3,241	1,218,378	22,552	
	1,740,581	(1,498)	1,761,635	22,552	

	2024				
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Amortisasi/ *Amortized***	**Nilai tercatat/ *Carrying value***	**Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)***	
Sukuk (Catatan 5a)					***Sharia bonds (Note 5a)***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Pemerintah Republik Indonesia					*The Government of the Republic of Indonesia*
SBSN SERI PBS036	68,824	788	69,612	--	*SBSN SERI PBS036*
SBSN SERI PBS004	67,084	1,345	68,429	--	*SBSN SERI PBS004*
SBSN SERI PBS028	66,345	(740)	65,605	--	*SBSN SERI PBS028*
SBSN SERI PBS023	66,738	(1,240)	65,498	--	*SBSN SERI PBS023*
SBSN SERI PBS005	65,032	135	65,167	--	*SBSN SERI PBS005*
SBSN SERI PBS012	59,745	(2,192)	57,553	--	*SBSN SERI PBS012*
SBSN SERI PBS029	51,435	218	51,653	--	*SBSN SERI PBS029*
SBSN SERI PBS022	47,893	(1,422)	46,471	--	*SBSN SERI PBS022*
SBSN SERI PBS017	39,981	9	39,990	--	*SBSN SERI PBS017*
SBSN SERI PBS015	34,231	(275)	33,956	--	*SBSN SERI PBS015*
SBSN SERI PBS033	18,466	55	18,521	--	*SBSN SERI PBS033*
SBSN SERI PBS003	12,738	133	12,871	--	*SBSN SERI PBS003*
SBSN SERI PBS030	11,794	74	11,868	--	*SBSN SERI PBS030*
SBSN SERI PBS032	9,644	128	9,772	--	*SBSN SERI PBS032*
SBSN SERI PBS025	3,528	(118)	3,410	--	*SBSN SERI PBS025*
PT Permodalan Nasional Madani					*PT Permodalan Nasional Madani*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PNM Tahap II Tahun 2023	10,000	--	10,000	--	*Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PNM Tahap II Tahun 2023*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)					*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B	3,000	--	3,000	--	*Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B*
	636,478	(3,102)	633,376	--	

	2024				
	Biaya perolehan/ *Cost*	Amortisasi/ *Amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Pemerintah Republik Indonesia					*The Government of the Republic of Indonesia*
SBSN SERI PBS005	132,917	109	132,305	(721)	*SBSN SERI PBS005*
SBSN SERI PBS004	96,169	519	94,001	(2,687)	*SBSN SERI PBS004*
SBSN SERI PBS032	82,155	521	81,841	(835)	*SBSN SERI PBS032*
SBSN SERI PBS038	78,968	12	77,684	(1,296)	*SBSN SERI PBS038*
SBSN SERI PBS030	78,126	238	77,409	(955)	*SBSN SERI PBS030*
SBSN SERI PBS029	74,203	83	73,114	(1,172)	*SBSN SERI PBS029*
SBSN SERI PBS033	64,498	32	63,447	(1,083)	*SBSN SERI PBS033*
SBSN SERI PBS017	59,865	59	59,534	(390)	*SBSN SERI PBS017*
SPNS01042025	43,420	881	44,252	(49)	*SPNS01042025*
SBSN SERI PBS015	28,536	(251)	29,255	970	*SBSN SERI PBS015*
SBSN SERI PBS025	28,303	(962)	27,484	143	*SBSN SERI PBS025*
SBSN SERI PBS036	23,608	251	23,760	(99)	*SBSN SERI PBS036*
SPNS20012025	19,420	510	19,924	(6)	*SPNS20012025*
SBSN SERI PBS039	19,616	11	19,545	(82)	*SBSN SERI PBS039*
SBSN SERI PBS034	19,972	5	19,281	(696)	*SBSN SERI PBS034*
SBSN SERI PBS003	14,827	8	14,704	(131)	*SBSN SERI PBS0003*
SPNS09062025	14,332	206	14,504	(34)	*SPNS09062025*
SBSN SERI PBS028	11,629	(109)	11,804	284	*SBSN SERI PBS028*
SPNS01092025	9,563	31	9,559	(35)	*SPNS01092025*
SPNS02022025	4,774	197	4,969	(2)	*SPNS02022025*
SPNS03032025	4,842	105	4,943	(4)	*SPNS03032025*
SPNS29052025	4,833	44	4,865	(12)	*SPNS29052025*
SPNS07072025	4,779	67	4,830	(16)	*SPNS07072025*
	919,355	2,567	913,014	(8,908)	
	1,555,833	(535)	1,546,390	(8,908)	

	2025	2024	
Deposito berjangka (Catatan 5b)			***Time deposits (Note 5b)***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	310,950	215,950	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Nasional	63,500	62,500	*PT Bank Syariah Nasional*
	374,450	278,450	

	2025			
	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	
Reksa dana (Catatan 5c)				***Mutual funds (Note 5c)***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
PT PNM Investment Management				*PT PNM Investment Management*
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII	10,000	10,140	140	*RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII*
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI	5,000	5,011	11	*RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVI*
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII	5,000	5,022	22	*RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XVIII*
	20,000	20,173	173	

	2024			
	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai wajar/ *Fair value*	Laba (rugi) belum direalisasi/ *Unrealized gain (loss)*	
Reksa dana (Catatan 5c)				***Mutual funds (Note 5c)***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
PT Bahana TCW Investment Management				*PT Bahana TCW Investment Management*
RDSPU Bahana Likuid Syariah Kelas S	15,000	15,328	328	*RDSPU Bahana Likuid Syariah Kelas S*
RDST Bahana Salamah Syariah 6	10,000	10,260	260	*RDST Bahana Salamah Syariah 6*
PT PNM Investment Management				*PT PNM Investment Management*
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII	10,000	10,140	140	*RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XIII*
RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV	5,000	5,009	9	*RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri XV*
	40,000	40,737	737	

	2025	2024	
Deposito berjangka untuk tujuan tertentu (Catatan 6)			***Time deposits for certain purposes (Note 6)***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	50,000	80,000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Piutang imbal jasa *kafalah* - bersih (Catatan 7)			***Kafalah fee receivables - net (Note 7)***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,827	4,646	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Pegadaian (Persero)	578	38	*PT Pegadaian (Persero)*
Pemerintah Republik Indonesia	62	1,027	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Permodalan Nasional Madani	8	14	*PT Permodalan Nasional Madani*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	5	5	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	--	51	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	3	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
	2,480	5,784	
Piutang penjaminan ulang - bersih (Catatan 8)			***Re-guarantee receivables - net (Note 8)***
PT Asrinda Arthasangga	52,143	42,256	*PT Asrinda Arthasangga*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	7,806	563	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	1,284	473	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Asuransi BRI Life	332	332	*PT Asuransi BRI Life*
PT Asuransi Kredit Indonesia	--	3	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
	61,565	43,627	
Piutang hasil investasi (Catatan 9)			***Investment income receivables (Note 9)***
Pemerintah Republik Indonesia	27,017	24,597	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Permodalan Nasional Madani	148	148	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Pegadaian	83	--	*PT Pegadaian*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	28	28	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4	--	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	27,280	24,773	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	2,287,588	2,034,812	*Total assets with related parties*
Persentase terhadap jumlah aset	69.76%	68.14%	*Percentage of total assets*

	2025	2024	
Utang penjaminan ulang (Catatan 15)			***Re-guarantee payables (Note 15)***
PT Asrinda Arthasangga	32,870	9,845	*PT Asrinda Arthasangga*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	115	12,286	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	91	10,940	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
	33,076	33,071	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	33,076	33,071	*Total liabilities with related parties*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	1.57%	1.66%	*Percentage of total liabilities*
Premi penjaminan ulang (Catatan 24)			***Re-guarantee premiums (Note 24)***
Bruto:			***Gross:***
PT Asrinda Arthasangga	220,589	91,482	*PT Asrinda Arthasangga*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	619	26,422	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	54	105,944	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
Restitusi:			***Restitution:***
PT Reasuransi Syariah Indonesia	(1,479)	--	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	(3,155)	--	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
	216,628	223,848	
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang	98.19%	96.88%	*Percentage of total re-guarantee premiums*
Beban *kafalah*:			***Kafalah expenses:***
Beban *ta'widh* (Catatan 26)			***Ta'widh expenses (Note 26)***
PT Permodalan Nasional Madani	275,023	115,573	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	244,911	226,476	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	519,934	342,049	
Persentase terhadap jumlah beban *ta'widh*	92.63%	90.94%	*Percentage of total ta'widh expenses*
***Ta'widh* penjaminan ulang (Catatan 27)**			***Re-guarantee ta'widh (Note 27)***
PT Asrinda Arthasangga	168,501	135,317	*PT Asrinda Arthasangga*
PT Reasuransi Nasional Indonesia	7,626	2,961	*PT Reasuransi Nasional Indonesia*
PT Reasuransi Syariah Indonesia	2,213	769	*PT Reasuransi Syariah Indonesia*
PT Asuransi Kredit Indonesia	--	47	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
	178,340	139,094	
Persentase terhadap jumlah *ta'widh* penjaminan ulang	100.00%	99.78%	*Percentage of total re-guarantee ta'widh*
Pendapatan subrogasi (Catatan 30)			***Subrogation income (Note 30)***
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	48,343	34,005	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Permodalan Nasional Madani	31,481	8,023	*PT Permodalan Nasional Madani*
	79,824	42,028	
Persentase terhadap jumlah pendapatan subrogasi	95.76%	91.13%	*Percentage of total subrogation income*

	2025	2024	
Pendapatan investasi (Catatan 32)			***Investment income (Note 32)***
Pemerintah Republik Indonesia	117,971	91,481	*The Government of the Republic of Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17,408	12,590	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Unit Syariah	4,682	2,267	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Sharia Unit*
PT Permodalan Nasional Madani	1,988	799	*PT Permodalan Nasional Madani*
PT Pegadaian	497	--	*PT Pegadaian*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	240	240	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
	142,786	107,377	
Persentase terhadap jumlah pendapatan investasi	92.92%	87.21%	*Percentage of total investment income*
Beban Usaha: (Catatan 33)			***Operating Expense: (Note 33)***
Kepegawaian			***Employee***
PT Asuransi Jiwa IFG	708	880	*PT Asuransi Jiwa IFG*
PT Asuransi Kredit Indonesia	--	13	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
	708	893	
Persentase terhadap jumlah pendapatan beban usaha	0.47%	0.64%	*Percentage of total operating expenses*
Beban lain - lain - bersih (Catatan 34)			***Other Expenses - Net (Note 34)***
PT Bahana TCW Investment	17	--	*PT Bahana TCW Investment*
Persentase terhadap jumlah pendapatan beban usaha	0.08%	0.00%	*Percentage of total operating expenses*

36. Zakat

Perusahaan telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba tahun sebelumnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.768 dan Rp4.117.

36. Zakat

The Company has calculated zakat based on 2.5% of the income from previous year for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp4,768 and Rp4,117.

37. Risiko Penjaminan Keuangan

Risiko utama yang dihadapi Perusahaan dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya *default risk* dan tingkat *Non-performing financing* ("NPF") pinjaman yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara *ta'widh* aktual, pembayaran manfaat dan tanggal *ta'widh* dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, keparahan *ta'widh*, manfaat yang dibayarkan dan perkembangan *ta'widh* jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

37. Financial Guarantee Risk

The principal risk the Company faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's Non-performing financing ("NPF"), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual ta'widh, benefit payments and ta'widh dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of ta'widh, actual benefits paid and subsequent development of long-term ta'widh. Therefore, the objective of the Company is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Operasional Perusahaan didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Perusahaan untuk *underwrite* dan menerima penjaminan besar.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality*. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/ atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan *score* ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing- masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

The Company's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Company to underwrite and accept large guarantee accounts.

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, which are Prospect, Productivity, Payment, and Personality. The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/ or quantitatively for each aspect of the 4Ps. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.

Furthermore, to make a decision whether a guarantee application can be approved or not, is carried out in a committee meeting. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (risk taker unit) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (risk financing unit). With a decision- making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision-making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high-risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

Manajemen penjaminan ulang terkoordinasi terpusat memfasilitasi transfer risiko yang tepat dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien pasar penjaminan ulang eksternal. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Perusahaan harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses reviu keuangan yang ketat untuk disetujui oleh personel manajemen senior. Sebagai hasil dari kontrol ini, penjaminan ulang ditempatkan dengan kelompok terpilih hanya dari perusahaan yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pendekatan yang konsisten untuk pemesanan praktik dan penyelesaian *ta'widh* juga terjamin. Selain kontrol internal, unit operasional Perusahaan dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit perusahaan yang secara teratur melakukan audit operasional.

Centrally-coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Reinsurers utilised by the Company must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re- guarantee is placed with a select Company of only the most financially secured and experienced companies in the re-guarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of ta'widh are also ensured. In addition to these internal controls, the Company's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.

Eksposur Perusahaan terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portofolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

The Company's exposure to concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

Analisa Eksposur

Pada tahun 2025 dan 2024, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan kelas bisnis sebagai berikut:

Exposure Analysis

In 2025 and 2024, the Company's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows:

	2025				
	Ta'widh bruto/ ***Gross ta'widh***	**Ta'widh penjaminan ulang/** ***Re-guarantee ta'widh***	**(Kenaikan)/ penurunan cadangan ta'widh/** ***(Increase)/ decrease in ta'widh reserves***	**Beban ta'widh - bersih/*Ta'widh expenses - net***	
Produktif	522,774	(154,656)	61,554	429,672	*Productive*
Konsumtif	38,515	(23,684)	15,263	30,094	*Consumptive*
Bank garansi	--	--	(40)	(40)	*Bank guarantee*
Surety	--	--	(155)	(155)	*Surety*
Jumlah	**561,289**	**(178,340)**	**76,622**	**459,571**	***Total***

	2024				
	Ta'widh bruto/ ***Gross ta'widh***	**Ta'widh penjaminan ulang/** ***Re-guarantee ta'widh***	**(Kenaikan)/ penurunan cadangan ta'widh/** ***(Increase)/ decrease in ta'widh reserves***	**Beban ta'widh - bersih/*Ta'widh expenses - net***	
Produktif	327,601	(113,199)	86,419	300,821	*Productive*
Konsumtif	40,231	(23,715)	4,998	21,514	*Consumptive*
Bank garansi	8,283	(2,485)	(504)	5,294	*Bank guarantee*
Surety	--	--	476	476	*Surety*
Jumlah	**376,115**	**(139,399)**	**91,389**	**328,105**	***Total***

Cadangan Teknis

Metode *Expected Loss Ratio*, *Incurred Chain-ladder* dan *Incurred Bornhuetter-Ferguson* ("BF") telah diterapkan untuk masing-masing kelas bisnis untuk menentukan kewajiban penjaminan yang tidak didiskontokan.

Cadangan kerugian dipotong untuk mewakili nilai waktu dari uang.

Tingkat beban *ta'widh* yang belum dialokasikan dihitung dengan membagi data historis beban *ta'widh* dengan pembayaran *ta'widh*. Variabel ini dianggap sama untuk setiap LoB.

Margin risiko secara keseluruhan ditentukan setelah memungkinkan untuk ketidakpastian cadangan *ta'widh* yang luar biasa. Ketidakpastian dianalisis dengan mempertimbangkan potensi ketidakpastian yang berkaitan dengan model aktuaria dan asumsi, kualitas data yang mendasari yang digunakan dalam model dan lingkungan penjaminan umum.

Technical Reserves

The Expected Loss Ratio, Incurred Chain-ladder and Incurred Bornhuetter-Ferguson ("BF") method have been applied to each class of business to determine the undiscounted guarantee liabilities.

The loss reserves have been discounted to represent the time value of money.

The unallocated ta'widh expenses rate is calculated by observing the historical ta'widh expense divided by the ta'widh paid. It is assumed to be the same for each LoB.

The overall risk margin was determined after allowing for uncertainty of the outstanding ta'widh estimate. Uncertainty was analysed by taking into account potential uncertainties relating to the actuarial models and assumptions, the quality of the underlying data used in the models and the general guarantee environment.

Sensitivitas

Kewajiban *ta'widh* sangat mudah berubah untuk digunakan sebagai asumsi utama. Karena hal tersebut, tidak mungkin untuk mengukur sensitivitas dari asumsi tertentu seperti perubahan peraturan atau ketidakpastian dalam proses estimasi.

Analisis berikut dibuat untuk menunjukkan dampak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika asumsi utama berubah sementara semua asumsi lain tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan kewajiban *ta'widh*.

Dampak dari kenaikan/ penurunan kewajiban dan laba sebelum pajak pada tahun berjalan dari perubahan variabel adalah sebagai berikut:

Sensitivities

Ta'widh liabilities are very volatile to key assumptions used. Therefore, it is not possible to quantify the sensitivity of certain assumptions such as regulation change or uncertainty in the estimation process.

The following analysis is made to show the impact on the statement of profit or loss and other comprehensive income if the main assumptions change while all the other assumptions stay. The correlation between those assumptions can give significant impact in determining the ta'widh liability.

The impact of the increase/ decrease in liability and profit before tax on the current year from change in variable are as follows:

	2025			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Dampak terhadap liabilitas bersih/ *Impact on net liabilities***	**Dampak terhadap laba sebelum pajak/ *Impact on profit before tax***	
Rasio *ta'widh*	5%	4,197	(4,197)	*Ta'widh ratio*
	-5%	(4,197)	4,197	
Cadangan *ta'widh*	1%	3,475	(3,475)	*Ta'widh reserves*
	-1%	(3,475)	3,475	

		2024		
	Perubahan asumsi/ ***Change in assumptions***	**Dampak terhadap liabilitas bersih/** ***Impact on net liabilities***	**Dampak terhadap laba sebelum pajak/** ***Impact on profit before tax***	
Rasio ta'widh	5%	7,305	(7,305)	*Ta'widh ratio*
	-5%	(7,305)	7,305	
Cadangan ta'widh	1%	3,459	(3,459)	*Ta'widh reserves*
	-1%	(3,459)	3,459	

38. Manajemen Risiko Keuangan / *38. Financial Risk Management*

Risiko manajemen modal
Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Perusahaan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholders* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

Capital management risk
The Company's objective from managing its capital is to safeguard the Company's going concern ability in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

Risiko manajemen keuangan
Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko investasi, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko harga pasar. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

Financial risk management
The main risks arising from the Company's financial instruments are investment risk, credit risk, liquidity risk, and market price risk. The operational activities of the Company are managed in a prudential manner by managing those risks to minimise potential losses for the Company.

Risiko investasi
Perusahaan hanya menempatkan investasi dalam bentuk surat berharga Syariah negara, dan deposito berjangka waktu pendek setelah melakukan kajian kesehatan bank. Oleh karena itu, resiko investasi Perusahaan relatif kecil hanya terbatas pada porsi bagi hasil Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pengelola.

Investment risk
The company only places investment in the form of State Sharia securities and short-term deposits after conducting a review of the bank's health. Therefore, the investment risk of the Company is relatively small, only limited to the portion of the Company's profit sharing in its capacity as a manager.

Risiko kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Credit risk
Credit risk is the risk that the Company may suffer a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk. The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognised and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorisations of credit, and regularly monitoring the collectability of receivables to reduce the exposure to bad debts.

Risiko likuiditas

Perusahaan terekspos terhadap kegiatan harian atas ketersediaan sumber kas terutama dari *ta'widh* yang terjadi atas kontrak asuransi jangka pendek. Risiko likuiditas adalah risiko dimana kas tidak tersedia untuk memenuhi liabilitas di saat jatuh tempo. Risiko ini diminimalisir dengan mengelola profil jatuh tempo liabilitas keuangan dan memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah piutang premi dan investasi yang jatuh tempo serta memiliki deposito berjangka sebagai investasi terbesar Perusahaan.

Liquidity risk

The Company is exposed to daily calls on its available cash resources mainly from ta'widh arising from short-term insurance contract. Liquidity risk is the risk that cash may not be available to pay obligation when due. This risk has been minimised by managing the maturity profile of financial liabilities and ensuring the availability of funding from matured premium receivables and investment portfolio and having time deposits as the Company's major investment.

Sebagian besar ketersedian dana Perusahaan ditempatkan pada deposito berjangka yang tersebar dalam berbagai tanggal jatuh tempo di dalam periode berjalan. Kebijakan untuk menjaga investasi pada dana yang likuid dapat membantu kebutuhan likuiditas yang tidak terduga.

Most of the Company's available funds are placed in time deposit spread over various maturity dates within a period. The policy of keeping investment in liquid funds helps to meet any unexpected liquidity requirement.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below shows the maturity date of undiscounted financial liabilities which are based on the contractual payment as of December 31, 2025 and 2024:

	2025				
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity date*	**Sampai dengan satu tahun/ *Up to a year***	**Lebih dari satu tahun/ *More than a year***	**Jumlah/ *Total***	
Utang pajak	--	10,055	--	10,055	*Taxes payables*
Utang *ta'widh*	--	214	--	214	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	--	33,327	--	33,327	*Re-guarantee payables*
Akrual dan utang lain-lain	--	63,190	1,191	64,381	*Accruals and other payables*
Jumlah	**--**	**106,786**	**1,191**	**107,977**	***Total***

	2024				
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity date*	**Sampai dengan satu tahun/ *Up to a year***	**Lebih dari satu tahun/ *More than a year***	**Jumlah/ *Total***	
Utang pajak	--	2,760	--	2,760	*Taxes payables*
Utang *ta'widh*	--	1,552	--	1,552	*Ta'widh payables*
Utang penjaminan ulang	--	35,008	--	35,008	*Re-guarantee payables*
Akrual dan utang lain-lain	--	56,331	8,291	64,622	*Accruals and other payables*
Jumlah	**--**	**95,651**	**8,291**	**103,942**	***Total***

Risiko harga pasar

Dalam pengelolaan risiko harga pasar, Perusahaan telah melakukan pembatasan penempatan portofolio berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, komposisi portofolio juga dibatasi berdasarkan aset alokasi yang dibuat sesuai dengan tingkatan risikonya.

Market price risk

The Company has a portfolio placement restrictions, to manage the market price risks, based on applicable regulation. In addition, the composition of the portfolio is also restricted by risk level of assets allocation.

39. Informasi Tambahan Terkait Laporan Arus Kas / *39. Supplementary Information Related to the Statements of Cash Flows*

a) Transaksi Non Kas / *a) Non Cash Transactions*

Berikut aktivitas pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:

Financing activities that do not affect cash flows are as follows:

	2025	2024	
Penambahan Liabilitas Sewa melalui Beban Bunga Pinjaman	716	820	*Additional of Lease Liabilities through Interest Expense*
Penambahan Liabilitas Sewa melalui pengakuan awal	591	4,946	*Additional of Lease Liabilities through initial recognition*

b) Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan / *b) Reconciliation of Liabilities Arising from Financial Activities*

Penambahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	2025				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Non Kas/ *Non Cash*	Arus Kas Keluar/ *Outgoing Cash Flow*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Liabilitas Sewa	9,784	1,307	(5,624)	5,467	*Lease Liabilities*
Jumlah	**9,784**	**1,307**	**(5,624)**	**5,467**	***Total***

	2024				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Non Kas/ *Non Cash*	Arus Kas Keluar/ *Outgoing Cash Flow*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Liabilitas Sewa	8,800	5,766	(4,782)	9,784	*Lease Liabilities*
Jumlah	**8,800**	**5,766**	**(4,782)**	**9,784**	***Total***

40. Peristiwa Signifikan / *40. Significant Event*

Rencana Penggabungan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Pada tanggal 23 Desember 2025, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar"), dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat untuk rencana penggabungan usaha antara Perusahaan dengan Jamsyar, yang penyelesaian rencana ini bergantung pada pemenuhan seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Penggabungan Bersyarat.

Proposed Merger of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

On December 23, 2025, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar"), and the Company signed a Conditional Merger Agreement, for the proposed merger between the Company and Jamsyar, the completion of this proposal will be subject to fulfillment of all of terms and conditions in the Conditional Merger Agreement.

41. Informasi Tambahan yang tidak Dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia (Tidak diaudit)

Informasi tambahan berikut yang disajikan di bawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

Perusahaan memonitor *Gearing Ratio* yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 2/POJK.05/2017 tertanggal 11 Januari 2017 yang telah diubah menjadi POJK No. 11 Tahun 2025 tertanggal 28 April 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

*T*otal *Gearing Ratio* ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Perusahaan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Pada tahun 2025, total *Gearing Ratio* Perusahaan sebesar 29,07 kali (2024: 26,37 kali) dari ekuitas Perusahaan.

41. Additional Information that is not Required by Indonesian Accounting Standards (Unaudited)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

The Company monitors Gearing Ratio which is calculated in accordance with Financial Services of Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 2/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 as amended by POJK No. 11 of 2025 dated 28 Apil 2025 regarding Business Operation of Guarantor Institution. Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of the Guarantee that is borne by itself with the equity of the Guarantor at a certain time.

Total Gearing Ratio is set at no higher than 40 (forty) times of the equity of the Company.

The Company has fulfilled the requirements outlined in the regulation. As of 2025, the Company's total Gearing Ratio was 29.07 times (2024: 26.37 times) the Company's equity.

42. Standar Baru dan Amandemen atas Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Amendemen dan penyesuaian tahunan atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali terkait ruang lingkup dan penerapan metode penyatuan kepemilikan.

42. Accounting Standard Amendment to Standards which has been Issued but Not Yet Effective

Amendments to standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption are as follows:

- *Amendments PSAK 109 and PSAK 107 regarding Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *Annual Improvements on PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; and*
- *Revised PSAK 338: Business Combination of Entity Under Common Control regarding the scope and application of the method of pooling of interest.*

Standar baru dan amandemen yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119 : Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 119;
- PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- PSAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

New and amendment of standards which are effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early adoption permitted, are as follows:

- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;*
- *PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Amendment PSAK 119;*
- *PSAK 401: Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements;*
- *PSAK 403: Components of Financial Reports of Sharia Entities That Apply Indonesian SAK for Private Entities and Indonesian SAK for Micro, Small, and Medium Entities;*
- *PSAK 413: Impairment; and*
- *PSAK 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Implementing Indonesian SAK for Private Entities (SAK EP).*

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

43. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

43. Management Responsibility on the Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2026.

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized for issuance by the Board of Directors on March 13, 2026.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

ASKRINDO Syariah

Menara BPJamsostek
(Menara Utara) Lantai 19
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan - 12710